

DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL

Perspektif Ekonomi,
Sosial, dan Lingkungan



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL

**Perspektif Ekonomi,
Sosial, dan Lingkungan**



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN

Tim Penyusun

Bambang Supriyanto
Apik Karyana
Erna Rosdiana
Bagus Herudojo Tjiptono
Nur Dwiwati
Catur Endah Prasetiani P
Sahala Simanjuntak
Nurhasnih
Tubagus Ajie Rahmansyah
Apri Dwi Sumarah
Istianah Pujiastuti Siregar
Hikmawan Hidayat
Riska Anggraeni
Gladi Haryanto

Tim Peneliti

Prof. Mudrajad Kuncoro, SE, M.Soc.Sc,Ph.D -
Dr. Hempri Suyatna, S.Sos, M.Si -
Dr. rer. Silv. Ir. Ronggo Sadono -
Dr. Y.Sri Susilo,SE, M.Si -
Dr. Nairobi, S.E., M.Si -
Dr. Rahmat Syafei, S.Hut, M.Si -
Dr. Arivina Ratih Y.T., S.E., M.M -
Dyah Wahyuning Tyas, S.E., M.Ec.Dev -
Agung Prajuliyanto -
Linda Lestari, S.Hut -
Prayudha Ananta, S.E., M.Si -
Zulfa Emalia,SE,M.Sc -
Lia Mulyana, S.Hut -
Gladi Haryanto

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan atas segala keberkahan dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah menuntun kami menyusun Laporan Final Kajian Dampak Perhutanan Sosial. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan. Untuk mewujudkan kinerja perhutanan sosial maka ada dua strategi perhutanan sosial yang meliputi pemberian akses kelola perhutanan sosial dan peningkatan kapasitas usaha perhutanan sosial.

Laporan ini memuat hasil analisis dan survei HKm di Provinsi Lampung dan DIY. Kami selaku tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada: (1) Dr. Siti Nurbaya, Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang memberikan mandat kepada tim untuk melakukan penelitian ini; (2) Dr. Bambang Supriyanto selaku Dirjen dan segenap pejabat/staf Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan yang telah banyak membantu memfasilitasi, membiayai, dan mengumpulkan data; (3) Bupati Kulon Progo, Gunungkidul, dan Tanggamus beserta segenap pejabat dan gapoktan dan pokdarwis di ketiga kabupaten dan 4 lokasi HKm tersebut; (4) semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini.

Yogyakarta, Maret 2018
Tim Penyusun

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan ini berupaya menjawab pertanyaan sebagai berikut: (1) Seberapa jauh peningkatan kesejahteraan (dampak ekonomi dan sosial) terhadap rakyat lokal (pemegang ijin dan masyarakat sekitar)?; (2) Se jauh mana perhutanan sosial mendukung kelestarian hutan? Sasaran dari kajian ini adalah “rakyat sejahtera, hutan lestari” yang ditinjau dari tiga perspektif analisis, yaitu analisis dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan.

DAMPAK EKONOMI

Dampak ekonomi dari Program HKm adalah: (1) Meningkatnya produksi, pendapatan, penyerapan tenaga kerja; (2) Terlepasnya petani dari jerat kemiskinan yang tercermin dari: (a) Petani HKm telah memiliki rumah sendiri meskipun sebagian masih semi permanen; (b) Kepemilikan sepeda motor antara 1 hingga 3 unit.

Analisis regresi membuktikan bahwa lama SK IUP HKm, luas lahan, jumlah tenaga kerja, kemitraan berpengaruh positif terhadap pen-

dapatan. Jenis kemitraan yang telah dilakukan berupa penyuluhan, pelatihan, membeli produk, memberi bantuan modal, dan pendampingan. Selanjutnya kendala yang dihadapi oleh petani kelompok HKm adalah kombinasi dari terbatasnya akses bahan baku, akses modal, akses pasar, dan masih tradisionalnya peralatan yang dimiliki.

DAMPAK SOSIAL

Program Perhutanan Sosial juga telah mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat. Mayoritas responden (99,5%) menyatakan ada perubahan perilaku. Wujud dari perubahan perilaku yang muncul adalah munculnya rasa memiliki (*handarbeni*) dari anggota kelompok HKm setelah mereka memiliki kewenangan di dalam pengelolaan hutan (HKm Tani Manunggal). Di kelompok HKm Mandiri, setelah ditetapkan sebagai hutan lindung, masyarakat juga tidak berani mengambil hasil-hasil hutan secara sembarangan. Perubahan perilaku anggota ke-

lompok HKm Beringin Jaya dan Sinar Mulya ditunjukkan dengan adanya kesadaran mereka menjaga kelestarian hutan karena berpikir tentang keberlanjutan masa depan. Munculnya status HKm di masing-masing daerah juga menimbulkan rasa nyaman masyarakat dalam mengelola HKm. Berdasarkan hasil penelitian, 99% responden menyatakan nyaman dengan sistem pengelolaan HKm dan hanya 1% responden menyatakan tidak nyaman dengan sistem pengelolaan hutan. Alasan terbanyak menyatakan nyaman karena tidak lagi dikejar polisi hutan dan memiliki kepastian hak pengelolaan (57%). Kemudian 23% responden menyatakan nyaman dengan sistem pengelolaan hutan karena adanya kepastian hak IUPHK dan 13,5 % karena alasan lainnya. Alasan lainnya tersebut, di HKm Mandiri adalah tidak ada lagi kasus pencurian kayuan dan adanya tambahan penghasilan dari jasa lingkungan wisata. Sedangkan untuk kelompok HKm Tani Manunggal yang dimaksud alasan lainnya adalah bertambahnya lahan yang digarap dan peningkatan pengetahuan teknologi pertanian. Sedangkan alasan lain dari kelompok HKm Beringin Jaya dan Sinar Mulya adalah mereka tidak harus “kucing-kucingan” dengan petugas.

Dilihat dari aspek kendala pengelolaan HKm, hanya sebagian kecil

responden menyatakan adanya hambatan dalam pengelolaan HKm. Mayoritas responden (65,5%) menyatakan tidak ada hambatan dalam pengelolaan HKm. Namun demikian, masih ada 34,5% yang menyatakan ada kendala karena konflik dan kurangnya akuntabilitas pengelolaan kelompok. Hambatan lain yang ditemukan adalah adanya keluhan terkait prosedur izin yang masih berbelit-belit dalam penjarangan hutan (HKm Tani Manunggal). Di Kelompok HKm Mandiri, status hutan lindung yang ada di kelompok HKm Kalibiru juga menyulitkan mereka untuk mengembangkan wisata secara lebih optimal. Dikarenakan belum ada payung hukum secara formal, menyebabkan kelompok HKm Mandiri belum mampu memberikan kontribusi secara resmi dan signifikan melalui Pendapatan Asli Desa maupun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Di kelompok HKm, hambatan adalah persoalan komunikasi antara pengurus dengan anggota kelompok tani karena lemahnya kapasitas pengurus. Masalah lain adalah faktor cuaca (angin kencang, hujan dan kemarau di waktu yang tidak sesuai siklus) sehingga menghambat perkembangan usaha perkebunan kopi (Tanggamus). Untuk mengatasi hal ini, para petani sangat mem-

butuhkan bantuan baik berupa alat maupun pengetahuan untuk mengurangi dampak negatif cuaca tersebut.

Masalah yang mengganggu keberlanjutan program, menunjukkan bahwa 63,5% responden menyatakan tidak ada masalah yang mengganggu keberlanjutan program. Sedangkan 15% responden menyatakan hal yang dapat menjadi masalah keberlanjutan program adalah tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, ada 6,5% yang mengatakan bahwa masalah yang mengganggu keberlanjutan program adalah kecemburuan. Alasan lainnya di kelompok HKm Tani Manunggal adalah kejelasan masa panen dikarenakan peraturan yang belum jelas dan kurangnya intensitas pendampingan. Sedangkan di kelompok HKm Mandiri, Kalibiru masalah lainnya yang mengganggu keberlanjutan adalah persaingan dengan kelompok wisata yang mengambil obyek wisata yang serupa seperti Pule Payung dan Gunung Gajah. Destinasi-destinasi wisata ini berdekatan dengan Kalibiru sehingga di masa depannya dikhawatirkan akan menurunkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kalibiru.

DAMPAK LINGKUNGAN

Dampak lingkungan dalam pengelolaan HKm dapat dilihat dari

aspek produksi, ekologi, dan sosial. Aspek produksi (sustainabilitas) HKm yang terdiri atas perubahan tutupan lahan, jenis tanaman di lahan HKm, rehabilitasi di lahan HKm, pertumbuhan bibit di lahan HKm dan tanaman pokok di lahan HKm. Aspek ekologi yaitu ancaman dalam pengelolaan HKm yang dapat diketahui dari adanya tingkat ancaman kebakaran, pencurian, gangguan satwa, dan perburuan liar. Aspek sosial dapat dilihat dari adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan HKm yang meliputi partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev), serta keterlibatan *stakeholders*.

Hasil kajian dampak lingkungan menunjukkan terjadi perubahan tutupan lahan di keempat lokasi HKm yaitu HKm Mandiri, HKm Tani Manunggal, HKm Sinar Mulya dan HKm Beringin Jaya. Peningkatan tutupan hutan lahan kering sekunder terjadi di HKm Mandiri. Tutupan lahan HKm Mandiri pada awalnya berupa pertanian lahan kering campuran kemudian menjadi hutan lahan kering sekunder. Sebaliknya di HKm Sinar Mulya terjadi penurunan tutupan hutan lahan kering sekunder sebesar 2,91 ha. Pada dua lokasi HKm lainnya tidak terjadi perubahan tutupan hutan lahan hutan kering sekunder.

Berdasarkan tutupan tersebut maka dapat diketahui cadangan karbon pada masing-masing tipe lahan di HKm dengan mengkonversi data luas tutupan lahan dengan tabel cadangan karbon per hektar untuk 7 tipe penutupan lahan hutan skala regional (pulau) dan data cadangan karbon per hektar untuk 23 tipe penutupan lahan skala nasional (Tosiani, 2015). HKm di Kalibiru pada tahun 2016 dengan hutan lahan kering sekunder 113,77 ha memiliki cadangan karbon sebesar 9.698,89 c ton. Sedangkan dengan sawah sebesar 19,85 ha memiliki cadangan karbon sebesar 39,7 c ton. Pada HKm Tani Manunggal dengan tipe hutan lahan kering sekunder sebesar 129,40 ha memiliki cadangan karbon sebesar 11.031,35 c ton. Pada HKm Sinar Mulya dengan luas hutan lahan kering sekunder 63,85 ha memiliki cadangan karbon sebesar 5.818,01 c ton. Tipe lahan pertanian kering dengan luas 179,34 ha memiliki cadangan karbon sebesar 1.793,4 c ton. Untuk pertanian lahan kering campur seluas 680,23 ha memiliki cadangan karbon sebesar 20.406,9 c ton. Pada HKm Beringin Jaya dengan jenis hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan kering campur memiliki cadangan karbon yang berbeda-beda. Hutan lahan kering sekunder dengan luas 9,61 ha memiliki cadangan

karbon sebesar 875,66 c ton. Pada pertanian lahan kering dengan luas 24,08 ha memiliki cadangan karbon sebesar 240,8 c ton dan pertanian lahan kering campur dengan luas 830,08 memiliki cadangan karbon sebesar 20.902,4 c ton.

Jenis tanaman di empat lokasi HKm bervariasi. Secara umum di DIY didominasi oleh jenis tanaman kehutanan berupa jati dan di HKm Lampung didominasi oleh jenis tanaman perkebunan yaitu kopi. Salah satu upaya pemerintah dalam menjaga dan melestarikan hutan adalah memberikan bantuan bibit untuk kegiatan rehabilitasi hutan. Kegiatan rehabilitasi di lahan HKm telah dilakukan, kecuali di HKm Tani Manunggal tidak ada kegiatan rehabilitasi. Hal tersebut dikarenakan pohon jati yang ada sudah besar-besar dan tajuknya sudah menutupi seluruh lahan garapan, sehingga tidak ada lahan lagi untuk menanam. Dilihat dari persentase keberhasilan tumbuh bibit di ketiga lahan HKm <75%, sebaliknya di lahan HKm Tani Manunggal persen tumbuh bibit >75%.

Hadirnya HKm yang diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi kelompok tani dalam mengelola lahan hutan sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Hal tersebut terlihat dari rendahnya persentase tingkat kebakaran dan pencurian

ataupun penebangan kayu di lahan HKm. Persentase terjadinya kebakaran di lahan HKm, baik di DIY maupun Lampung cukup rendah, yaitu masing-masing 75,5% kebakaran tidak pernah terjadi dan 24,5% kebakaran pernah terjadi. Rendahnya tingkat kebakaran ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan dalam mencegah kebakaran di antaranya yaitu, anggota kelompok tani pengelola HKm berpartisipasi menjadi bagian dari masyarakat peduli api sebagai mitra KPHL, Pamong Hutan (Pamhut) bersama dengan *stakeholders* terkait melakukan Kegiatan patroli di wilayah hutan. Secara umum tidak ada kejadian pencurian di keempat lokasi HKm. Kejadian Pencurian terbesar terjadi di areal HKm Beringin Jaya sebesar 40%. Upaya pencegahan, antara lain: berupa himbauan, saling mengingatkan antar anggota, menjaga lahan kelola, melaporkan tindakan pencurian ke aparat pemerintah, dan melakukan ronda ataupun pengawasan bersama Pamong Hutan (Pamhut) dan Bintara Pembinaan Desa (Babinsa).

Salah satu ancaman terbesar dalam pengelolaan HKm adalah gangguan satwa. Secara umum terjadi gangguan satwa di keempat HKm, kecuali di HKm Tani Manunggal yang hanya 14% saja. Jenis satwa yang mengganggu di empat lokasi

HKm didominasi oleh babi hutan dan monyet. Secara umum upaya pencegahan terhadap gangguan satwa masih sangat rendah. Upaya pencegahan tertinggi terhadap gangguan satwa dijumpai di HKm Sinar Mulya sebesar 50%. Upaya pencegahan yang telah dilakukan HKm Mandiri yaitu berburu babi dengan bekerjasama dengan dinas terkait. Sebaliknya di Hkm Tani Manunggal tidak ada upaya pencegahan. Di HKm Sinar Mulya dan Beringin Jaya upaya pencegahan yang dilakukan antara lain adalah memasang pagar seng di lahan kelola, memasang jaring pada tanaman yang berbuah, menghidupkan petasan ketika satwa datang, dan memasang orang-orangan sawah. Selain gangguan satwa, perburuan satwa juga berpotensi mengancam kelestarian pengelolaan Hkm. Perburuan satwa yang terjadi di empat lokasi Hkm relatif rendah dengan persentase terbanyak di HKM Mandiri 52%. Perburuan satwa banyak dilakukan oleh perorangan ataupun masyarakat di luar anggota HKm, sehingga tindakan upaya pencegahan sulit dilakukan.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan HKm meliputi, keikutsertaan dalam pembentukan struktur kepengurusan Gabungan Kelompok Tani (gapoktan), pembuatan dan penetapan draft AD/ART

dan rencana pengelolaan hutan. Dalam tahapan pelaksanaan adalah ikut melakukan pemetaan lahan persil, penguatan tata batas HKm, penguatan kelembagaan gapoktan dan peningkatan ekonomi anggota. Tahapan selanjutnya yaitu monev. *Monitoring* merupakan suatu penilaian (*assesment*) yang rutin (harian) terkait aktivitas dan perkembangan yang sedang berlangsung. Kegiatan yang dilaksanakan adalah rapat rutin bulanan, dan RAT. Partisipasi masyarakat dilihat dari uji Chi-square menunjukkan nilai Chi-square=28,522 yang signifikan pada derajat kepercayaan 99%. Artinya, adanya variasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan di keempat lokasi HKm. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan secara umum tergolong tinggi, kecuali di HKm Beringin Jaya yang tergolong sedang. Chi-square=28,522 yang signifikan pada derajat kepercayaan 99% menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan di keempat lokasi HKm. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tergolong tinggi, terutama di HKm Mandiri sebesar 88%. Hal tersebut terlihat dari nilai Chi-square=24,986 yang signifikan pada derajat kepercayaan 99%, yang menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan di keempat lokasi HKm.

selanjutnya partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi secara umum tergolong tinggi, terutama di HKm Mandiri. Chi-square=20,547 yang signifikan pada derajat kepercayaan 99% menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi di keempat lokasi HKm.

Keterlibatan *stakeholders* di DIY dan Lampung, kombinasi pengurus kelompok, polisi hutan, dan LSM memiliki nilai persentase paling tinggi. Khusus lokasi HKm di Lampung selain ketiga *stakeholder* tersebut pihak swasta (perusahaan swasta) dan akademisi (perguruan tinggi) juga ikut terlibat dalam pengelolaan HKm. Hasil analisis dampak lingkungan di lokasi studi memberikan beberapa temuan penting di antaranya, tutupan lahan hutan yang berkurang di HKm Sinar Mulya, gangguan satwa dan perburuan satwa yang mengancam kelestarian hutan serta keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan HKm. Beberapa tindakan yang penting dilakukan yaitu pencegahan yang efektif dan penerapan sanksi hukum yang tegas, sehingga mampu memberikan efek jera kepada penggarap ilegal yang membuka lahan hutan dan perburuan satwa. Peran *stakeholders* terkait, terutama KPHL, Polhut, Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) sangat dibutuhkan

untuk berkolaborasi mengamankan hutan dari pembukaan lahan. Perlu adanya penerapan teknologi yang tepat untuk mengamankan hutan dari gangguan satwa dan perburuan satwa. Keterlibatan *stakeholders* dalam pendampingan pengelolaan HKm perlu ditingkatkan dan harus terus berkelanjutan terutama keterlibatan dari KLHK. Kelompok tani membutuhkan pendampingan terkait cara inventarisasi, pemetaan, dan pembuatan perencanaan kelola tahunan (RKT).

Analisis dampak sosial Perhutanan Sosial meliputi: persepsi masyarakat terhadap perhutanan sosial, desain kelembagaan, perubahan perilaku masyarakat, dan kendala yang muncul dalam pengelolaan HKm. Hasil analisis menemukan bahwa Program Perhutanan Sosial telah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai HKm. Sebagian besar responden, baik di DIY maupun Lampung, mengetahui informasi tentang HKm di mana ada 183 dari 200 responden (91,5%) yang menyatakan tahu, sementara hanya 17 responden (8,5%) yang tidak tahu. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan HKm dapat diterima secara baik di masyarakat. Sumber informasi mengenai pengetahuan terhadap HKm terutama diperoleh dari pemeritah yakni 137 responden (68,5%). Sumber informasi lainnya

ini berasal dari LSM pendamping. Di Kelompok HKm Tani Manunggal, Bleberan Gunungkidul, LSM pendampingnya adalah Lembaga Java Learning Center (Javlec). Sedangkan LSM yang mendampingi kelompok HKm Mandiri, Kalibiru, Kokap, Kulonprogo adalah Yayasan Damar. Sementara lembaga yang mendampingi Kelompok HKm Beringin Jaya, Pekon Margoyoso dan Kelompok HKm Sinar Mulya, Pekon Sukamaju, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus adalah Konsorsium Kota Agung Utara (Korut).

Dari aspek desain kelembagaan, Program Perhutanan Sosial juga telah mendorong munculnya lembaga-lembaga lokal. Lembaga yang paling banyak muncul dari pengelolaan HKm adalah koperasi sebagaimana diakui oleh 125 responden (62,5%). Selain koperasi, lembaga-lembaga lain yang muncul adalah kelompok usaha, Pokdarwis, Gapoktan.

Kelembagaan yang ada tersebut aktif melakukan pemberdayaan masyarakat di kelompok HKm. Hasil penelitian menunjukkan, 179 responden (89,5%) menyatakan peran kelembagaan yang aktif dan hanya 21 responden (10,5%) yang menyatakan tidak aktif.

Munculnya kelembagaan yang aktif tidak terlepas dari adanya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa pendamping aktif dalam melakukan pendampingan, yakni 186 responden (93%). Proses pendampingan yang dilakukan cukup variatif. Mayoritas responden (69,5% atau 139 responden) menyatakan bentuk pendampingan yang dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan. Bentuk pendampingan lain adalah penguatan kewirausahaan (5,5%) dan akses pasar (2,5%). Sedangkan sisanya merupakan kombinasi di antara penguatan kelembagaan dan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan akses pasar, dan kombinasi di antara ketiga bentuk pendampingan yakni penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan akses pasar.

Jika dikaitkan dengan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk peningkatan kapasitas usaha perhutanan sosial, program penguatan kapasitas kelompok HKm yang dilakukan di empat lokasi HKm tersebut masih sebatas pada kategori *silver* (penguatan kapasitas kelembagaan). Sedangkan untuk kategori *gold*, yakni penguatan kewirausahaan, (bantuan ekonomi produktif, temu usaha) dan kategori platinum (akses pasar), masih perlu ditingkatkan. Pendampingan dilakukan oleh berbagai lembaga

baik pemerintah maupun nonpemerintah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa yang paling banyak memberikan pendampingan adalah LSM (29%) serta dinas terkait dengan LSM (29%). Ironisnya, KLHK dinilai oleh responden kurang memberikan pendampingan. Hasil penelitian menunjukkan hanya 1,5% dari 200 responden yang menyatakan didampingi oleh KLHK.

PRO-POOR GROWTH AND PRO-JOBS

Dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan rakyat di Indonesia menunjukkan tingkat kemiskinan menurun. Namun, penurunan kemiskinan masih di bawah target RPJMN dan terjadi perlambatan penurunan kemiskinan di akhir era Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 1 dan 2. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia selama 2002-2017 telah menyebabkan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Namun, pertumbuhan ekonomi yang sekitar 4-6% sejak tahun 2002 ternyata belum mampu menurunkan ketimpangan.

Di era Kabinet Kerja, realisasi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN). Ada dua jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. Pertama, **ketimpangan distribusi pendapatan antargolongan pendapatan** masyarakat. Kedua, **ketimpangan antar daerah**. Provinsi Lampung menyumbang 2,20% terhadap ekonomi Indonesia pada tahun 2011 kemudian sumbangan ini sedikit meningkat menjadi 2,21% tahun 2016. Pada tahun 2016, Provinsi DIY menyumbang 0,92% terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia, persentase sumbangan ini sedikit mengalami penurunan sebesar 1% dibanding dengan sumbangan DIY pada tahun 2011.

Di Kulon Progo, pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan penurunan kemiskinan dari 23,62% pada tahun 2011 menjadi 20,3% pada tahun 2016. Pertumbuhan ekonomi yang sekitar 4,3-4,95% selama tahun 2011-2016 ternyata belum mampu menurunkan ketimpangan.

Di Gunung Kidul, pertumbuhan ekonomi yang berada pada kisaran 4,97-4,33% selama tahun 2011-2016, ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan dari 23,03% pada tahun 2011 menjadi 19,34% pada tahun 2016. Kendati demikian, ternyata pertumbuhan ekonomi Gunung Kidul tersebut belum mampu untuk mengurangi tingkat ketimpangan dan pengangguran. Ketimpangan dan pengangguran

ternyata mengalami tren meningkat pada tahun 2011-2016.

Pertumbuhan ekonomi Tanggamus berkisar pada angka sekitar 5,5-9,19% selama tahun 2011-2015. Pertumbuhan ekonomi Tanggamus cenderung mengalami penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2012 dari 9,19% menurun hingga 5,5% pada tahun 2015. Penurunan angka pertumbuhan ekonomi ini ternyata berdampak pada kemiskinan dan pengangguran ternyata juga mengalami peningkatan pada tahun 2011-2016. Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Tanggamus diberikan secara bertahap dalam lima tahun terakhir. Ijin pengelolaan paling banyak diberikan di tahun 2014 dengan luas lahan 46.867, 67 ha. Pemberian ijin pengelolaan HKm di tahun 2014 yang tinggi hanya sedikit mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran Tanggamus. Salah satu penyebabnya karena mayoritas responden hutan kemasyarakatan di Tanggamus mengusahakan komoditas perkebunan (kopi), yang hasilnya baru bisa dinikmati beberapa tahun kemudian setelah penanaman.

HUBUNGAN ANALISIS SOSIAL, LINGKUNGAN DAN EKONOMI

Analisis regresi logistik digunakan untuk memprediksi faktor-faktor

penentu klasifikasi kenaikan pendapatan responden, sekaligus menganalisis hubungan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap pendapatan (lihat Gambar 1). Pendapatan 200 responden di Lampung dan DIY dikategorikan menjadi “tinggi” apabila melebihi nilai rata-rata pendapatan ditambah deviasi standarnya; sebaliknya disebut “rendah” bila kurang dari nilai rata-rata pendapatan ditambah deviasi standarnya. Diperoleh hasil bahwa klasifikasi pendapatan rendah responden sebanyak 35,5%, dan sebanyak 44% responden memiliki pendapatan yang tinggi, sisanya 20,5% responden berpendapatan sedang.

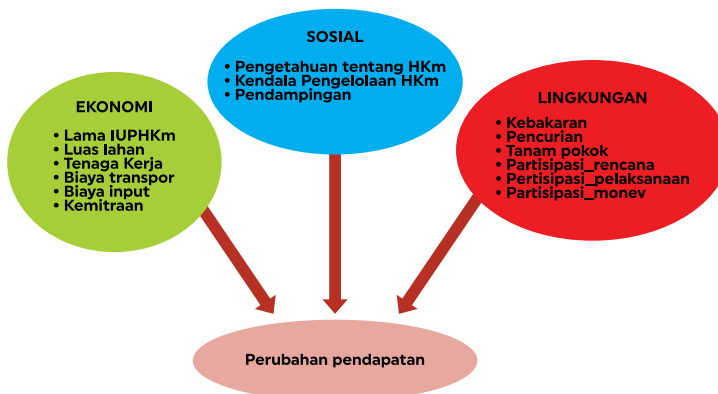
Secara keseluruhan, model regresi logistik binari mampu mengalokasikan secara tepat lebih dari 83% dari kenaikan pendapatan. Model 3 adalah model yang terbaik

karena hasilnya mampu memprediksi secara tepat keanggotaan grup sebesar 80,5% untuk responden yang pendapatannya tinggi pasca ijin HKm dan 86,2% untuk responden yang tergolong pendapatannya rendah.

Variabel kunci yang menentukan tinggi rendahnya pendapatan responden adalah **lama SK IUPHKm, kemitraan, tenaga kerja, dan partisipasi pelaksanaan**. Koefisien regresi logistik untuk lama SK adalah negatif dan signifikan dengan derajat kepercayaan 99%. Hal ini berarti bahwa semakin singkat responden mendapatkan SK IUPHKm maka besar kemungkinan pendapatan responden makin tinggi.

Koefisien regresi logistik untuk kemitraan adalah positif dan signifikan dengan derajat kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa semakin responden banyak

► **Gambar 1.** Hubungan Antara Dimensi Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Terhadap Pendapatan



menjalin kemitraan dengan pihak mana pun maka makin besar kemungkinan pendapatan responden meningkat. Sebaliknya, makin sedikit kemitraan yang dijalin, maka makin besar kemungkinan pendapatan responden tidak meningkat.

Sedangkan variabel tenaga kerja, memiliki koefisien yang negatif. Artinya semakin banyak jumlah tenaga kerja maka penghasilan yang diperoleh menjadi semakin berkurang. Ini bisa dimengerti mengingat kebanyakan responden masih menggunakan pekerja keluarga. Penambahan jumlah tenaga kerja yang dibayar akan mengurangi pendapatan. Bab 6 sudah menganalisis terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang substansial.

Koefisien regresi logistik untuk partisipasi pelaksanaan adalah negatif dan signifikan dengan derajat kepercayaan 90%. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan HKM maka makin kecil kemungkinan pendapatan responden rendah.

Ternyata koefisien lain yang tidak signifikan adalah luas lahan, biaya transpor, biaya input, kebakaran, pencurian, pendampingan, tanaman pokok, partisipasi rencana, dan partisipasi monev. Artinya, variabel ekonomi (luas lahan, biaya transpor, biaya input), variabel sosial

(pendampingan, pengetahuan HKM, dan kendala pengelolaan HKM), dan variabel lingkungan (kebakaran, pencurian, tanaman pokok, partisipasi rencana, dan partisipasi monev) ternyata belum berdampak secara signifikan terhadap pendapatan responden. Besar kemungkinan ini diakibatkan oleh periode implementasi HKM yang relatif masih pendek (3-4 tahun).

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari Bab 1 hingga Bab 9, dapat ditarik implikasi kebijakan dari perspektif masing-masing dimensi sebagai berikut:

1. Dari dimensi ekonomi:

- a. Program pemberian IUPHKM kepada petani/masyarakat terus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkannya ijin usaha (termasuk kemudahan dan kecepatan pemberian ijin yang terkait dengan pengelolaan hutan), luas lahan, dan kesiapan kelompok tani HKM.
- b. Program Perhutanan Sosial, khususnya HKM, harus bekerja sama dan bersinergi dengan pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha,

komunitas lokal, dan media massa (*Penta Helix*). Keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi, pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, dan kemitraan usaha.

- c. Sebagian besar responden tergolong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka diperlukan dukungan, bantuan, dan pendampingan terkait dengan akses bahan baku, akses modal, akses pasar, dan masih tradisionalnya peralatan yang dimiliki.

2. Dari dimensi sosial:

- a. Pendampingan yang lebih intensif dari KLHK perlu ditingkatkan khususnya melalui penguatan kewirausahaan (bantuan ekonomi produktif dan temu usaha), akses modal, akses pasar.
- b. P r o g r a m - p r o g r a m pendampingan perlu berbasis pada paradigma pemberdayaan masyarakat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga subyek dalam

pengelolaan HKm. Dalam konteks ini, pemberdayaan harus diarahkan pada upaya pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi (*empowering*), dan menciptakan kemandirian anggota HKm. Perencanaan partisipatif menjadi salah satu kunci utama agar bentuk pendampingan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki anggota kelompok HKm.

- c. Fungsi pendamping perlu lebih dioptimalkan lagi agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara ideal, fungsi pendamping diarahkan pada tiga tugas utamayaitupengorganisasian masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pendokumentasian program-program Perhutanan Sosial. Fungsi pengorganisasian masyarakat meliputi: merumuskan kebutuhan hidup masyarakat di sekitar wilayah HKm dan memetakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk berkembang (*need assesment*), menjalin dan menjaga hubungan baik

- dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, LSM dan berbagai organisasi lainnya, menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program Perhutanan Sosial, dan merumuskan rencana program sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di sekitar HKm. Sedangkan fungsi peningkatan kapasitas masyarakat meliputi: merumuskan kapasitas yang harus dimiliki masyarakat dalam program pengembangan HKm dan melakukan pendampingan pengembangan kapasitas masyarakat dan pengurus kelompok HKm, melakukan monitoring dan evaluasi program yang dilakukan.
- d. Dari aspek regulasi, perlu payung hukum agar kelompok HKm mampu memberi kontribusi kepada daerah melalui PADes maupun PAD (Kulon Progo),
 - e. Perlu ada peran KLHK dalam memunculkan dan mensosialisasikan prosedur ijin yang jelas dalam melakukan penjarangan pohon (Gunungkidul),
 - f. Perlu ada penguatan kapasitas akses pasar mengenai pengolahan kopi paska panen agar nilai jual biji kopi di petani bisa tinggi dan petani memiliki alternatif menjual kopi dalam bentuk olahan yang bernilai tambah, penguatan kewirausahaan dengan bantuan alat/ pengetahuan yang mampu mengurangi kerugian akibat cuaca yang tidak bersahabat (Tanggamus).
3. Dari dimensi lingkungan:
- a. Perlu adanya tindakan pencegahan yang efektif dan penerapan sanksi hukum yang tegas agar mampu memberikan efek jera kepada penggarap ilegal yang membuka lahan hutan. Peran *stakeholders* terkait terutama KPHL, Polhut, Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi mengamankan hutan dari pembukaan lahan.
 - b. Perlu adanya penerapan teknologi yang tepat untuk mengamankan hutan dari gangguan satwa dan perburuan satwa. Bantuan dari dinas terkait untuk pengamanan lahan

sangat dibutuhkan agar pengawasan hutan dan regulasi yang tegas dapat dijalankan. Regulasi yang tegas diharapkan mampu mencegah perburuan satwa yang biasanya dilakukan oleh perorangan ataupun masyarakat di luar anggota HKm.

- c. Keterlibatan *stakeholders* dalam pendampingan pengelolaan HKm perlu ditingkatkan dan harus terus berkelanjutan terutama keterlibatan dari KLHK. Kelompok tani membutuhkan pendampingan terkait cara inventarisasi, pemetaan, dan pembuatan perencanaan kelola tahunan (RKT).

DAFTAR ISI

► KATA PENGANTAR	ii
► RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
► DAFTAR ISI	xvii
► DAFTAR GAMBAR	xx
► DAFTAR TABEL	xxiv

► BAB 1	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Obyek dan Lokasi Penelitian	3
1.5 Sasaran	4
1.6 Waktu Pelaksanaan	4
1.7 Peralatan dan Material	5
1.8 Personalia	5
1.9 Sistematika Laporan	6

► BAB 2	
GAMBARAN UMUM HUTAN KEMASYARAKATAN DI INDONESIA	9
2.1 Sejarah Paradigma Perhutanan Sosial	10

2.2 Lahirnya Program Hutan Kemasyarakatan (HKm)	12
2.3 Perkembangan Awal Program HKm	17
2.4 Dinamika Program HKm dari Tahun 2014-2017	20

► BAB 3	
GAMBARAN UMUM PERHUTANAN SOSIAL DI DIY	29
3.1 Lokasi HKm DIY	29
3.2 Lokasi HKm Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo	34
3.3 Lokasi HKm Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul	40

▶ BAB 4	
GAMBARAN UMUM PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI LAMPUNG	49
4.1 Perhutanan Sosial Lampung	49
4.2 Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tanggamus	51
4.3 Lokasi HKm Beringin Jaya dan HKm Sinar Mulya	52
▶ BAB 5	
METODOLOGI PENELITIAN	61
5.1 Pendekatan Penelitian	61
5.2 Lokasi Penelitian	61
5.3 Unit Analisis dan Informan	62
5.4 Ruang Lingkup Penelitian	63
5.5 Teknik Pengumpulan Data	63
5.6 Teknik Analisis Data	64
5.7 Kerangka Pemikiran	64
5.8 Analisis Deskriptif	65
5.9 Analisis <i>Cross Tabulation</i> (Tabulasi Silang)	66
5.10 Analisis Regresi Logistik	67
▶ BAB 6	
ANALISIS DAMPAK EKONOMI PERHUTANAN SOSIAL	71
6.1 Produksi	71
6.2 Dampak Pendapatan	73

6.3 Penyerapan Tenaga Kerja	78
6.4 Struktur Biaya	82
6.5 Dampak Terhadap Kemiskinan	84
6.6 Kemitraan	89
6.7 Kendala	90
6.8 Faktor-faktor Penentu Pendapatan	92
▶ BAB 7	
ANALISIS DAMPAK SOSIAL PERHUTANAN SOSIAL	97
7.1 Persepsi Masyarakat Terhadap HKm	97
7.2 Desain Kelembagaan	105
7.3 Perubahan Perilaku	115
7.4 Kendala Pengelolaan HKm	121
7.5 Analisis Tabulasi Silang	127
▶ BAB 8	
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN PERHUTANAN SOSIAL	135
8.1 Hakikat Sustainabilitas	135
8.2 Sustainabilitas HKm	139
8.3 Ancaman dalam Pengelolaan HKm	156
8.4 Partisipasi Masyarakat	173

► **BAB 9**
DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL
TERHADAP KESEJAHTERAAN
RAKYAT **185**

9.1 *Pro-Poor Growth and Pro-Jobs* **185**

9.2 Hubungan Analisis Sosial, Lingkungan dan
Ekonomi **196**

► **BAB 10**
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
KEBIJAKAN **201**

10.1 Kesimpulan **201**

10.2 Implikasi Kebijakan **205**

► **DAFTAR PUSTAKA** **209**

► **BIODATA SINGKAT**
TIM PENELITIAN **215**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	1	Gambar 3.6.	41
Ketua Tim Peneliti Bersama Menteri LHK		Lokasi Hkm Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul	
Gambar 2.1.	17	Gambar 3.7.	42
Prosedur Perijinan dan Fasilitasi HKm Berdasarkan Permenhut No. P.37 Tahun 2007		Foto Tim Kajian Di Desa Bleberan	
Gambar 2.2.	22	Gambar 3.8.	44
Keterkaitan Antara Nawacita dan Program HKm		Coa Rancang Kencono	
Gambar 2.3.	23	Gambar 3.9.	45
Restra PSKL		Air Terjun Sri Gethuk	
Gambar 2.4.	24	Gambar 3.10.	47
Strategi Perhutanan Sosial		Grafik Total Kunjungan Wisatawan dan Rata-Rata Kunjungan Wisatawan Per Bulan	
Gambar 2.5.	25	Gambar 3.11.	48
Data Ijin Usaha Pemanfaatan IUPHKm sampai dengan Desember Tahun 2017		Grafik Kunjungan Wisatawan Domestik Dan Wisatawan Mancanegara	
Gambar 2.6.	26	Gambar 4.1.	50
Data Penetapan Areal Kerja HKm sampai dengan Desember Tahun 2017		Peta Perhutanan Sosial Di Lampung	
Gambar 2.7.	27	Gambar 4.2.	53
Strategi Perhutanan Sosial Yang Digariskan Oleh Kementerian LHK Dan Perkembangan Capaiannya		Peta Lokasi Hkm Beringin Jaya	
Gambar 3.1.	32	Gambar 4.3.	55
Peta Lokasi HKm di DIY		Peta Lokasi Hkm Sinar Mulya.	
Gambar 3.2.	34	Gambar 4.4	56
Lokasi hkm Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo		Lahan Hkm Di Beringin Jaya	
Gambar 3.3.	37	Gambar 4.5.	57
Lingkungan Obyek Wisata Alam Kalibiru		Lahan Hkm Di Sinar Mulya	
Gambar 3.4.	39	Gambar 4.6.	59
Jumlah Pengunjung Wisata Alam Kalibiru Per Bulan		Air Terjun Lembah Pelangi	
Gambar 3.5.	40	Gambar 4.7.	60
Rata-Rata Jumlah Pengunjung Wisata Alam Kalibiru Per Bulan		Tim Penelitian Di Hkm Sinar Mulya	
		Gambar 5.1.	65
		Kerangka Pemikiran	

Gambar 6.1.	72	Gambar 8.4.	145
Peningkatan Produksi Setelah Mendapat SK HKm		Peta Penutupan Lahan di Lokasi HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju tahun 2009, 2014 dan 2016	
Gambar 6.2.	73	Gambar 8.5.	146
Interval Total Pendapatan Per Tahun		Peta Penutupan Lahan di Lokasi HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso tahun 2009, 2014 dan 2016	
Gambar 6.3.	79	Gambar 8.6.	148
Jumlah Tenaga Kerja Sebelum Mendapat SK HKm		Jenis Tanaman di Lahan HKm Mandiri dan Tani Manunggal (DIY)	
Gambar 6.4	80	Gambar 8.7.	149
Jumlah Tenaga Kerja Setelah Mendapat SK HKm (Orang)		Jenis Tanaman di Lahan HKm Sinar Mulya dan Beringin Jaya (Lampung)	
Gambar 6.5.	85	Gambar 8.8.	155
Kepemilikan Jenis Rumah Oleh Pemilik Lahan		Persentase Tumbuh Bibit di HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal (DIY)	
Gambar 6.6.	87	Gambar 8.9.	156
Jumlah Kepemilikan Motor Oleh Pemilik Lahan		Persentase Bibit di HKm Sinar Mulya dan HKm Beringin Jaya (Lampung)	
Gambar 6.7.	88	Gambar 8.10.	157
Jumlah Kepemilikan Mobil		Persentase Kebakaran di DIY dan Lampung	
Gambar 6.8.	89	Gambar 8.11.	158
Jenis Kemitraan		Kebakaran di Lahan HKm Mandiri Desa Hargowilis dan Tani Manunggal Desa Bleberan	
Gambar 6.9.	91	Gambar 8.12.	159
Jenis Kendala		Kebakaran di Lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan Beringin Jaya Pekon Margoyoso	
Gambar 6.10.	94	Gambar 8.13.	160
Lama SK IUPHKm Diterima Oleh Responden		Pencurian di Lahan HKm di DIY dan Lampung	
Gambar 8.1.	141	Gambar 8.14.	161
Peta Penutupan Lahan HKm Kalibiru, Desa Hargowilis tahun 2009 dan 2014		Persentase Pencurian HKm Mandiri Desa Hargowilis dan Tani Manunggal Desa Bleberan	
Gambar 8.2.	142	Gambar 8.15.	161
Peta Penutupan Lahan HKm di Kalibiru, Hargowilis Tahun 2016		Persentase Pencurian di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan Beringin Jaya Pekon Margoyoso	
Gambar 8.3.	143		
Peta Penutupan Lahan HKm Tani Manunggal Bleberan tahun 2009, 2014 dan 2016			

Gambar 8.16.	163	Gambar 8.27.	179
Persentase Gangguan Satwa di DIY dan Lampung		Persentase Partisipasi Pelaksanaan di Masing-masing KTHKm	
Gambar 8.17.	164	Gambar 8.28.	181
Gangguan Satwa di HKm Mandiri Desa Hargowilis dan Tani Manunggal Desa Bleberan		Persentase Partisipasi Pada Tahap Monitoring dan Evaluasi di Masing-masing KTHKm	
Gambar 8.18.	165	Gambar 8.29.	182
Persentase Gangguan Satwa di Lokasi HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso		Persentase Keterlibatan Stakeholders Dalam Pengelolaan HKm	
Gambar 8.19.	166	Gambar 8.30.	183
Persentase Jenis Satwa di DIY dan Lampung		Persentase Keterlibatan Stakeholders Dalam Pengelolaan HKm Di Masing-masing KTHKm	
Gambar 8.20.	167	Gambar 9.1.	187
Jenis Satwa di Lahan HKm Mandiri Desa Hargowilis dan Tani Manunggal Desa Bleberan		Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Indeks Gini: Indonesia 2002-2017	
Gambar 8.21.	168	Gambar 9.2.	190
Jenis Satwa di Lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso		Persentase Sumbangan PDRB Seluruh Provinsi di Indonesia, 2011, 2013 & 2016	
Gambar 8.22.	169	Gambar 9.3.	191
Persentase Tindakan Pencegahan Satwa Di Lahan HKm DIY dan Lampung		Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo, 2011-2016	
Gambar 8.23.	170	Gambar 9.4.	192
Tindakan Pencegahan dari Gangguan Satwa di HKm Mandiri Desa Hargowilis dan HKm Tani Manunggal Desa Bleberan		Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi Gunungkidul, 2011-2016	
Gambar 8.24.	171	Gambar 9.5.	193
Tindakan Pencegahan Dari Gangguan Satwa Di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso		Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Tanggamus, 2011-2016	
Gambar 8.25.	172	Gambar 9.6.	194
Persentase Perburuan Satwa di Masing-masing HKm		Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan IUP-HKm (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) di Tanggamus Tahun 2011-2016	
Gambar 8.26.	176		
Persentase Partisipasi Perencanaan di Masing-masing KTHKm			

Gambar 9.7. 195

Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan IUP-HKm (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) di Kulon Progo Tahun 2011-2016

Gambar 9.8. 195

Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan IUP-HKm (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) di Kulon Progo Tahun 2011-2016

Gambar 9.9. 196

Klasifikasi Pendapatan

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	4	Tabel 6.4.	81
Jadual Kegiatan Penelitian		Tabulasi Silang antara Jumlah Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Menerima SK HKm	
Tabel 1.2.	5	Tabel 6.5.	83
Tim Peneliti Perhutanan Sosial		Crosstabulation antara Rasio Biaya Tenaga Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja Sesudah Menerima SK HKm	
Tabel 2.1.	18	Tabel 6.6.	93
Sebaran Lokasi Penerima Penetapan Areal Kerja Hkm 2007		Hasil Regresi Faktor-faktor Penentu Pendapatan Responden	
Tabel 2.2.	19	Tabel 7.1.	97
Realisasi Areal HKm melalui IUPHKm pada tahun 2009, 2014, dan 2016		Pengetahuan Masyarakat Mengenai Hutan Kemasyarakatan (HKm)	
Tabel 2.3.	24	Tabel 7.2.	98
Capaian Kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (ha)		Lokasi dan Pengetahuan tentang HKm (P_HKm)	
Tabel 3.1.	30	Tabel 7.3.	99
Luas Dan Persentase Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Desember Tahun 2017		Sumber Informasi Pengetahuan HKm	
Tabel 3.2.	35	Tabel 7.4.	100
Koperasi/Kthkm Penerima IUPHKm		Lokasi dan Sumber Informasi	
Tabel 4.1.	51	Tabel 7.5.	101
Distribusi Blok dan Petak pada areal KPHL Kotaagung Utara		Lama Pengetahuan HKm	
Tabel 4.2.	54	Tabel 7.6.	102
Gapoktan, Kawasan, Luas Areal, Dan Jumlah Anggota Di Hkm Tanggamus		Lokasi dan Pengetahuan HKm	
Tabel 6.1.	74	Tabel 7.7.	103
Crosstabulation antara Total Pendapatan dan Alamat HKm		Pengetahuan Mengenai Status Hutan	
Tabel 6.2.	75	Tabel 7.8.	104
Interval Proporsi Pendapatan Responden dari TanamanUtama, Tanaman Sampingan, dan Ternak Terhadap Total Pendapatan Responden		Lokasi dan Pengetahuan Status Hutan	
Tabel 6.3.	77	Tabel 7.9.	105
Jumlah Wisatawan/Pengunjung Desa Wisata Kalibiru		Kelembagaan Yang Muncul Setelah Adanya HKm	
		Tabel 7.10.	106
		Lokasi dan Lembaga Yang Muncul	

Tabel 7.11.	107	Tabel 7.25.	122
Peran Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat		Hambatan dalam Pengelolaan HKm	
Tabel 7.12.	108	Tabel 7.26.	122
Peran Kelembagaan dalam Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Lokasi HKm		Lokasi dan Hambatan Pengelolaan HKm	
Tabel 7.13.	109	Tabel 7.27.	124
Peran Pendamping Terhadap Kelembagaan		Masalah yang Mengganggu Keberlanjutan Program	
Tabel 7.14.	109	Tabel 7.28.	126
Lokasi dan Keberadaan Pendamping Terhadap Kelembagaan		Lokasi dan Masalah yang Mengganggu Keberlanjutan Program	
Tabel 7.15.	110	Tabel 7.29.	128
Bentuk Pendampingan		Tabulasi Silang Bentuk Pendampingan dan Hambatan Pengelolaan HKm	
Tabel 7.16.	111	Tabel 7.30.	131
Lokasi dan Bentuk Pendampingan		Tabulasi Silang Peran Kelembagaan dan Hambatan Pengelolaan HKm	
Tabel 7.17.	112	Tabel 7.31.	133
Pelaku Pendampingan		Tabulasi Silang Keberadaan Pendampingan dan Hambatan Pengelolaan HKm	
Tabel 7.18.	114	Tabel 8.1a.	141
Lokasi dan Aktor Pelaku Pendampingan		Perubahan Tutupan Lahan HKm di Kalibiru, Desa Hargowilis	
Tabel 7.19.	115	Tabel 8.1b.	143
Perubahan Perilaku Masyarakat		Perubahan Tutupan Lahan HKm di Menggoran, Desa Bleberan	
Tabel 7.20.	116	Tabel 8.1c.	144
Lokasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat		Perubahan Tutupan Lahan di Lokasi HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju	
Tabel 7.21.	118	Tabel 8.1d.	146
Kenyamanan Mengelola Kawasan HKm		Perubahan Tutupan Lahan di Lokasi HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso	
Tabel 7.22.	118	Tabel 8.2.	153
Lokasi dan Kenyamanan Mengelola Kawasan HKm		Persentase Tanaman Pokok	
Tabel 7.23.	120		
Alasan Kenyamanan Dalam Sistem Pengelolaan HKm			
Tabel 7.24.	121		
Lokasi Dan Alasan Kenyamanan			

Tabel 8.3. 153

Persentase Rehabilitasi

Tabel 8.4. 176

Hasil Analisis Tabulasi Silang dan Chi-Square
Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan
HKm di DIY dan Lampung

Tabel 8.5. 177

Hasil Analisis Tabulasi Silang dan Chi-Square
Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan
HKm

Tabel 8.6. 180

Hasil Analisis Tabulasi Silang dan Chi-Square
Partisipasi Masyarakat Dalam Monitoring dan
Evaluasi HKm

Tabel 9.1. 188

Ketimpangan Antargolongan Pendapatan
Dari Era Megawati-Haz Hingga Jokowi-Kalla,
Indonesia, 2002-2017

Tabel 9.2. 189

Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan
PDB Nasional, 2000-2017.1 (persen)

Tabel 9.3. 199

Hasil Estimasi Kategori Pendapatan dengan
Regresi Logistik Binari

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Hutan untuk rakyat merupakan paradigma baru perhutanan sosial. Intinya hutan bukan hanya untuk pengusaha atau usaha besar tapi rakyat kecil dan usaha kecil mikro (UKM) di seputar hutan perlu mendapat jaminan ijin/hak untuk menanam kopi, jagung dan lain-lain, maupun air minum dan penghidupan yang layak. Di masa lalu perambah hutan, masyarakat adat dan rakyat yang tinggal di seputar hutan sering dikejar-kejar oleh polisi hutan karena mencuri kayu, merusak, bahkan membakar hutan. Kini mereka malah diberi ijin/hak pengelolaan hutan.

► **Gambar 1.1.** Ketua Tim Peneliti Bersama Menteri LHK



Itulah pesan utama Dr Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) kepada Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D, Ketua Tim Peneliti studi ini. Menteri LHK, yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan Kementerian Dalam Negeri, ini menugaskan stafnya untuk meminta tim peneliti, yang terdiri dari tim Jogja dan Lampung, ini melakukan studi tentang dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan hutan dari program perhutanan sosial.

Peraturan Menteri (Permen) LHK No. P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10 tahun 2016 mengatur dan menjelaskan apa dan bagaimana perhutanan sosial. Tujuannya jelas: pertama, pedoman pemberian hak pengelolaan, perijinan, kemitraan dan hutan di bidang perhutanan sosial. Kedua, untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat, yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan. Singkatnya, Permen ini bermuara pada rakyat sejahtera namun hutan harus juga lestari.

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.

Ruang lingkup perhutanan sosial mencakup 5 jenis hutan, yaitu: (1) hutan desa, (2) hutan kemasyarakatan, (3) hutan tanaman rakyat, (4) kemitraan kehutanan, dan (5) hutan adat. Sampai dengan akhir pemerintah SBY (Oktober 2014), rakyat yang memperoleh ijin/hak atas kelima jenis hutan ini hanya 449,1 ribu ha atau hanya sekitar 4% dari total ijin/hak yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hingga Desember 2017, di bawah Kabinet Kerja Jokowi, kini sudah 4.150 unit SK ijin/hak diberikan kepada 293.367 kepala keluarga dengan luasan hutan mencapai 1,336 juta ha.

Tentu *spillover* dan *multiplier effects* dari perhutanan sosial akan berdampak langsung bagi rakyat kecil (baca: wong cilik) yang mendapat ijin/hak yang selama ini hanya diberikan dan dinikmati

kepada pengusaha kelas kakap. Dampak tidak langsung juga akan dirasakan bagi daerah di seputar hutan akan mendapat manfaat dari penciptaan kerja (menurunkan pengangguran), meningkatnya nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi, serta menurunkan ketimpangan.

Perhutanan sosial sejatinya sudah dirintis sejak lama melalui berbagai bentuk kegiatan, baik berupa program tumpangsari di Perhutani, maupun PMDH oleh HPH/HTI. Pasca Orde Baru, pemerintah pusat semakin membuka ruang untuk hak yang lebih besar bagi masyarakat lokal melalui Undang-Undang tentang Kehutanan no. 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah no. 6 tahun 2007 jo no. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) no. 35 tahun 2012, Wilayah Adat diakui dan bukan menjadi bagian dari Kawasan Hutan Negara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan no. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai revisi atas peraturan-peraturan program perhutanan sosial sebelumnya. Dalam Permen LHK ini dijelaskan secara rinci mengenai skema perhutanan sosial, mulai dari

penyederhanaan mekanisme proses usulan sampai dengan terbitnya ijin.

Dengan melalui terbitnya peraturan perhutanan sosial dan adanya beberapa perubahan kebijakan diharapkan dapat merealisasikan target RPJMN tahun 2015-2019 di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta ha. Mengingat program perhutanan sosial ini mempunyai kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pengurangan kemiskinan pada tingkat rumah tangga kelompok tani pengelola perhutanan sosial.

Implementasi prakarsa ini penuh dengan tantangan. Perdebatan seputar pengaturan hak properti yang tepat, apakah itu untuk masyarakat, swasta atau individu dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan, masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Masih diperdebatkan apakah dan bagaimana perhutanan sosial di Indonesia dapat memberikan hak kepastian tenurial yang diharapkan, sekaligus berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian dan konservasi hutan.

Selanjutnya rakyat dan UKM membutuhkan pendampingan dan kemitraan. Itulah pesan yang digarisbawahi oleh Dr. Bambang

Supriyanto, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), ketika Ketua Tim Peneliti bertemu di kantornya di Gedung Manggala Wanabhakti tanggal 17 Januari 2018. Dirjen PSKL Kementerian LHK beserta jajarannya yang menindaklanjuti mandat Menteri LHK kepada tim peneliti untuk melakukan “*short study*” ini.

1.2. PERTANYAAN PENELITIAN

Kajian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:

1. Seberapa jauh peningkatan kesejahteraan (dampak ekonomi dan sosial) terhadap rakyat lokal (pemegang ijin dan masyarakat sekitar)?
2. Sejauh mana perhutanan sosial mendukung kelestarian hutan?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari kajian ini adalah:

1. Menganalisis dampak peningkatan kesejahteraan, secara ekonomi dan sosial, terhadap rakyat lokal (pemegang ijin dan masyarakat sekitar).
2. Menganalisis dampak perhutanan sosial terhadap kelestarian hutan.

1.4. OBYEK DAN LOKASI PENELITIAN

Obyek untuk penulisan Kajian Perhutanan Sosial ini adalah sebagai

berikut:

1. Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Tanggamus (HKm), Provinsi Lampung.
2. Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Gunungkidul (HKm Playen) dan Kulon Progo (HKm Kalibiru) Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5. SASARAN

Sasaran dari kajian ini adalah “rakyat sejahtera, hutan lestari” yang ditinjau dari tiga aspek analisis, yaitu analisis dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

1. Ekonomi

Perhutanan sosial ditinjau dari dampak ekonomi meliputi produksi dan pendapatan, lapangan kerja, penurunan kemiskinan, dan kemitraan bisnis.

2. Sosial

Perhutanan sosial ditinjau dari dampak sosial meliputi persepsi masyarakat, desain kelembagaan, perubahan perilaku, dan kendala. Sejauh mana peningkatan kapasitas usaha perhutanan sosial?

3. Lingkungan

Perhutanan sosial ditinjau dari dampak lingkungan meliputi keberlanjutan (*sustainability*) berdasarkan tutupan lahan yang dilihat dari ancaman (kebakaran, satwa, pencurian, dan lain-lain) dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan.

1.6. WAKTU PELAKSANAAN

Penyusunan Kajian Perhutanan Sosial dilaksanakan selama 3 bulan yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Maret tahun 2018 dengan tahapan pelaksanaan sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.1.

► **Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan Penelitian**

[illegible]

1.7. PERALATAN DAN MATERIAL

Sarana dan prasarana penyelenggaraan kajian sesuai dengan rincian dalam Rincian Anggaran Belanja. Tenaga ahli, asisten tenaga ahli serta pendukung sesuai dengan rincian dalam Rincian Anggaran Belanja.

1.8. PERSONALIA

Daftar nama tim tenaga ahli

penyusunan kajian dampak perhutanan sosial dirangkum dalam Tabel 1.2. Penyusunan tim didasarkan atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: SK.2/PSKL/SET/KUM.1/2017 tentang Penetapan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial Lingkup Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).

► **Tabel 1.2.** Tim Peneliti Perhutanan Sosial

No.	Nama	Instansi	Keterangan
1.	Prof. Mudrajad Kuncoro, SE, M.Soc.Sc, Ph.D	Guru Besar Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta	Ketua
2.	Dr. Hempri Suyatna, S.Sos, M.Si	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM Yogyakarta	Anggota Tim
3.	Dr. rer. silv. Ir. Ronggo Sadono	Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta	Anggota Tim
4.	Dr. Y.Sri Susilo, SE, M.Si	Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY)	Anggota Tim
5.	Dr. Nairobi, S.E., M.Si	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung (UNILA)	Anggota Tim
6.	Dr. Rahmat Safei, S.Hut, M.Si	Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung (UNILA)	Anggota Tim
7.	Dr. Arivina Ratih Yulihar T., SE, MM	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung (UNILA)	Anggota Tim
8.	Dyah Wahyuning Tyas, S.E., M.Ec.Dev	Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM)	Asisten Tim
9.	Linda Lestari, S.Hut	Fakultas Kehutanan UGM	Asisten Tim
10.	Agung Prajulyanto, S.Sos, M.Si	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM	Asisten Tim
11.	Bowo Dwi Siswoko, S.Hut, MA	Fakultas Kehutanan UGM	Asisten Tim
12.	Prayudha Ananta, S.E., M.Si	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung (UNILA)	Asisten Tim
13.	Zulfa Emalia, SE, M.Sc	Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNILA	Asisten Tim
14.	Lia Mulyana, S.Hut	Jurusan Kehutanan, UNILA	Asisten Tim

1.9. SISTEMATIKA LAPORAN

Pelaporan Kajian Perhutanan Sosial disusun sesuai dengan format sistematika sebagai berikut.

Bab 1 merupakan pendahuluan. Bab pendahuluan ini berisi deskripsi tentang latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, obyek dan lokasi penelitian, sasaran, waktu penelitian, peralatan dan material, personalia, dan sistematika laporan.

Bab 2 memberikan gambaran umum mengenai perhutanan sosial di Indonesia. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai paradigma perhutanan sosial, program dan dinamika program hutan kemasyarakatan.

Bab 3 mendeskripsikan gambaran umum perhutanan sosial di DIY. Dalam bagian ini deskripsi fokus di wilayah penelitian yaitu HKm Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul dan HKm Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

Bab 4 menjelaskan gambaran umum perhutanan sosial di Lampung, Gambaran umum fokus di wilayah penelitian yaitu HKm Sinar Mulya (Gapoktan Sinar Mulya), Pekon Sukamaju, Kecamatan Ulu Belu dan HKm Beringin Jaya (Gapoktan Beringin Jaya) Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo. Kedua HKm tersebut berada di wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Bab 5 mendeskripsikan

metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Metodologi termaksud mencakup pendekatan penelitian, lokasi penelitian, unit analisis dan informan, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 6 berisi hasil dan pembahasan dampak implementasi perhutanan sosial berdasarkan tujuan penelitian. Fokus bab ini adalah pembahasan hasil dan analisis dari perspektif ekonomi.

Bab 7 berisi hasil dan pembahasan dampak implementasi perhutanan sosial berdasarkan tujuan penelitian. Fokus bab ini adalah pembahasan hasil dan analisis dari perspektif sosial.

Bab 8 berisi hasil dan pembahasan dampak implementasi perhutanan sosial berdasarkan tujuan penelitian. Fokus bab ini adalah pembahasan hasil dan analisis dari perspektif lingkungan hidup.

Bab 9 berisi dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan rakyat yang dikaji dari perspektif makro regional dan hasil survei dengan data primer. Fokus bab ini adalah menganalisis sejauh mana perhutanan sosial berdampak pada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pendapatan rakyat, sekaligus bagaimana pengaruh variabel ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap tinggi

rendahnya pendapatan.

Bab 10 berisi kesimpulan dan implikasi kebijakan yang operasional. Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari Bab 1 hingga Bab 9, dapat ditarik kesimpulan dan implikasi kebijakan dari perspektif dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.

BAB 2

GAMBARAN UMUM HUTAN KEMASYARAKATAN DI INDONESIA

Bab 2 ini akan menguraikan secara ringkas asal muasal lahirnya paradigma perhutanan sosial di dunia. Munculnya paradigma tersebut menjadi inspirasi tema sentral di Kongres Kehutanan Dunia di Jakarta Indonesia pada tahun 1978.

Subbab berikutnya akan menelusuri lahirnya hutan kemasyarakatan di Indonesia. Pada tahun 1995 melalui Keputusan Menteri Kehutanan nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan, pemerintah bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar hutan sebagai solusi program Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Bina Desa Hutan yang tidak mampu memecahkan permasalahan konflik antara pengusaha pemegang HPH dengan masyarakat lokal di sekitar hutan.

Pada bagian akhir bab ini menampilkan perkembangan program Hutan Kemasyarakatan (HKm). Perkembangan sampai dengan tahun 2006, seolah-olah hanya jalani di tempat. Selama rentang waktu tersebut, program HKm

berada dalam ketidakpastian baik masalah areal kerja, perijinan usaha, dan bimbingan/fasilitasi. Sejak tahun 2007, yaitu pasca lahirnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007, masyarakat peserta program HKm bisa sedikit bernapas lega karena semua ketidakpastian mengenai areal kerja, perijinan, dan fasilitasi diatur dalam peraturan ini. Sebagai tonggak awal pada tahun 2007, diberikan ijin definitif HKm di 3 provinsi, yaitu: Lampung, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Nusa Tenggara Barat. Untuk mencapai target dan perbaikan regulasi maka dilakukan evaluasi P.37/Menhut-II/2007 dengan munculnya P.88/Menhut-II/2014 tentang hutan kemasyarakatan dan dipertegas dengan peraturan terbaru yaitu Peraturan No: 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

2.1. SEJARAH PARADIGMA PERHUTANAN SOSIAL

Pada abad ke-19, hutan tanaman telah mendominasi Eropa Tengah, Eropa Barat, Skandinavia, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru (Simon, 2006). Namun sampai dengan awal abad ke-20, negara Asia yang sudah mengenal pengelolaan hutan tanaman tersebut baru negara Jepang. Di India, Thailand, China, dan Indonesia pengelolaan hutan tanaman dalam jumlah terbatas telah diperkenalkan oleh pemerintah kolonial. Sistem pengelolaan hutan tanaman monokultur yang menempatkan kelestarian hasil hutan, terutama kayu (*sustained yield principle*) sebagai landasannya, dikenal sebagai sistem pengelolaan hutan moderen pada saat itu. Ciri utama hutan tanaman yang dikembangkan di Eropa, khususnya Jerman, yang kemudian meluas ke Amerika Utara, Australia, dan Asia tersebut adalah (Simon, 2006):

1. Sistem silvikultur, pengelolaan hutan mulai dari tebangan hingga peremajaan kembali, yang digunakan adalah tebang habis dengan permudaan buatan.
2. Pohon yang diusahakan hanya satu jenis, sehingga hutannya monokultur dan dinamakan jenis pokok.
3. Karena tebang habis dan monokultur, maka dalam pengelolaan hanya dikenal satu macam daur (daur tunggal).
4. Dengan monokultur dan daur tunggal, maka dalam perencanaan hutan tanaman dikenal istilah kelas perusahaan.

Pada paruh kedua abad ke-20, khususnya setelah Perang Dunia II, terjadi kerusakan hutan yang cukup parah, terutama di negara-negara berkembang. Kerusakan hutan di negara-negara berkembang yang umumnya baru merdeka pasca Perang Dunia II tersebut terjadi karena beberapa sebab, antara lain: terbentuknya pemerintahan baru yang memerlukan modal untuk menjalankan roda pemerintahan dan roda pembangunan, diperlukannya modal pembangunan terutama sumberdaya alam berupa bahan tambang dan sumberdaya hutan, adanya laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang kemudian meningkatkan kebutuhan akan lahan pertanian serta perumahan, dan pada akhirnya berdampak pada alih fungsi kawasan hutan. Pada umumnya negara-negara berkembang belum menguasai ilmu pengelolaan hutan yang mampu menjamin kelestarian sumberdaya hutan sehingga pengusaha hutan masih belum menggunakan kaidah-

kaidah kelestarian hutan, yang menyebabkan eksploitasi berlebihan dan tanpa kendali sehingga mengakibatkan hutan mengalami kerusakan yang cukup parah.

Dalam praktik terjadi peningkatan kerusakan hutan di negara-negara berkembang yang kebanyakan adalah pemilik hutan hujan tropis. Penyebab utamanya adalah pengaruh masalah sosial ekonomi yang telah menggugah para ahli kehutanan dunia untuk melakukan antisipasi dengan mengangkat masalah sosial ekonomi dalam pertemuan-pertemuan kehutanan di tingkat dunia. Tindakan antisipasi dan kepedulian tersebut dimulai pada saat Konggres Kehutanan Dunia (*World Forestry Congress, WFC*) ke-6 di Seattle tahun 1960, dengan mengangkat tema utama *Multiple Use of Forest Lands* (Hutan Multiguna), yang kemudian ditindaklanjuti dengan WFC ke-8 tahun 1978 di Jakarta dengan tema *Forest for People* (Hutan untuk Rakyat).

Konsep hutan untuk rakyat pada WFC ke-8 tahun 1978 mengandung makna bahwa pembangunan hutan harus diarahkan untuk pembangunan masyarakat lokal (*forestry for local community development*). Tujuannya adalah untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk perdesaan di sekitar hutan dengan cara melibatkan mereka dalam proses pengambilan

keputusan dan berbagai kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal. Sejak saat itulah lahir paradigma baru dalam pembangunan hutan bernama perhutanan sosial (*social forestry*).

Sebagai suatu paradigma yang baru saja lahir dalam pengelolaan hutan, terdapat banyak pengertian dan definisi tentang perhutanan sosial. Sebagai gambaran, di bawah ini adalah beberapa pengertian perhutanan sosial yang berkembang selama ini:

1. Perhutanan sosial adalah suatu pendekatan pembangunan kehutanan yang mempunyai tujuan memproduksi manfaat hutan untuk perlindungan dan rekreasi bagi masyarakat (Westoby, 1968)
2. *Community forestry* (CF) merupakan segala macam keadaan yang melibatkan penduduk lokal dalam kegiatan pembangunan kehutanan. Meliputi: pembuatan kebun kayu, dan menanam pohon di lahan usaha tani (FAO, 1978).
3. Perhutanan sosial merupakan ilmu dan seni penanaman pohon dan atau tumbuhan lain pada lahan yang dimungkinkan untuk tujuan tertentu, di dalam maupun di luar kawasan hutan, dan mengelolanya secara intensif dengan melibatkan masyarakat dan pengelolaan ini terintegrasi dengan kegiatan lain,

yang mengakibatkan terjadinya keseimbangan dan saling mengisi penggunaan lahan dengan maksud untuk menyediakan barang dan jasa secara luas baik kepada individu penggarap maupun masyarakat. (Tiwari, 1983).

4. *Social forestry* adalah ilmu dan seni mengenai pepohonan dan/atau vegetasi lainnya pada semua lahan yang ada dan mengelola hutan yang ada dengan melibatkan masyarakat secara aktif guna menyediakan segala macam barang/bahan-bahandanjasa-jasa untuk anggota masyarakat desa dan juga kelompok masyarakat (Foley & Barnard, 1984).
5. Perhutanan sosial adalah suatu strategi yang menitikberatkan pada pemecahan masalah-masalah penduduk lokal dan pemeliharaan lingkungan. Oleh karena itu, hasil utama kehutanan tidak semata-mata kayu. Lebih dari itu kehutanan dapat diarahkan untuk menghasilkan berbagai macam komoditi sesuai dengan kebutuhan penduduk di suatu wilayah, termasuk kayu bakar, pangan, pakan ternak, buah, air, satwa liar, keindahan, dan lainnya (Simon, 1994).

2.2. LAHIRNYA PROGRAM HUTAN KEMASYARAKATAN

Program HKm digulirkan pertama kali oleh Departemen Kehutanan RI pada tahun 1995. Lahirnya program HKm ditandai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan yang bertujuan untuk menjawab tuntutan para pihak karena program HPH Bina Desa Hutan ternyata tidak mampu memecahkan permasalahan yang terdapat di masyarakat lokal. Seiring dengan perjalanan waktu sampai dengan saat ini Program HKm yang digulirkan Departemen Kehutanan mengalami banyak perubahan, yaitu berturut-turut dengan keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 677/Kpts-II/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan, berikutnya lahir Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat di dalam dan atau sekitar hutan dalam rangka *social forestry*; dan terakhir adalah dikeluarkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Bahkan yang cukup ironis, meskipun sudah digulirkan sejak

tahun 1995, di dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak diketemukan aturan legal formal tentang program HKm. Padahal UU Nomor 41 Tahun 1999 merupakan payung hukum tertinggi di bidang kehutanan. Demikian pula aturan tentang HKm juga tidak ditemukan dalam PP Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Di dalam PP Nomor 34 Tahun 2002 khususnya pasal 51 hanya ditemukan aturan tentang pemberdayaan masyarakat sekitar atau dalam hutan untuk meningkatkan kemampuan lembaga.

Dasar hukum HKm baru muncul dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 sebagai revisi PP Nomor 34 Tahun 2002. Di dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 ini yang dimaksud dengan HKm yaitu hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat. Sebagaimana diterangkan dalam pasal 11 dari PP Nomor 6 Tahun 2007 tersebut bahwa: *"Pada areal tertentu dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 dapat ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan kemasyarakatan, hutan adat, hutan desa, dan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK)".* Selain itu di dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 juga menerangkan tentang ragam pemanfaatan hutan yang salah

satunya adalah Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang menjadi lahan garap dalam program HKm.

Dengan adanya perubahan aturan pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 1999 dari PP Nomor 34 Tahun 2002 menjadi PP Nomor 6 Tahun 2007, program HKm memiliki payung hukum yang jelas. Dari pasal 11 tersebut artinya keberadaan program HKm secara legal formal mendapatkan pengakuan dari Pemerintah c.q. Departemen Kehutanan. Aturan dalam pasal 11 tersebut kemudian diperkuat dengan ketentuan dalam pasal 93 ayat (2), pasal 94 ayat (3), Pasal 95 ayat (2), Pasal 96 ayat (8), dan Pasal 98 ayat (3). Sebagai penjabaran dari pasal-pasal dalam PP Nomor 6 Tahun 2007 dan tersebut diterbitkan Permenhut Nomor P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Dalam Permenhut P.37/2007, yang dimaksud dengan hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan atau sekitar hutan, yang membentuk komunitas, sosial dengan kesamaan mata pencaharian

yang bergantung dengan hutan, dan aktifitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan hutan kemasyarakatan adalah:

1. Tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan.
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil penanaman.
3. Mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya.
4. Menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
6. Memerankan masyarakat sebagai pelaku utama.
7. Adanya kepastian hukum.
8. Transparansi dan akuntabilitas publik.
9. Partisipatif dalam pengambilan keputusan.

Wilayah yang dapat ditetapkan sebagai areal HKm meliputi kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi, sepanjang tidak dibebani hak atau ijin dalam pemanfaatan hasil hutan dan/atau menjadi sumber mata pencaharian masyarakat setempat. Untuk pemberian ijin hutan kemasyarakatan menurut Permenhut No: 37/2007 meliputi tahapan fasilitasi dan pemberian ijin. Kegiatan fasilitasi dilakukan dengan

tujuan antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola organisasi kelompok.
2. Membimbing masyarakat mengajukan permohonan ijin sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat di dalam menyusun rencana pemanfaatan hutan kemasyarakatan.
4. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan.
6. Memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses masyarakat setempat terhadap pasar dan modal.
7. Meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pemanfaatan hutan dan hasil hutan.

Untuk mencapai tujuan di atas kegiatan fasilitasi dilakukan melalui pemberian status legalitas, pengembangan kelembagaan,

pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, membuka akses pasar, dan pembinaan dan pengendalian. Kegiatan fasilitasi tersebut wajib dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota yang dapat dibantu oleh pemerintah dan pemerintah provinsi, serta dapat dibantu oleh pihak-pihak lain seperti perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga keuangan, koperasi, dan BUMN/BUMD/BUMS.

Menurut Permenhut No: 37/2007 ini, ijin hutan kemasyarakatan diberikan melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Di dalam pasal 13 diatur bahwa IUPHKm bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dan IUPHKm dilarang dipindahtangankan, diagunkan, atau digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang mengubah status dan fungsi kawasan hutan. IUPHKm dapat diberikan kepada kelompok masyarakat setempat yang telah mendapat fasilitasi pada kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan dengan surat Keputusan Menteri.

Ragam IUPHKm tersebut kemudian dijabarkan dalam Pasal

15 sesuai dengan fungsi kawasan hutannya, dengan perincian sebagai berikut:

1. Hutan lindung, meliputi kegiatan:

- a. Pemanfaatan kawasan, yang meliputi: budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, pohon serbaguna, burung walet, penangkaran satwa liar, dan rehabilitasi hijauan makanan ternak.
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan, yang meliputi: pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu, yang meliputi: pemungutan rotan, bambu, madu, getah, buah, dan jamur.

2. Hutan produksi, yang meliputi kegiatan:

- a. Pemanfaatan kawasan, yang meliputi: budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, penangkaran satwa, dan sarang burung walet.
- b. Penanaman tanaman hutan berkayu dapat berupa tanaman sejenis dan tanaman multi jenis.
- c. Pemanfaatan jasa lingkungan, yang meliputi: pemanfaatan

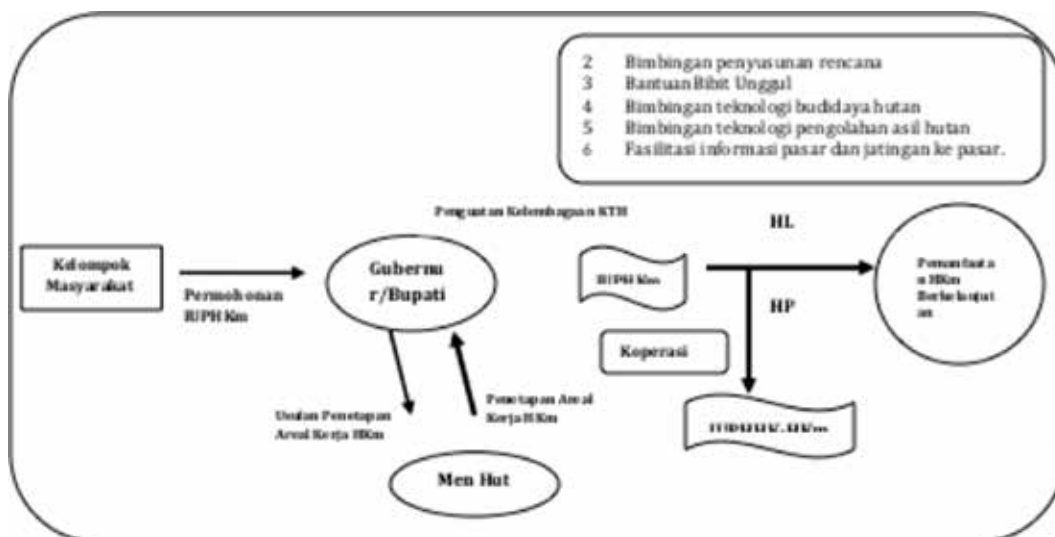
- jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, dan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- d. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, yang meliputi: rotan, sagu, nipah, bambu, getah, kulit kayu, buah atau biji, dan gaharu.
 - e. Pemungutan hasil hutan kayu diberikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat dengan ketentuan paling banyak 50 meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan, dan dikerjakan selama jangka waktu paling lama 1 tahun.
 - f. Pemungutan hasil hutan bukan kayu, berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 ton untuk setiap pemegang ijin.

Skema prosedur perijinan dan fasilitasi HKm dimulai dari kelompok masyarakat setempat mengajukan permohonan ijin kepada gubernur/bupati, permohonan dilengkapi dengan sketsa areal kerja yang dimohonkan dan Surat Keterangan

Kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari Kepala Desa. Gubernur/bupati mengajukan usulan penetapan areal kerja HKm kepada Menteri setelah diverifikasi oleh tim yang dibentuk gubernur/bupati. Terhadap usulan gubernur/bupati, dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Menteri. Jika semua syarat terpenuhi maka Menteri Kehutanan akan menetapkan areal kerja HKm sesuai usulan dari gubernur/bupati (lihat Gambar 2.1).

Areal HKm dapat diberikan pada status kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Dalam proses pengajuan perijinan dan setelah mendapat IUPHKm, kelompok mendapat fasilitasi. Fasilitasi bertujuan untuk: meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok, membimbing masyarakat mengajukan permohonan ijin sesuai ketentuan yang berlaku, meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi yang tepat guna dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.

► Gambar 2.1. Prosedur Perijinan dan Fasilitas HKm Berdasarkan Permenhut No. P.37 Tahun 2007



Sumber: Kementerian Kehutanan (2007)

2.3. PERKEMBANGAN AWAL PROGRAM HKm

Pada awal perkembangan HKM, program ini mengalami perkembangan yang pasang surut. Tahun 2006 program ini tidak banyak mengalami pertumbuhan di lapangannya. Ketidakjelasan lahan (areal kelola), ijin usaha dan fasilitasi menjadi problema yang menyebabkan program ini tidak berkembang di lapangan. Kondisi ini agak sedikit berbeda pada tahun 2007, pasca lahirnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2007, masyarakat peserta program

HKm bisa sedikit bernapas lega. Dengan lahirnya P.37 ada titik terang akan kepastian areal kerja, perijinan usaha, dan kejelasan fasilitasi. Kepastian areal kerja dan perijinan usaha merupakan aspek legal yang sangat penting dalam menjamin keberlangsungan usaha pengelolaan hutan yang lestari. Sedangkan fasilitasi dari berbagai pihak dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam mengelola hutan.

Setelah melalui jalan yang cukup berliku, pada tahun 2007, perjuangan kelompok tani peserta

program HKm mulai menunjukkan secercah harapan. Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perijinan sementara Hutan Kemasyarakatan di 6 kabupaten di 3 provinsi (Lampung, DIY, dan Nusa Tenggara Barat), masyarakat dinilai mampu mengelola hutan dengan baik dan layak mendapatkan pengakuan legal formal. Dari hasil evaluasi tersebut diputuskan bahwa masyarakat peserta program HKm di 6 kabupaten tersebut berhak mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan dan Surat Keputusan Bupati tentang Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan

(IUPHKm) kepada 57 Kelompok Tani HKm di 6 kabupaten tersebut. Pada tanggal 15 Desember 2007 bertempat di Gunung Kidul dilakukan penyerahan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Tabel 2.1 menunjukkan sebaran lokasi penerima penetapan areal kerja HKm 2007 di 6 kabupaten di Indonesia. HKm yang terluas di Indonesia berada di Kabupaten Tanggamus (29,91%). Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul memiliki luas HKm yang jauh lebih rendah yaitu sebesar masing-masing 2,23% dan 12,34%.

► **Tabel 2.1. Sebaran Lokasi Penerima Penetapan Areal Kerja HKm 2007**

No.	Kabupaten	Luas (ha)	% Terhadap Total
1.	Gunung Kidul	1.087,45	12,34
2.	Kulonprogo	196,80	2,23
3.	Lampung Barat	1.970,09	22,36
4.	Lampung Utara	1.200,00	13,62
5.	Tanggamus	2.547,22	29,91
6.	Lombok Tengah	1.809,50	20,54
Total Luas Areal HKm		8.811,06	100,00

Sumber: Departemen Kehutanan (2008)

► Tabel 2.2. Realisasi Areal HKm melalui IUPHKm pada tahun 2009, 2014, dan 2016

No.	Provinsi	Luas HKm		
		Tahun 2009	Tahun 2014	Tahun 2016
1.	Aceh	-	-	200,00
2.	Sumatera Utara	-	-	-
3.	Riau	-	-	-
4.	Jambi	-	-	-
5.	Sumatera Barat	-	1.511,00	-
6.	Sumatera Selatan	-	-	-
7.	Bengkulu	1.762,75	-	-
8.	Lampung	15.001,30	46.867,67	-
9.	DIY	-	-	-
10.	Jawa Barat	-	-	-
11.	Jawa Timur	-	-	-
12.	Kalimantan Barat	-	-	-
13.	Kalimantan Tengah	-	-	1.885,00
14.	Kaliamntan Selatan	-	730,00	-
15.	Kep. Bangka Belitung	-	1.227,00	-
16.	Sulawesi Selatan	-	5.025,66	-
17.	Sulawesi Tengah	31,00	590,00	-
18.	Sulawesi Tenggara	-	-	-
19.	Sulawesi Utara	-	-	-
20.	Sulawesi Barat	-	4000,00	-
21.	Bali	150,00	-	-
22.	NTB	185,00	3.805,16	380,46
23.	NTT	500,00	-	-
24.	Maluku Utara	-	290,00	-
25.	Papua	-	-	-
Total		17.630,05	64.046,49	2.465,46

Sumber: Kementerian LHK (2016); Rincian data runtut waktu per provinsi lihat Lampiran 2.1

Sebagai target antara ditetapkan target hutan kemasyarakatan tahun 2009 seluas 429.125,29 ha. Target ini ditetapkan berdasarkan luas dan penyebaran lokasi Proyek Pembangunan HKm tahun 1993–2001, usulan penetapan areal dari kabupaten dan areal kerja *social forestry*. Lokasi areal HKm tersebut tersebar di beberapa provinsi sebagai mana ditunjukkan dalam Tabel 2.2. Sampai dengan tahun 2014 areal HKm yang dicapai seluas 328.452,86 ha, yang masih jauh dengan target pada tahun 2009 (lihat Tabel 2.2).

2.4. DINAMIKA PROGRAM HKm DARI TAHUN 2014-2017

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.88/Menhut-II/2014 merupakan penyempurnaan dari evaluasi P.37/Menhut-II/2007 dan P.52/Menhut-II/2011. Dalam Peraturan P.88/Menhut-II/2014 HKm bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumberdaya hutan secara optimal, adil dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup. Pada peraturan ini lebih membahas mengenai hak dan kewajiban peserta HKm seperti mengenai perijinan baik di HKm yang berada di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung.

muncul peraturan terbaru yaitu Peraturan No. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang perhutanan sosial yang bertujuan untuk memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perijinan, kemitraan, dan hutan adat di bidang Perhutanan Sosial. Peraturan Menteri ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di sekitar kawasan hutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kelestarian hutan. Dalam peraturan ini ruang lingkup perhutanan sosial adalah hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat. Program perhutanan sosial ini telah diatur sedemikian hingga jangka waktu dan evaluasi yaitu untuk hutan desa, hutan tanaman rakyat dan hutan kemasyarakatan berlaku 35 tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 tahunan. Dilakukan monitoring pada program perhutanan sosial oleh pendamping/pokja Program Perhutanan Sosial (PPS) atau Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) setempat. Pemegang ijin pengelolaan juga mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilan secara sepihak oleh pihak lain.

Seiring berjalannya waktu

Dalam program Perhutanan

Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Renstra Ditjen PSKL tahun 2015-2019 memiliki sasaran program untuk meningkatkan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat, meningkatkan upaya penyelesaian konflik dan tenurial di kawasan hutan serta meningkatkan perilaku peduli lingkungan dan kehutanan. Hal ini ditunjang dengan pencadangan areal perhutanan sosial dengan target seluas 12,7 juta ha pada tahun 2019.

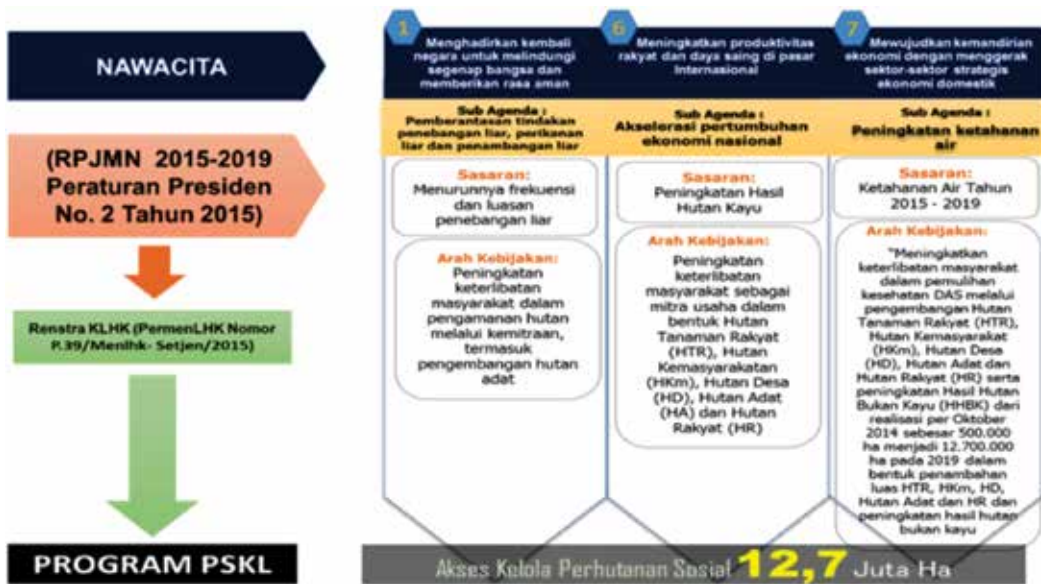
Dalam rangka pencapaian *Millenium Development Goal (MDGs)* tahun 2015 ditetapkan target areal kerja Program Hutan Kemasyarakatan seluas 2,1 juta hektar. Kementerian LHK berkomitmen untuk berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Dengan target HKm seluas 2,1 juta hektar tersebut, diharapkan pada tahun 2015 sektor kehutanan dapat menurunkan angka kemiskinan minimal 50%. Hingga tahun 2017, luas perhutanan sosial telah mencapai 7,6 juta ha yang tersebar di seluruh Indonesia.

Program PSKL ini selaras dengan program Nawacita yang menargetkan menurunkan frekuensi dan luasan penebangan liar, peningkatan hasil hutan kayu dan ketahanan air (lihat Gambar 2.2). Dengan program perhutanan sosial yang melibatkan masyarakat maka dari segi keamanan

kawasan hutan akan lebih meningkat karena tidak saja pihak dinas namun masyarakat juga memiliki andil dalam menjaga kawasan yang telah mereka kelola melalui ijin kelola baik melalui Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD), IUPHKm, dan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR). Peningkatan hasil hutan kayu akan terwujud dari pengelolaan kawasan yang maksimal dengan melibatkan masyarakat sekitar hutan dengan memadukan dengan kearifan lokal. Dengan terjaganya hutan maka akan berdampak pada ketahanan air mengingat fungsi hutan sebagai penyimpan air.

Rencana strategis dan program

► Gambar 2.2. Keterkaitan Antara Nawacita dan Program HKm



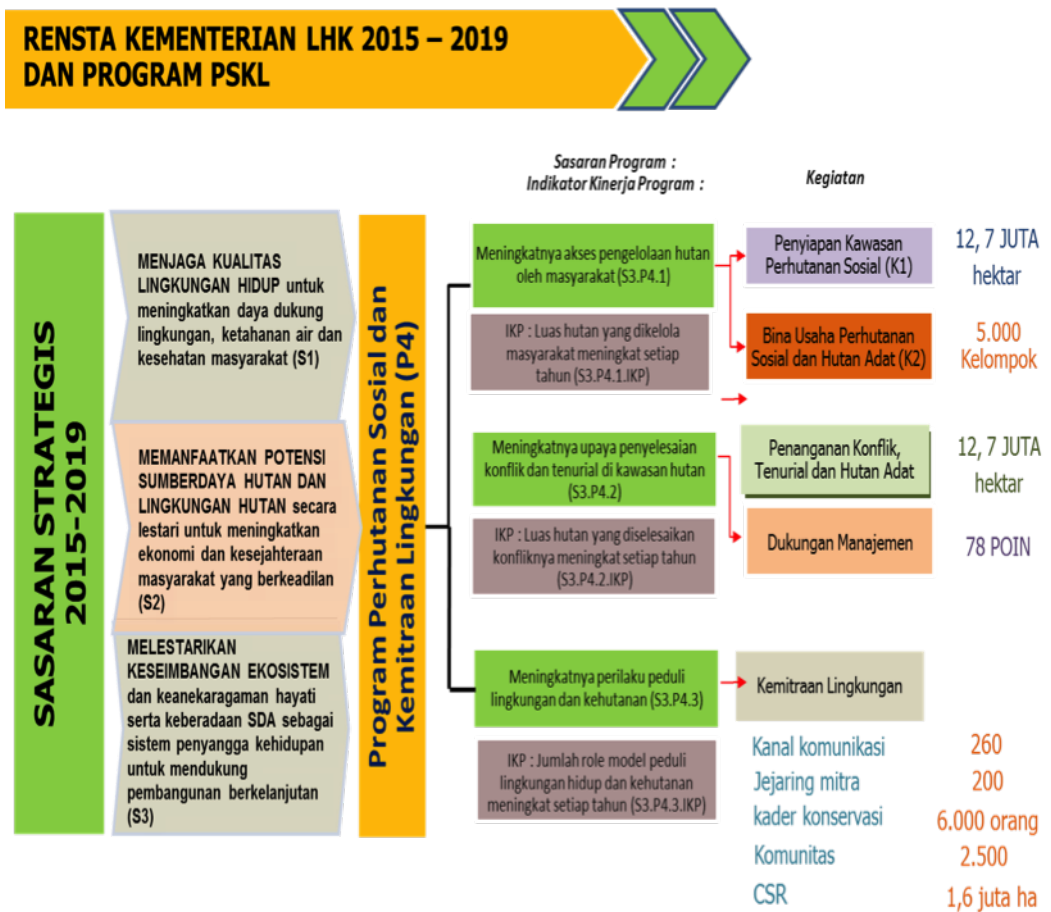
Sumber: Kementerian LHK (2017)

perhutanan sosial menitikberatkan pada pemberian akses kelola perhutanan sosial dan peningkatan kapasitas usaha perhutanan sosial (lihat Gambar 2.3). Strategi dan program tersebut menekankan bahwa hutan harus dapat memberi kesejahteraan bagi masyarakat yang berada di sekitar hutan.

Implementasi strategi melalui pemberian akses terhadap lahan hutan dan peningkatan kapasitas usaha menjadi kunci penting untuk mengentaskan kemiskinan khususnya masyarakat sekitar hutan (lihat Gambar 2.4). Program

perhutanan sosial tersebut juga harus didukung pembiayaan/ modal dalam pengembangan usaha, peningkatan kapasitas SDM dan penguatan kelembagaan melalui pendampingan yang intensif sehingga masyarakat mandiri dan mampu mengoptimalkan sumberdaya yang ada.

► Gambar 2.3. Restra PSKL



Sumber: Kementerian LHK (2017)

Sampai dengan tahun 2017

► Gambar 2.4. Strategi Perhutanan Sosial



Sumber: Kementerian LHK (2017)

pemberian ijin usaha pemanfaatan HKm telah mencapai 301.548,67 ha yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia (lihat Tabel 2.3). Untuk pencadangan area HKm sampai dengan tahun 2017 sudah

mencapai 432.598,86 ha. Selisih angka pencadangan area HKm dan pemberian IUPHKm ini menjadi peluang bagi masyarakat sekitar hutan untuk mendapat akses kelola lahan lebih luas.

► Tabel 2.3. Capaian Kinerja Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (ha)

No.	Tahun	PAK/PENCADANGAN	IJIN/MOU
1.	2007-2014	328.452,86	153.725,15
2.	2015	49.128	20.945,06
3.	2016	55.018	2.465,46
4.	2017	-	124.413
TOTAL		432.598,86	301.548,67

Sumber: Kementerian LHK (2017)

Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari awal HKm digulirkan hingga Oktober 2018. IUPHKm tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Capaian IUPHKm hingga Oktober 2018 sudah diatas angka penetapan areal kerja HKm. Provinsi Lampung mendapatkan IUPHKm paling luas yaitu 134.395,73 ha dan Bali mendapat IUPHKm paling sedikit hanya sebesar 150 ha. Luasan ini dapat meningkat mengingat data

penetapan areal HKm yang belum sama dengan data IUPHKm.

Pada data penetapan areal HKm, telah ditetapkan seluas 432.598,86 ha sampai dengan Desember tahun 2017. Di Provinsi Lampung telah ditetapkan seluas 111.115,61 ha masih di atas capaian luas HKm yang telah mendapat IUPHKm (lihat Gambar 2.6).

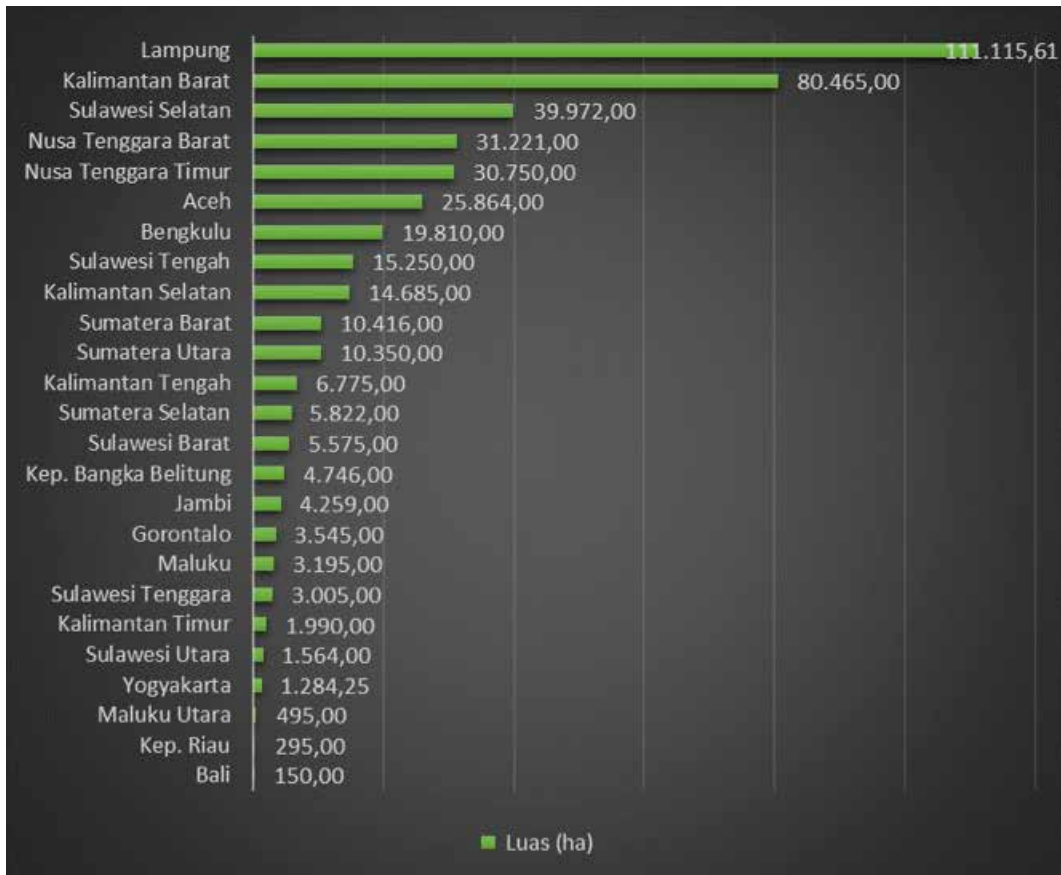
Gambar 2.7 menunjukkan data

► Gambar 2.5. Data Ijin Usaha Pemanfaatan IUPHKm sampai dengan Desember Tahun 2017



Sumber: Kementerian LHK (2017)

► Gambar 2.6. Data Penetapan Areal Kerja HKm sampai dengan Desember Tahun 2017



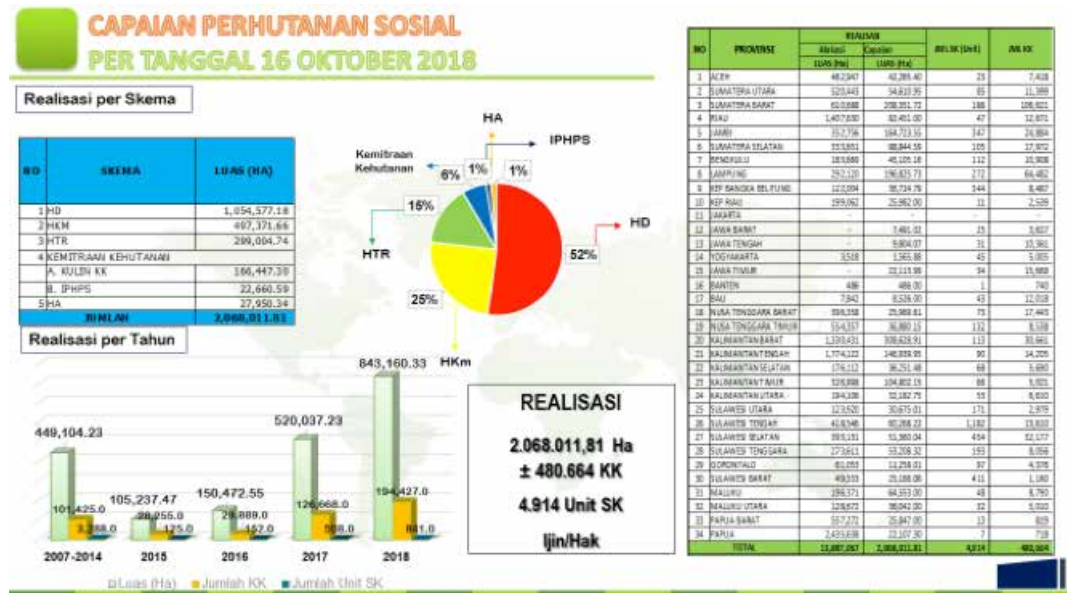
Sumber: Kementerian LHK (2017)

perkembangan program perhutanan sosial di mana sampai Oktober 2014 mencapai luasan sebesar 449.104,2 ha dan meningkat drastis hingga tahun 2018 mencapai 2.068.011,81 ha. Selama 4 tahun terakhir program perhutanan sosial telah merealisasi 2.068.011,81 ha dengan 4.914 unit ijin/hak/MoU dan melibatkan 480.664 Kepala Keluarga masyarakat

sekitar hutan di seluruh Indonesia. Untuk perkembangan program HKm sendiri selama 7 tahun yaitu dari tahun 2007 hingga Oktober 2014 yang telah merealisasikan HKm seluas 153.725,15 ha dan selama 4 tahun terakhir telah menunjukkan mencapai 343.646,51 ha. Hal ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan relatif tinggi apabila

dibandingkan perkembangan HKm sebelumnya.

► Gambar 2.7. Strategi Perhutanan Sosial Yang Digarisikan Oleh Kementerian LHK Dan Perkembangan Capaiannya



Sumber: Kementerian LHK (2017)

BAB 3

GAMBARAN UMUM PERHUTANAN SOSIAL DI DIY

Bab 3 menjelaskan gambaran umum Perhutanan Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Subbab pertama mendeskripsikan lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) di DIY. Selanjutnya pada subbab kedua menjelaskan lokasi HKM di Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo. Pada subbab ketiga berisi deskripsi lokasi HKm di Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul.

3.1. LOKASI HKM DIY

Hutan merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitar hutan pada umumnya. Sekitar tahun 1974-1980 masyarakat Provinsi DIY mulai masuk hutan, bukan untuk menebang kayu tetapi untuk menggarap lahan, yang dalam Bahasa Jawa disebut baon (Lestari, 2017). Petani menanam tanaman jati dengan tumpangsari tanaman semusim. Dengan berjalannya waktu, kebijakan pengelolaan hutan lebih memberikan akses bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan, antara lain dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 622/Kpts-II/1996 tentang

Hutan Kemasyarakatan, maka masyarakat mulai membentuk kelompok-kelompok tani hutan.

Tabel 3.1 menunjukkan luas HKm DIY sebesar 1.238,15 ha. Luasan ini tergolong kecil di Indonesia karena hanya sekitar 0,41% dari total hutan HKm di Indonesia yang mencapai 301.548,67 ha. Meskipun tergolong kecil, luas HKm di DIY ternyata lebih tinggi daripada Bali, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara.

Di wilayah DIY, setidaknya terdapat 42 Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan (KTHKm) yang mendapat ijin definitif. Perinciannya, ada 35 KTHKm di Gunungkidul dengan komunitas BUKIT SERIBU dan 7 KTHKm di Kulon Progo dengan komunitas LINGKAR.

► Tabel 3.1. Luas dan Persentase Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm), Desember Tahun 2017

No.	Provinsi	Luas (ha)	Persen terhadap total
1.	Aceh	18.130	6,01
2.	Bali	150	0,05
3.	Bengkulu	8.566	2,84
4.	Jambi	6.086	2,02
5.	Kalimantan Barat	12.745	4,23
6.	Kalimantan Selatan	6.135	2,03
7.	Kalimantan Tengah	10.031	3,33
8.	Kalimantan Timur	1.990	0,66
9.	Kalimantan Utara	220	0,07
10.	Kep. Bangka Belitung	8.668	2,87
11.	Kep. Riau	2.589	0,86
12.	Lampung	109.361	36,27
13.	Maluku	2.595	0,86
14.	Maluku Utara	290	0,10
15.	Nusa Tenggara Barat	14.453	4,79
16.	Nusa Tenggara Timur	25.555	8,47
17.	Riau	5.898	1,96
18.	Sulawesi Barat	4.679	1,55
19.	Sulawesi Selatan	17.227	5,71
20.	Sulawesi Tengah	8.484	2,81
21.	Sulawesi Tenggara	4.683	1,55
22.	Sulawesi Utara	1.888	0,63
23.	Sumatera Barat	19.001	6,30
24.	Sumatera Selatan	3.909	1,30
25.	Sumatera Utara	6.978	2,31
26.	Yogyakarta	1.238	0,41
Total		301.549	100,00

Sumber: Kementerian LHK (2018)

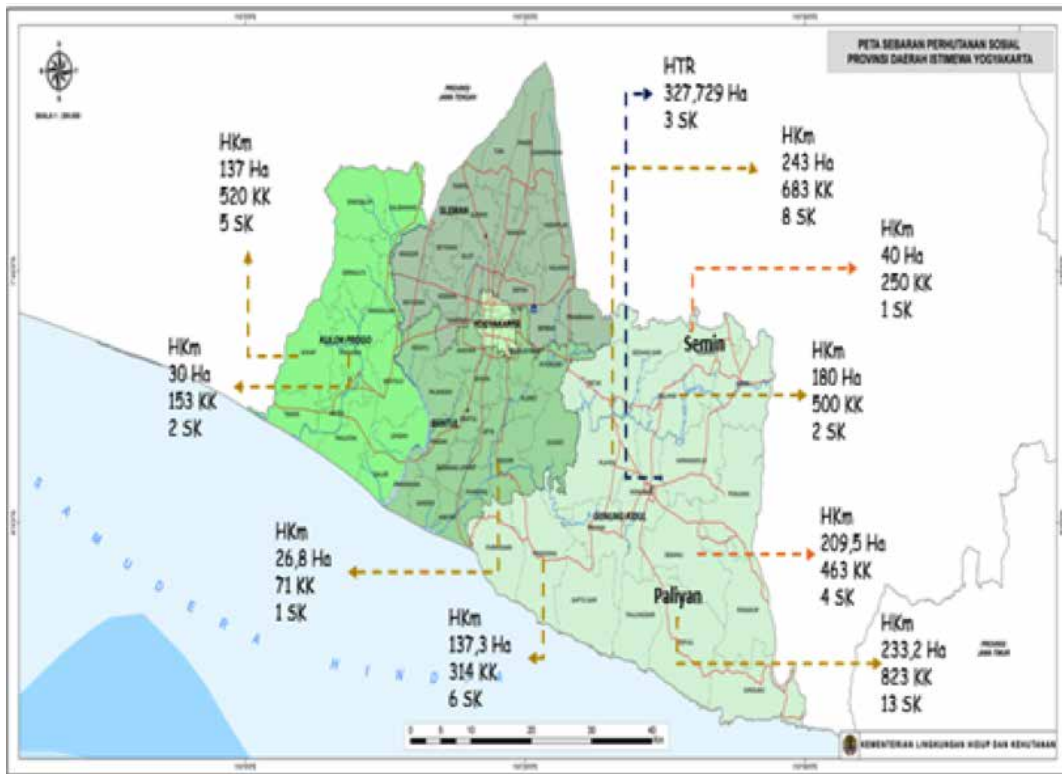
Pasca terbitnya ijin definitif pengelolaan HKm selama 35 tahun banyak hal yang harus diselesaikan seperti rencana kelola, peningkatan kapasitas lembaga, serta pengembangan produk. Pengelolaan HKm di Kabupaten Gunungkidul khususnya di Kecamatan Playen dilakukan di hutan produksi yang berada di Resort Pengelolaan Hutan (RPH) Menggoro, RPH Kepek, RPH Menggoran, RPH Gubuk Rupuh, dan RPH Wonolegi. Terdapat 7 KTHKm yang berada di wilayah Kecamatan Playen, yaitu: KTHKm Sedyo Rukun, Tani Manunggal, Sumber Wanajati I, Sumber Wanajati III, Wana Makmur, Wana Lestari I dan Wana Lestari II. Lahan HKm yang berada di RPH Menggoro berada pada petak 95 dengan luas 17 ha, di RPH Kepek lokasi HKm berada di petak 94 dengan luas HKm 27,65 ha yang dikelola 2 KTHKm yaitu: Sumber Wanajati I dan Sumber Wanajati III. HKm yang berada di RPH Menggoran berada di petak 86 dengan luas 40 ha. Di RPH Gubuk Rubuh lokasi HKm berada pada petak 73 dengan luas 39,4 ha dan pada petak 74 dengan luas 57,4 ha. Sedangkan di RPH Wonolegi lokasi HKm berada pada petak 71 dengan luas 35 ha (BPDAS Serayu Opak Progo, 2011).

Dalam praktik, sistem pengelolaan HKm tergantung potensi daerah dan hutan. Lokasi HKm di DIY tersebar di

Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul (lihat Gambar 3.1). Pengelolaan HKm di Gunungkidul dilakukan dengan sistem *agroforestry* dengan jenis tanaman pokok berupa jati. Sedangkan pengelolaan HKm di Kuloprogo dengan terbitnya Ijin Usaha Pemanfaatan HKm para petani merasa lebih nyaman dalam mengelola hutan. Khusus untuk 2 KTHKm, yaitu Taruna Tani dan Nuju Makmur, status kawasan masih tetap Hutan Produksi (HP), sehingga tinggal melanjutkan sesuai dengan rencana kelola yang sudah disusun.

Berbeda dengan 5 KTHKm lainnya (Sido Akur, Menggerrejo, Mandiri, Rukun Makaryo, dan Suko Makmur), turunnya ijin tersebut sedikit menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh perubahan status hutan. Dalam tahap ijin sementara masih kawasan termaksud berstatus Kawasan Hutan Produksi (HP), dalam status IUPHKm kemudian berubah menjadi Kawasan Hutan Lindung (HL). Kondisi ini tentunya tidak selaras dengan rencana kelola dan jenis tanaman yang telah mereka tanam. Meskipun demikian, ke-5 KTHKm tersebut tetap bersemangat untuk melestarikan hutan, dengan harapan mereka akan mendapat manfaat dari kelestarian hutan tersebut (BPDAS Serayu Opak Progo, 2011).

► Gambar 3.1. Peta Lokasi HKm di DIY



Sumber: Kementerian LHK (2017)

Setelah berkonsultasi dengan pihak Pemerintah melalui Forum Komunikasi Kelompok Hutan Kemasyarakatan (FKKHKm), ke-5 KTHKm membuat perubahan pola tanam kawasan hutan, dari yang semula dominan tanaman penghasil kayu, sekarang diperbanyak tanaman serbaguna dan buah-buahan, atau biasa disebut *Multi Purpose Tree Species* (MPTS). Hal ini dimaksudkan agar petani bisa memanfaatkan hasil buah tanaman tersebut, karena di

kawasan hutan lindung tidak ada sistem bagi hasil panen kayu.

Sebagai konsekuensi dari IUPHKm tersebut, Pemerintah secara bertahap memberikan kompensasi berupa bantuan bibit tanaman. Namun sebagai kawasan yang masih tandus, tentunya tidak mudah bagi para petani untuk merawat tanaman yang baru ditanam. Setiap musim hujan selalu dilakukan penyulaman tanaman karena banyak tanaman yang mati. Berbagai upaya terus

dilakukan agar tanaman dapat hidup dan tumbuh dengan baik. Pada akhir tahun 2008, khusus untuk Areal Kerja HKm di hutan lindung, sudah diatur bahwa tidak boleh ada penebangan pohon, dan tidak ada bagi hasil kayu sebagaimana di hutan produksi. Hal ini sempat membuat sedikit pesimis para anggota KTHKm di hutan lindung, karena sebetulnya salah satu yang mereka harapkan adalah bagi hasil kayu hutan, baik hasil pada waktu penjarangan maupun pada waktu pemanenan (Lestari, 2017).

Dari beberapa peluang yang mungkin dilakukan, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya usulan pemanfaatan jasa lingkungan menjadi prioritas usulan yang dilaksanakan bersama-sama. Untuk tahap awal pemanfaatan jasa lingkungan adalah dengan rencana pembangunan wisata alam. Pembangunan wisata alam Kalibiru adalah salah satu kegiatan yang dikembangkan oleh Komunitas Lingkar sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat pengelola hutan, khususnya di Hutan Lindung Kabupaten Kulon Progo.

Dengan semakin rapatnya tegakan di kawasan hutan, masyarakat sudah tidak bisa menikmati lagi hasil tumpangsari yang semula menjadi andalan, karena tanaman semusim tersebut tidak bisa hidup dan menghasilkan lagi. Dengan

adanya wisata alam ini diyakini mampu menjadi kegiatan alternatif bagi masyarakat agar kelestarian hutan tetap terjaga, namun di sisi lain secara ekonomi ada peningkatan pendapatan, dengan tujuan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Perpaduan antara keelokan alam yang ada di wisata alam Kalibiru dengan budaya lokal masyarakat, baik budaya pertanian, peternakan, maupun budaya gotong-royong, dan dengan didukung oleh adanya beberapa jenis kesenian sebagai atraksi budaya.

Di DIY, luas HKm yang mencapai 1.236,8 ha dibagi dalam 42 SK yang tersebar di 2 kabupaten, yaitu: Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Lokasi HKm tersebut berada di Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo. HKm di sekitar Kali Biru memiliki luas 137 ha atau sekitar 11% dari total HKm yang ada di DIY. Adapun di HKm tersebut terdapat 55 keluar (KK) dan 5 SK. HKm ini juga bernilai ekonomis dan memberikan penghasilan untuk warga. Letaknya yang strategis di sekitar Kalibiru menyuguhkan pemandangan yang menarik bagi wisatawan, serta terdapat juga kerajinan hasil hutan.

Di Gunungkidul, HKm berada di Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Gunungkidul. Di Desa Bleberan terdapat HKm seluas

243 ha atau hampir 20% dari HKm di DIY, yang diberikan kepada 638 KK dengan 8 SK. HKm tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dibandingkan yang ada di sekitar Kalibiru.

3.2. LOKASI HKm DESA HARGOWILIS, KOKAP, KULON PROGO

Desa Wisata Kalibiru adalah tempat wisata yang berada di atas Waduk Sermo, yang merupakan

satu-satunya waduk di DIY. Desa Wisata Kalibiru merupakan pengembangan dari wisata alam Kalibiru (Desa Wisata Kalibiru, 2017). Pengembangan ini perlu dilakukan mengingat semakin banyaknya permintaan dan tuntutan banyak pihak, khususnya para pengunjung wisata alam akan kebutuhan rekreasi yang menampilkan budaya dan kehidupan masyarakat lokal, yang masih belum mampu terpenuhi dari sisi wisata alam.

► Gambar 3.2 Lokasi HKm Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo



Sumber: Kementerian LHK (2017)

Keberadaan Desa Wisata Kalibiru tidak bisa dilepaskan dari keberadaan wisata alam di wilayah ini sebagai cikal bakal sekaligus andalan bagi Desa Wisata Kalibiru. Keberadaan wisata alam sendiri tidak lepas dari proses panjang pengelolaan kawasan hutan yang ada di Kulon Progo, yang pada akhirnya dikelola oleh masyarakat sekitar hutan dengan nama Hutan Kemasyarakatan (HKm) (lihat Gambar 3.2). Sementara Ijin Pemanfaatan HKm juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah hutan negara yang ada di wilayah ini, karena keberadaan hutan negara menyimpan banyak cerita yang cukup mengeskan, khususnya bagi penduduk di sekitarnya.

HKm adalah skema Perhutanan Sosial yang dilaksanakan di hutan negara Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ijin Usaha Pemanfaatan HKm di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan di kawasan Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi (HP) dengan luas

keseluruhan kira-kira 200 ha dari keseluruhan luas hutan negara 1.045 ha. Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) untuk jangka panjang (35 tahun) diberikan oleh pemerintah kepada 7 Kelompok Tani HKm sejak tahun 2007.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No: SK. 437/Menhut-II/2007 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Kulon Progo DIY, maka Bupati Kulon Progo mengeluarkan IUPHKm kepada 7 koperasi/KTHKm di Kulon Progo (lihat Tabel 3.2). Selanjutnya mereka bersepakat untuk membentuk sebuah wadah yang diharapkan bisa menggantikan peran pendamping. Wadah ini kemudian diberi nama Komunitas Lingkar (Lingkungan Alam Lestari). Pengurus Komunitas Lingkar terdiri dari perwakilan pengurus 7 KTHKm dan orang-orang yang merasa terpanggil untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan, khususnya hutan.

► **Tabel 3.2. Koperasi / KTHKm Penerima IUPHKm**

No.	Nama Koperasi/ KTHKm	Alamat	Luas Lahan	Status Kawasan
1.	SIDO AKUR	Hargowilis, Kokap	20,6 ha	Hutan Lindung
2.	MENGGERREJO	Hargowilis, Kokap	12,1 ha	Hutan Lindung
3.	MANDIRI	Hargowilis, Kokap	29,7 ha	Hutan Lindung
4.	RUKUN MAKARYO	Sendangsari, Pengasih	35,8 ha	Hutan Lindung
5.	SUKO MAKMUR	Sendangsari, Pengasih	15,8 ha	Hutan Lindung
6.	TARUNA TANI	Hargorejo, Kokap	43,2 ha	Hutan Produksi
7.	NUJU MAKMUR	Hargorejo, Kokap	39,6 ha	Hutan Produksi

Sumber: Vitasurya et al. (2014)

Dengan telah terbitnya Ijin Usaha Pemanfaatan HKm para petani merasa lebih nyaman dalam mengelola hutan. Khusus untuk 2 KTHKm (Taruna Tani dan Nuju Makmur), status kawasan masih tetap Hutan Produksi (HP), sehingga tinggal melanjutkan sesuai dengan rencana kelola yang sudah disusun.

Berbeda dengan 5 KTHKm lainnya (Sido Akur, Menggerrejo, Mandiri, Rukun Makaryo, dan Suko Makmur), turunnya ijin tersebut sedikit menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh perubahan status hutan, di mana pada tahap ijin sementara masih berstatus Kawasan Hutan Produksi (HP), sedang dalam IUPHKm berubah menjadi Kawasan Hutan Lindung (HL). Hal ini tentunya tidak selaras dengan rencana kelola dan jenis tanaman yang telah mereka tanam. Meskipun demikian, kelima KTHKm tersebut tetap bersemangat untuk melestarikan hutan, dengan harapan mereka akan mendapat manfaat dari kelestarian hutan tersebut.

Setelah berkonsultasi dengan pihak Pemerintah melalui FKKHKm, kelima KTHKm membuat perubahan pola tanam kawasan hutan, dari yang semula dominan tanaman penghasil kayu, sekarang diperbanyak tanaman serbaguna dan buah-buahan (MPTS). Hal ini dimaksudkan agar petani bisa memanfaatkan hasil buah tanaman

tersebut, karena di kawasan hutan lindung tidak ada sistem bagi hasil panen kayu di masa yang akan datang.

Sebagai konsekuensi dari IUPHKm tersebut, pemerintah secara bertahap memberikan kompensasi berupa bantuan bibit tanaman. Namun sebagai kawasan yang masih tandus, tentunya tidak mudah bagi para petani untuk merawat tanaman yang baru ditanam. Setiap musim hujan selalu dilakukan penyulaman tanaman karena banyak tanaman yang mati. Berbagai upaya terus dilakukan agar tanaman dapat hidup dan tumbuh dengan baik.

Dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan, upaya itu mulai menampakkan hasil, di antaranya (Desa Wisata Kalibiru, 2017):

1. Hutan yang semula hampir gundul, sekarang sudah mulai menghijau ditumbuhi tanaman keras dan MPTS.
2. Beberapa mata air mulai muncul, sehingga kekeringan tidak lagi dialami oleh penduduk di sekitar hutan.
3. Keawetan tanah terjaga sehingga bisa untuk menanam Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan tanaman pangan.

Khusus untuk areal kerja HKm di hutan lindung sudah diatur bahwa tidak boleh ada penebangan

pohon, dan tidak ada bagi hasil kayu sebagaimana di hutan produksi. Hal ini sempat membuat sedikit pesimis para anggota KTHKm di hutan lindung karena sebetulnya salah satu yang mereka harapkan adalah bagi hasil kayu hutan, baik hasil pada waktu penjarangan maupun pada waktu pemanenan.

Dari beberapa peluang yang mungkin dilakukan, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya usulan pemanfaatan jasa lingkungan menjadi prioritas usulan yang akan dilaksanakan bersama-sama. Untuk tahap awal pemanfaatan jasa lingkungan adalah dengan rencana pembangunan wisata alam (Wiratno, 2016).

Rencana pembangunan wisata alam sebagai salah satu pengembangan HKm di hutan lindung tersebut, oleh Pengurus Komunitas Lingkar disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo. Setelah melihat perkembangan di lapangan, dan dengan mempertimbangkan aturan yang ada, pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo akhirnya menyetujui rencana tersebut. Rencana tahap awal pembangunan wisata alam disepakati untuk dilaksanakan di salah satu lokasi KTHKm Mandiri, Kalibiru.

► Gambar 3.3. Lingkungan Obyek Wisata Alam Kalibiru



Sumber: Dokumentasi Tim (2018)

3.2.1. Profil Desa Hargowilis

Desa Hargowilis memiliki luas wilayah 1.547,84 ha dengan ketinggian 110-600 m di atas permukaan laut (DPL) (BPS, 2016). Batas wilayah sebelah utara adalah Desa Jatimulyo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sendangsari, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hargorejo dan batas sebelah barat adalah Desa Hargotirto. Pada awalnya Desa Hargowilis terdiri dari 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Girisremo dan Kelurahan Kalibiru. Kedua kelurahan tersebut digabung menjadi satu dengan nama Hargowilis. Kata Hargo diambil dari kata Giri yang artinya Gumung dan kata WILIS diambil dari kata Biru yang artinya Hijau sehingga Hargowilis berarti Gumung (pegunungan yang hijau).

Tata guna lahan jenis tanah sawah di Desa Hargowilis seluas 0 ha, tanah kering seluas 194,22 ha, tanah perkebunan ada seluas 389 ha, fasilitas umum ada seluas 0,75 ha, perkarangan/bangunan seluas 110,73 ha, tanah hutan seluas 398 ha, dan lainnya. Tanah hutan terdiri dari hutan rakyat seluas 182 ha dan hutan negara seluas 216 ha.

Menurut Pemerintah Desa Hargowilis (2017), jumlah penduduk Desa Hargowilis tahun 2017 sebanyak 6.808 orang, yang mana laki-laki sebanyak 3.344 orang dan

perempuan sebanyak 3.462 orang. Mayoritas para penduduk menganut agama Islam. Menurut jenjang pendidikan tertinggi, penduduk Desa Hargowilis paling banyak tamatan SLTA/ sederajat dengan jumlah 762 orang laki-laki dan 741 orang perempuan. Adapun yang tidak pernah sekolah sebanyak 377 orang laki-laki dan 368 orang perempuan.

Mata pencaharian penduduk mayoritas ibu rumah tangga sebanyak 1.790 orang dari 6.808 orang total penduduk Desa Hargowilis. Urutan kedua banyak penduduk yang belum/tidak bekerja (pengangguran) sebanyak 1153 orang dari 6.808 total penduduk, dan penduduk yang masih sekolah ada sebanyak 1152 orang dari 6.808 orang total penduduk. Pada urutan ketiga, penduduk yang bekerja sebagai buruh migran dalam negeri 723 orang dan petani bukan penderes 519 orang sedangkan sisanya bermata pencaharian peternak/ perikanan, perdagangan, industri kecil dan kerajinan, dan sektor jasa lainnya (Desa Wisata Kalibiru, 2017).

Sumber energi listrik sudah banyak digunakan rumah penduduk untuk aktivitas kebutuhan sehari-hari, ada 1474 rumah berlangganan listrik dan yang belum pasang listrik ada 65 rumah. Meskipun demikian, masih ada pula rumah tangga yang menggunakan LPG sebanyak 605

rumah dan pengguna bahan bakar ada 934 rumah tangga (Desa Wisata Kalibiru, 2017).

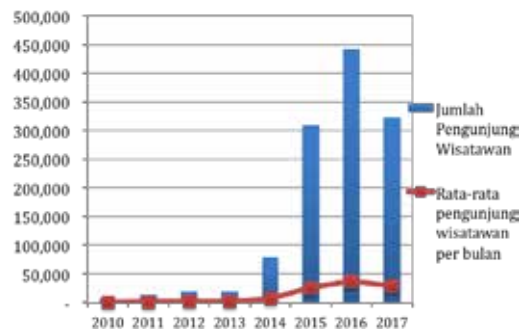
Desa Hargowilis memiliki sarana prasarana wilayah dan perumahan yang menunjang aktivitas ekonomi berjalan setiap hari. Ada 26 bangunan sarana pendidikan, ada 34 sarana peribadatan terutama masjid dan mushola, dan ada 22 sarana kesehatan termasuk dokter dan puskesmas. Sarana hiburan dan pariwisata sebanyak 38 yang terdiri dari 4 sarana wisata alam, 1 sarana wisata danau/waduk, 7 sarana wisma/penginapan, 23 sarana *homestay*, dan ada 3 sarana dermaga wisata. Kebutuhan sarana air bersih untuk sumur gali ada 60 sarana, ada 47 umbul/mata air, ada 23 penampung air hujan (PAH), ada 11 embung, ada 1 bendungan/waduk, ada 2 tangki air bersih, dan ada 1 hidran umum (Pemerintah Desa Hargowilis, 2017). Hampir semua sarana air bersih dapat dinikmati para penduduk, ada 1074 rumah pelanggan PAM dan 465 rumah pengguna air selain PAM sedangkan rumah tangga yang masih kesulitan air pada musim kering ada 93 rumah.

3.2.2. Daya Tarik Wisata Kalibiru di Desa Hargowilis

Luas lahan yang sebagian besar berupa hutan lindung, memberikan suasana alam yang menarik di Desa

Hargowilis. Panorama waduk dan perbukitan Menoreh yang dapat dinikmati dari atas bukit Kalibiru membuka peluang yang besar untuk daya tarik wisata alam bagi para turis. Salah satu wisata yang dikelola masyarakat kelompok tani yaitu Wisata Alam Kalibiru. Wisata Kalibiru yang diawali dari wisata sejarah atas asal usul dusun tersebut diberi nama Kalibiru hingga sampai terwujud wisata alam. Di samping daya tarik wisata alam yang menarik, peluang kesempatan kerja pun terbuka untuk sebagian masyarakat Dusun Kalibiru. Perkembangan jumlah pengunjung Wisata Alam Kalibiru per bulan meningkat sejak dibuka pada tahun 2010-2016 (lihat Gambar 3.4).

► Gambar 3.4. Jumlah Pengunjung Wisata Alam Kalibiru Per Bulan

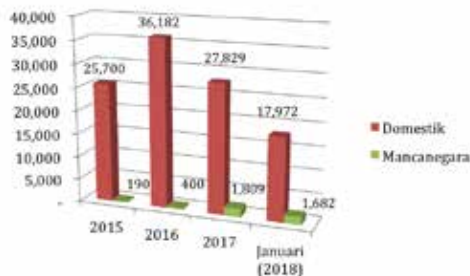


Sumber: Pengelola Wisata Kalibiru (2018)

Gambar 3.5 menunjukkan wisatawan domestik masih mendominasi pengunjung wisata alam Kalibiru. Tahun 2015, wisatawan domestik sebanyak

25.700 yang sedikit meningkat menjadi 27.829 pada tahun 2017. Wisatawan mancanegara hanya berkisar antara 190 hingga 1.682 selama 2015 hingga Januari 2018.

► **Gambar 3.5. Rata-rata Jumlah Pengunjung Wisata Alam Kalibiru Per Bulan**



Sumber: Pengelola Wisata Kalibiru (2018)

Wisata alam Kalibiru terbentuk dari adanya program jasa lingkungan yang mengajak kelompok tani untuk berkontribusi dalam pengelolaannya. Dampak yang diharapkan dari wisata ini adalah terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat Kalibiru, sebagai wujud dari program perhutanan sosial dalam menjaga kehidupan masyarakat dan kelestarian hutan. Selain daya tarik wisata alam dan panorama antara hutan dan Waduk Sermo, fasilitas wisata yang ditawarkan meliputi: spot foto, joglo wisata alam Kalibiru, gardu pandang, gazebo, flying fox, jalur tracking, homestay, camping ground, dan fasilitas outbond. Tingginya minat

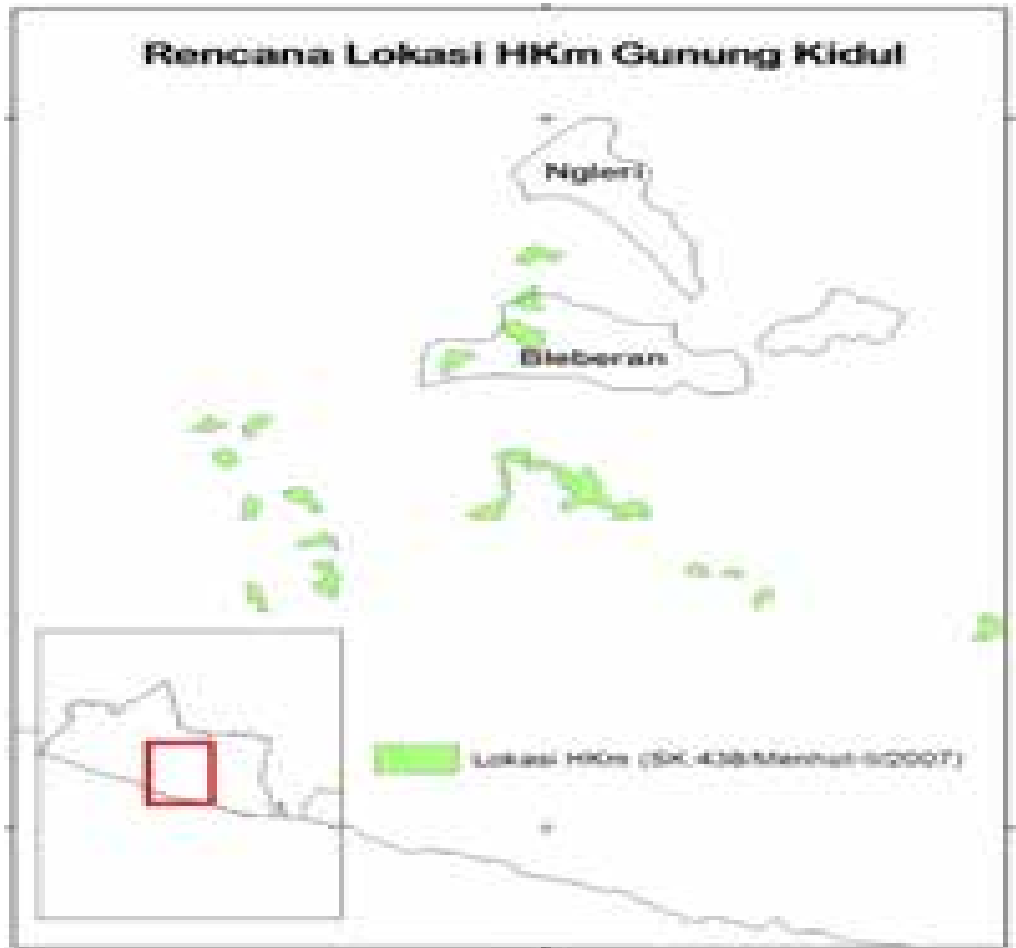
berwisata di Kalibiru rata-rata jumlah pengunjung wisata per bulan mencapai 36.182 orang wisatawan pada tahun 2016, baik itu wisata domestik maupun mancanegara.

Seiring berkembangnya wisata disekitar Kalibiru pada tahun 2016 membuat jumlah wisata yang berkunjung ke Wisata Alam Kalibiru menurun. Beberapa tempat wisata di sekitar Kalibiru menawarkan fasilitas wisata yang hampir sama, tetapi pengelola wisata menyatakan bahwa untuk mencapai target wisata tahun 2018 akan dilakukan pengembangan jasa wisata.

3.3. LOKASI HKm DESA BLEBERAN, PLAYEN, GUNUNGKIDUL

Desa Bleberan merupakan salah satu dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yang berada di sektor barat (lihat Gambar 3.6). Secara keseluruhan, wilayah Desa Bleberan merupakan daerah datar dapat dijumpai di tujuh dusun dan 10 persen tanah berbukit yang terdapat di tiga dusun.

► Gambar 3.6. Lokasi HKm Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul



Sumber: Kementerian LHK (2017)

Jenis tanah pertaniannya beragam yang didominasi oleh tanah margalit (Desa Bleberan, 2016). Setiap musim kemarau lapisan tanah mengalami retak-retak atau lebih dikenal "telo" lebar. Panjang "telo" tersebut besarnya berkorelasi negatif dengan tingkat kelembaban dan kandungan bahan organik yang terdapat di

wilayah desa bagian tengah ke timur seperti Dusun Peron, Tanjung I, Tanjung II, Bleberan, Sawahan, dan Srikoyo. Sedang di wilayah bagian tengah sebelah utara tanahnya berkapur. Untuk wilayah barat seperti Dusun Menggoran I, Menggoran II, dan Ngrancang cenderung bertanah merah.

► Gambar 3.7. Foto Tim Kajian di Desa Bleberan



Sumber: Dokumentasi Tim (2018)

Perekonomian Desa Bleberan sebagian besar ditopang oleh aktivitas pertanian, disusul sektor peternakan dan pariwisata. Dua sisi Desa Bleberan berbatasan langsung dengan wilayah kehutanan telah mendorong terjalinnya kerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul dan Provinsi DIY untuk Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKM). Kelompok HKM di Dusun Menggoran 2, Desa Bleberan adalah “Tani Manunggal”.

Kerjasama yang sifatnya nonformal berupa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat cukup mendongkrak pendapatan masyarakat dalam

mendukung swasembada pangan. Pengelolaan dengan mendukung sektor pertanian antara lain bertujuan meningkatkan komoditas jagung, kedelai, padi, ketela serta holtikultura seperti cabe, kacang panjang, ketimun dan terong.

Semenjak Desa Bleberan diresmikan menjadi desa wisata pada tahun 2010 (Yuwono, 2017). Jumlah kunjungan wisatawan ke kawasan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan pada tahun 2015, jumlah wisatawan mencapai 140.315 pengunjung. Jumlah wisatawan yang selalu naik ini memberikan kontribusi terhadap kehidupan

ekonomi masyarakat di Desa Wisata Bleberan. Kegiatan wisata di Desa Wisata Bleberan memberikan peranan penting terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan tersebut antara lain, membuka kesempatan kerja, mendorong seseorang untuk berwirausaha, menambah pendapatan masyarakat, serta dibangunnya fasilitas infrastruktur yang lebih baik di kawasan Desa Wisata Bleberan.

Desa Bleberan di Playen, Gunungkidul, menjadi salah satu wisata terbaik pilihan Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Hadi, 2017). Salah satu pertimbangan Kemendes PDT memilih Desa Wisata Bleberan, karena di desa ini terdapat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang mampu memanfaatkan teknologi pengelolaan air bersih. Keberadaan BUMDes juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat, dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunungkidul.

3.3.1. Profil Desa Bleberan

Batas wilayah Desa Bleberan meliputi: sebelah utara berbatasan dengan Desa Getas dan Desa Dengok, sebelah barat berbatasan dengan Desa Banyusoco dan wilayah kehutanan, sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Kehutanan RPH Karang Mojo,

dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Dengok dan Desa Plembutan. Secara geografis, letak Desa Bleberan berada pada ketinggian 188,20 m di atas permukaan laut.

Desa Bleberan menjadi salah satu dari 13 desa di wilayah Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul yang berada di sektor barat, dengan jarak dari ibukota Kecamatan Playen adalah 4 km sedangkan jarak dengan ibukota kabupaten adalah 10 km dan jarak dengan ibukota provinsi adalah 40 km. Desa Bleberan 90% merupakan daerah datar dan 10% tanah berbukit yang terdapat di tiga padukuhan (Padukuhan Menggoran I, Menggoran II, dan Ngrancang). Desa ini dikelilingi wilayah kehutanan yang memiliki luasan 1.626 ha yang terdiri dari hutan kayu putih 475 ha dan hutan kayu jati 250 ha (Pemdes Bleberan, 2016). Tidak hanya sektor pertanian dari kehutanan, sektor perikanan pun menggeliat dengan kegiatan sampingan program mina politan di Kecamatan Playen. Produksi perikanan dikelola dengan produksi lele, nila dan gurameh. Budidaya lele dilakukan pada lahan kering dengan sistem terpal.

Jumlah penduduk pada tahun 2016 (Pemdes Bleberan, 2016) sebanyak 5.341 orang dengan bermacam-macam jenis pekerjaan. Pekerjaan yang paling banyak adalah jenis kelompok petani/perkebunan



yang besarnya 2.092 orang pada tahun 2016. Tingkat pendidikan rata-rata lulusan SD sebesar 1.312 orang, bahkan ada kelompok tidak/belum sekolah mencapai 1.185 orang. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, banyak sarana ibadah masjid dan langgar yang terbangun tetapi hanya ada 1 unit gereja di Desa Bleberan.

Sarana kesehatan di Desa Bleberan sudah ada Puskesmas II Playen yang memberikan pelayanan kesehatan, tetapi belum dapat memberikan layanan rawat inap. Rata-rata kesehatan masyarakat cenderung meningkat karena sebagian besar masyarakat sudah memiliki kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Sebagian besar masyarakat Desa Bleberan menggunakan sarana air bersih PAM Desa dan juga sebagian kecil menggunakan sumur. Pengelolaan PAM Desa dikelola dengan BUMDes "SEJAHTERA" dengan pengurus 6 orang, badan pengawas 5 orang dan karyawan 9

orang (Pemdes Bleberan, 2016).

3.3.2. Daya Tarik Wisata di Desa Bleberan

Di desa Bleberan terdapat 2 obyek wisata yang cukup dikenal yaitu Goa Rancang Kencono dan Air Terjun Sri Gethuk. Kedua tujuan wisata tersebut berada di sekitar wilayah HKm. Berikut deskripsi singkat dari kedua obyek wisata tersebut.

1. Goa Rancang Kencono

Goa Rancang Kencono merupakan goa purba yang terletak di Padukuhan Menggoran, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Goa ini dulu digunakan untuk menyusun strategi perang antara laskar Mataram dengan penjajah Belanda pada tahun 1720-an. Bahkan menurut buku mozaik pusaka budaya, tempat ini dulunya juga sebagai tempat pertemuan Pangeran Diponegoro dengan Sentot Prawirodirdjo serta petinggi Kerajaan Mataram pada masa itu (lihat Gambar 3.8).

Kyai Soreng Pati dan Kyai Putut Linggo Bowo gua tersebut diberi nama Goa Rancang Kencono karena tempat tersebut digunakan untuk merencanakan sebuah kegiatan kabajikan/mulia (emas) (Desa Wisata Bleberan, 2015a). Di dalam gua ada sebuah ruangan gelap untuk bersemedi. Untuk masuk ke ruang tersebut melalui lorong sangat sempit hanya bisa dimasuki satu badan dan harus merunduk/jongkok sepanjang sekitar dua meter. Dengan adanya beberapa lokasi wisata yang memiliki nilai sejarah cukup tinggi serta nuansa goa yang alami dan menarik

tersebut pada tanggal 3 Juli 2010 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat mengenalkan Desa Bleberan sebagai Desa Wisata.

2. Pesona Air Terjun Sri Gethuk

Kabupaten Gunung Kidul yang terkenal dengan “kekeringannya” ini ternyata menyimpan sejuta keindahan. Sri Gethuk, air terjun dengan tinggi sekitar 50 meter yang terletak di Dusun Menggoran, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Gunung Kidul, atau sekitar 40 km dari Yogyakarta (lihat Gambar 3.9).

► Gambar 3.9 Air Terjun Sri Gethuk



Sumber: Desa Wisata Bleberan (2015b)

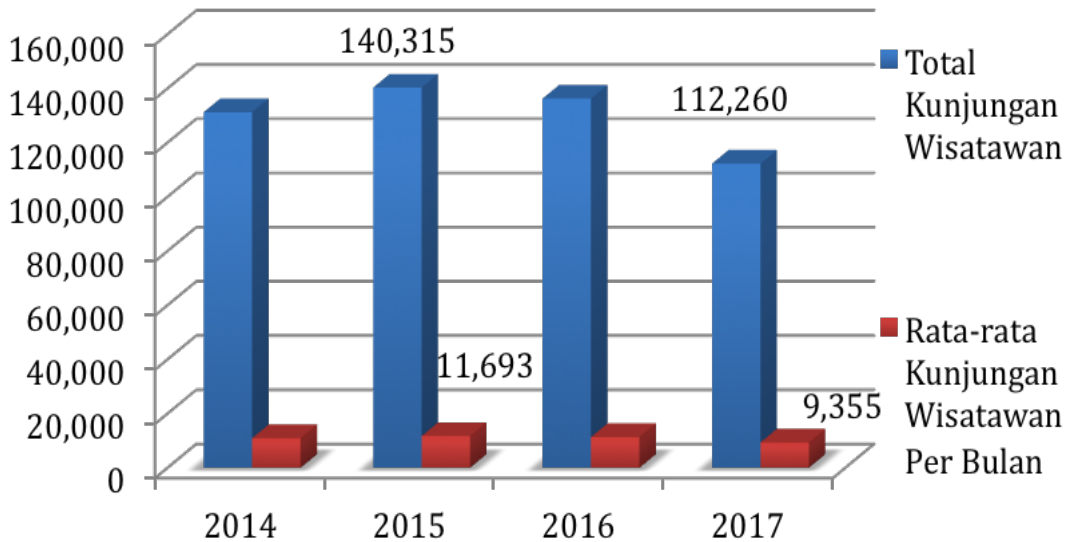
Meski tak setinggi dan terkenal seperti Grojogan Sewu di Tawangmangu, Sri Gethuk menawarkan panorama yang tak kalah indah. Anda bisa mencapai Sri Gethuk dari jalan utama Jogja-Wonosari dengan jarak sekitar 10 km, yang dihiasi dengan jalanan batu putih (yang memacu adrenalin) sepanjang sekitar 3 km yang hanya bisa dilalui oleh maksimal satu kendaraan. Lokasinya yang cukup ekstrim membuat tidak ada angkutan umum yang beroperasi di daerah tersebut. Jalan satu-satunya adalah hanya dengan menggunakan kendaraan pribadi.

Mengingat potensinya yang luar biasa, Sri Gethuk akan dikembangkan sebagai tempat wisata terpadu yang meliputi Goa Rancang Kencana, Air Terjun Sri Gethuk, bumi perkemahan, situs purbakala, dan pemacangan dalam satu area di Dusun Menggoran, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Gunung Kidul. Sri Gethuk juga menyimpan kisah mistis hingga masyarakat setempat menyebutnya *slempret*, yang berasal dari kata *slomporet* (Desa Wisata Bleberan, 2015b). Konon, keberadaan air terjun Sri Gethuk merupakan lokasi pasar jin. Di malam-malam tertentu, masyarakat sering mendengar bunyi-bunyian seperti *slomporet* dari arah air terjun itu. Tapi jika suara itu didekati, suara

tersebut akan menghilang. Makanya masyarakat menyebut Sri Gethuk sebagai air terjun *Slomporet*. Warga percaya, gamelan itu dibunyikan oleh para jin yang suka kesenian dan milik dari Angga Mandura, nama dari raja jin *Slempret*. Sedangkan untuk nama Sri Gethuk diambil dari nama instrumen gamelan yang dipergunakan Jin Angga Mandura yakni *Kethuk*.

Perkembangan total kunjungan wisatawan dan rata-rata kunjungan wisatawan per bulan di Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono (lihat Gambar 3.10). Total kunjungan wisatawan paling tinggi mencapai 140.315 orang wisatawan pada tahun 2015 dengan rata-rata per bulan sebesar 11.693 orang wisatawan.

► Gambar 3.10. Total Kunjungan Wisatawan dan Rata-rata Kunjungan Wisatawan Per Bulan



Sumber: Pengelola Wisata Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono (2018)

Peningkatan wisata ini diminati karena keunggulan wisata air terjun dan goa yang memiliki nilai sejarah purbakala di tanah Jawa. Wisata Air Terjun Sri Gethuk menjadi daya tarik wisata karena pesona alam tebing dan sumber mata air yang mengalir di aliran sungai membuat wisatawan tertarik untuk bermain tubing dan berenang, dan tidak lupa untuk berfoto mengabadikan kenangan di bawah Air Terjun Sri Gethuk. Tebing yang dialiri air merupakan batuan karst yang terbentuk secara alami sehingga lekukan batu membuat keindahan untuk diabadikan dalam foto. Fasilitas yang ditawarkan

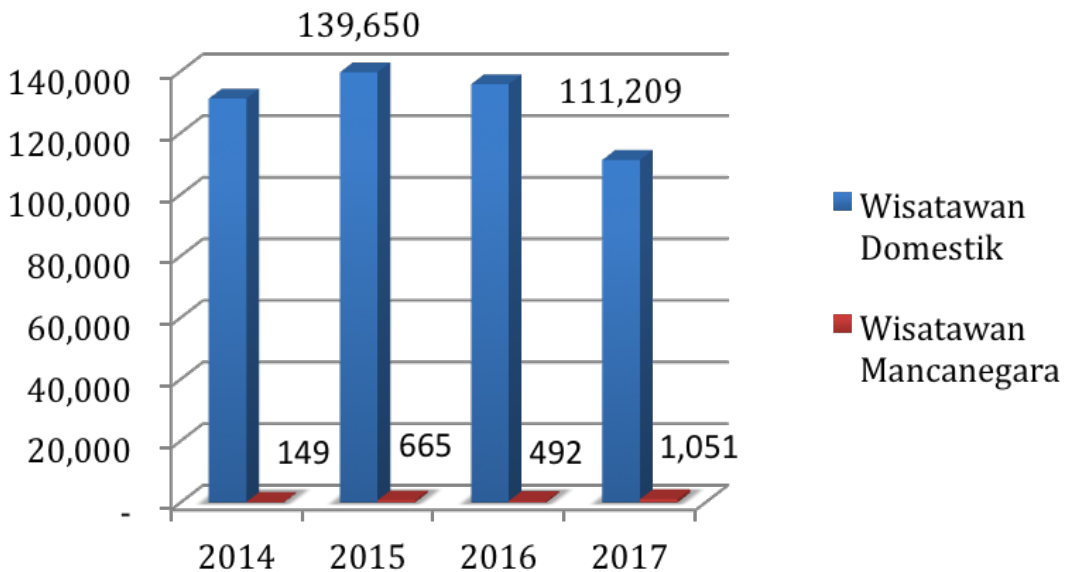
sebagai daya tarik meliputi: paket wisata, *outing/meeting, tracking & body rafting*, paket wisata budaya, *outbond team building*, paket *outbond, education & tour for kid*, paket *tour & training*, dan *homestay*. Tentunya paket wisata ini telah dilengkapi dengan pemandu, asuransi jasa rahaja, susur sungai dengan perahu, dan makan.

Namun, seiring perkembangan wisata yang dikelola maju pesat, Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono terjadi penurunan kunjungan wisatawan pada tahun 2016 dan 2017 (lihat Gambar 3.11) karena adanya bencana banjir pada tahun 2016 membuat peralatan

seperti perahu untuk susur, pelampung, dan perlengkapan wisata yang lain ikut hanyut terbawa

terjangan banjir. Wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara menurun hingga 112.260 orang (lihat Gambar 3.10).

► Gambar 3.11. Kunjungan Wisatawan Domestik dan Wisatawan Mancanegara



Sumber: Pengelola Wisata Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono (2018)

Meskipun demikian, wisatawan mancanegara ada peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 yaitu 492 orang menjadi 1.051 orang. Asal wisatawan beragam negara, seperti

Malaysia, Cina, Taiwan, dan sebagainya. Pengelolaan wisata di Air Terjun dan Goa Rancang Kencono lebih menekankan pada pengembangan wisata alam dan wisata budaya.

BAB 4

GAMBARAN UMUM PERHUTANAN SOSIAL DI LAMPUNG

Dalam bab ini akan dijelaskan gambaran umum perhutanan sosial di Lampung. Subbab pertama mendeskripsikan perhutanan sosial Lampung, khususnya Hutan Kemasyarakatan (HKm). Salah satu HKm terluas di Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus. Oleh karena itu, subbab kedua berisi tentang HKm Tanggamus. Selanjutnya pada subbab ketiga berisi deskripsi lokasi dua HKm yang ada di Tanggamus, yaitu: HKm Beringin Jaya dan HKm Sinar Mulya.

4.1. PERHUTANAN SOSIAL LAMPUNG

Masyarakat di sekitar hutan khususnya Lampung memiliki ketergantungan yang sangat tinggi atas keberadaan hutan. Sebagian besar masyarakat sekitar hutan menjadikan hutan sebagai sumber mata pencarian mereka dengan membuka lahan hutan untuk bercocok tanam. Pembukaan lahan hutan sudah dimulai sejak tahun 1950 dan dibuka kembali oleh masyarakat transmigran pada tahun 1960-1972 yang mengakibatkan

perambahan lahan hutan semakin luas. Oleh karena itu, pada tahun 1983-1994, seluruh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan direlokasi oleh pemerintah. Tanaman kopi beserta cengkeh mereka yang sudah memasuki masa panen disita oleh pemerintah.

Skema perhutanan sosial hadir sebagai resolusi konflik lahan antara pemerintah dan masyarakat sekitar hutan. Perhutanan sosial merupakan program pemerintah yang memberi ruang bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat memasuki kawasan hutan secara *legal* dan mengelola hutan tersebut. Adapun bentuk dari program perhutanan sosial, antara lain: Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Desa (HD) dan Kemitraan.

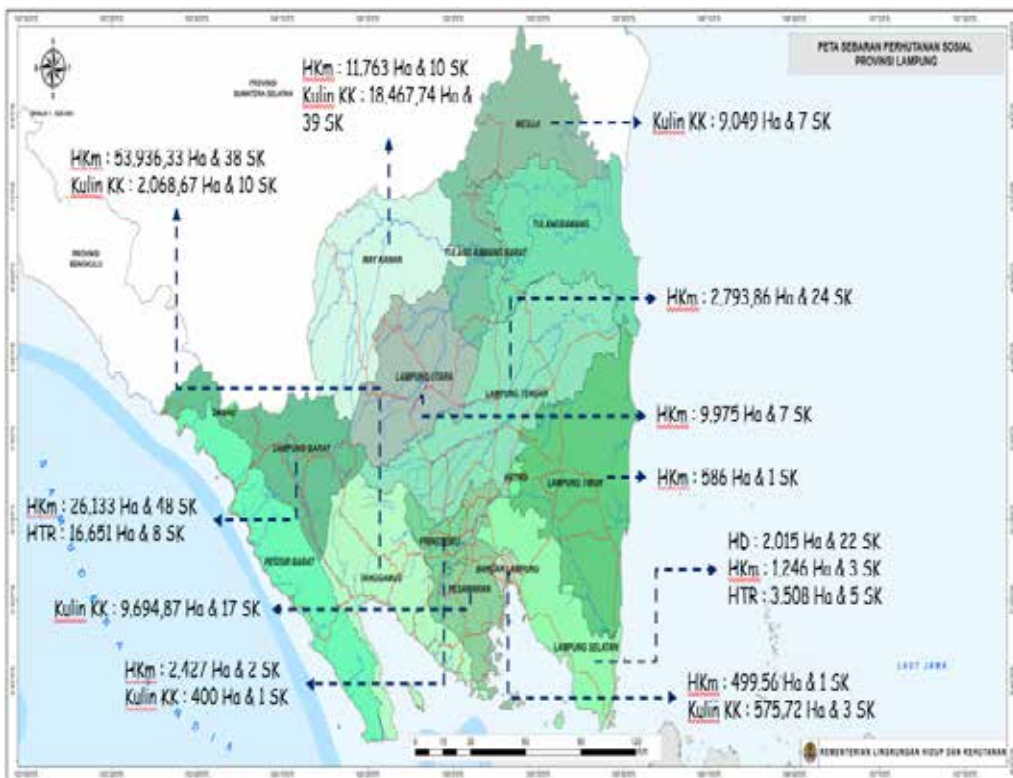
Keempat program dari skema perhutanan sosial tersebut terdapat di Lampung. Lampung memiliki HKm seluas 109.360,7 ha dengan 134 SK yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Ketentuan dari program HKm tersebut diatur dalam P.37/Menhut-II/2007 dan P.88/Menhut-II/2014. Selain HKm, di Lampung juga terdapat

Hutan Desa (HD) seluas 2.015 ha, Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas 20.159 ha, dan Kemitraan Kehutanan seluas 40.256 ha. Program-program tersebut berada dalam wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) sebagai pengelola hutan di tingkat tapak.

Salah satu HKm terluas di Lampung terdapat di Kabupaten Tanggamus

yaikni hampir 58.347,07 ha atau hampir 50% dari luas HKm Lampung dengan 41 Surat Keputusan (SK). Kemudian, diikuti oleh Kabupaten Lampung Barat yang memiliki HKm seluas 26.133 ha dengan 48 SK. Hal yang menarik adalah terdapat HKm di ibukota Provinsi Lampung yaitu di Kota Bandar Lampung. Adapun luas dari HKm tersebut adalah 499,56 ha dengan 1 SK dan merupakan wilayah dengan HKm terkecil di Lampung.

► Gambar 4.1. Peta Perhutanan Sosial di Lampung



Sumber: Kementerian LHK (2017)

4.2. HUTAN KEMASYARAKATAN (HKm) TANGGAMUS

Secara administrasi, luas HKm di Kabupaten Tanggamus mencapai hampir 58.347,07 ha berada dalam Kawasan Hutan Lindung (KHL) (Korut, 2017). HKm tersebut terbagi ke dalam 8 register, yaitu Reg. 21, Reg. 25 Pematang Tanggang, Reg. 26 Serkung Piji, Reg. 27 Pematang Sulah, Reg. 28 Pematang Neba, Register 30 Gunung Tanggamus, Reg. 32 Bukit Rindingan, dan Register 39 Kota Agung Utara. Areal KPHL Kota Agung Utara terbagi lagi menjadi

dua Blok Pengelolaan, yaitu Blok Inti dan Blok Pemanfaatan. Seluruh Blok terbagi kedalam 217 petak yang terdiri atas 55 petak Inti dan 162 petak Pemanfaatan.

Seluruh areal KPHL Kota Agung Utara dibagi menjadi 7 Resort Pengelolaan Hutan (RPH). Pembagian RPH di KPHL Kota Agung Utara didasarkan pada areal Sub DAS dan rentang kendali pengelolaan. Areal Sub DAS yang masih luas dibagi kedalam dua RPH. Distribusi Blok dan Petak pada masing-masing RPH di KPHL Kota Agung Utara disajikan pada Tabel 4.1.

► Tabel 4.1. Distribusi Blok dan Petak pada areal KPHL Kotaagung Utara

No.	RPH	Blok Inti		Blok Pemanfaatan		Petak	Luas (ha)
		Jumlah Petak	Luas (ha)	Jumlah Petak	Luas (ha)		
1.	Kotaagung	15	3.603,57	7	1.619,12	22	5.222,69
2.	Kotaagung Barat	3	697,16	24	6.800,80	27	7.497,96
3.	Way Belu	5	1.632,55	20	5.148,54	22	6.781,09
4.	Wonosobo	12	3.555,70	15	3.962,26	36	7.517,96
5.	Way Semuong	20	4.813,77	38	8.445,06	25	13.258,83
6.	Semaka Hulu	-	-	36	9.635,68	58	9.635,68
7.	Semaka Hilir	-	-	22	6.105,79	27	6.105,79
	Jumlah	55	14.302,744	162	41.717,25	217	56.020,00

Keterangan:

Jumlah petak dan luas RPH Way Semuong jauh lebih besar dibanding yang lain. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar wilayahnya merupakan areal Kontrak Karya PT. Natarang Mining.

Sumber: KPHL Kota Agung Utara (2014)

Berdasarkan administrasi pemerintahan, wilayah HKm yang terbagi atas 8 register tersebut tercakup dalam 56 Pekon/Desa di 16 Kecamatan. Kecamatan tersebut meliputi Kelumbayan Barat, Bulok, Cukuh Balak, Limau, Pugung, Gisting, Kota Agung, Sumberejo dan Pulau Panggung, Air Naningan, Talang Padang, Bandar Negri Semong, Ulu Belu, Wonosobo, Semaka, Kotaagung Barat, dan Pardasuka.

Kabupaten Tanggamus memiliki 41 HKm. HKm tersebut terbagi atas 3 wilayah kelola, yaitu wilayah kelola KPHL Kota Agung Utara, KPHL Batu Tegi dan wilayah kelola KPHL Pematang Neba. KPHL Pematang Neba mengelola 12 HKm, KPHL Batu Tegi mengelola 12 HKm dan KPHL Kota Agung Utara mengelola 12 HKm. Sementara 5 HKm lainnya masuk ke dalam dua wilayah kelola, yaitu KPHL Kota Agung Utara dan KPHL Batu Tegi. HKm tersebut yaitu Patria Panca Marga (Kppm), Tani Harapan Sentosa, Bun Margo Rukun, Karya Tani Mandiri dan HKm Bakti Mandiri. SK HKm beserta Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) di Kabupaten Tanggamus diberikan ke 41 HKm dalam waktu yang berbeda-beda. Ada 4 HKm yang telah memperoleh IUPHKM di tahun 2007. Setelah itu di tahun 2009 ada 9 Hkm, di tahun 2014 ada 18 Hkm dan di tahun 2017 ada 10 HKm. Tabel

4.2 menyajikan nama gapoktan/KTH, kawasan hutan lindung, luas areal, dan jumlah anggota untuk tiap Gapoktan/KTH di Kabupaten Tanggamus.

4.3. LOKASI HKm BERINGIN JAYA DAN HKm SINAR MULYA

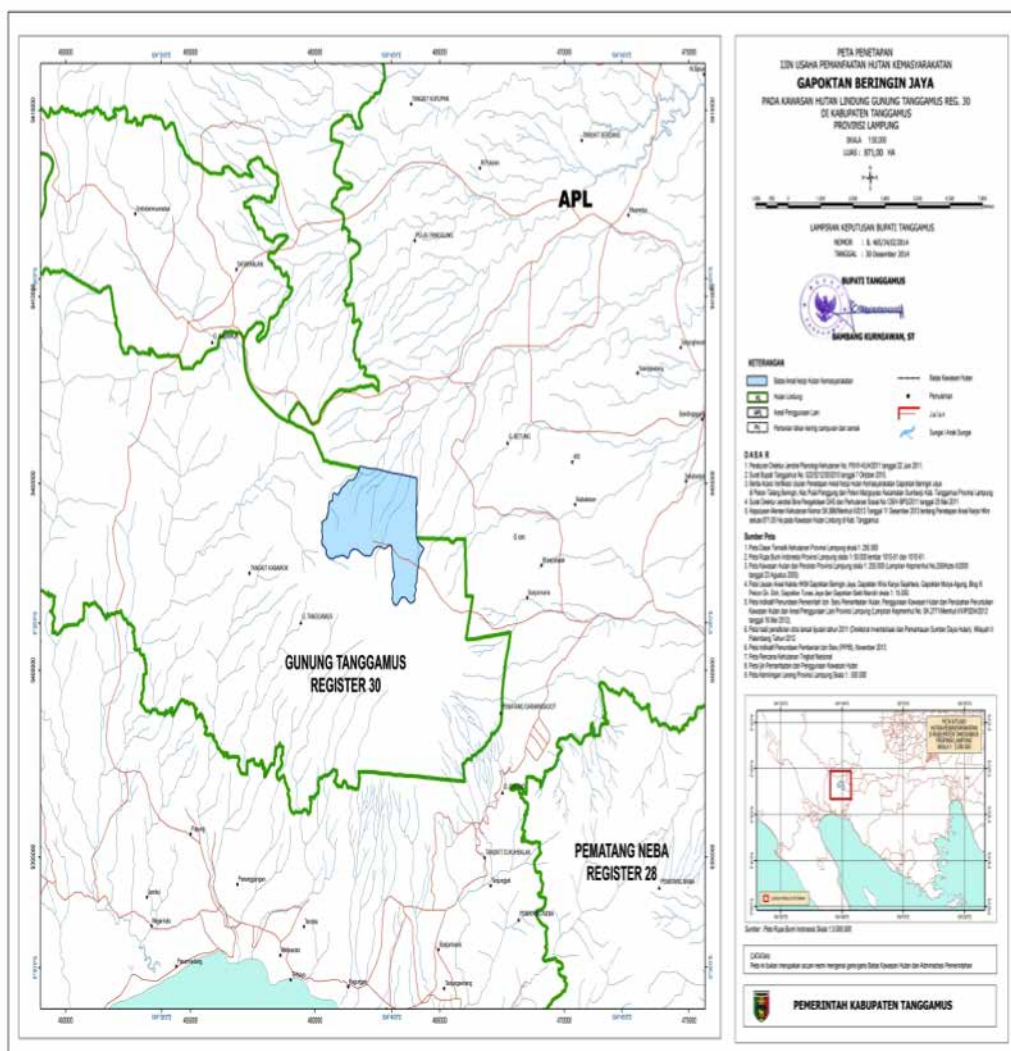
HKm di Lampung yang memperoleh ijin IUPHHKM di tahun 2014, dua di antaranya adalah HKm Beringin Jaya dan HKm Sinar Mulya. HKm Beringin Jaya memperoleh ijin berdasarkan SK Menteri Kehutanan (Menhut) No. 886/Menhut-II/2013 pada 11 Desember 2013 dan SK Bupati No.B.465/34/II/2014 pada 30-12-2014. HKm Beringin Jaya masuk dalam wilayah Pekon/Desa Talang Beringin, Kecamatan Pulau Panggung Reg. 30 dengan luas lahan HKm 871 ha. HKm tersebut terdiri atas 8 kelompok yaitu kelompok Lestari Jaya 1, Lestari Jaya 2, Lestari Jaya 3, Lestari Jaya 4, Lestari Jaya 5, Lestari Jaya 6, Lestari Jaya 7 dan Lestari Jaya 8 dengan jumlah anggota kelompok 446 orang.

Sementara itu, HKm Sinar Mulya memperoleh ijin berdasarkan SK Menhut No.80/Menhut-II/2014 pada 22 Januari 2014 dan SK Bupati No.B.461/34/II/2014 pada 30-12-2014. HKm Sinar Mulya masuk dalam wilayah Pekon/Desa Sukamaju Kec. Ulu Belu Reg. 39 dengan luas lahan 917 ha. HKm tersebut terdiri atas 5 kelompok tani yaitu kelompok

Ndelong Utara, Ndelong Selatan, Ndelong Tengah, Lungur Buntung dan Pondok Rejo dengan jumlah anggota kelompok 263 orang. Letak wilayah kerja Gapoktan Sinar Mulya

dan gapoktan Beringin Jaya yang berada di Register 39 Kota Agung Utara dan Regisiter 30 Gunung Tanggamus dapat dilihat melalui Gambar 4.2 dan 4.3 di bawah ini.

► **Gambar 4.2. Peta Lokasi HKm Beringin Jaya**



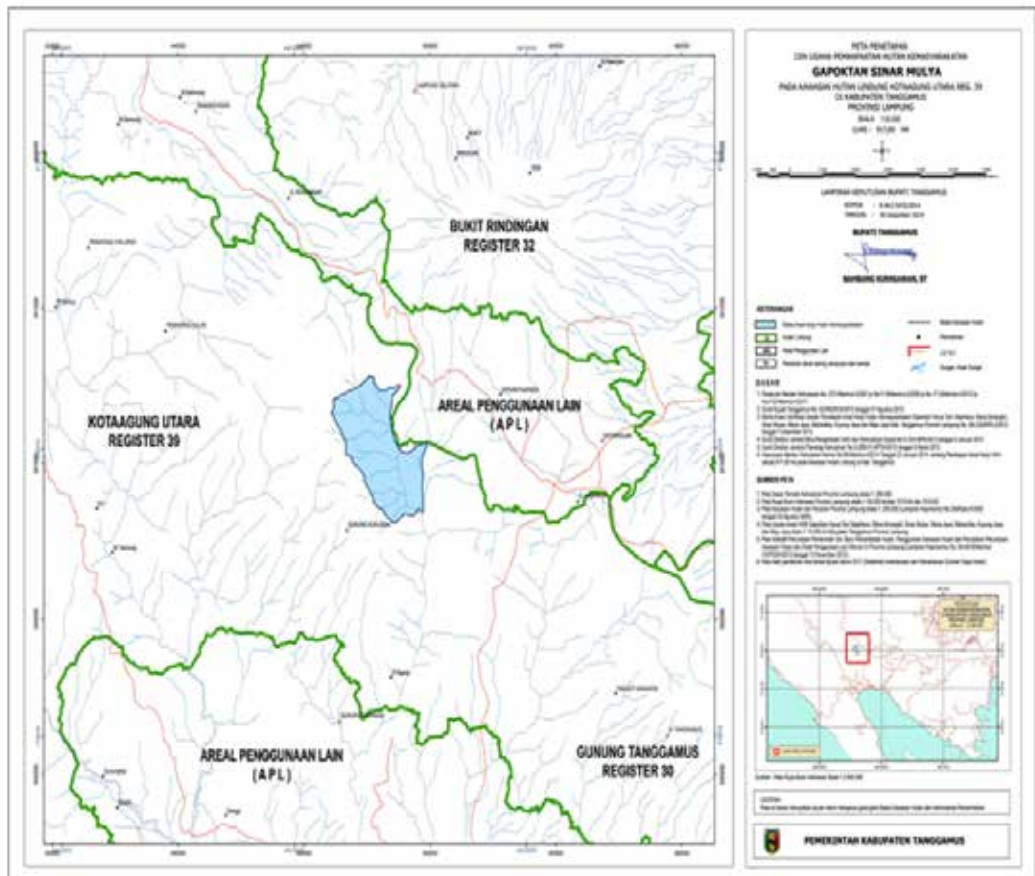
Sumber: KORUT (2014)

► Tabel 4.2. Gapoktan, Kawasan, Luas Areal, dan Jumlah Anggota di HKm Tanggamus

No.	Gapoktan/KTH	Kawasan Hutan Lindung	Luas Areal Kelola (ha)	Jumlah Anggota
1.	Kelumbayan Maju	Reg. 25 Pematang Tanggang	1.910,00	902
2.	Lestari Jaya	Reg. 26 Serkung Piji	655,00	557
3.	Tunas Muda	Reg. 27 Pematang Sulah	673,00	254
4.	Karya Mandiri	Reg. 27 Pematang sulah	414,95	341
5.	Gunung Jaya Lestari	Reg. 27 Pematang sulah	1.166,01	669
6.	Citra Lestari	Reg. 27 Pematang sulah	1.218,76	976
7.	Kuyung Jaya	Reg. 27 Pematang sulah	1.514,00	1.036
8.	Sedia Maju	Reg. 28 Pematang Neba	475,71	251
9.	Maju Jaya	Reg. 28 Pematang Neba	887,00	265
10.	Mandiri Jaya	Reg. 28 Pematang Neba	883,48	644
11.	Wirakarya Sejahtera	Reg. 28 Pematang Neba	4.305,00	904
12.	Karya Tani Sejahtera	Reg. 28 Pematang Neba	3.382,00	991
13.	Bakti Makmur	Reg. 30 Gunung Tanggamus	856,60	565
14.	Beringin Jaya	Reg. 30 Gunung Tanggamus	871,00	851
15.	Sidodadi	Reg. 32 Bukit Rindingan	2.306,00	390
16.	Hijau Makmur	Reg. 32 Bukit Rindingan	1.190,00	434
17.	Sinar Harapan	Reg. 32 Bukit Rindingan	4.834,00	467
18.	Sinar Baru	Reg. 32 Bukit Rindingan	1.244,89	485
19.	Mahardika	Reg. 32 Bukit Rindingan	2.340,00	1.141
20.	Hutan Lestari	Reg. 39 Kotaagung Utara	382,00	171
21.	Sinar Mulya	Reg. 39 Kotaagung Utara	917,00	263
22.	Pala Makmur	Reg. 39 Kotaagung Utara	368,28	303
23.	Bakti Mandiri	Reg. 39 Kotaagung Utara	473,00	421
24.	Tribuana	Reg. 39 Kotaagung Utara	678,37	500
25.	Tunas jaya	Reg. 39 Kotaagung Utara	1.388,00	584
26.	Wana Jaya	Reg. 39 Kotaagung Utara	1.507,00	801
27.	Tulung Agung	Reg. 39 Kotaagung Utara	926,00	844
28.	Mulya Agung	Reg. 39 Kotaagung Utara	1.450,00	961
29.	Wana Binangkit	Reg. 30 Gunung Tanggamus	289,18	217
30.	Koptan Sumber Rezeki	Reg. 30 Gunung Tanggamus	499,56	275
31.	Wana Arba Lestari	Reg. 32 Bukit Rindingan	2.000,00	1.017
32.	Mandiri Lestari	Reg. 39 Kotaagung Utara	1.401,80	181
33.	Koptan Harapan Sentosa	Reg. 39 Kotaagung Utara	300,00	273
34.	Bina Wana Jaya 2	Reg. 39 Kotaagung Utara	1.044,80	281
35.	Bina Wana Jaya 1	Reg. 39 Kotaagung Utara	1.592,40	360
36.	Wana Tani Lestari	Reg. 39 Kotaagung Utara	3.091,00	483
37.	Karya Bakti	Reg. 39 Kotaagung Utara	1.896,40	606
38.	Margo Rukun	Reg. 39 Kotaagung Utara & 32 Bukit Rindingan	1.428,70	282
39.	Koperasi Patria Panca Marga	Reg. 39 Kotaagung Utara & 32 Bukit Rindingan	593,58	304
40.	Karya Tani Mandiri	Reg. 39 Kotaagung Utara & 32 Bukit Rindingan	1.977,60	653
41.	Tunas Mekar	Reg. 21	1.015,00	604
	Total		58.347,07	23.453

Sumber: KORUT (2017)

► Gambar 4.3. Peta Lokasi HKm Sinar Mulya



Sumber: KORUT (2014)

Anggota Gapoktan Beringin Jaya sebagian besar terletak di Pekon Sumberejo, Kabupaten Tanggamus dengan jumlah anggota 571 KK, sedangkan anggota Gapoktan Sinar Mulya sebagian besar berada pada wilayah Pekon Sukamaju Kecamatan Ulu belu. Saat ini Gapoktan Sinar

Mulya memiliki anggota sebanyak 701 KK. Seluruh anggota dari kedua Gapoktan tersebut mayoritas merupakan petani perkebunan yang secara turun menurun telah menanam kopi sebagai tanaman budidaya di lahan HKmnya (lihat Gambar 3.1).



► Gambar 4.4 Lahan HKM di Beringin Jaya

Sumber: Dokumentasi Tim (2018)

SK HKM yang diperoleh HKM Beringin Jaya dan Sinar Mulya melalui proses yang sangat panjang. Hal tersebut sejalan dengan praktik pengelolaan hutan yang telah dilakukan sejak lama oleh petani. Petani hutan dulunya menggarap lahan kelola tanpa ada ijin dari pemerintah sehingga mereka dikatakan *illegal*. Sebelum adanya ijin HKM Kawasan Hutan Lindung Tanggamus dikelola oleh petani dengan cara berkebun dan bertani. Tanaman utama yang mendominasi lahan hutan adalah kopi di HKM Sinar Mulya dan sayur-sayuran

di HKM Beringin Jaya. Setelah ijin IUPHKM terbit mereka mulai memperbaiki pola tanamnya dengan menerapkan sistem agroforestri yang mengkombinasikan jenis tanaman kayu kayuan, *Multi Purpose Tree Species* (MPTS), perkebunan dan tanaman agrikultur. Jenis tanaman kayu-kayuan yang ada antara lain mindri, medang, mahoni, randu, rimau, dadap, cempaka. Sementara jenis tanaman MPTS berupa durian, randu, cengkeh, petai, jengkol, alpukat, nangka, mangga, pinang dan aren. Tanaman perkebunan yang ada berupa tanaman kopi, coklat, lada,

dan pala. Selanjutnya untuk jenis tanaman agrikultur (sayur-sayuran) berupa jahe, cabe, kacang-kacangan

dan lain-lain yang bersifat tanaman sela dengan jumlah relatif kecil.

► **Gambar 4.5. Lahan HKm di Sinar Mulya**



Sumber: Dokumentasi Tim (2018)

Lahan kelola HKm saat ini banyak ditanami tanaman MPTS. Penanaman MPTS dilakukan karena lahan HKm berada di kawasan hutan lindung sehingga masyarakat harus menjaga keberadaan pohon dan tidak boleh menebang pohon. Dengan menanam MPTS, mereka dapat memanfaatkan buah yang dihasilkan oleh pohon

tersebut. Beberapa tanaman MPTS yang ada di lahan HKm bibitnya berasal dari bantuan pemerintah. Pemberian bantuan bibit merupakan upaya pemerintah merehabilitasi lahan di kawasan hutan lindung. Bibit yang diberikan yaitu durian, pala dan alpukat.

Selain mengubah pola tanam dalam mengelola lahan hutan terbitnya Ijin Usaha Pemanfaatan HKm (IUPHKm) juga memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut didukung dengan adanya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompok tani. Dalam AD/ART terdapat hak, kewajiban, larangan dan sanksi yang mengikat anggota kelompok. Beberapa kewajiban bagi anggota tertuang dalam pasal 2 butir 6 dan 7 yaitu “Setiap anggota wajib melaporkan kepada pengurus kelompok apabila ada pencurian, pembakaran dan pengrusakan hutan serta mencegah dan melarang penebangan liar di areal kelompok”. Selain itu, terdapat larangan bagi anggota yang tertuang dalam pasal 5 butir 1, 2, dan 4 yaitu “Dilarang mengambil dan menebang isi hutan seperti kayu yang masih hidup dan satwa yang dilindungi, dilarang memperluas atau membuka lahan yang masih berupa hutan produktif dan mencuri dan menampung hasil curian”.

Aturan tersebut sangat berpengaruh, sehingga tingkat kriminalitas seperti pencurian, pembukaan lahan dan penebangan pohon sangat jarang terjadi, setidaknya menurun, di HKm Beringin Jaya dan HKm Sinar Mulya. Petani HKm saat ini merasa jauh lebih nyaman dan bersemangat dalam

mengelola hutan. Mereka tidak lagi takut dan bersembunyi-sembunyi ke hutan atau lari ketika bertemu dengan polisi hutan (polhut). Beberapa anggota kelompok tani dari Sinar Mulya dan Beringin Jaya direkrut menjadi mitra bagi KPHL dan polhut dalam rangka menjaga keamanan hutan. Adanya mitra KPHL yang merupakan anggota kelompok tani ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang baik dan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemerintah dan masyarakat sekitar hutan.

Kemitraan lainnya yang timbul setelah terbitnya ijin IUPHKm yakni kemitraan kelompok tani dengan perusahaan Nestle, *Tropical Forest Conservation Action* (TFCA), dan Konsorsium Kota Agung Utara (KORUT). Kehadiran ketiga mitra HKm tersebut memberikan dampak yang besar bagi kelompok tani terutama dalam penguatan kelembagaan kelompok tani dan peningkatan kapasitas kelompok tani hutan. Secara implementasi Nestle memberikan pengetahuan kepada petani tentang teknik-teknik terbaik dalam pengelolaan panen dan pasca panen kopi. Sementara TFCA ikut mendorong mendorong petani HKm untuk melakukan perlindungan dan pemeliharaan kawasan konservasi termasuk tumbuhan dan satwa yang ada di dalamnya. Di samping itu

pendampingan juga terus dilakukan oleh KORUT agar tujuan utama dari skema perhutanan sosial yakni hutan lestari masyarakat sejahtera

dapat tercapai. Melalui kemitraan yang terbentuk tersebut kualitas hidup keluarga kelompok tani ikut meningkat.

► Gambar 4.6. Air Terjun Lembah Pelangi



Sumber: Dokumentasi Tim (2018)

Munculnya kemitraan memberikan dampak positif bagi petani yakni meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan. Hal tersebut juga dikarenakan sebagian besar masyarakat sekitar hutan khususnya petani HKm Beringin Jaya dan Sinar Mulya memanfaatkan sumber mata air dari kawasan hutan lindung sebagai sumber utama untuk memenuhi kebutuhan air mereka. Sebagian besar petani di kedua HKm tersebut tidak memiliki sumur, sehingga mereka memiliki komitmen

yang sama untuk menjaga kelestarian hutan. Di samping sumber mata air yang melimpah kawasan hutan lindung Reg. 30 dan Reg. 39 juga memiliki potensi wisata berupa air terjun. Air terjun tersebut yakni air terjun batu lapis yang berada di wilayah kelola HKm Beringin Jaya dan air terjun lembah pelangi yang berada di HKm Sinar Mulya. Namun, objek wisata ini belum terkelola dengan baik oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) dan petani HKm sehingga sangat diperlukan pengarahan dan pendampingan dari berbagai *stakeholder* terkait.

► Gambar 4.7. Tim Penelitian di HKm Sinar Mulya



Sumber: Dokumentasi Tim (2018)

BAB 5

METODOLOGI PENELITIAN

Bab 5 ini menguraikan mengenai prosedur atau cara penelitian yang dijadikan sebagai dasar untuk memperoleh data yang digunakan di dalam penelitian ini. Melalui prosedur penelitian yang benar diharapkan diperoleh data yang benar-benar valid sehingga mampu menjawab perumusan masalah penelitian ini. Oleh karena itu, di dalam bab ini akan diuraikan secara rinci mengenai pendekatan penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, unit analisis dan informan, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan kerangka pemikiran.

5.1. PENDEKATAN PENELITIAN

Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan menekankan bahwa pengembangan kesejahteraan diperuntukkan bagi seluruh rakyat, termasuk penerima hak/ijin dan rakyat di sekitar hutan. Keberhasilan dalam pengelolaan hutan dapat dilihat bagaimana kondisi serta permasalahan sosial maupun ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Oleh karena itu, penelitian ini

mengelaborasi sejauh mana dampak peningkatan kesejahteraan ditinjau dari dimensi ekonomi, sosial terhadap masyarakat di sekitar hutan, serta sejauh mana perhutanan sosial dapat mendukung kelestarian hutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif dan deskriptif analitik. Penggunaan metode ini diharapkan mampu mengelaborasi dan mempermudah proses penggalan informasi selama penelitian berlangsung.

5.2. LOKASI PENELITIAN

Identifikasi dampak ekonomi, sosial dan lingkungan dari perhutanan sosial dilakukan di dua lokasi penelitian, yaitu: di Provinsi Lampung dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dua lokasi penelitian ini dipilih karena sudah ditetapkan sebagai provinsi percontohan perhutanan sosial di Indonesia. Masing-masing provinsi diambil dua lokasi HKM.

Lokasi penelitian untuk Provinsi Lampung dilakukan di Pekon Margoyoso Kecamatan Sumberejo dan Pekon Sukamaju Kecamatan

Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. Sedangkan untuk Provinsi DIY dilakukan di Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo dan di Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Lokasi penelitian di wilayah DIY dan Lampung memiliki HKm seluas masing-masing 0,41% dan 36,3% terhadap total luasan HKm di Indonesia.

5.3. UNIT ANALISIS DAN INFORMAN

Unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok HKm. Unit analisis yang dikaji untuk Provinsi DIY adalah anggota kelompok HKm Mandiri Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulonprogo dan kelompok HKm Tani Manunggal, Dusun Menggoran II, Desa Bleberan Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan unit analisis di Provinsi Lampung adalah anggota Kelompok HKm Beringin Jaya, Pekon Margoyoso, Kecamatan Suberejo dan anggota Kelompok HKm Sinar Mulya, Pekon Sukamaju, Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus.

Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode *cluster sampling* dan *purposive sampling*. *Cluster sampling* disebut juga area

sampling. *Cluster sampling* digunakan ketika elemen dari populasi secara geografis tersebar luas sehingga sulit disusun *sampling frame*. Keuntungan penggunaan teknik ini adalah menjadikan proses *sampling* lebih murah dan cepat daripada jika digunakan teknik *random sampling*. Dalam implementasinya, metode pengambilan sampel dengan *cluster sampling* ini peneliti membagi populasi menjadi beberapa subkelompok berdasarkan kriteria yang sederhana atau tersedia dalam data, peneliti berusaha menjaga heterogenitas dalam satu subkelompok dan homogenitas antar sub kelompok, peneliti memilih jumlah subkelompok secara random (Cooper & Schindler dalam Kuncoro, 2013:136). Dalam konteks ini, hutan HKm yang dipilih sebagai kluster adalah: hutan HKm di Desa Sukamaju dan Desa Margoyoso Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus, Desa Hargowilis Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo serta Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul.

Teknik penentuan responden menggunakan *purposive sampling* (sampel bertujuan). Teknik ini merupakan pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang disyaratkan misalnya terkait sifat, karakteristik, kriteria, dan sebagainya. Responden

dalam penelitian adalah anggota kelompok tani HKm. Jumlah responden untuk masing-masing lokasi HKm adalah 50 orang. Untuk mempertajam analisis, peneliti juga melakukan wawancara ke informan lain yaitu pengurus kelompok tani, kelompok sadar wisata (pokdarwis), Gabungan Kelompok Tani (gapoktan), anggota kelompok tani, unit usaha dari kelompok HKm serta *stakeholder* terkait baik dari pemerintah (bupati, dinas kehutanan, camat, pemerintah desa/pekon, dukuh) dan LSM.

5.4. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan dari keberadaan HKm di Provinsi Lampung dan DIY. Sebagai upaya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai perhutanan sosial maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi tiga aspek, yaitu: dampak ekonomi, sosial serta lingkungan yang mendukung kelestarian hutan.

5.5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

5.5.1. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi. Bentuk observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat langsung di lokasi penelitian yakni aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para petani,

peternak, pokdarwis, gapoktan dan pelaku ekonomi lainnya di HKm. Proses observasi awal dilakukan pada saat pra-survei, kemudian pada saat pelaksanaan penelitian berlangsung.

5.5.2. Dokumentasi

Tahap ini merupakan pengumpulandenganmemanfaatkan data sekunder untuk mendukung hasil riset seperti profil desa di masing-masing lokasi, data BPS masing-masing lokasi, (Kecamatan dalam Angka, Kabupaten Dalam Angka, Statistik Kesejahteraan Sosial), data tutupan lahan, dan sebagainya.

5.5.3. Wawancara (*Indepth interview*)

Wawancara mendalam dalam penelitian dilakukan kepada masing-masing lima puluh petani di masing-masing lokasi HKm. Agar data lebih komprehensif maka wawancara juga ditujukan kepada Bupati, Sekda, kepala desa, camat, dukuh, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yakni Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan sebagainya.

5.5.4. Focused Group Discussion (FGD)

Metode FGD dilakukan dengan mengundang *stakeholders* terkait

(kelompok tani, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan Organisasi Perangkat Daerah terkait). FGD secara khusus juga dilakukan kepada anggota kelompok HKm di masing-masing lokasi penelitian. FGD ini dilakukan untuk memperoleh umpan balik dari hasil survei yang dilakukan pada responden.

5.6. TEKNIK ANALISIS DATA

5.6.1. Validasi Data

Validasi data dilakukan dengan pemilahan data dari hasil catatan di lapangan dan menentukan data mana yang dapat digunakan dan valid. Data yang diperlukan akan dikembangkan dan dipertajam sesuai dengan fokus penelitian.

5.6.2. Penyajian Data

Setelah data divalidasi, tahap berikutnya adalah penyajian data. Data tersebut kemudian diorganisasikan dan disusun pola-pola hubungan yang ada sehingga mudah untuk dipahami. Selain analisis deskriptif analitik, penelitian ini juga menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk menampilkan peta tematik berdasarkan tutupan lahan, kemiskinan, dan lain-lain.

5.6.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya dari penelitian

ini adalah penarikan kesimpulan. Upaya menarik kesimpulan ini dilakukan dengan mendasarkan pada bukti dan data yang valid sehingga kesimpulan yang diperoleh adalah kesimpulan yang benar-benar kredibel.

5.7. KERANGKA PEMIKIRAN

Riset ini berbasis pada tiga aspek yakni dampak sosial, dampak ekonomi dan aspek lingkungan di dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian hutan (lihat Gambar 5.1).

1. Dampak Ekonomi

Untuk mengidentifikasi dampak ekonomi akan dilihat dari indikator-indikator ekonomi sebagai berikut:

- Jumlah produksi dan pendapatan petani.
- Lapangan kerja yang muncul dari keberadaan HKm.
- Penurunan kemiskinan.
- Kemitraan bisnis yang mampu dikembangkan.

► Gambar 5.1. Kerangka Pemikiran



2. Dampak Sosial

Indikator untuk melihat dampak sosial adalah sebagai berikut:

- Persepsi masyarakat.
- Desain kelembagaan.
- Perubahan perilaku.
- Kendala di dalam pengembangan HKm.

3. Dampak Lingkungan

Indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Sustainability kelestarian lingkungan.
- Ancaman (kebakaran hutan,

pencurian satwa, pencurian dan sebagainya).

- Partisipasi masyarakat di dalam mendukung kelestarian lingkungan.

5.8. ANALISIS DESKRIPTIF

Dalam studi ini digunakan analisis deskriptif yang meliputi metode kasus dan metode statistik.

5.8.1. Metode Kasus

Metode kasus lebih sering digunakan untuk menemukan ide-ide baru mengenai hubungan antarvariabel, yang kemudian diuji

lebih mendalam dalam penelitian eksploratif. Perbedaan metode kasus dalam studi eksploratif dan studi deskriptif terletak pada hasil akhirnya. Bila pengujian lebih lanjut diperlukan, maka penelitian tersebut bersifat eksploratif.

Dalam studi ini akan digunakan baik studi deskriptif maupun eksploratif. Studi deskriptif mendeskripsikan responden di 4 lokasi Hkm di Kabupaten Tanggamus, Gunungkidul, dan Kulon Progo. Studi eksplorasi akan didasari pada beberapa aspek kajian dampak; dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak lingkungan. Dampak ekonomi akan menitikberatkan penilaian pada aspek produksi, pendapatan, tenaga kerja, biaya produksi, kemitraan, serta informasi lain yang terkait dengan dampak ekonomi. Dampak sosial menitikberatkan pada persepsi masyarakat, desain kelembagaan, perubahan perilaku, serta kendala yang mungkin ada dalam pengelolaan HKM. Dampak Lingkungan menitikberatkan pada sustainabilitas, ancaman (kebakaran, pencurian, gangguan satwa, dan ancaman perburuan satwa).

5.8.2. Metode Statistik

Metode statistik digunakan untuk menelusuri profil responden di Kabupaten Gunungkidul, Kulon

Progo dan Tanggamus. Profil responden akan diidentifikasi dengan mencermati: nama/kode responden, jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, alamat, pekerjaan pokok, luas lahan, nama kelompok tani-hutan, jumlah anggota kelompok, tahun SK HKM diterima, total luas lahan HKM, dan jarak tempat tinggal responden dari hutan kemasyarakatan.

Metode statistik juga digunakan dalam mengeksplorasi dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, pembahasan akan dilengkapi dengan grafik dan visualisasi peta untuk penyajian laporan yang lebih informatif.

5.9. ANALISIS CROSS TABULATION (TABULASI SILANG)

Analisis crosstabs yang digunakan adalah analisis statistik yaitu *Chi-Square*. Metode analisis ini digunakan untuk menguji korelasi antara variabel dalam tabel kontigensi sehingga diketahui apakah proporsi dari dua perubahan terjadi karena kebutuhan atau karena adanya asosiasi. Tabulasi silang digunakan untuk mentabulasikan beberapa variabel yang berbeda ke dalam suatu matriks. Variabel yang ditabulasi silang adalah:

1. Variabel bentuk pendampingan dan hambatan dalam pengelolaan HKM.

2. Variabel peran kelembagaan dalam mendorong pemberdayaan masyarakat dan hambatan dalam pengelolaan HKm
3. Variabel keberadaan pendampingan dan hambatan dalam pengelolaan HKm

5.10. ANALISIS REGRESI LOGISTIK

Model regresi logistik dirancang untuk untuk melakukan prediksi keanggotaan grup. Dengan kata lain, tujuan analisis adalah seberapa jauh model yang digunakan mampu memprediksi secara benar kategori (grup) dari sejumlah individu? Dapatkah grup atau hasil diprediksi dengan menggunakan sejumlah variabel prediktor?

- Kelebihan metode regresi logistik adalah lebih fleksibel dibanding teknik lain, yaitu:
- Regresi logistik tidak memiliki asumsi normalitas atas variabel prediktor yang digunakan dalam model. Artinya, variabel prediktor tidak harus memiliki distribusi normal, linear, maupun memiliki varians yang sama dalam setiap grup. Ini berbeda dengan analisis diskriminan yang mengharuskan semua variabel prediktor berdistribusi normal.
- Variabel prediktor dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinu, diskrit, dan

dikotomis.

- Regresi logistik amat bermanfaat digunakan apabila distribusi respon atas variabel prediktor diharapkan nonlinear dengan satu atau lebih variabel prediktor.

Regresi logistik memiliki cakupan yang lebih luas daripada model logit. Model logit dengan dua pilihan sering disebut sebagai *binary logistic regression*. Misalnya, peneliti mau menganalisis apa faktor-faktor yang dapat memprediksi: perilaku konsumen perempuan dan laki-laki, perbedaan Katimin (Kawasan Timur Indonesia) dengan Kabarin (Kawasan barat Indonesia). Sedangkan model logistik dengan lebih dua pilihan disebut *multinomial logistic regression*. Lebih dari dua pilihan, bisa, tiga, empat, lima pilihan tergantung tujuan penelitian. Sebagai contoh, peneliti mau menganalisis apa faktor-faktor yang dapat memprediksi: persepsi masyarakat tentang Presiden SBY-Boediono apakah sangat puas, puas, moderat, tidak puas, sangat tidak puas.

Karena model yang dihasilkan dengan regresi logistik bersifat nonlinear, persamaan yang digunakan untuk mendeskripsikan hasil sedikit lebih kompleks dibanding regresi berganda. Variabel grup, Y, adalah probabilitas mendapatkan 2 hasil atau lebih

berdasarkan fungsi nonlinear dari kombinasi linear sejumlah variabel bebas (*predictors*).

Persamaan umum untuk regresi logistik dengan dua pilihan hasil dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_i = \frac{e^u}{1 + e^u} \quad 5.1$$

di mana Y_i adalah probabilitas yang diestimasi dengan kasus sebanyak i ($i=1, \dots, n$) dan u adalah persamaan regresi biasa:

$$u = A + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_kX_k \quad 5.2$$

dengan konstanta A , koefisien b_j , dan variabel bebas X_j dengan jumlah k ($j=1, 2, \dots, k$).

Dalam subbab ini analisis regresi digunakan untuk memprediksi faktor-faktor penentu klasifikasi pendapatan responden. Adapun fungsi pendapatan adalah sebagai berikut:

Adapun model yang digunakan adalah *Binary Logistic Regression* sebagai berikut:

$$\text{PG_PENDAPATAN} = f(\text{LAMA_SK, LUAS_LAHAN, TK, B_TRANSPORTASI, B_INPUT, KEMITRAAN, P_HKM, KENDALA, KEBAKARAN, PENCURIAN, PENDAMPINGAN, TANAM POKOK, PARTISIPASI_RENCANA, PARTISIPASI_PELAKSANAAN, PARTISIPASI_MONEV}) \quad 5.3$$

Persamaan 5.3 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apakah kategori pendapatan responden (PG_PENDAPATAN) dapat dijelaskan oleh variabel (LAMA_SK, LUAS_LAHAN, TK, B_TRANSPORTASI, KEMITRAAN, P_HKM, KENDALA, KEBAKARAN, PENCURIAN, PENDAMPINGAN, TANAM POKOK, PARTISIPASI_Rencana, PARTISIPASI_Pelaksanaan, PARTISIPASI_Monev) tersebut? Adapun variabel penjelas tersebut adalah:

LAMA_SK	= Lama tahun diterima SK
LUAS_LAHAN	= Luas Lahan HKm yang dikelola masing-masyarakat
TK	= Jumlah tenaga kerja termasuk buruh dan pemilik lahan
B_TRANSPORTASI	= Biaya transportasi yang dikeluarkan
B_INPUT	= Biaya input yang dikeluarkan untuk mengelola lahan HKm

KEMITRAAN	= Jenis kemitraan yang dilakukan
P_HKM	= Dummy variabel (1= masyarakat tahu tentang HKm, 0= tidak tahu)
KENDALA	= Dummy variabel (0= tidak tahu, 1=akses pasar, 2=akses modal, 3=akses bahan baku, 4=peralatan masih tradisonal, 5=kombinasi, 6=lainnya)
KEBAKARAN	= Dummy variabel (1= tidak pernah kebakaran, 0= pernah kebakaran)
PENCURIAN	= Dummy variabel (0= tidak ada pencurian, 1= ada pencurian)
PENDAMPINGAN	= Dummy variabel (0= tidak ada pendampingan, 1= ada pendampingan)
TANAM POKOK	= Dummy variabel (1=kopi, 2=jati, 3=lainnya (tanaman kehutanan)
PARTISIPASI_Rencana	= Dummy variabel partisipasi rencana masyarakat mendukung kelestarian lingkungan (3= tinggi, 2=sedang, 1=rendah)
PARTISIPASI_Pelaksanaan	= Dummy variabel partisipasi pelaksanaan masyarakat mendukung kelestarian lingkungan (3= tinggi, 2=sedang, 1=rendah).
PARTISIPASI_Monev	= Dummy variabel partisipasi monev masyarakat mendukung kelestarian lingkungan (3= tinggi, 2=sedang, 1=rendah).

BAB 6

ANALISIS DAMPAK EKONOMI PERHUTANAN SOSIAL

Bab 6 ini menguraikan mengenai hasil dari analisis dampak ekonomi perhutanan sosial yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Provinsi Lampung. Pembahasan dampak ekonomi meliputi: (1) peningkatan produksi setelah menerima Surat Keputusan (SK) Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm), (2) ada atau tidak peningkatan pendapatan sebelum dan setelah memiliki surat keputusan, (3) perubahan pendapatan terutama yang berasal dari tanaman pokok atau sampingan/ternak/wisata, (4) ada atau tidak peningkatan lapangan kerja yang terjadi sebelum dan setelah memiliki SK, (5) tingkat kemiskinan dari rumah, mobil dan motor yang dimiliki, (6) kemitraan bisnis yang terjalin antar lembaga dengan pemilik Hutan Kemasyarakatan (HKm), (7) kendala utama yang dihadapi selama mengelola HKm, dan (8) faktor-faktor penentu pendapatan anggota HKm.

6.1. PRODUKSI

Pemberian HKm kepada petani, artinya memberikan kepastian hak pengelolaan hutan bagi petani,

terutama dalam hak pengelolaan luasan lahan yang selama ini telah mereka garap (persil). Kepastian hak pengelolaan ini secara ekonomi memberikan nilai tambah bagi aset mereka terutama aset tanah dan aset batang pohon perkebunan. Adanya kepastian kepemilikan aset ini diharapkan dapat meningkatkan semangat berproduksi tanpa merasa khawatir bahwa apa yang petani lakukan melanggar hukum.

Gambar 6.1 memperlihatkan bahwa adanya HKm ternyata berdampak terhadap peningkatan produksi. Sebanyak 56,5 persen responden menyatakan bahwa produksi tanaman mereka semakin meningkat setelah mereka menerima Ijin Usaha Pengelolaan HKm (IUPHKm). Peningkatan ini terjadi dikarenakan mereka lebih bersemangat untuk menggarap ladang HKm mereka. Dengan kata lain, yang dahulu kebun dan ladang merupakan sumber pendapatan sampingan dengan adanya HKm kebun dan ladang mereka menjadi sumber pendapatan utama.

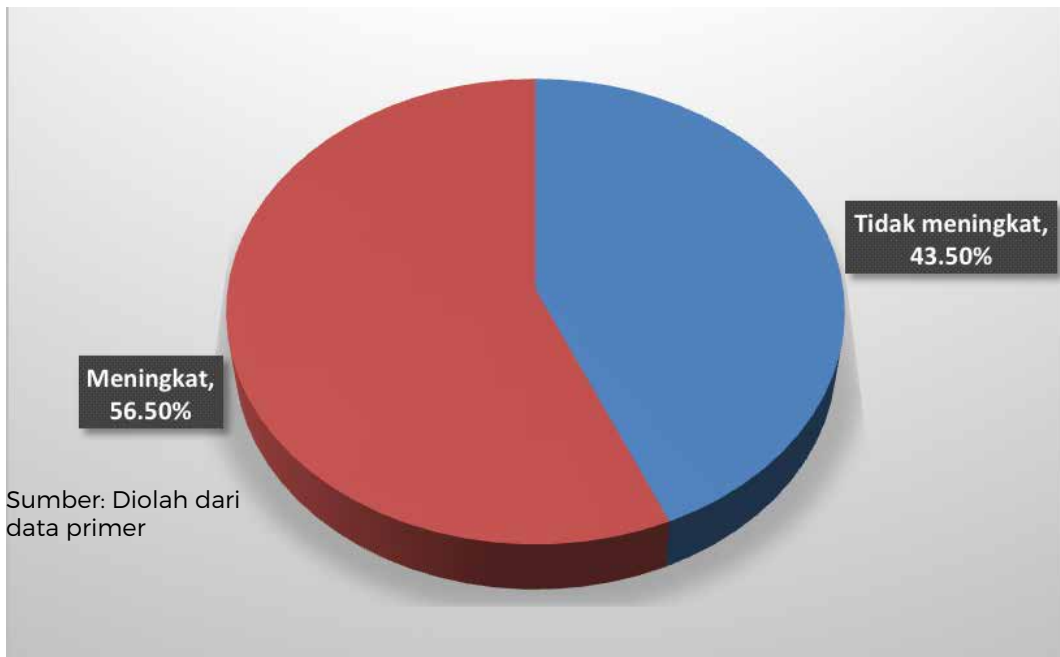
Sebagian besar petani yang

mengalami peningkatan produksi adalah petani di HKm Kabupaten Tanggamus. Seluruh responden petani di HKm Tanggamus adalah petani kopi yang juga memiliki tanaman sampingan lain seperti lada, pisang, cengkeh, serta tanaman sayuran. Tanaman tersebut memiliki masa panen baik tahunan, triwulanan, bulanan ataupun harian. Dengan demikian, petani dapat menghitung dan memperkirakan jumlah produksi yang mereka hasilkan pada setiap waktu panen.

Berbeda halnya dengan petani di HKm di wilayah DIY, khususnya kelompok petani HKm Tani Manunggal di Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul dan kelompok tani HKm Mandiri

Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kokap, Kulon Progo. Kelompok HKm Tani Manunggal memiliki tanaman utama berupa pohon Jati (hutan lindung) yang tidak dapat dipanen secara tahunan. Akibatnya, nilai produksi dari hasil hutan belum diketahui walaupun secara langsung dapat dilihat semakin membesarnya batang pohon jati. Demikian pula kelompok Tani HKm Mandiri yang kawasan hutan yang dikelolanya merupakan hutan lindung, yang sebagian besar terdiri dari tanaman jati, akasia, sonokeling, dan mahoni. Jumlah tanaman yang paling banyak adalah pohon jati. Di kedua wilayah tersebut dapat dikatakan tidak menikmati peningkatan produksi karena termasuk kawasan hutan lindung.

► Gambar 6.1. Peningkatan Produksi Setelah Mendapat SK HKm



6.2. DAMPAK PENDAPATAN

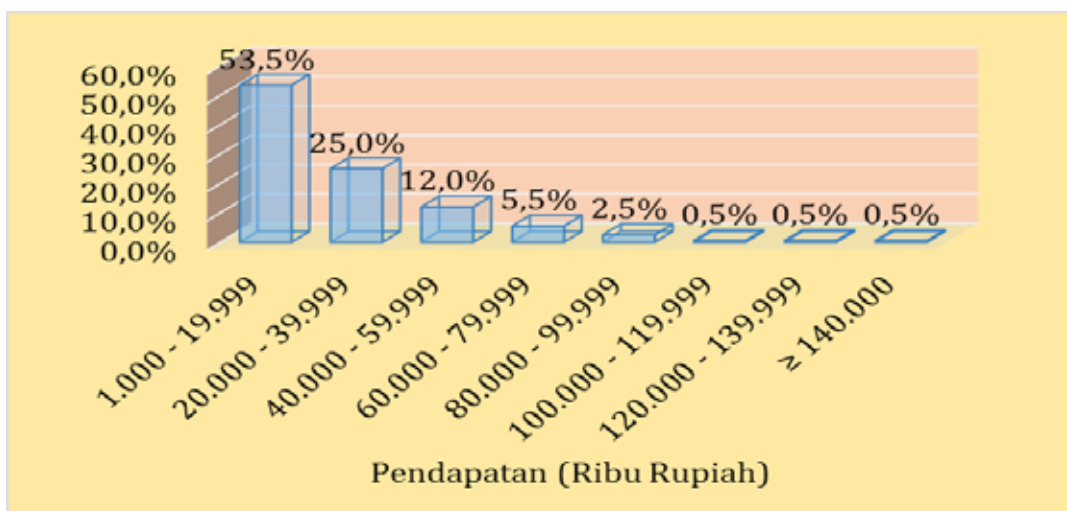
Peningkatan dalam produksi petani akan berdampak terhadap pendapatan yang diterima. Tentu saja ini tergantung kepada fluktuasi harga komoditas yang diproduksi dan dijual kepasar. Peningkatan produksi petani HKm ternyata memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pendapatan petani.

Berdasarkan Gambar 6.2 dapat dilihat bahwa pendapatan yang diperoleh petani dari hasil produksinya tersebut sangat bervariasi. Pendapatan petani sebagian besar berada pada interval Rp1-20 juta per tahun yaitu sebesar 53,5 persen, kemudian 25 persen berada pada interval pendapatan Rp20-40 juta per tahun, serta 5,5 persen berada pada interval pendapatan Rp 60-70 juta.

Sedangkan pendapatan yang antara Rp80 juta sampai dengan Rp140 juta per tahun hanya sebanyak 4 persen saja. Secara rata-rata pendapatan petani HKm adalah sebesar Rp28,3 juta selama satu tahun atau Rp 2,36 juta per bulan.

Berdasarkan data BPS Tanggamus, pengeluaran penduduk per kapita di Kabupaten Tanggamus per bulan adalah sebesar Rp0,714 juta, atau Rp8,572 juta per tahun (BPS Tanggamus, 2017). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa jika rata-rata petani memiliki 4 orang anggota keluarga, maka rata-rata pengeluaran per kapita per tahun adalah sebesar Rp34,288 juta. Artinya sebagian besar pendapatan petani di HKm sebagian besar belum cukup untuk memenuhi pengeluaran kebutuhan rumah tangga selama satu tahun.

► Gambar 6.2. Interval Total Pendapatan per Tahun



Keterangan: (*) Rata-rata Total Pendapatan Rp28.340.724,00
Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan Tabel 6.1 terlihat bahwa terdapat perbedaan pendapatan antara pemilik HKm di Kabupaten Tanggamus (HKm Sinar Mulya dan HKm Beringin Jaya) dan HKm di wilayah DIY (HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal). Petani di Kabupaten Tanggamus relatif mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Petani di wilayah DIY (HKm Tani Manunggal, Kabupaten Gunung Kidul dan HKM Mandiri, Kabupaten Kulon Progo).

Dari 54 persen petani yang memiliki pendapatan di interval Rp1-19,9 juta, ternyata 47 persen adalah petani di HKm di wilayah DIY, sedangkan sisanya 7 persen berada di wilayah HKm di Kabupaten Tanggamus.

Selanjutnya untuk 25 persen petani yang memiliki pendapatan dengan lebih interval Rp20–39,9 juta hanya 2,5 persen yang berasal dari petani HKm Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul (DIY), sedangkan 22 persen berasal dari petani HKm Kabupaten Tanggamus. Untuk pendapatan dengan interval yang lebih tinggi, atau petani yang berpendapatan Rp40 juta sampai dengan Rp140 juta, hanya 0,5 persen saja yang berasal dari HKm di wilayah DIY, dan 21,5 persen adalah petani dari HKm Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan Tabel 6.1 menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh petani di HKm di wilayah DIY lebih rendah dibandingkan petani HKm di Kabupaten Tanggamus.

► **Tabel 6.1.** *Crosstabulation* antara Total Pendapatan dan Alamat HKm

Kelas	Interval Pendapatan (Ribuan rupiah)	HKm				Total
		Mandiri (%)	Tani Manunggal (%)	Sinar Mulya (%)	Beringin Jaya (%)	
1.	1.000 - 19.999	24,5	22,5	3	4	54,0
2.	20.000 - 39.999	0,5	2	5	17	24,5
3.	40.000 - 59.999	0	0,5	8	3,5	12,0
4.	60.000 - 79.999	0	0	5	0,5	5,5
5.	80.000 - 99.999	0	0	2,5	0	2,5
6.	100.000 - 119.999	0	0	0,5	0	0,5
7.	120.000 - 139.999	0	0	0,5	0	0,5
8.	≥ 140.000	0	0	0,5	0	0,5
Total		25	25	25	25	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

Sumber pendapatan petani responden (anggota kelompok HKM) berasal dari 3 sumber pendapatan dari usaha tani, yaitu yang berasal dari tanaman utama, tanaman sampingan, dan budidaya ternak. Tabel 6.2 menggambarkan interval proporsi pendapatan responden yang berasal dari tanaman utama, tanaman sampingan dan juga ternak terhadap total pendapatannya.

Untuk proporsi tanaman utama, rata-rata proporsi pendapatan dari tanaman utama sebesar

0,473 persen. Terdapat 52 persen petani yang memiliki proporsi dari pendapatan utamanya yang berada lebih dari 50 persen. Sebanyak 48 persen petani memiliki proporsi di bawah 50 persen pendapatannya bersumber dari tanaman utama. Untuk tanaman sampingan rata-rata proporsi pendapatannya adalah 0,36,4 persen. Proporsi pendapatan dari tanaman utama cenderung lebih kecil, terdapat 67 persen petani yang memiliki proporsi pendapatan yang sangat kecil atau dibawah 50 persen.

► **Tabel 6.2. Interval Proporsi Pendapatan Responden dari Tanaman Utama, Tanaman Sampingan, dan Ternak Terhadap Total Pendapatan Responden**

Kelas	Interval Proporsi Pendapatan	Utama		Sampingan		Ternak	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	0,0 – 9,99	79	39,5	79	39,5	138	69,0
2	10,0 – 19,9	4	2,0	29	14,5	13	6,5
3	20,0 – 19,9	4	2,0	9	4,5	11	5,5
4	30,0 – 39,9	5	2,5	11	5,5	9	4,5
5	40,0 – 40,9	4	2,0	6	3,0	3	1,5
6	50,0 – 59,9	4	2,0	5	2,5	3	1,5
7	60,0 – 69,0	9	4,5	11	5,5	5	2,5
8	70,0 – 79,0	16	8,0	9	4,5	1	0,5
9	80,0 – 89,0	33	16,5	5	2,5	7	3,5
10	90,0 - 100	42	21,0	36	18,0	10	5
		200	100,0	200		200	

Keterangan:

1) Rata-rata Proporsi Pendapatan Tanaman Utama : 47,3 persen

2) Rata-rata Proporsi Pendapatan Tanaman Sampingan : 36,4 persen

3) Rata-rata Proporsi Pendapatan Ternak : 36, 4 persen

Sumber: Diolah dari data primer

Selanjutnya terdapat 33 persen petani yang penghasilan utama dari tanaman sampingan cukup besar atau proporsinya lebih dari 50 persen (lihat Tabel 6.2). Demikian pula untuk proporsi pendapatan petani yang berasal dari usaha ternak, rata-rata proporsinya 36,4 persen. Proporsi pendapatan petani dari ternak cenderung lebih kecil, terdapat 87 persen petani yang memiliki proporsi hanya di bawah 50 persen, dan hanya sebagian kecil atau 13 persen memiliki proporsi yang melebihi 50 persen.

Keragaman dalam proporsi pendapatan ini sangat dipengaruhi oleh jenis tanaman utama yang dihasilkan oleh petani, di HKm Kabupaten Tanggamus, tanaman utama yang ditanam sebagian besar adalah pohon kopi sehingga dampaknya mereka lebih mengandalkan tanaman utama sebagai sumber pendapatannya. Sebaliknya petani HKm di wilayah DIY berbeda, tidak dapat mengandalkan pohon jati dan pohon lainnya di hutan sebagai sumber pendapatan utama dikarenakan hutan yang mereka kelola termasuk kawasan hutan lindung. Petani HKm di wilayah DIY mengandalkan tanaman sampingan, ternak, dan pengelolaan kawasan hutan untuk wisata sebagai sumber pendapatan mereka.

Kelompok HKm Mandiri terlibat dalam pengelolaan Desa

Wisata Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo. Berdasarkan wawancara mendalam dan focus group discussion (FGD) diperoleh kesimpulan bahwa kegiatan desa wisata tersebut berdampak positif terhadap perekonomian, khususnya pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Dari kegiatan wisata tersebut pendapatan pengelola desa wisata diperoleh dari tiket masuk ke lokasi wisata, sewa penginapan (homestay dan pondok wisata), gardu pandang, paket wisata (joglo pertemuan, outbond, flying fox, jalur tracking, dan gardu foto). Masyarakat, khususnya anggota kelompok HKm Mandiri yang terlibat dalam kegiatan desa wisata pendapatannya juga meningkat, misalnya yang terlibat sebagai tenaga kerja pengelola kawasan desa wisata dan pengelola warung makanan.

Seluruh pengelola warung makanan di desa wisata Kalibiru menerapkan harga yang sama. Dari jumlah warung sebanyak 38 unit, 20 unit berada di dalam kawasan wisata dan 18 unit berada di luar kawasan wisata. Harga diatur oleh pengelola desa wisata. Margin keuntungan rata-rata sekitar 10 persen. Pendapatan kotor untuk hari biasa sekitar Rp10.000,00 per hari, sedangkan pada hari libur atau hari minggu dapat mencapai Rp800.000,00 per hari.

Di kawasan desa wisata Kalibiru terdapat 6 penginapan yang disediakan dengan tarif Rp300.000,00 per hari. Penginapan tersebut dikelola oleh kelompok masyarakat yang mengelola kawasan wisata tersebut. Dengan demikian ketentuan tarif dan standar pelayanan sudah ditentukan oleh pengelola. Mulai bulan April 2018, tiket masuk kawasan desa wisata Kalibiru untuk wisatawan lokal Rp10.000,00 per orang sedangkan untuk wisatawan mancanegara sebesar Rp20.000,00 per orang.

Efek pengganda dari kegiatan desa Wisata Kalibiru tidak hanya diperoleh anggota kelompok HKM Mandiri, Kalibiru dan masyarakat Desa Hargowilis, namun juga diterima warga di sekitarnya. Masyarakat desa tetangga menjalankan usaha sewa angkutan jeep dengan rute Waduk Sermo– Kalibiru PP, Clereng–Kalibiru

PP, dan Girinyono–Kalibiru PP. Sewa angkutan rata-rata sebesar Rp350 ribu PP. Untuk hari biasa, bukan hari libur dan minggu, biasanya transaksi sewa jeep sebanyak 1 kali per hari. Pada hari libur atau hari Minggu, transaksi sewa jeep yang terjadi mencapai 2-3 kali per hari.

Jumlah wisatawan yang datang ke kawasan desa wisata Kalibiru dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 selalu meningkat (lihat Tabel 6.3). Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 87.572 pengunjung (19,76 persen). Penurunan tersebut terkait di wilayah juga sudah mulai dikembangkan kawasan wisata sejenis di sekitar Kalibiru. Dugaan lain, pada umumnya wisatawan/pengunjung hanya datang sekali dan jarang yang datang untuk ke-2 atau ke-3 kali (kunjungan berulang).

► **Tabel 6.3 Jumlah Wisatawan/Pengunjung Desa Wisata Kalibiru**

Tahun	Jumlah Wisatawan / Pengunjung
2010	7.167
2011	13.033
2012	19.012
2013	19.762
2014	79.137
2015	309.541
2016	443.070
2017	355.498
Jumlah	1.246.220

Sumber: Diolah dari data primer

Selanjutnya untuk anggota kelompok HKm Tani Manunggal, Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul memperoleh pendapatan dari tanaman sampingan dan hasil ternak. Di samping itu, sebagian anggota HKm Tani Manunggal terlibat dalam kegiatan desa wisata Bleberan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sejahtera”. Terdapat 3 jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes yaitu unit pengelolaan desa wisata (Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk), unit pemanfaatan dan pengelolaan sumber mata air, dan unit usaha simpan pinjam.

Kegiatan usaha yang terkait dengan pengelolaan desa wisata Bleberan antara lain sewa penginapan (homestay), baik untuk keluarga dan rombongan, warung makanan dan sebagainya. Pengelola desa wisata menerapkan paket wisata, dalam paket tersebut mencakup masuk obyek wisata, penginapan, makan-minum tradisional, nonton atraksi seni budaya, belajar musik gamelan dan sebagainya.

Tarif paket wisata sebesar Rp390.000,00 per paket minimal 20 paket. Di samping itu, pengelola juga wisata menawarkan paket outbond (Rp50.000,00 per orang) dan paket rafting (Rp50.000,00 per orang). Setia pengunjung juga ditarik retribusi Rp10.000,00 per orang.

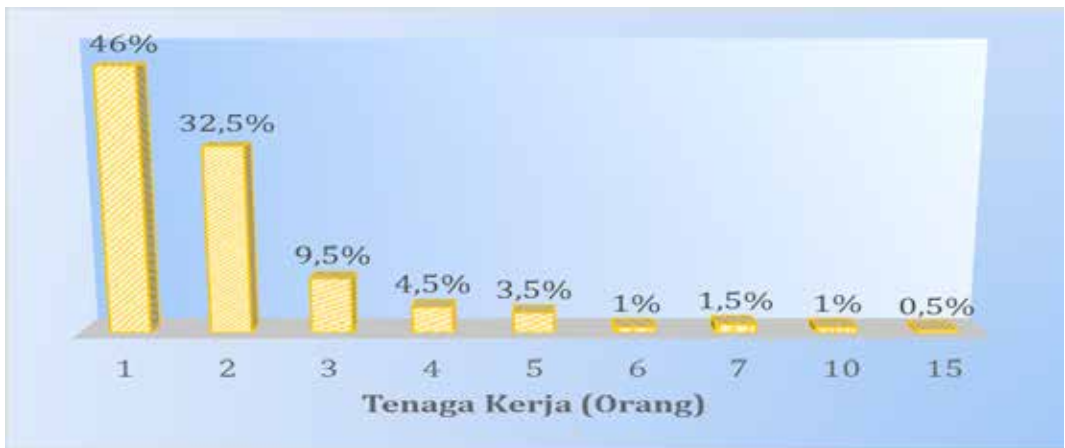
Berdasarkan data 3 tahun terakhir, jumlah wisatawan dapat mencapai 2.000 orang setiap minggu. Anggota kelompok HKm Tani Manunggal yang terlibat dalam kegiatan desa wisata tentu akan memperoleh tambahan pendapatan.

6.3. PENYERAPAN TENAGA KERJA

Salah satu tujuan pemberian HKm bagi petani adalah agar masyarakat perdesaan mendapatkan kesempatan untuk bekerja mandiri dan mengurangi arus urbanisasi. Penyerapan kesempatan di perdesaan akan mengurangi pengangguran dan akan meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan.

Berdasarkan Gambar 6.3, terlihat bahwa sebelum mendapat SK HKm sebanyak 46 persen responden mengelola sendiri lahan HKm-nya tanpa bantuan tenaga kerja lain. Berikutnya ada 32,5 persen petani yang mengelola sendiri dibantu oleh satu orang tenaga kerja untuk mengelola lahan HKm, dan sisanya sebesar 22,5% menggunakan tambahan dua orang atau lebih tenaga kerja. Kendati demikian, masih ada pemakaian tenaga kerja yang cukup banyak oleh penggarap hutan, yakni sebanyak 10 orang dan 15 orang yang terdapat pada HKm di wilayah DIY. Pemakaian tenaga kerja yang cukup banyak tersebut digunakan untuk melakukan pembersihan lahan dari guguran daun.

► Gambar 6.3. Jumlah Tenaga Kerja Sebelum Mendapat SK HKm



Keterangan: (*) Rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap : 2 orang

Sumber: Diolah dari data primer

Setelah petani menerima IUPHKm terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam penyerapan tenaga kerja. Rata-rata jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan HKm mengalami kenaikan menjadi 3 orang (lihat Gambar 6.4). Petani yang bekerja sendiri turun dari 46 persen menjadi 29 persen. Petani yang menyerap 2 tenaga kerja semakin berkurang dari 32,5 persen menjadi 22,5 persen, petani yang mempekerjakan 3 orang

semakin bertambah dari 9,5 persen bertambah menjadi 15,5 persen demikian seterusnya. Hasil survei ini menunjukkan bahwa usaha tani yang dilakukan oleh petani setelah menerima HKm telah berubah dari pertanian subsistem telah menjadi usaha tani yang memiliki aset berupa tenaga kerja. Namun, usaha tani di lahan HKm ini masih tergolong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) karena menyerap tenaga kerja masih kurang dari 20 orang.

► Gambar 6.4 Jumlah Tenaga Kerja Setelah Mendapat SK HKm (Orang)



Keterangan: Rata-rata jumlah tenaga kerja yang terserap 3 orang

Sumber: Diolah dari data primer

Hasil survei lapangan pada Gambar 6.3 menunjukkan jumlah petani responden yang memperkerjakan tenaga kerja 1-4 orang mencapai 92,5 persen maka dapat dikategorikan sebagai usaha mikro atau usaha skala rumah tangga (sebelum memperoleh SK). Kemudian jika mencermati Gambar 6.4 jumlah responden yang tergolong usaha mikro atau usaha rumah tangga sebanyak 78 persen (sesudah menerima SK). Dengan demikian, ada sebagian responden 14,5 persen yang meningkat menjadi kategori usaha kecil dengan jumlah tenaga kerja 5-19 orang yang tadinya

adalah usaha mikro dengan jumlah tenaga kerja 1-4 orang.

Responden yang tergolong UMK relatif banyak, baik sebelum menerima SK (92,5 persen) maupun sesudah menerima SK (78 persen). Kondisi tersebut tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kemampuan unit usaha petani responden anggota HKm untuk meningkatkan kinerja, misalnya dalam meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.

Kondisi ini dipertegas oleh hasil tabulasi silang (crosstabulation) pada Tabel 6.4 antara jumlah tenaga kerja sebelum dan sesudah

menerima IUPHKm. Sebelum menerima IUPHKm, petani yang bekerja sendiri sebanyak 46 persen dan turun menjadi 29 persen setelah menerima IUPHKm. Petani yang sebelum IUPHKm menyerap 2 orang sebanyak 32,5 persen turun menjadi 22,5 persen. Sebaliknya petani yang menyerap 3 orang sebelum menerima IUPHKm sebanyak 9,5 persen mengalami peningkatan menjadi 15,5 persen, begitupun petani yang menyerap 4 tenaga kerja

sebelum HKm meningkat menjadi 11 persen. Dari tabulasi silang tersebut terlihat bahwa semakin banyak petani menggunakan tenaga kerja di saat sudah menerima IUPHKm. Ada kecenderungan akan semakin bertambah serapan tenaga kerjanya. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan skala usaha tani di DIY dan Lampung. Ini diperkuat dengan nilai *Chi-Square* sebesar 396.000, yang signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

► **Tabel 6.4. Tabulasi Silang antara Jumlah Tenaga Kerja Sebelum dan Sesudah Menerima SK HKm**

jumlah TK sebelum * jumlah TK sesudah Crosstabulation

% of Total		jumlah TK sesudah								Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	
jumlah TK sebelum	1	24.0%	5.0%	3.0%	6.5%	5.0%	2.0%	.5%		46.0%
	2	2.0%	17.5%	7.0%	2.5%	2.5%	1.0%			32.5%
	3	1.5%		5.0%	.5%	1.5%	1.0%			9.5%
	4	.5%			1.5%		2.0%	.5%		4.5%
	5			.5%		1.5%	.5%	.5%		3.5%
	6						1.0%			1.0%
	7							1.5%		1.5%
	10	.5%							.5%	1.0%
	15	.5%								.5%
	Total	29.0%	22.5%	15.5%	11.0%	10.5%	7.5%	3.0%	.5%	100.0%

Keterangan:

- 1) Nilai Pearson Chi-Square: 396.000^a, yang signifikan pada derajat kepercayaan 99%.
- 2) 69 cells (85,2%) have expected count less than 5.
- 3) The minimum expected count is 0,01.

Sumber: Diolah dari data primer

Dari kegiatan BUMDes “Sejahtera”, Desa Bleberan, Playen, Gunungkidul jumlah karyawan BUMDes sebanyak 12 orang, ditambah karyawan unit pengelolaan air sebanyak 6 orang dan unit simpan pinjam sebanyak 3 orang. Tenaga kerja yang diserap untuk pengelolaan kawasan desa wisata sebanyak 90 orang. Terkait dengan kegiatan wisata maka pemberdayaan masyarakat dengan membuka warung sebanyak 60 orang dan pengelola *homestay* sebanyak 30 orang. Di samping itu, terdapat 10 kelompok pemilik mobil dan 6 kelompok kuliner untuk mendukung kegiatan wisata.

Selanjutnya kegiatan wisata yang dikelola kelompok masyarakat di Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 73 orang. Di samping itu juga terdapat karyawan tidak tetap yang terlibat sebanyak 43 orang. Dengan demikian tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan kawasan desa wisata Kalibiru mencapai 116 orang. Sebagian dari jumlah tersebut termasuk anggota HKM Manunggal.

Penyerapan tenaga kerja untuk kasus kelompok HKM Tani Manunggal, Menggoran II, Bleberan, Playen, Gunungkidul dan HKM Mandiri, Kalibiru, Hargowilis, Kokap, Kulon Progo, terutama sesudah menerima SK, dapat diduga terkait dengan kegiatan desa wisata di kedua

wilayah tersebut. Kegiatan wisata tersebut menyerap tenaga kerja, baik anggota maupun bukan anggota HKM serta masyarakat dari desa maupun dari luar desa. Dengan demikian, kegiatan kelompok HKM Tani Manunggal dan HKM Mandiri terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan desa wisata di kedua desa tersebut. Kegiatan desa wisata tersebut berdampak positif dalam mendorong peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu perbedaan dalam pengelolaan desa wisata di kedua desa tersebut adalah desa wisata Bleberan sudah dikelola oleh BUMDes, sedangkan desa wisata Kalibiru masih dikelola oleh kelompok masyarakat (belum dikelola oleh BUMDes).

6.4. STRUKTUR BIAYA

Rasio biaya tenaga kerja merupakan perbandingan biaya tenaga kerja dengan total biaya. Rasio biaya digunakan untuk mengetahui seberapa besar proporsi biaya tenaga kerja dibandingkan total biaya. Berdasarkan perhitungan, rata-rata rasio biaya tenaga kerja adalah 30 persen.

Tabel 6.5 memperlihatkan hasil tabulasi silang antara rasio biaya tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja. Responden dengan interval rasio biaya tenaga kerja pada Kelas 1 (0 hingga 10 persen) merupakan

responden dengan jumlah terbanyak (38,5 persen), kemudian menyusul interval rasio biaya pada Kelas 5 (40,1 hingga 50 persen), dan berikutnya

responden dengan rasio biaya pada Kelas 4 (30,1 hingga 40 persen), masing-masing sebesar 38,5 persen, 14 persen, dan 10,5 persen.

► **Tabel 6.5.** *Crosstabulation* antara Rasio Biaya Tenaga Kerja dan Jumlah Tenaga Kerja Sesudah Menerima SK HKm

Kelas	Interval Rasio Biaya Tenaga Kerja	Jumlah Tenaga Kerja														Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	
1	0.000 - 0.1	19,5%	17,0%	0,5%	0,0%	0,0%	1,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	38,5%
2	0.101 - 0.2	0,5%	0,5%	2,0%	0,5%	0,5%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,5%
3	0.201 - 0.3	0,5%	0,5%	1,5%	1,5%	2,5%	0,0%	2,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	9,5%
4	0.301 - 0.4	1,0%	0,5%	2,5%	0,0%	1,5%	1,0%	0,0%	2,0%	1,5%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	10,5%
5	0.401 - 0.5	0,0%	0,5%	2,0%	0,5%	3,0%	2,0%	0,5%	1,5%	1,0%	0,5%	1,5%	0,5%	0,5%	0,0%	14,0%
6	0.501 - 0.6	0,0%	0,5%	0,5%	1,5%	0,5%	1,5%	0,5%	0,5%	2,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	9,5%
7	0.601 - 0.7	1,0%	0,5%	0,5%	0,5%	1,0%	0,0%	1,0%	0,0%	1,0%	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	0,5%	7,0%
8	0.701 - 0.8	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,5%	1,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	3,0%
9	0.801 - 0.9	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	2,5%
10	0.901 - 1.0	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%
Total		24,5%	21,5%	9,5%	4,5%	9,5%	6,5%	5,0%	4,0%	6,5%	2,0%	4,0%	1,0%	0,5%	1,0%	100,0%

Keterangan: (*) Rata-rata rasio biaya tenaga kerja adalah 30 persen

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan hasil tabulasi silang, banyaknya responden dengan rasio biaya pada Kelas 1 dan hanya menggunakan satu tenaga kerja (pemilik lahan) adalah sebesar 19,5 persen, sedangkan banyaknya responden rasio biaya Kelas 1 dan menggunakan 2 tenaga kerja adalah sebesar 17 persen. Masih banyak petani anggota kelompok HKm, baik di wilayah Kabupaten Tanggamus, Lampung serta wilayah

DIY (Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo), yang menggarap lahan HKm-nya sendiri tanpa menggunakan tenaga kerja orang lain yang dibayar. Di samping dirasakan masih mampu untuk mengerjakannya, hal tersebut dapat meniadakan atau menghemat biaya tenaga kerja yang dibayar.

Berbeda dengan kondisi HKm di wilayah DIY, penyerapan tenaga kerja di HKm Lampung relatif tinggi.

Rata-rata jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan di HKm Lampung sebanyak 3 orang. Petani merasa akan lebih efisien jika menggunakan tambahan tenaga untuk merawat dan memanen tanaman. Bahkan HKm Sinar Mulya memiliki jadwal tiap-tiap kelompok tani untuk mengontrol seluruh total lahan HKm. Hal ini untuk meningkatkan rasa kegotongroyongan, senasib sepenanggungan, dan kesadaran bahwa bertani di lahan HKm merupakan sumber penghasilan utama. Hal tersebut juga merupakan upaya untuk meminimumkan biaya tenaga kerja yang dilakukan oleh anggota kelompok HKm Sinar Mulya.

Untuk kelompok tani HKm Tani Manunggal dan HKm Mandiri kesadaran untuk menjaga dan merawat kawasan hutan lindung cukup tinggi, hal ini terbukti untuk beberapa tahun terakhir kasus pencurian kayu di hutan dapat dikatakan nihil. Kesadaran dan kegotongroyongan mereka dalam menjaga hutan cukup tinggi. Kondisi tersebut dialami oleh anggota kelompok HKm dan juga anggota kepala keluarga (KK) anggota HKm. Dalam konteks KK anggota HKm, anggota keluarganya juga dilibatkan dalam kegiatan sehingga mereka merasa tidak perlu menggunakan tenaga kerja di luar anggota keluarga.

6.5. DAMPAK TERHADAP KEMISKINAN

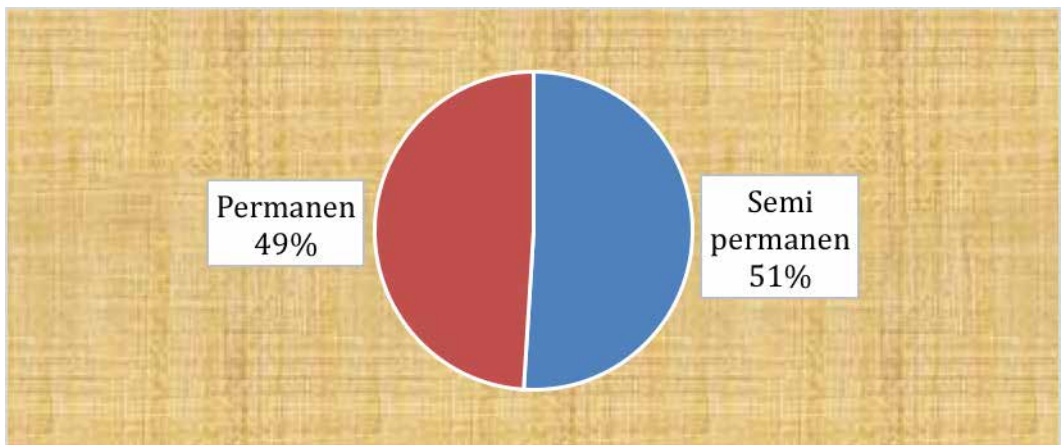
Salah satu indikator tingkat kemiskinan dapat dilihat kepemilikan dan jenis rumah yang dihuni oleh keluarga. Seluruh responden di Kabupaten Tanggamus mengatakan bahwa rumah yang mereka tinggali merupakan rumah milik sendiri. Hal ini sesuai dengan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanggamus 2017, yang menyatakan bahwa 89,24 persen status rumah di Kabupaten Tanggamus adalah milik sendiri. Demikian pula untuk seluruh responden anggota HKm Tani Manunggal (Kabupaten Gunungkidul) dan seluruh responden anggota HKm Mandiri (Kabupaten Kulon Progo) yang menyatakan bahwa rumah tinggal mereka milik sendiri. Kondisi ini sejalan dengan kondisi masyarakat Kabupaten Gunungkidul yang 97,44 persen tinggal di rumah sendiri (BPS Gunung Kidul, 2016). Demikian juga kondisi tersebut sesuai dengan kondisi masyarakat Kabupaten Kulon Progo pada umumnya, dimana sebanyak 88,82 persen menyatakan tinggal di rumah sendiri (BPS Kulon Progo, 2017).

Di sisi lain dari jenis rumah responden petani HKm, dapat dilihat dari jenis rumah mereka. Gambar 6.5 memberikan informasi jenis rumah responden. Sebanyak 49

persen responden memiliki rumah yang sudah permanen, artinya dinding rumah adalah tembok terbuat dari bata merah dan semen, atap bangunannya genteng, lantai terbuat dari bata merah dan semen.

Sebagian responden petani yang lain atau 51 persen masih memiliki rumah yang semi permanen yang dindingnya sebagian dari tembok dan semen kemudian sebagian lain dari kayu, lantainya masih tanah serta atap ditutupi seng.

► **Gambar 6.5. Kepemilikan Jenis Rumah Oleh Pemilik Lahan**



Sumber: Diolah dari data primer

Hasil penelitian ini sejalan dengan Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanggamus 2017 menyatakan bahwa 61,16 persen dinding bangunan terluas di Kabupaten Tanggamus adalah tembok dari semen dan 88,3 persen rumah tangga di kabupaten Tanggamus telah menggunakan listrik PLN. Dengan kata lain berdasarkan indikator perumahan maka responden HKm di Kabupaten Tanggamus cenderung sudah bukan dikategorikan sebagai kelompok miskin.

Demikian pula untuk responden anggota HKm Tani Manunggal (Kabupaten Gunungkidul) dan HKm Mandiri (Kabupaten Kulon Progo) dapat dinyatakan juga sebagai bukan kategori kelompok miskin. Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2016 menyatakan bahwa kondisi rumah menggunakan genteng (97,63 persen), tembok (80,36 persen), lantai bukan tanah (80,47 persen) dan listrik (99,49 persen). Selanjutnya berdasarkan Statistik Kesejahteraan Rakyat

Kabupaten Kulon Progo 2017, rumah di wilayah tersebut dengan genteng (98,77 persen), tembok (87,57 persen), lantai bukan tanah (90,05 persen), dan listrik (99,35 persen).

Dari sisi perumahan, pada HKm Beringin Jaya setelah mereka mendapatkan ijin pengelolaan HKm, muncul perkumpulan sosial berupa "Arisan Rumah". Secara bergilir anggota arisan bergotong royong mengumpulkan dana dan melakukan renovasi bagi anggota arisan yang mendapatkan undian arisan. Inilah bentuk konkrit modal sosial yang positif bagi perbaikan rumah. Arisan rumah ini sangat membantu petani untuk memperbaiki rumah, dikarenakan biaya renovasi rumah menjadi murah karena biaya tenaga kerja dilakukan secara bergotong royong.

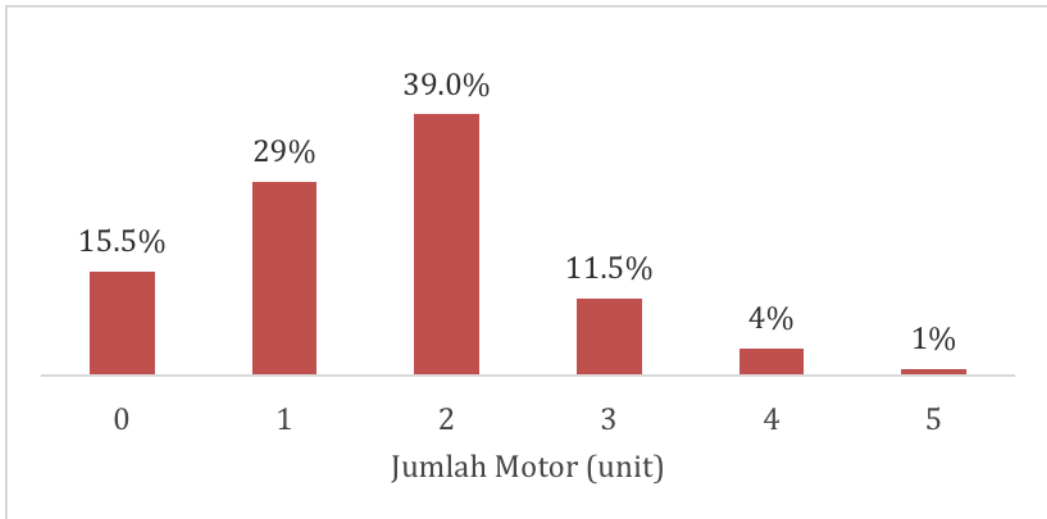
Dari sisi tempat tinggal jika dicermati lebih jauh, seluruh responden anggota HKm Mandiri Kalibiru mengaku rumahnya sudah menggunakan listrik, tersedia mandi cuci kakus (MCK), dan air bersih, meskipun untuk musim kemarau ketersediaan air bersih berkurang. Demikian juga untuk responden anggota HKm Tani Manunggal, Bleberan (Kabupaten Gunungkidul), seluruh responden sudah menggunakan fasilitas jaringan listrik, tersedia MCK, dan air bersih di rumahnya. BUMDes "Sejahtera" Desa

Bleberan mempunyai unit usaha menyalurkan air bersih dari sumber mata air, sehingga ketersediaan atau pasokan air bersih dapat dinikmati oleh warga setempat. Namun harus diakui pada saat musim kemarau pada saat musim kemarau pasokan air berkurang. Dari wawancara mendalam dan FGD di kedua wilayah tersebut hanya beberapa anggota HKm yang belum mempunyai MCK sendiri.

Selain rumah, salah satu kebutuhan yang menandakan bahwa seseorang telah memiliki pendapatan yang cukup dan tidak termasuk kategori miskin adalah kebutuhan transportasi yaitu kepemilikan kendaraan bermotor, baik motor maupun mobil. Gambar 6.6 memperlihatkan jumlah kendaraan motor yang dimiliki oleh petani HKm. Dari Gambar 6.6 terlihat bahwa 83,5 persen warga memiliki paling sedikit satu unit motor dan paling banyak 5 buah motor. Hanya 15,5 persen saja yang tidak memiliki motor.

Motor bagi petani di Kabupaten Tanggamus merupakan sarana transportasi utama untuk melakukan proses produksi dan mendistribusikan produksinya. Gambaran data di atas menunjukkan bahwa daya beli petani relatif cukup untuk mendapatkan aset tersebut walaupun harga aset itu relatif cukup tinggi.

► Gambar 6.6. Jumlah Kepemilikan Motor Oleh Pemilik Lahan



Sumber : Diolah dari data primer

Berdasarkan wawancara mendalam dan FGD di wilayah HKM Tani Manunggal (Kabupaten Gunung Kidul) dan HKM Mandiri (Kabupaten Kulon Progo), kendaraan motor roda dua digunakan oleh anggota HKM untuk mobilitas kegiatan sehari-hari baik yang terkait langsung dengan kegiatan pekerjaan pokok dan sampingan serta kegiatan yang tidak terkait langsung misalnya untuk mengantar anak sekolah, kegiatan sosial (mendatangi acara hajatan) dan agama (pengajian). Kepemilikan sepeda motor responden yang cukup tinggi (84,5 persen) disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: (1) kebutuhan untuk mobilitas, terkait dengan lokasi antar dusun, antar desa dan jarak

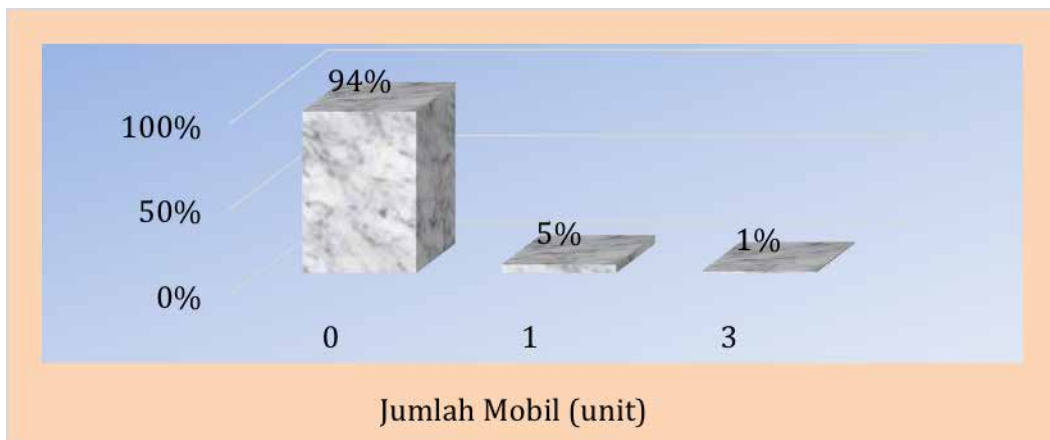
menuju ke ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten yang cukup jauh; (2) Kondisi wilayah yang berbukit dengan jalan naik turun dan berkelok (HKM Mandiri) menjadikan sepeda motor menjadi alat transportasi yang dapat diandalkan; (3) Kemudahan mempunyai sepeda motor melalui cicilan kredit menjadikan sebanyak 55,5 persen mempunyai sepeda motor lebih dari 1 unit.

Selain motor, kepemilikan mobil dapat digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kemiskinan. Dalam arti orang yang mempunyai mobil pribadi seharusnya tidak termasuk kategori miskin. Penduduk yang telah memiliki mobil relatif memiliki pendapatan yang jauh lebih besar

dan daya beli yang lebih tinggi. Berdasarkan Gambar 6.7 terlihat bahwa ada petani HKm yang telah memiliki mobil, yaitu sebanyak 6 persen. Sebanyak 5 persen memiliki 1 mobil dan ada 1 persen petani

yang memiliki 3 mobil. Namun berdasarkan wawancara, mobil yang mereka miliki merupakan mobil yang umumnya digunakan untuk melakukan angkutan proses produksi.

► **Gambar 6.7. Jumlah Kepemilikan Mobil**



Sumber: Hasil olahan data primer

Dalam jangka panjang seharusnya program Perhutanan Sosial, termasuk dalam bentuk HKm, dapat mendorong secara bertahap pengurangan kemiskinan di wilayah kawasan hutan. Masyarakat yang mendapat hak kelola kawasan hutan selama 35 tahun, dapat mengoptimalkan pemanfaatan kawasan hutan untuk berproduksi dan atau mengelola kawasan hutan untuk memperoleh pendapatan baik bagi individu maupun kelompok. Tujuan tersebut akan lebih mudah dicapai jika ada upaya percepatan

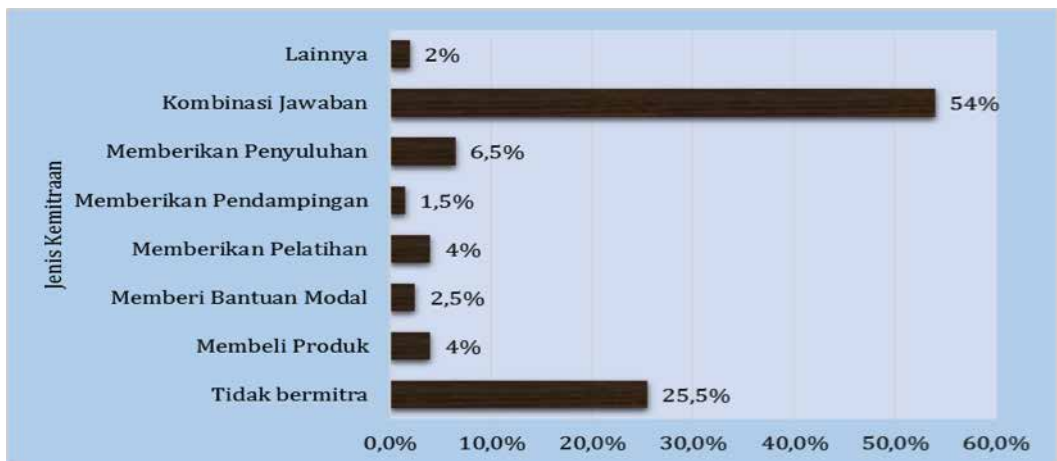
program Perhutanan Sosial. Salah satu tujuan program tersebut yaitu untuk mengurangi kemiskinan di kawasan hutan secara lebih efektif. Untuk mencapai tujuan diperlukan kerja keras masyarakat anggota HKm di dukung oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kerja keras tersebut hasilnya akan menjadi lebih optimal jika memperoleh dukungan pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, dan komunitas masyarakat lokal.

6.6. KEMITRAAN

Pelaku atau unit usaha biasanya memerlukan dukungan dari mitra yang akan membantu dalam proses produksi, membantu panen dan pasca panen, membantu permodalan dan pemasaran serta memberi berbagai informasi dalam

usaha tani. Kemitraan dapat berasal dari pihak-pihak swasta, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), institusi pemerintah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan yang lain. Gambar 6.8 menjelaskan jenis kemitraan yang dilakukan oleh responden.

► Gambar 6.8. Jenis Kemitraan



Sumber: Diolah dari data primer

Gambar 6.7 memperlihatkan bahwa petani responden ternyata telah banyak melakukan kemitraan dalam menjalankan usahanya. Sebagian besar petani (74,5 persen) telah melakukan kemitraan, dan sebagian lagi 25,5 persen belum melakukan kemitraan.

Berbagai macam kemitraan yang dilakukan adalah (1) membeli produksi petani; (2) memberikan bantuan

modal; (3) memberikan pelatihan; (4) memberikan pendampingan; serta (5) memberikan penyuluhan. Kemitraan yang terbanyak adalah kemitraan berupa gabungan dari berbagai jenis kemitraan yang dilakukan, sebanyak 54 persen responden melakukan kemitraan yang lebih dari satu jenis bentuk kemitraan. Selain kombinasi kemitraan, persentase terbesar selanjutnya adalah bahwa terdapat

25,5 persen responden yang tidak memiliki mitra; lalu 6,5 persen responden hanya mendapatkan penyuluhan; masing-masing 4 persen responden mengatakan hanya mendapat pelatihan dan hanya dibeli produknya; 2,5 persen hanya mendapatkan bantuan modal; 2 persen mengatakan lainnya; dan 1,5 persen hanya mendapatkan pendampingan.

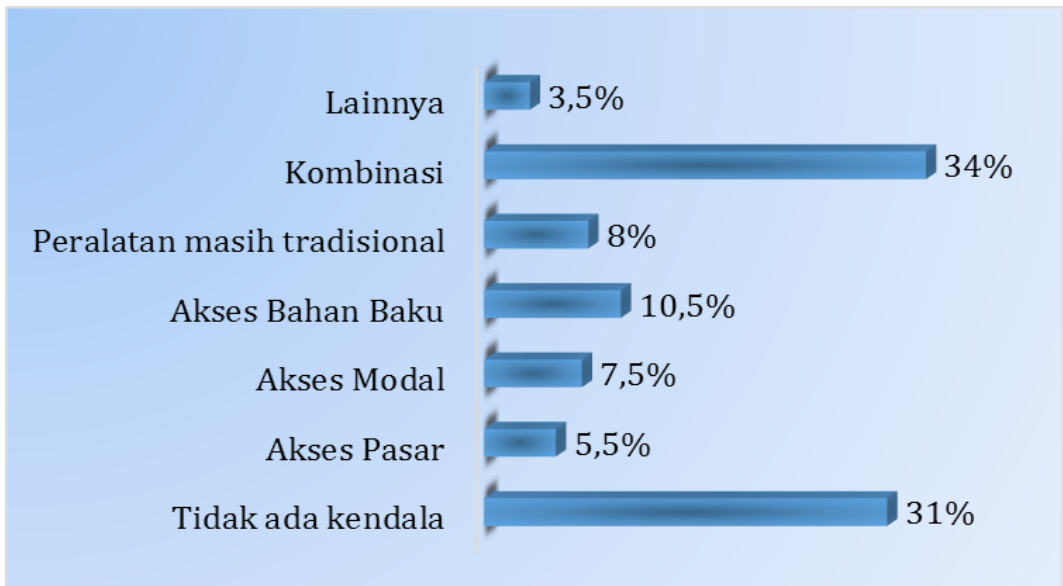
Secara kelembagaan HKM Tani Manunggal (Kabupaten Gunungkidul) dan HKM Mandiri bupaten Kulon Progo) telah melakukan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, seperti misalnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perguruan tinggi, LSM, dunia usaha, dan komunitas masyarakat lokal. Sebagai contoh, HKM Mandiri telah lama didampingi oleh LSM (Yayasan Damar). LSM tersebut mendampingi kelompok masyarakat dalam mengelola, merawat, dan menjaga kawasan hutan. Lebih jauh LSM tersebut juga membantu mengembangkan kawasan desa wisata Kalibiru. Untuk HKM Tani Manunggal (Kabupaten Gunungkidul) kemitraan dan kerjasama telah dilakukan dengan beberapa perguruan tinggi (PTN/PTS), Beberapa kajian dilakukan terkait dengan HKM Tani Manunggal (dan juga BUMDes “Sejahtera”). Hasil kajian tersebut diharapkan dapat

menjadi acuan agar capaian kegiatan anggota HKM menjadi lebih baik dan kinerja BUMDes menjadi lebih optimal.

6.7. KENDALA

Selanjutnya Gambar 6.9 menjelaskan jenis-jenis kendala yang dialami oleh responden. Jenis kendala terbanyak yang dialami responden adalah kombinasi dari terbatasnya akses bahan baku, akses modal, akses pasar, dan masih tradisionalnya peralatan yang dimiliki. Sebanyak 34% responden menjawab kombinasi. 10,5% responden mengatakan hanya memiliki kendala akses bahan baku; 8% hanya memiliki kendala peralatannya yang masih tradisional; 7,5% hanya memiliki kendala terbatasnya akses modal; 5,5% hanya memiliki kendala terbatasnya akses pasar; dan 3,5% responden menjawab kendala lainnya.

► Gambar 6.9. Jenis Kendala



Sumber: Hasil olahan data primer

Terkait kendala peralatan yang masih tradisional dan akses pasar, petani di HKm Sinar Mulya dan HKm Beringin Jaya belum memiliki peralatan yang modern untuk mengolah kopi asalan (kopi yang masih bercampur dengan kulit, gelondong dan lainnya) menjadi kopi yang berkualitas. Para petani hanya bisa menjual hasil panennya kepada pihak vendor (pengepul) dengan harga rendah, sesuai dengan harga pasar kopi asalan, sekitar Rp20.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Pihak vendor tadi merupakan pihak yang memiliki peralatan yang lebih

modern. Pihak vendor kemudian mengolah kopi asalan tadi menjadi kopi berkualitas, dan menjual ke pasar dengan harga tinggi, sekitar Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogramnya.

Responden yang mengatakan tidak ada kendala (31%) sebagian besar merupakan responden HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal. Penelusuran lebih lanjut berdasarkan wawancara mendalam dan FGD terkait dengan tidak ada kendala adalah keterlibatan masyarakatan anggota HKm dalam menjaga dan merawat kawasan hutan lindung

adalah hal yang biasa dan menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Pemahaman mereka terhadap kelestarian hutan dapat dianggap sudah mendarah daging. Tidak ada kendala yang berarti bagi mereka untuk hidup bersatu dan menjadi bagian dari kawasan hutan.

6.8. FAKTOR-FAKTOR PENENTU PENDAPATAN

Subbab ini akan berupaya menjawab pertanyaan: apakah faktor-faktor penentu pendapatan dari responden yang merupakan anggota HKm Sinar Mulya dan HKm Beringin Jaya (Kabupaten Tanggamus) serta HKm Tani Manunggal (Kabupaten Gunungkidul) dan HKm Mandiri (Kabupaten Kulon Progo)? Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dicermati pada Tabel 6.6.

Model 1 terdiri dari variabel dependen dan variabel independen atau penjelas. Variabel dependen adalah total pendapatan anggota HKm yang menjadi responden. Berdasarkan analisis di subbab 6.2, pendapatan petani sebagian besar berada pada interval Rp1-20 juta per tahun yaitu sebesar 53,5 persen, kemudian 25 persen berada pada interval pendapatan Rp20-40 juta per tahun, serta 5,5 persen berada pada interval pendapatan Rp 60-70 juta. Secara rata-rata pendapatan petani HKm adalah sebesar Rp28,3

juta selama satu tahun atau Rp 2,36 juta per bulan.

Selanjutnya variabel independen terdiri dari lamanya SK diterima oleh responden, luas lahan yang diterima, jumlah tenaga kerja, persentase biaya transportasi, persentase biaya input, jenis kemitraan, pengetahuan tentang HKm, partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, serta partisipasi dalam monitoring dan evaluasi. Dari 10 variabel independen dalam model 1, hanya ada 3 variabel independen yang signifikan yaitu lama SK diterima, luas lahan, dan jumlah tenaga kerja. Ketiga variabel penjelas tersebut masing-masing signifikan pada $\alpha = 1$ persen. Variabel-variabel jenis kemitraan, pengetahuan tentang HKm, partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, serta partisipasi dalam monitoring dan evaluasi tidak signifikan diduga terkait penerapan Program HKm yang relatif masih pendek.

► Tabel 6.6. Hasil Regresi Faktor-faktor Penentu Pendapatan Responden

Variabel Independen	Model 1	Model 2
Konstanta	2,516E7 (2,540)*	1,845E7 (3,330)*
Lama SK diterima	-1,722E6 (-4,325)*	-1,701E6 (-4,647)*
Luas dalam hektar	4,302E6 (3,610)*	4,240E6 (3,758)*
Jumlah tenaga kerja	2,177E6 (4,322)*	2,186E6 (4,697)*
Persen biaya transpor	705241,989 (0,092)	
Persen biaya input	3,500E6 (0,506)	
Jenis kemitraan	1,123E6 (2,237)**	1,091E6 (2,278)**
Pengetahuan tentang HKm	-2,174E6 (-0,449)	
Partisipasi dalam perencanaan	56044,300 (0,008)	
Partisipasi dalam pelaksanaan	-1,933E6 (-0,329)	
Partisipasi dalam money	-528295,187 (-0,076)	
Adjusted R ²	0,499	0,510
F-statistik	20,856*	52,884*

Keterangan:1) * signifikan pada $\alpha = 1$ persen2) ** signifikan pada $\alpha = 5$ persen

Sumber: Diolah dari data primer

Kemudian dilakukan metode “backward” untuk memilih variabel independen mana saja yang berpengaruh terhadap variabel dependen. Dari proses tersebut

diperoleh model 2. Model tersebut mempunyai adjusted R² sebesar 0,51 yang lebih tinggi daripada model 1 yang hanya memiliki adjusted R² sebesar 0,499 (lihat Tabel 6.6). hasil

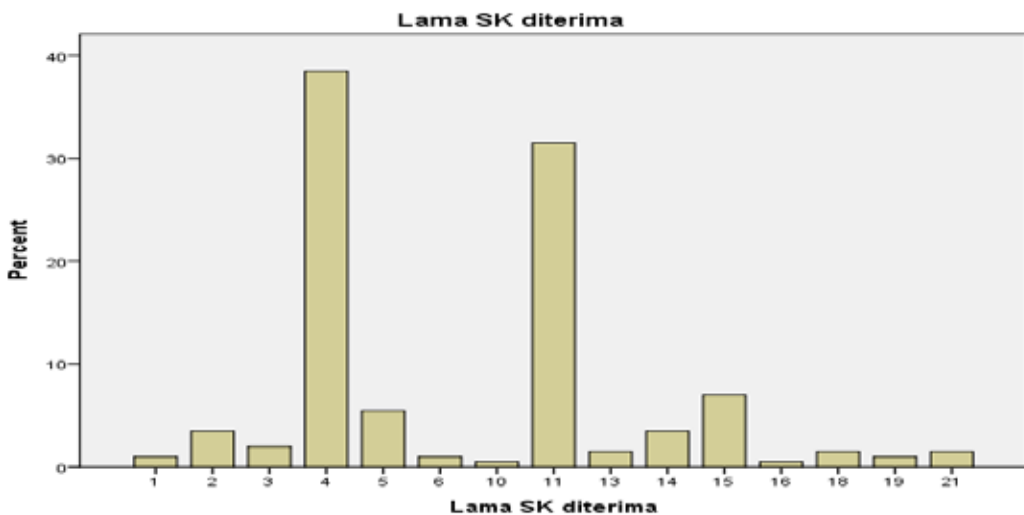
ini menunjukkan variasi perubahan seluruh variabel independen dalam model (lama SK diterima, luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan jenis kemitraan) mampu menjelaskan perubahan variasi total pendapatan sebesar 51 persen dan sisanya 49 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Selanjutnya model 2 mempunyai nilai F statistik sebesar 52,884 dan signifikan pada $\alpha=1$ persen. Angka F statistik yang signifikan menunjukkan bahwa seluruh variabel (lama SK diterima, luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan jenis kemitraan) secara bersama-sama dalam model berpengaruh signifikan terhadap pendapatan responden

pada taraf kepercayaan 99 persen. Model 2 dianggap tidak terjadi pelanggaran terhadap asumsi klasik yang meliputi multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan otokorelasi.

Variabel lama SK diterima berpengaruh negatif dan signifikan terhadap total pendapatan pada taraf kepercayaan 99 persen. Gambar 6.10 menunjukkan mayoritas lama IUPHKm diterima oleh responden adalah 38,5 persen. Kondisi ini dapat diartikan semakin pendek lama SK IUPHKm diterima maka total pendapatan responden makin meningkat. Dengan kata lain, semakin cepat pemberian IUPHKm kepada kelompok tani maka potensi peningkatan pendapatan akan semakin besar.

► Gambar 6.10. Lama SK IUPHKm Diterima Oleh Responden



Sumber: Hasil olahan data primer

Kemudian luas lahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pendapatan pada taraf kepercayaan 99 persen. Hal ini berarti semakin luas lahan yang diterima oleh petani anggota HKm maka akan mendorong meningkatnya pendapatan, *ceteris paribus*.

Variabel jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap total pendapatan pada taraf kepercayaan 99 persen. Dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang dilibatkan dalam kegiatan di lahan HKm maka pendapatan juga akan meningkat, *ceteris paribus*.

Selanjutnya jenis kemitraan berpengaruh positif dan signifikan pada taraf kepercayaan 95 persen. Hal ini dapat diartikan semakin banyak jenis kemitraan yang dapat dilakukan maka berbagai fasilitas seperti pembimbingan, pendampingan, dan bantuan lain akan diperoleh anggota HKm. Dengan berbagai fasilitas dari kemitraan tersebut maka kegiatan usaha dari anggota HKm akan lebih baik, dan pada gilirannya pendapatan juga akan meningkat, *ceteris paribus*.

BAB 7

**ANALISIS DAMPAK
SOSIAL PERHUTANAN
SOSIAL**

Bab 7 ini menguraikan tentang hasil dari analisis dampak sosial perhutanan sosial yang ada di wilayah DIY dan Lampung. Analisis dampak sosial meliputi: persepsi masyarakat terhadap perhutanan sosial, lembaga yang muncul setelah adanya HKm, perubahan perilaku masyarakat setelah adanya HKm dan kendala yang muncul dalam pengelolaan HKm, . Oleh sebab itu, pada bab ini akan dipaparkan secara rinci hasil olah data dari hasil survei di DIY dan Lampung.

**7.1. PERSEPSI MASYARAKAT
TERHADAP HKm**

Persepsi masyarakat menjadi salah satu faktor menjadi kunci yang akan menentukan perilaku responden

dalam pengelolaan HKm. Ada beberapa aspek yang akan dianalisis tentang persepsi masyarakat, yang meliputi: pengetahuan masyarakat tentang HKm, dari mana sumber informasi tentang HKm didapatkan, dan sejak kapan mengetahui HKm.

Tabel 7.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden, baik di DIY maupun Lampung, mengetahui informasi tentang HKm di mana ada 183 dari 200 responden (91,5%) yang menyatakan tahu, sementara hanya 17 responden (8,5%) yang tidak tahu. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan HKm dapat diterima secara baik di masyarakat. Dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responden mampu menjelaskan secara sederhana mengenai HKm.

► **Tabel 7.1. Pengetahuan Masyarakat Mengenai Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak	17	8,5
	Ya	183	91,5
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

Jika dilihat dari variasi antar daerah, sebagaimana tertera di dalam Tabel 7.2 menunjukkan bahwa 50 responden kelompok HKM Mandiri Kalibiru Kulonprogo mengetahui tentang HKM (25%). Sedangkan di kelompok Tani Manunggal Bleberan Gunungkidul ditemukan 48 responden (24%) mengetahui

HKM. Kemudian di Kelompok Sinar Mulya Pekon Sukamaju terdapat 44 responden (22%) yang mengetahui dan Kelompok HKM Beringin Jaya Pekon Margoyoso hanya 41 responden (20,5%) yang mengetahui HKM ini. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.2 berikut ini.

► **Tabel 7.2. Lokasi dan Pengetahuan tentang HKM (P_HKm)**

			P_HKm		Total
			Tidak	Ya	
Lokasi HKm	Mandiri	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Tani Manunggal	Count	2	48	50
		% of Total	1,0%	24,0%	25,0%
	Sinar Mulya	Count	6	44	50
		% of Total	3,0%	22,0%	25,0%
	Beringin Jaya	Count	9	41	50
		% of Total	4,5%	20,5%	25,0%
Total		Count	17	183	200
		% of Total	8,5%	91,5%	100,0%

Catatan: Chi-square=12,536, signifikan pada derajat kepercayaan 99%

Sumber: Diolah dari data primer

Pengetahuan tentang HKM tersebut diperoleh dari berbagai sumber informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden di DIY dan Lampung memperoleh sumber informasi mengenai pengetahuan terhadap HKM dari pemerintah yakni 137 responden (68,5%). Pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah

desa, kecamatan dan kabupaten. Pemerintah melalui pemerintah daerah hingga aparat desa melakukan sosialisasi tentang HKM kepada masyarakat, serta membantu mengenai pengurusan izin HKM. Sumber informasi utama kedua diperoleh dari sumber lainnya (LSM, universitas dan sebagainya). Hal ini seperti tertera dalam Tabel 7.3.

► Tabel 7.3. Sumber Informasi Pengetahuan HKm

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak tahu	14	7,0
	Pemerintah	137	68,5
	Media massa	1	0,5
	Lainnya (LSM, universitas dsb)	47	23,5
	Pemerintah dan sumber lainnya	1	0,5
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

Pengetahuan masyarakat tentang informasi HKm berasal dari berbagai sumber, dengan membandingkan antara lokasi dengan sumber informasi menunjukkan bahwa Kelompok HKm Mandiri Kalibiru dan Kelompok HKm Tani Manunggal Bleberan memperoleh pengetahuan tentang HKM berasal dari sumber informasi lainnya. Hal ini berdasarkan Tabel 7.4 yang menunjukkan bahwa terdapat 20 responden (10%) di Kelompok HKm Mandiri yang memperoleh sumber informasi dari sumber lainnya, sedangkan di kelompok HKm Tani Manunggal ada 15 responden

(7,5%) yang memperoleh informasi dari sumber lainnya. Dari hasil penelitian di lapangan, sumber informasi lainnya ini berasal dari LSM pendamping. Di Kelompok HKm Manunggal, LSM pendampingnya adalah Lembaga Java Learning Center (Javlec). Sedangkan LSM yang mendampingi kelompok HKm Mandiri adalah Yayasan Damar, sementara di Lampung LSM yang mendampingi adalah Konsorsium Kota Agung Utara (Korut). Lembaga-lembaga ini turut membantu dalam memberikan informasi kepada anggota kelompok tani dan sadar wisata di masing-masing daerah.

► Tabel 7.4. Lokasi dan Sumber Informasi

			Lokasi HKm				Total
			Mandiri	Tani Manunggal	Sinar Mulya	Beringin Jaya	
Sumber Informasi	Tidak tahu	Count	0	0	5	9	14
		% of Total	0,0%	0,0%	2,5%	4,5%	7,0%
	Pemerintah	Count	30	34	39	34	137
		% of Total	15,0%	17,0%	19,5%	17,0%	68,5%
	Media massa	Count	0	0	1	0	1
		% of Total	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%
	Lainnya	Count	20	15	5	7	47
		% of Total	10,0%	7,5%	2,5%	3,5%	23,5%
	1 dan 4	Count	0	1	0	0	1
		% of Total	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,5%
Total		Count	50	50	50	50	200
		% of Total	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=35,965, signifikan pada derajat kepercayaan 99%

Sumber: Diolah dari data primer

Lama pengetahuan responden mengenai HKm sangat bervariasi. Sebagian besar responden (49%) sudah mengetahui HKm selama 4, 9, dan 15 tahun. Bahkan terdapat

1 orang responden yang sudah memiliki lama pengetahuan HKm selama 25 tahun (0,5%). Hal tersebut seperti terlihat pada Tabel 7.5.

► Tabel 7.5. Lama Pengetahuan HKm

Lama Tahun		Frekuensi	Persentase
Valid	< 4	8	4,0
	4	25	12,5
	5	12	6,0
	6	9	4,5
	7	4	2,0
	8	4	2,0
	9	37	18,5
	10	8	4,0
	11	9	4,5
	12	1	0,5
	13	4	2,0
	14	5	2,5
	15	36	18,0
	16	5	2,5
	17	10	5,0
	18	12	6,0
	19	3	1,5
	20	1	0,5
	21	6	3,0
	25	1	0,5
	Total		200

Sumber: Diolah dari data primer

Jika dicermati pengetahuan responden dari masing-masing daerah sebagaimana terlihat pada Tabel 7.6. menunjukkan perbedaan yang variatif. Hal ini ditunjukkan dari nilai Chi-square sebesar 274,8 dan signifikan pada derajat kepercayaan 99%. Di Kelompok HKm Mandiri, mayoritas responden (18 responden) memiliki pengetahuan HKm sudah 15 tahun. Lama

pengetahuan responden ini juga berkaitan erat dengan terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan HKm. Di Kalibiru Kulonprogo, izin sementara pengelolaan HKm terbit pada tahun 2003 melalui Surat Keputusan Pemberian Izin Sementara Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan kepada 7 kelompok Tani Hutan (KTHKm). Atas perkembangan yang positif muncul izin definitif yang

terbit pada tahun 2007. Namun demikian sebelum itu, sebagian masyarakat juga sudah mengenalnya dikarenakan pendampingan Yayasan Damar di Kalibiru sudah dimulai sejak tahun 1999. Tabel 7.6 juga menunjukkan bahwa di HKm Tani Manunggal mayoritas responden (18 responden) mengetahui HKm selama 15 tahun. Ijin pengelolaan HKm di Bleberan Gunungkidul ini juga sama dengan Kalibiru yakni tahun 2007 ditandai dengan terbitnya Ijin Pemanfaatan HKm di 35 kelompok Tani HKm di Gunungkidul.

Hal ini berbeda dengan Lampung di mana sebagian besar masyarakat belum lama mengetahui mengenai HKm. Sebagian responden (17 responden) Kelompok HKm Tani Sinar Mulya, mengetahui HKm baru 4 tahun sedangkan kelompok HKm Beringin Jaya sebagian besar respondennya (27 responden) mengetahui HKm baru 9 tahun. Hal ini tidak terlepas dari ijin pengelolaan HKm di dua kelompok tersebut yang baru muncul pada tahun 2013. Secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 7.6.

► **Tabel 7.6. Lokasi dan Pengetahuan HKm**

			Lokasi HKm				Total
			Mandiri	Tani Manunggal	Sinar Mulya	Beringin Jaya	
Lama tahun	0	Count	0	0	3	5	8
		% of Total	0,0%	0,0%	1,5%	2,5%	4,0%
	4	Count	0	0	17	8	25
		% of Total	0,0%	0,0%	8,5%	4,0%	12,5%
	5	Count	0	1	6	5	12
		% of Total	0,0%	0,5%	3,0%	2,5%	6,0%
	6	Count	0	1	8	0	9
		% of Total	0,0%	0,5%	4,0%	0,0%	4,5%
	7	Count	0	0	0	4	4
		% of Total	0,0%	0,0%	0,0%	2,0%	2,0%
	8	Count	0	0	4	0	4
		% of Total	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%
	9	Count	0	0	10	27	37
		% of Total	0,0%	0,0%	5,0%	13,5%	18,5%
	10	Count	6	1	0	1	8
		% of Total	3,0%	0,5%	0,0%	0,5%	4,0%
	11	Count	4	5	0	0	9
		% of Total	2,0%	2,5%	0,0%	0,0%	4,5%
	12	Count	1	0	0	0	1
		% of Total	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
	13	Count	2	2	0	0	4
		% of Total	1,0%	1,0%	0,0%	0,0%	2,0%

	14	Count	1	4	0	0	5
		% of Total	0,5%	2,0%	0,0%	0,0%	2,5%
	15	Count	18	18	0	0	36
		% of Total	9,0%	9,0%	0,0%	0,0%	18,0%
	16	Count	1	3	1	0	5
		% of Total	0,5%	1,5%	0,5%	0,0%	2,5%
	17	Count	8	2	0	0	10
		% of Total	4,0%	1,0%	0,0%	0,0%	5,0%
	18	Count	5	6	1	0	12
		% of Total	2,5%	3,0%	0,5%	0,0%	6,0%
	19	Count	2	1	0	0	3
		% of Total	1,0%	0,5%	0,0%	0,0%	1,5%
	20	Count	1	0	0	0	1
		% of Total	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
	21	Count	0	6	0	0	6
		% of Total	0,0%	3,0%	0,0%	0,0%	3,0%
	25	Count	1	0	0	0	1
		% of Total	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Total	Count		50	50	50	50	200
	% of Total		25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=274,8, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari Data Primer

Pengetahuan masyarakat tentang HKm membuat masyarakat juga mengetahui mengenai status hutan yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal mereka. Tabel 7.7 menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengetahui status hutan yakni 166 responden (88%)

sedangkan yang tidak mengetahui hanya sebanyak 24 responden (12%). Pengetahuan masyarakat mengenai status hutan ini tentunya akan membantu kesadaran masyarakat di dalam mengelola dan menjaga kelestarian hutan.

► **Tabel 7.7. Pengetahuan Mengenai Status Hutan**

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak	24	12
	Ya	176	88
	Total	200	100

Sumber: Diolah dari data primer

Jika dicermati dari masing-masing lokasi HKm, sebagaimana dirangkum pada Tabel 7.8, sebanyak 50 responden di kelompok HKm Mandiri mengetahui status hutan tersebut sedangkan kelompok Tani Manunggal hanya ada 3 responden yang tidak mengetahui. Sedangkan di Lampung, kelompok HKm Sinar Mulya dan HKm Beringin Jaya ternyata masing-masing terdapat 40 responden yang mengetahui status HKm. Di kelompok HKm Mandiri, responden mengetahui adanya perubahan status hutan lindung bersamaan dengan turunnya ijin definitif pada tahun 2007. Sedangkan

status hutan yang berbeda terjadi di kelompok HKm Tani Manunggal di mana status hutan adalah hutan produksi. Adanya 3 responden di kelompok HKm Tani Manunggal yang tidak mengetahui status hutan ini dikarenakan hak pengelolaan hutan yang dimiliki merupakan warisan dari suami atau orang tuanya. Responden tersebut hanya memiliki hak mengelola sedangkan informasi tentang kelompok maupun status HKm tidak banyak mengetahui. Secara lebih jelas mengenai distribusi responden menurut pengetahuan status hutan dapat dilihat pada Tabel 7.8.

► Tabel 7.8. Lokasi dan Pengetahuan Status Hutan

			TAHU STATUS HUTAN		Total
			Tidak	Ya	
Lokasi HKm	Mandiri	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Tani Manunggal	Count	3	47	50
		% of Total	1,5%	23,5%	25,0%
	Sinar Mulya	Count	11	39	50
		% of Total	5,5%	19,5%	25,0%
	Beringin Jaya	Count	10	40	50
		% of Total	5,0%	20,0%	25,0%
Total		Count	24	176	200
		% of Total	12,0%	88,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=16,288, signifikan pada derajat kepercayaan 99%
Sumber: Diolah dari Data primer

7.2. DESAIN KELEMBAGAAN

Salah aspek penting keberlanjutan pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah adanya lembaga yang mampu menjadi wadah sosial ekonomi masyarakat. Dalam penelitian ini, aspek kelembagaan akan dilihat dari beberapa aspek yakni bentuk kelembagaan yang muncul, peran kelembagaan dalam pemberdayaan, pendampingan terhadap kelembagaan, bentuk pendampingan, dan pihak yang melakukan pendampingan.

Dari hasil penelitian di Lampung dan DIY menunjukkan bahwa

lembaga yang paling banyak muncul dari pengelolaan HKM adalah koperasi sebagaimana dikemukakan oleh 125 responden (62,5%). Hal ini menunjukkan bahwa koperasi masih dipandang sebagai lembaga yang dianggap layak untuk menjadi wadah aktivitas sosial ekonomi dan alat perjuangan ekonomi rakyat kecil. Selain koperasi, lembaga lain yang muncul pasca IUPHKM adalah kelompok usaha (Pokdarwis dan Gapoktan) (10%), dan sebagainya. Berikut Tabel 7.9 yang menunjukkan kelembagaan yang muncul setelah adanya HKM.

► **Tabel 7.9. Kelembagaan Yang Muncul Setelah Adanya HKM**

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak menjawab	4	2,0
	kelompok usaha	13	6,5
	Pokdawis	7	3,5
	Koperasi	125	62,5
	kelompok usaha dan koperasi	17	8,5
	koperasi dan lainnya	5	2,5
	kelompok usaha, pokdarwis dan lainnya	21	10,5
	kelompok usaha dan pokdawis	8	4,0
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan variasi antar daerah dapat dilihat dan memperkuat fakta bahwa koperasi menjadi lembaga yang diakui oleh responden paling banyak muncul. Di kelompok HKm Beringin Jaya menunjukkan bahwa 45 responden (22,5%) menyatakan lembaga yang muncul

adalah koperasi. Hal demikian juga diakui oleh mayoritas responden di kelompok HKm Sinarmulyo (32 responden), kelompok HKm Tani Manunggal (30 responden) dan kelompok HKm Mandiri, Kalibiru (18 responden). Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 7.10.

► Tabel 7.10. Lokasi dan Lembaga Yang Muncul

			Lokasi HKm				Total
			Mandiri	Tani Manunggal	Sinar Mulya	Beringin Jaya	
Lembaga yang muncul	Tidak menjawab	Count	0	0	3	1	4
		% of Total	0,0%	0,0%	1,5%	0,5%	2,0%
	Kelompok usaha	Count	2	2	6	3	13
		% of Total	1,0%	1,0%	3,0%	1,5%	6,5%
	Pokdawis	Count	4	0	3	0	7
		% of Total	2,0%	0,0%	1,5%	0,0%	3,5%
	Koperasi	Count	18	30	32	45	125
		% of Total	9,0%	15,0%	16,0%	22,5%	62,5%
	Kelompok usaha dan koperasi	Count	4	9	3	1	17
		% of Total	2,0%	4,5%	1,5%	0,5%	8,5%
	Koperasi dan lainnya	Count	4	1	0	0	5
		% of Total	2,0%	0,5%	0,0%	0,0%	2,5%
	Kelompok usaha, pokdawis dan lainnya	Count	13	8	0	0	21
		% of Total	6,5%	4,0%	0,0%	0,0%	10,5%
	Kelompok usaha dan pokdawis	Count	5	0	3	0	8
		% of Total	2,5%	0,0%	1,5%	0,0%	4,0%
Total		Count	50	50	50	50	200
		% of Total	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=77,487, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari Data primer

Koperasi menjadi wadah untuk bekerjasama yang banyak dipilih oleh responden di lokasi penelitian. Sayangnya, keberadaan koperasi di Beringin Jaya dikeluhkan oleh sebagian responden karena manfaat belum dirasakan secara merata oleh semua anggota. Beberapa responden selalu merasa kesulitan saat akan meminjam dari koperasi, karena uang sudah didistribusikan ke anggota lain. Fenomena lain yang terjadi di HKM Beringin Jaya adalah ketidakberadaan Pokdarwis. Pokdarwis (kelompok sadar wisata) tidak ada karena kegiatan utama HKM adalah perkebunan. Pariwisata alam belum dikelola dengan baik, antara lain dapat dilihat dari pencatatan jumlah pengunjung hingga fasilitas

pendukung wisata belum disediakan dengan selainya.

Agar kelembagaan yang ada mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat, maka peran kelembagaan dalam memberdayakan masyarakat menjadi penting. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga yang ada ternyata aktif dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di kelompok HKM. Tabel 7.11. menunjukkan hal tersebut di mana 179 responden (89,5%) menyatakan peran kelembagaan yang aktif dan hanya 21 responden (10,5%) yang menyatakan tidak aktif. Peran kelembagaan yang aktif tersebut tentunya sangat positif dalam mendorong pemberdayaan para petani HKM.

► **Tabel 7.11. Peran Kelembagaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak aktif	21	10,5
	Aktif	179	89,5
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

Dengan melihat variasi antar daerah, peran kelembagaan yang paling aktif terdapat di kelompok HKM Mandiri Kalibiru. Semua responden di kelompok HKM Mandiri Kalibiru menyatakan peran aktif dari kelembagaan tersebut.

Hal ini sebenarnya juga diperkuat dari hasil wawancara di lapangan yang menunjukkan bahwa lembaga yang ada di kelompok HKM Mandiri Kalibiru cukup aktif dalam menyelenggarakan pertemuan rutin dan mengadakan berbagai aktivitas

untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata di Kalibiru. Sebagian warga Kalibiru terlibat dalam pengelolaan wisata baik sebagai petugas kebersihan, tukang parkir, pemandu wisata, penjaga tiket dan sebagainya. Demikian juga di kelompok Tani Manunggal dimana hanya ada 1 responden yang menyatakan bahwa lembaga tersebut tidak aktif perannya. Pertemuan rutin di kelompok Tani Manunggal masih aktif diselenggarakan. Berbagai

aktivitas bersama juga diinisiasi oleh kelompok misalnya perawatan pohon jati. Sedangkan di kelompok Beringin Jaya dan Sinar Mulya, masing-masing hanya 10 responden yang menyatakan bahwa lembaga yang ada tidak aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Lembaga-lembaga yang ada tersebut juga aktif menyelenggarakan pertemuan untuk anggota HKm dan juga menjadi wadah ketika berhubungan dengan pihak eksternal.

► Tabel 7.12. Peran Kelembagaan dalam Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Lokasi HKm

			PERAN LEMBAGA		Total
			Tidak aktif	Aktif	
Lokasi HKm	Mandiri	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Tani Manunggal	Count	1	49	50
		% of Total	0,5%	24,5%	25,0%
	Sinar Mulya	Count	10	40	50
		% of Total	5,0%	20,0%	25,0%
	Beringin Jaya	Count	10	40	50
		% of Total	5,0%	20,0%	25,0%
Total		Count	21	179	200
		% of Total	10,5%	89,5%	100,0%

Catatan: Chi-square=19,314, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari Data primer

Munculnya kelembagaan yang aktif tersebut tidak terlepas dari adanya pendampingan yang dilakukan oleh pendamping. Tabel 7.13. menunjukkan bahwa mayoritas

responden menyatakan bahwa terdapat pendampingan terhadap kelembagaan, yakni 186 responden (93%). Hal ini seperti terlihat pada Tabel 7. 13.

► **Tabel 7.13. Peran Pendamping Terhadap Kelembagaan**

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak	14	7,0
	Ya	186	93,0
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

Berdasarkan empat lokasi HKm yang diteliti, semua responden di kelompok HKm Mandiri Kalibiru (50) menyatakan bahwa pendamping aktif di dalam melakukan pendampingan terhadap kelembagaan. Sementara di kelompok HKm Sinar Mulya dan Beringin Jaya masing-masing ada 44 responden yang

menyatakan bahwa pendamping aktif melakukan pendampingan terhadap kelembagaan. Sedangkan di kelompok HKm Tani Manunggal terdapat 48 responden yang menyatakan peran pendamping terhadap kelembagaan tersebut. Secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7.14.

► **Tabel 7.14 Lokasi dan Keberadaan Pendamping Terhadap Kelembagaan**

			PENDAMPING		Total
			Tidak	Ya	
Lokasi HKm	Mandiri	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Tani Manunggal	Count	2	48	50
		% of Total	1,0%	24,0%	25,0%
	Sinar Mulya	Count	6	44	50
		% of Total	3,0%	22,0%	25,0%
	Beringin Jaya	Count	6	44	50
		% of Total	3,0%	22,0%	25,0%
Total		Count	14	186	200
		% of Total	7,0%	93,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=8,295, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari Data primer

Dalam proses pendampingan yang dilakukan terdapat berbagai bentuk pendampingan yang cukup variatif. Namun demikian, mayoritas responden (139 responden atau 69,5%) menyatakan bentuk pendampingan yang utama dilakukan adalah penguatan kapasitas kelembagaan. Bentuk pendampingan yang lain adalah penguatan kewirausahaan (5,5%)

dan akses pasar (2,5%). Sedangkan sisanya merupakan kombinasi di antara penguatan kelembagaan dan kewirausahaan, penguatan kelembagaan dan akses pasar, dan kombinasi di antara ketiga bentuk pendampingan yakni penguatan kelembagaan, kewirausahaan dan akses pasar. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.15.

► **Tabel 7.15 Bentuk Pendampingan**

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak ada pendampingan	17	8,5
	Penguatan kapasitas kelembagaan	139	69,5
	Penguatan kewirausahaan	11	5,5
	Akses pasar	5	2,5
	Penguat kelembagaan dan kewirausahaan	16	8,0
	Penguatan kelembagaan dan akses pasar	11	5,5
	Penguatan kelembagaan, kewirausahaan, dan akses pasar	1	0,5
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

Jika melihat variasi antar daerah, seperti terlihat pada Tabel 7.16 menunjukkan bahwa mayoritas responden di kelompok Tani Manunggal (44 responden) menyatakan bahwa penguatan kelembagaan merupakan bentuk pendampingan yang paling sering dilakukan oleh para pendamping. Demikian juga di kelompok HKm Mandiri, Kalibiru (41 responden).

Sedangkan di kelompok HKm Sinar Mulya, Sukamaju terdapat 30 responden yang menyatakan pendampingan dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Sementara di kelompok HKm Beringin Jaya Margoyoso ada 24 responden yang menyatakan pendampingan dilakukan melalui penguatan kelembagaan. Bentuk pendampingan lainnya yang dilakukan yaitu

pendampingan dalam bentuk penguatan kewirausahaan, akses pasar dan kombinasi di antara bentuk-bentuk pendampingan walaupun hanya terdapat beberapa responden yang menjawab. Hal yang menarik dari Tabel 7.16 tersebut adalah masih ada 15 responden yang

terdiri dari 8 responden di kelompok HKM Sinar Mulya dan 7 responden di kelompok HKM Beringin Jaya yang menyatakan tidak ada pendampingan terhadap mereka. Hal ini dimungkinkan karena proses pendampingan yang belum merata ke segenap anggota kelompok HKM.

► Tabel 7.16. Lokasi dan Bentuk Pendampingan

			Lokasi HKm				Total
			Mandiri	Tani Manunggal	Sinar Mulya	Beringin Jaya	
Bentuk Pendampingan	Tidak ada pendampingan	Count	0	2	8	7	17
		% of Total	0,0%	1,0%	4,0%	3,5%	8,5%
	Penguatan kapasitas kelembagaan	Count	41	44	30	24	139
		% of Total	20,5%	22,0%	15,0%	12,0%	69,5%
	Penguatan kewirausahaan	Count	0	1	0	10	11
		% of Total	0,0%	0,5%	0,0%	5,0%	5,5%
	Akses pasar	Count	0	0	3	2	5
		% of Total	0,0%	0,0%	1,5%	1,0%	2,5%
	Penguat kelembagaan dan kewirausahaan	Count	6	3	4	3	16
		% of Total	3,0%	1,5%	2,0%	1,5%	8,0%
	Penguatan kelembagaan dan akses pasar	Count	2	0	5	4	11
		% of Total	1,0%	0,0%	2,5%	2,0%	5,5%
	Penguatan kelembagaan, kewirausahaan, dan akses pasar	Count	1	0	0	0	1
		% of Total	0,5%	0,0%	0,0%	0,0%	0,5%
Total		Count	50	50	50	50	200
		% of Total	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=59,081, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari Data primer

Bentuk pendampingan yang dilakukan tidak dapat dilepaskan dari lembaga yang melakukan pendampingan tersebut. Hasil dari penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa yang paling banyak memberikan pendampingan adalah LSM (29%) serta dinas terkait (29%). Hal ini dapat terlihat pada keberhasilan program pengembangan kelompok HKm di Kalibiru yang tidak terlepas dari peran Yayasan Damar. Dinas terkait

yang berperan ini terutama dari Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Dinas Pariwisata. Ironisnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai oleh responden kurang memberikan pendampingan. Dari hasil penelitian tersebut hanya 1,5 persen dari 200 responden yang menyatakan pendampingan dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 7.17.

► Tabel 7.17. Pelaku Pendampingan

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak ada pendamping	11	5,5
	Kementerian LHK	3	1,5
	Dinas terkait	43	21,5
	LSM	58	29,0
	Lainnya	1	0,5
	Dinas terkait dan LSM	58	29,0
	Kementrian LHK, Dinas terkait, dan LSM	2	1,0
	Dinas terkait, LSM, dan perusahaan swasta	3	1,5
	LSM, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi	4	2,0
	Dinas terkait, LSM, dan perguruan tinggi	1	0,5
	LSM dan perguruan tinggi	1	0,5
	LSM dan perusahaan swasta	7	3,5
	Kombinasi 1-5	1	0,5
	Kementerian LHK dan LSM	4	2,0
	Dinas terkait dan perusahaan swasta	3	1,5
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari data primer

Dilihat dari hubungan antara lokasi dengan lembaga yang melakukan pendampingan menunjukkan bahwa di kelompok HKm Mandiri Kalibiru, kelompok HKm Sinar Mulya Sukamaju, dan kelompok HKm Beringin Jaya Margoyoso mayoritas responden menyatakan bahwa LSM merupakan lembaga yang paling banyak melakukan pendampingan. Berdasarkan Tabel 7.18 terdapat 22 responden di kelompok HKm Mandiri, 16 responden di kelompok HKm Beringin Jaya, 13 responden di kelompok HKm Sinar Mulya yang menyatakan demikian. Adanya mayoritas responden di Kalibiru yang menyatakan pendampingan dilakukan oleh LSM, tidak terlepas dari adanya Yayasan Damar yang telah melakukan pendampingan di Kalibiru sejak pertengahan tahun 2000. Berbagai aktivitas seperti penguatan kelompok, mendorong kesadaran masyarakat untuk tidak mengambil hasil hutan secara sembarangan dan juga bersama-sama masyarakat menginisiasi pengembangan desa wisata adalah beberapa contoh peran yang dilakukan oleh Yayasan Damar. Di kelompok HKm Sinar Mulya dan Beringin Jaya, LSM KORUT juga banyak melakukan pendampingan untuk penguatan kelompok dan kapasitas masyarakat dalam penanaman kopi.

Meskipun di tiga lokasi lembaga yang dianggap paling banyak melakukan pendampingan adalah LSM, namun di Kelompok HKm Tani Manunggal, Bleberan, Gunungkidul justru sebagian besar responden (26 responden) yang menyatakan bahwa Dinas terkait yang paling banyak melakukan pendampingan. Dinas terkait dalam hal ini adalah Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan.

Hal yang menarik untuk kelompok HKm Sinar Mulya menunjukkan adanya keterlibatan perusahaan dalam melakukan pendampingan. Berdasarkan Tabel 7.18, pada kelompok HKm Sinar Mulya terdapat 7 responden yang menyatakan bahwa pendampingan dilakukan oleh LSM dan perusahaan swasta, 3 responden menyatakan pendampingannya Dinas terkait, LSM, dan perusahaan swasta, dan 4 responden yang menyatakan pendampingan dilakukan oleh LSM, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi. Keterlibatan perusahaan ini tidak terlepas dari keberadaan perusahaan Nestle yang menjadi mitra para petani kopi di desa tersebut.

► Tabel 7.18. Lokasi dan Aktor Pelaku Pendampingan

			Lokasi HKm				Total
			Mandiri	Tani Manunggal	Sinar Mulya	Beringin Jaya	
Pelaku Pendamping	Tidak ada pendamping	Count	0	2	5	4	11
		% of Total	0,0%	1,0%	2,5%	2,0%	5,5%
	Kementrian LHK	Count	1	0	1	1	3
		% of Total	0,5%	0,0%	0,5%	0,5%	1,5%
	Dinas terkait	Count	11	26	5	1	43
		% of Total	5,5%	13,0%	2,5%	0,5%	21,5%
	LSM	Count	22	7	13	16	58
		% of Total	11,0%	3,5%	6,5%	8,0%	29,0%
	Lainnya	Count	0	1	0	0	1
		% of Total	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,5%
	Dinas terkait dan LSM	Count	15	13	6	24	58
		% of Total	7,5%	6,5%	3,0%	12,0%	29,0%
	Kementrian LHK, Dinas terkait, dan LSM	Count	1	1	0	0	2
		% of Total	0,5%	0,5%	0,0%	0,0%	1,0%
	Dinas terkait, LSM, dan perusahaan swasta	Count	0	0	3	0	3
		% of Total	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	1,5%
	LSM, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi	Count	0	0	4	0	4
		% of Total	0,0%	0,0%	2,0%	0,0%	2,0%
	Dinas terkait, LSM, dan perguruan tinggi	Count	0	0	1	0	1
		% of Total	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%
	LSM dan perguruan tinggi	Count	0	0	1	0	1
		% of Total	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%
	LSM dan perusahaan swasta	Count	0	0	7	0	7
		% of Total	0,0%	0,0%	3,5%	0,0%	3,5%
	Kombinasi 1-5	Count	0	0	1	0	1
		% of Total	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%
	Kementerian LHK dan LSM	Count	0	0	1	3	4
		% of Total	0,0%	0,0%	0,5%	1,5%	2,0%
	Dinas terkait dan perusahaan swasta	Count	0	0	2	1	3
		% of Total	0,0%	0,0%	1,0%	0,5%	1,5%
Total		Count	50	50	50	50	200
		% of Total	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=125,037, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari data primer

7.3. PERUBAHAN PERILAKU

Tujuan utama program HKm adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Melalui HKm, masyarakat diberi kewenangan dalam pengelolaan hutan di wilayah sekitar tempat tinggalnya. Izin pengelolaan HKm yang relatif baru diterima ternyata mengubah perilaku masyarakat di sekitar wilayah hutan. Untuk menganalisis perubahan perilaku pasca penetapan Ijin

Pengelolaan HKm ini, akan dilihat beberapa aspek nyata lain melalui ada tidaknya perubahan perilaku dan kenyamanan mengelola kawasan HKm.

Berdasarkan Tabel 7.19, diketahui bahwa perilaku masyarakat berubah setelah adanya HKm. Mayoritas responden (99,5%) menyatakan ada perubahan perilaku dan hanya 0,5% responden yang menyatakan tidak ada perubahan perilaku.

► Tabel 7.19. Perubahan Perilaku Masyarakat

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak	1	0,5
	Ya	199	99,5
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari Data primer

Berdasarkan analisis pada empat lokasi hanya 1 responden di kelompok HKm Beringin Jaya, Pekon Margoyoso yang menyatakan tidak adanya perubahan perilaku. Sementara semua responden di kelompok HKm Mandiri Kalibiru, kelompok HKm Tani Manunggal Bleberan dan kelompok HKm

Sinar Mulya Pekon Suka Maju yang menyatakan ada perubahan perilaku. Belum adanya perubahan perilaku diduga karena izin pengelolaan HKm yang belum lama baru sekitar 2013 sehingga belum membawa dampak pada perubahan perilaku masyarakat. Secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel 7.20.

► Tabel 7.20 Lokasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat

			Perubahan Perilaku		Total
			Tidak	Ya	
Lokasi HKm	Mandiri	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Tani Manunggal	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Sinar Mulya	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Beringin Jaya	Count	1	49	50
		% of Total	0,5%	24,5%	25,0%
Total		Count	1	199	200
		% of Total	0,5%	99,5%	100,0%

Sumber: Diolah dari Data primer

Wujud dari perubahan perilaku yang muncul misalnya berupa rasa memiliki (*handarbeni*) dari anggota kelompok HKm setelah mereka memiliki kewenangan di dalam pengelolaan hutan. Sebagai contoh, status hutan produksi anggota kelompok HKm Tani Manunggal, Bleberan Gunungkidul yang membuat anggota kelompok HKm memperoleh *sharing profit* dari hasil hutan yang mereka kelola. Oleh sebab itu, rasa *handarbeni* mereka terhadap HKm relatif tinggi. Perubahan perilaku tersebut juga terlihat dari tidak adanya pencurian kayu. Mereka menganggap mencuri kayu maupun hasil hutan di lahan HKm sama saja mencuri miliknya sendiri. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa tanaman yang mereka tanam

merupakan tabungan sehingga ada anggota yang menjaga tanamannya dengan memberi “pagar” keliling di lahan yang mereka kelola. Pagar ini berhubungan dengan kearifan warga lokal setempat karena mempercayai bahwa pagar tersebut dapat melindungi tanaman yang mereka miliki dari berbagai gangguan dan ancaman.

Hal demikian juga terjadi di kelompok HKm Mandiri, Kalibiru. Setelah ditetapkan sebagai hutan lindung, masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak mengambil hasil-hasil hutan secara sembarangan. Pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Damar Kulonprogo turut membantu terjadinya perubahan perilaku masyarakat tersebut. Seperti telah dipaparkan di atas

pendampingan yang dilakukan meliputi penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Pengembangan Kalibiru sebagai destinasi wisata juga mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan.

Perubahan perilaku anggota kelompok tani Beringin Jaya, Pekon Margoyoso juga hampir serupa, mereka menjaga kelestarian hutan karena berpikir tentang keberlanjutan masa depan. Pengelolaan yang baik akan membuat kehidupan mereka lebih baik saat ini dan masa depan. Hal tersebut terpicu dari peningkatan kemampuan finansial para anggota tani. Sejak izin pengelolaan HKm diterima mereka mulai bisa memperbaiki rumah melalui arisan bedah rumah, menambah kendaraan bermotor, dan anak-anak bisa melanjutkan sekolah.

HKm Sinar Mulya Pekon Suka Maju memiliki cerita yang serupa, kecuali untuk tingkat kriminalitas. Sejak izin pengelolaan HKm diterima, kriminalitas berupa pencurian kendaraan bermotor berkurang drastis. Hal ini terjadi karena masyarakat sudah memiliki pendapatan yang pasti dari hasil perkebunan, sehingga tidak perlu mencari nafkah dengan cara-cara yang ilegal. Baik HKm Beringin Jaya maupun Sinar Mulya juga melakukan pelestarian tanaman di

hutan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan air bersih yang mereka gunakan dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat menyadari bahwa keberadaan mata air sangat tergantung pada keberadaan pohon-pohon yang lestari.

Meskipun sebagian besar responden menyatakan ada perubahan perilaku positif dari keberadaan hutan kemasyarakatan akan tetapi ada beberapa dampak sosial negatif yang muncul. Misalnya potensi kecemburuan antara anggota dengan pengurus kelompok dan munculnya pola perilaku menyimpang masyarakat seperti perilaku prostitusi. Hal ini seperti terjadi pada beberapa anggota masyarakat di Kalibiru Kulonprogo. Meningkatnya pendapatan yang diterima oleh masyarakat di dusun ini sebagaimana dampak dari pengelolaan wisata justru menyebabkan terjadinya perilaku negatif dari beberapa anggota masyarakat dengan “jajan seks” di luar Kalibiru. Pola perilaku negatif ini jika tidak diantisipasi secara baik akan mengganggu keberlanjutan pengelolaan HKm.

Munculnya status HKm di masing-masing daerah juga menimbulkan rasa nyaman masyarakat dalam mengelola HKm. Berdasarkan hasil penelitian di Lampung dan DIY, diketahui bahwa 99% responden menyatakan nyaman dengan sistem

pengelolaan HKm (lihat Tabel 7.21.). Hanya 1% responden menyatakan tidak nyaman dengan sistem pengelolaan hutan.

Jika dicermati analisis per daerah ternyata responden yang merasakan tidak nyaman berasal dari kelompok HKm Tani Manunggal Bleberan.

► Tabel 7.21. Kenyamanan Mengelola Kawasan HKm

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak	2	1,0
	Ya	198	99,0
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari Data primer

Sedangkan di tiga lokasi lainnya yakni kelompok HKm Mandiri, kelompok HKm Sinar Mulya dan Kelompok HKm Beringin Jaya semua responden merasakan nyaman (lihat Tabel 7.22). Ketidaknyamanan responden di kelompok HKm Tani Manunggal disebabkan karena belum adanya kepastian pengelolaan panen HKm. Sampai saat ini belum ada kejelasan sistem mengenai

prosedur memanen hasil hutan dari tanaman yang mereka tanam. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi rasa kenyamanan masyarakat dalam mengelola lahan HKm. Apabila hal tersebut tidak segera ditanggulangi dikhawatirkan juga akan berpengaruh kepada perubahan perilaku masyarakat, misalnya pencurian kayu.

► Tabel 7.22. Lokasi dan Kenyamanan Mengelola Kawasan HKm

			NYAMAN		Total
			Tidak	Ya	
Lokasi HKm	Mandiri	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Tani Manunggal	Count	2	48	50
		% of Total	1,0%	24,0%	25,0%
	Sinar Mulya	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
	Beringin Jaya	Count	0	50	50
		% of Total	0,0%	25,0%	25,0%
Total		Count	2	198	200
		% of Total	1,0%	99,0%	100,0%

Sumber: Diolah dari Data primer

Alasan responden merasa nyaman dengan sistem pengelolaan hutan beragam. Alasan terbanyak menyatakan nyaman karena tidak lagi dikejar polisi hutan dan memiliki kepastian hak pengelolaan (57%). Sedangkan 23% responden menyatakan nyaman dengan sistem pengelolaan hutan karena adanya kepastian hak IUPHKM dan 13,5 persen karena alasan lainnya.

Pada kasus di kelompok HKM Mandiri Kalibiru Kulon Progo, yang dimaksud alasan lainnya meliputi: pertama, adanya rasa aman dalam pengelolaan hutan, sejak adanya status HKM tidak ada lagi kasus pencurian kayu. Kedua, adanya tambahan penghasilan dari jasa lingkungan wisata. HKM di Kulon Progo berkembang menjadi ekowisata yang ramai dikunjungi oleh rata-rata per tahun 29.625 wisatawan. Dengan berkembangnya sektor wisata tersebut, anggota HKM Mandiri Kalibiru juga mendapat dampak positif secara ekonomi. Namun, status hutan lindung membuat anggota kelompok HKM tidak bisa mengambil nilai manfaat langsung dari hasil hutan. Meskipun demikian berkembangnya sektor wisata mampu memberi kontribusi

secara ekonomi kepada anggota HKM. Misalnya, anggota HKM Mandiri rata-rata mendapat kompensasi antara Rp. 300.000 sampai Rp400.000 per bulan secara berkala.

Sedangkan untuk kelompok HKM Tani Manunggal Bleberan Gunungkidul, alasan responden nyaman dengan status hutan beragam. Alasan lainnya yang dimaksud pada indikator kenyamanan terhadap sistem pengelolaan HKM antara lain: bertambahnya lahan yang digarap, peningkatan pengetahuan teknologi pertanian. Jawaban yang paling sering muncul adalah mudahnya mendapat bantuan seperti bantuan bibit.

Responden pada kelompok tani HKM Beringin Jaya dan Sinar Mulya menyatakan ada rasa tidak tenang ketika izin pengelolaan belum ada. Mereka harus “kucing-kucingan” dengan petugas sehingga tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Hal tersebut terjadi karena tidak setiap saat tanaman dapat diperhatikan, akibatnya hasil panen menjadi lebih sedikit. Begitu pula ketika hendak memanen dan membawa turun hasil panen, rasa takut membuat responden terburu-buru dan asal dalam memetik hasil.

► Tabel 7.23. Alasan Kenyamanan Dalam Sistem Pengelolaan HKm.

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak menjawab	2	1,0
	Tidak dikejar polisi hutan	2	1,0
	Kepastian hak IUPHKm	47	23,5
	Lainnya	27	13,5
	Semuanya	2	1,0
	Tidak dikejar polisi hutan dan adanya kepastian IUPHKm	114	57,0
	Adanya kepastian IUPHKm dan lainnya	6	3,0
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari Data primer

Jika dicermati dari masing-masing daerah menunjukkan hal yang berbeda antara DIY dan Lampung. Di Kelompok HKm Mandiri Kalibiru dan Tani Manunggal Bleberan sebagian besar responden mengatakan bahwa mereka nyaman mengelola HKm karena adanya kepastian hak IUPHKm. Dalam Tabel 7.24 menunjukkan di

kelompok HKm Mandiri sebanyak 23 responden sedangkan di kelompok HKm Tani Manunggal 24 responden. Sementara di Lampung (kelompok HKm Sinar Mulya dan Beringin Jaya) semua responden menyatakan nyaman karena adanya kepastian hak IUPHK dan tidak dikejar-kejar polisi hutan.

► Tabel 7.24. Lokasi Dan Alasan Kenyamanan

			Lokasi HKm				Total
			Mandiri	Tani Manunggal	Sinar Mulya	Beringin Jaya	
Status nyaman	Tidak menjawab	Count	0	2	0	0	2
		% of Total	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%
	Tidak dikejar	Count	0	2	0	0	2
		% of Total	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%
	Kepastian hak IUHPHK	Count	23	24	0	0	47
		% of Total	11,5%	12,0%	0,0%	0,0%	23,5%
	Lainnya	Count	18	9	0	0	27
		% of Total	9,0%	4,5%	0,0%	0,0%	13,5%
	Semuanya	Count	0	2	0	0	2
		% of Total	0,0%	1,0%	0,0%	0,0%	1,0%
	1 dan 2	Count	6	8	50	50	114
		% of Total	3,0%	4,0%	25,0%	25,0%	57,0%
Total		Count	50	50	50	50	200
		% of Total	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=168,990, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari Data primer

7.4. KENDALA PENGELOLAAN HKm

Pengelolaan HKm telah dimulai pada tahun 2000-an. Selama lima belas tahun berjalan tidak menutup kemungkinan beragam kendala atau hambatan muncul dalam pengelolaan HKm. Jika tidak diantisipasi, kendala-kendala ini

akan mengganggu keberlanjutan pengelolaan HKm. Berdasarkan Tabel 7.25, diketahui bahwa hanya sebagian kecil responden menyatakan adanya hambatan dalam pengelolaan HKm. Mayoritas responden (65,5%) menyatakan tidak ada hambatan dalam pengelolaan HKm.

► Tabel 7.25. Hambatan dalam Pengelolaan HKm

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak ada	131	65,5
	Konflik	15	7,5
	Kurangnya akuntabilitas	15	7,5
	Lainnya	39	19,5
	Total	200	100,0

Sumber: Diolah dari Data primer

Jika dicermati variasi masing-masing daerah ternyata menunjukkan bahwa mayoritas anggota kelompok HKm Sinar Mulya (47 responden) menyatakan tidak ada hambatan di dalam pengelolaan HKm. Demikian juga mayoritas responden di kelompok HKm

Mandiri, Kalibiru (32 responden) dan kelompok HKm Beringin Jaya (35 responden). Sementara mayoritas responden di kelompok Tani Manunggal mengatakan bahwa ada hambatan lainnya (30 responden). Data lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 7.26.

► Tabel 7.26. Lokasi dan Hambatan Pengelolaan HKm

			HAMBATAN				Total
			Tidak ada	Konflik	Kurangnya akuntabilitas	Lainnya	
Lokasi HKm	Mandiri	Count	32	7	2	9	50
		% of Total	16,0%	3,5%	1,0%	4,5%	25,0%
	Tani Manunggal	Count	17	3	0	30	50
		% of Total	8,5%	1,5%	0,0%	15,0%	25,0%
	Sinar Mulya	Count	47	2	1	0	50
		% of Total	23,5%	1,0%	0,5%	0,0%	25,0%
	Beringin Jaya	Count	35	3	12	0	50
		% of Total	17,5%	1,5%	6,0%	0,0%	25,0%
Total		Count	131	15	15	39	200
		% of Total	65,5%	7,5%	7,5%	19,5%	100,0%

Catatan: Chi-square=104,229, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari Data primer

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan hambatan yang muncul dalam pengelolaan HKM di kelompok HKM Tani Manunggal, Gunungkidul adalah anggota kelompok tidak bisa memanen hasil hutan karena belum adanya kejelasan peraturan mengenai hal tersebut. Masyarakat mengeluhkan prosedur izin yang dirasa berbelit-belit. Hal ini dapat menjadi potensi terjadi penjarahan atau pencurian kembali jika prosedur izin penjarangan tidak diubah. Sebagai contoh, untuk melakukan penjarangan kelompok harus melakukan sensus rinci nama pohon, tentunya hal ini memakan biaya yang tidak sedikit. Beberapa tahun yang lalu, anggota kelompok HKM pernah melakukan sensus yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 15.000.000 dan hasilnya tetap saja gagal dalam memperoleh izin penjarangan. Kondisi ini apabila tidak segera diantisipasi dapat menimbulkan potensi *distrust* (ketidakpercayaan) dengan Dinas Kehutanan dan bisa memunculkan anarkisme sosial. Saat terjun ke lapangan, pihak pemerintah (Dinas Kehutanan) seringkali juga bingung ketika masyarakat menanyakan prosedur penjarangan ini.

Kendala lainnya adalah terkait pemanfaatan lahan. Pada awalnya masyarakat menggunakan sistem tumpang sari pada lahan HKM.

Di sela-sela pohon jati sebagai komoditas utama lahan HKM, petani pada saat itu menanam tanaman-tanaman palawija seperti jagung, kacang sehingga memperoleh tambahan penghasilan. Namun saat ini kondisi pohon sudah tinggi sehingga sudah tidak bisa ditanami oleh tanaman lainnya selain tanaman pokok. Tambahan penghasilan saat ini diperoleh dari penjualan daun-daun pohon jati yang diperoleh dari hutan HKM dan komoditas lainnya seperti kepompong dan belalang.

Sedangkan di kelompok HKM Mandiri Kalibiru sebagaimana terlihat pada Tabel 7.25 di atas, hambatan yang muncul di dalam pengelolaan HKM ini adalah konflik dan kurangnya akuntabilitas. Sebagian masyarakat menganggap selama ini yang mengetahui informasi maupun administrasi dalam pengelolaan HKM khususnya wisata Kalibiru merupakan orang-orang tertentu saja. Jika tidak dikelola secara baik ini tentunya dapat menghambat keberlanjutan pengelolaan HKM. Selain itu, status hutan lindung yang ada di kelompok HKM Kalibiru juga menyulitkan mereka untuk mengembangkan wisata Kalibiru secara lebih optimal. Misalnya karena belum ada payung hukum, secara formal menyebabkan kelompok HKM Mandiri di Kalibiru belum mampu memberikan kontribusi secara resmi

dan signifikan melalui Pendapatan Asli Desa maupun Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo. Selama ini kontribusi sosial yang diberikan kelompok HKM lebih bersifat informal seperti bantuan pembangunan masjid, infrastruktur jalan dan sebagainya.

Kelompok tani HKM Beringin Jaya dan Sinar Mulya mayoritas menyatakan tidak ada konflik dalam pengelolaan hutan, akan tetapi pernah ada hambatan yang disebabkan komunikasi. Keberadaan anggota tani yang relatif banyak membuat informasi sampai di waktu yang berbeda, sehingga rentan menimbulkan kesalahpahaman. Keahlian pengurus kelompok juga menjadi salah satu hambatan, hal ini dirasakan wajar karena sebelumnya pengurus adalah petani biasa yang tidak mendapatkan pendidikan atau pelatihan organisasi. Masalah lain yang sering dihadapi oleh para petani di dua kelompok HKM ini

adalah faktor cuaca (angin kencang, hujan dan kemarau di waktu yang tidak sesuai siklus) sehingga menghambat perkembangan usaha perkebunan kopi (Tanggamus). Untuk mengatasi hal ini, para petani sangat membutuhkan bantuan baik berupa alat maupun pengetahuan untuk mengurangi dampak negatif cuaca tersebut.

Masalah yang mengganggu keberlanjutan program dapat dilihat dalam Tabel 7.27. Data tersebut menunjukkan bahwa 63,5% responden menyatakan tidak ada masalah yang mengganggu keberlanjutan program. Sedangkan 15% responden menyatakan hal yang dapat menjadi masalah keberlanjutan program adalah tidak adanya pendampingan yang berkelanjutan. Selain itu, ada 6,5% yang mengatakan bahwa masalah yang mengganggu keberlanjutan program adalah kecemburuan.

► **Tabel 7.27 Masalah yang Mengganggu Keberlanjutan Program**

		Frekuensi	Persentase
Valid	Tidak ada	127	63,5
	Kecemburuan	13	6,5
	Konflik anggota dengan pengurus	2	1,0
	Konflik dengan LSM	3	1,5
	Pendampingan yang tidak berkelanjutan	30	15,0
	Pihak luar HKM membuka lahan	1	,5
	Konflik antar kelompok	5	2,5
	Kombinasi antar a-g	5	2,5
	Lainnya	14	7,0
Total		200	100,0

Sumber: Diolah dari Data primer

Jika mencermati variasi antar daerah sebagaimana di rangkum pada tabel 7.27, menunjukkan bahwa sebagian besar responden di masing-masing kelompok HKm mengatakan tidak ada masalah yang menghambat dalam keberlanjutan HKm. Bahkan di Kelompok HKm Sinar Mulya terdapat 44 responden yang mengatakan demikian. Namun jika mencermati masalah yang lain terlihat bahwa pendampingan yang tidak berkelanjutan menjadi kendala di mana di kelompok HKm Tani Manunggal terdapat 12 responden, Kelompok HKm Mandiri 9 responden dan kelompok HKm Beringin Jaya terdapat 9 responden.

Responden pada masing-masing kelompok HKm menyatakan bahwa masalah yang muncul saat ini adalah kurangnya intensitas pendampingan. Pada awal berdirinya kelompok, pendampingan dilakukan secara gencar dari berbagai pihak yang mencakup berbagai aspek namun saat ini pendampingan yang dilakukan saat ini dirasakan mulai berkurang. Berdasarkan wawancara dengan responden di kelompok HKm Tani Manunggal menunjukkan bahwa pendampingan yang tidak

berkelanjutan menyebabkan pengetahuan yang mereka dapatkan tidak bisa diaplikasikan secara sempurna. Selain itu, pendampingan yang mereka rasakan semakin berkurang sehingga menyebabkan masyarakat khawatir terhadap keberlanjutan HKm.

Berdasarkan Tabel 7.28 dapat dilihat terdapat alasan lainnya yang mengganggu keberlanjutan program HKm di kelompok HKm Tani Manunggal dan kelompok HKm Mandiri. Di kelompok HKm Tani Manunggal alasan lainnya ini adalah kejelasan masa panen dikarenakan peraturan yang belum jelas. Ketika akan melakukan penjarangan, anggota kelompok terbentur adanya masalah peraturan yang belum jelas. Sedangkan di kelompok HKm Mandiri, Kalibiru masalah lainnya yang mengganggu keberlanjutan adalah persaingan dengan kelompok wisata yang mengambil obyek wisata yang serupa seperti Pule Payung dan Gunung Gajah. Destinasi-destinasi wisata ini berdekatan dengan Kalibiru sehingga ke depannya dikhawatirkan akan menurunkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kalibiru.

► Tabel 7.28. Lokasi dan Masalah yang Mengganggu Keberlanjutan Program

			Lokasi HKm				Total
			Mandiri	Tani Manunggal	Sinar Mulya	Beringin Jaya	
Masalah Keberlanjutan	Tidak ada	Count	25	22	44	36	127
		% of Total	12,5%	11,0%	22,0%	18,0%	63,5%
	Kecemburuan	Count	8	2	1	2	13
		% of Total	4,0%	1,0%	0,5%	1,0%	6,5%
	Konflik anggota dengan pengurus	Count	0	0	0	2	2
		% of Total	0,0%	0,0%	0,0%	1,0%	1,0%
	Konflik dengan LSM	Count	0	0	3	0	3
		% of Total	0,0%	0,0%	1,5%	0,0%	1,5%
	Pendampingan yang tidak berkelanjutan	Count	9	12	0	9	30
		% of Total	4,5%	6,0%	0,0%	4,5%	15,0%
	Pihak luar HKm membuka lahan	Count	0	0	1	0	1
		% of Total	0,0%	0,0%	0,5%	0,0%	0,5%
	Konflik antar kelompok	Count	3	0	1	1	5
		% of Total	1,5%	0,0%	0,5%	0,5%	2,5%
	Kombinasi antar a-g	Count	3	2	0	0	5
		% of Total	1,5%	1,0%	0,0%	0,0%	2,5%
	Lainnya	Count	2	12	0	0	14
		% of Total	1,0%	6,0%	0,0%	0,0%	7,0%
Total		Count	50	50	50	50	200
		% of Total	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=85,472, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari Data primer

7.5. ANALISIS TABULASI SILANG

7.5.1. Bentuk Pendampingan dan Hambatan dalam Pengelolaan HKm

Pengelolaan hutan lindung oleh masyarakat bertujuan untuk mendukung kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar hutan. Tujuan ini tidak serta-merta dapat terlaksana karena keterbatasan masyarakat dalam pengelolaan, sehingga diperlukan pendampingan oleh pihak-pihak tertentu. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, peran pihak eksternal dibutuhkan untuk mendorong inovasi dan ide baru ke masyarakat sehingga mereka memiliki kapasitas untuk mandiri. Proses pendampingan dari pihak luar harus ditempatkan sebagai bagian dari proses membina kemampuan (enabling process). Secara teoritik, proses pendampingan dinyatakan berhasil apabila setelah program intervensi berakhir penerima pendampingan secara mandiri dapat melanjutkan berbagai aktivitas membangun yang bersifat swadaya dan swakelola dalam proses selanjutnya (Suyatna, et al., 2015: 45).

Bentuk pendampingan dalam pengelolaan HKm yang diberikan beragam. Untuk mempermudah pembahasan, pendampingan akan dikelompokkan menjadi beberapa hal sebagai berikut: penguatan kapasitas

kelembagaan, kewirausahaan, akses pasar, kelembagaan dan kewirausahaan, kelembagaan dan akses pasar, serta kombinasi dari kelembagaan, kewirausahaan, dan akses pasar. Diharapkan, melalui pendampingan hambatan-hambatan dalam pengelolaan HKm dapat dikurangi.

Tabulasi silang antara bentuk pendampingan dan hambatan dalam pengelolaan HKm, sebagaimana terlihat pada Tabel 7.29 menunjukkan bahwa adanya pendampingan memiliki pengaruh terhadap hambatan dalam pengelolaan HKm. Berdasarkan Tabel 7.29, terdapat 137 responden yang menyatakan bahwa dengan pendampingan maka hambatan dalam pengelolaan HKm berupa konflik (antaranggota, antara anggota dan pengurus, serta antarkelompok), kurangnya akuntabilitas, dan hambatan lainnya menjadi tidak ada. Bentuk pendampingan berupa penguatan kapasitas kelembagaan menjadi bentuk yang paling utama dinyatakan oleh responden (69,5%). Meskipun demikian, ada 17 dari 131 responden (hanya 8,5%) yang menjawab tanpa bantuan pendampingan tidak ada hambatan dalam pengelolaan HKm.

► Tabel 7.29. Tabulasi Silang Bentuk Pendampingan dan Hambatan Pengelolaan HKm

			HAMBATAN				Total
			Tidak ada	Konflik	Kurangnya akuntabilitas	Lainnya	
Bentuk Pendampingan	Tidak ada pendampingan	Count	17	0	0	0	17
		% of Total	8,5%	0,0%	0,0%	0,0%	8,5%
	Penguatan kapasitas kelembagaan	Count	87	12	5	35	139
		% of Total	43,5%	6,0%	2,5%	17,5%	69,5%
	Penguatan Kewirausahaan	Count	4	0	7	0	11
		% of Total	2,0%	0,0%	3,5%	0,0%	5,5%
	Akses pasar	Count	4	0	1	0	5
		% of Total	2,0%	0,0%	0,5%	0,0%	2,5%
	Penguat kelembagaan dan kewirausahaan	Count	10	1	2	3	16
		% of Total	5,0%	0,5%	1,0%	1,5%	8,0%
	Penguatan kelembagaan dan akses pasar	Count	9	1	0	1	11
		% of Total	4,5%	0,5%	0,0%	0,5%	5,5%
	Penguatan kelembagaan, kewirausahaan, dan akses pasar	Count	0	1	0	0	1
		% of Total	0,0%	0,5%	0,0%	0,0%	0,5%
Total		Count	131	15	15	39	200
		% of Total	65,5%	7,5%	7,5%	19,5%	100,0%

Catatan: Chi-square=82,508, signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Diolah dari Data primer

Hasil olah data berdasarkan Tabel 7.29 juga diperkuat dengan hasil wawancara dan FGD di lokasi penelitian. Di Kelompok HKm Tani Manunggal Bleberan, para kelompok tani juga mengakui bahwa pendampingan yang dilakukan terutama oleh LSM Java Learning Center (Javlec) memberikan kontribusi positif bagi pengelolaan keuangan kelompok yang lebih transparan, menjaga kekompakan antar anggota kelompok dan kesadaran mereka dalam menjaga kelestarian hutan. Hal demikian juga diakui oleh Kelompok HKm Mandiri Kalibiru yang juga menyatakan bahwa pendampingan yang dilakukan berhasil meningkatkan ketrampilan mereka dalam pengelolaan kelompok menjadi lebih transparan dan akuntabel. Potensi kecemburuan antara anggota dengan pengurus kelompok HKm memang ada akan tetapi selama ini masih dapat dikelola secara baik oleh kelompok.

Salah satu pendamping yang secara konsisten membantu kelompok tani HKm Beringin Jaya dan Sinar Mulya adalah Konsorsium Kota Agung Utara (KORUT). Dalam melaksanakan kegiatannya, KORUT bekerjasama dengan banyak pihak di antaranya adalah: PSKL (perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan) Kabupaten Tanggamus, BP2SDM (Badan Penyuluhan dan Peningkatan

Sumber Daya Manusia) Kabupaten Tanggamus, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tanggamus, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Kota Agung Utara, KPHL Batu Tegi, IPKINDO (Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia), Dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Tanggamus. Selain melakukan pendampingan kepada Beringin Jaya dan Sinar Mulya, KORUT juga melakukan pendampingan terhadap 26 Gapoktan HKm lain di Kabupaten Tanggamus (KORUT, 2017).

Pendampingan yang dilakukan oleh KORUT terdiri dari tiga komponen yaitu, penguatan pengelolaan HKm, penguatan kawasan HKm sebagai penyangga taman nasional dan waduk Batu Tegi, serta pengembangan ekonomi terpadu. Wujud nyata dari ketiga komponen tersebut meliputi penguatan kelembagaan HKm, pembukaan dan peningkatan jaringan pemasaran, pengembangan koperasi, hingga peningkatan kapasitas HKm (Priyono, 2017). Wawancara dan FGD terhadap responden di kelompok tani HKm Beringin Jaya dan Sinar Mulya menemukan bahwa mayoritas responden menjawab tidak ada hambatan dalam pengelolaan HKm. Hal ini dapat terjadi karena anggota tani didampingi untuk memiliki wadah untuk meningkatkan

kesejahteraan bersama. Melalui beragam aktivitas yang ada, kekompakan dan rasa memiliki mulai terpupuk sehingga konflik dan hambatan dalam pengelolaan HKm semakin sedikit terjadi. Meskipun demikian, masih ada beberapa hambatan yang ditemui tetapi dapat diselesaikan sebelum menjadi masalah yang berlarut-larut. Hambatan ini bisa muncul karena kesalahan komunikasi ataupun karena anggota tani masih dalam tahap belajar mengelola hutan kemasyarakatan.

7.5.2. Peran Kelembagaan dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat dan Hambatan dalam Pengelolaan HKm

Adanya kelembagaan yang aktif dalam mendorong pemberdayaan masyarakat akan memberikan kontribusi positif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada di kelompok. Keberadaan institusi lokal akan memungkinkan penerapan strategi pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada kelompok. Institusi lokal strategis bagi upaya pemberdayaan karena dapat berperan dalam memfasilitasi tindakan bersama. Didalam kelompok terjadi suatu dialogical center yang menumbuhkan dan memperkuat kesadaran dan solidaritas kelompok.

Anggota kelompok menumbuhkan identitas seragam dan mengenali kepentingan mereka bersama (Moeljarto, 1996:138). Melalui kelembagaan lokal, diharapkan masyarakat juga dapat berperan lebih aktif untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul, mengembangkan potensi dirinya serta dapat menggali potensi lokal dan ikut berperan serta melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintah agar tercipta kesejahteraan sesuai yang diharapkan. (Suyatna et al., 2016: 45).

Dalam konteks pengelolaan HKm ini, muncul beberapa kelembagaan lokal seperti koperasi, kelompok usaha, kelompok sadar wisata (pokdarwis), maupun gabungan kelompok tani (gapoktan). Lembaga lokal inilah yang diharapkan mampu memberikan peran lebih besar sebagai wadah bagi masyarakat untuk saling bertukar informasi dan memecahkan secara bersama-sama permasalahan yang ada dalam pengelolaan HKm.

Dari hasil penelitian di DIY dan Lampung, sebagaimana dirangkum pada Tabel 7.30, menunjukkan adanya variasi yang signifikan antara aktif tidaknya peran kelembagaan dalam menyelesaikan hambatan dalam pengelolaan HKm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

sebanyak 131 responden (65,55%) menyatakan tidak ada hambatan dalam pengelolaan HKm, di mana 55,5% mengaku aktifnya peran kelembagaan, 15% menyelesaikan konflik dan kurangnya akuntabilitas.

► **Tabel 7.30. Tabulasi Silang Peran Kelembagaan dan Hambatan Pengelolaan HKm**

			HAMBATAN				Total
			Tidak ada	Konflik	Kurangnya akuntabilitas	Lainnya	
Peran Kelembagaan	Tidak aktif	Count	20	0	0	1	21
		% of Total	10,0%	0,0%	0,0%	0,5%	10,5%
	Aktif	Count	111	15	15	38	179
		% of Total	55,5%	7,5%	7,5%	19,0%	89,5%
Total		Count	131	15	15	39	200
		% of Total	65,5%	7,5%	7,5%	19,5%	100,0%

Catatan: Chi-square=9,301, signifikan pada derajat kepercayaan 95%

Sumber: Diolah dari Data primer

Hasil penelitian di lapangan juga memperkuat apa yang ditunjukkan pada Tabel 7.30 tersebut. Lembaga-lembaga yang ada di masing-masing kelompok HKm cukup aktif melakukan pertemuan sebulan sekali. Di luar pertemuan bulanan mereka juga seringkali berinteraksi secara informal. Di Kelompok HKm Mandiri, Kalibiru masyarakat setiap hari justru berinteraksi karena mereka memiliki aktivitas pengelolaan wisata. Di antara anggota-anggota kelompok HKm juga muncul kepedulian untuk saling mengingatkan bersama pentingnya soliditas kelompok dan kesadaran menjaga hutan. Hal inilah

yang menyebabkan masyarakat cenderung tidak memiliki hambatan dalam pengelolaan HKm (10%). Adanya institusi lokal yang cukup aktif inilah yang seharusnya dapat dijadikan sebagai modal sosial untuk mendorong keberlanjutan pengelolaan HKm.

Aktivitas kelompok tani HKm Beringin Jaya dan Sinar Mulya di Tanggamus Lampung berbeda dengan kelompok tani di Gunungkidul dan Kulonprogo. Wisata di kawasan hutan belum berjalan aktif karena pengelolaan yang masih belum profesional. Aktivitas utama kelompok tani HKm di Tanggamus berkisar di tanaman

perkebunan dengan komoditas utama kopi, sehingga kelembagaan yang terbentuk berfokus pada pengelolaan tanaman perkebunan tersebut. Peran aktif dari lembaga yang terbentuk membantu anggota tani memperoleh pengetahuan yang mendukung pengelolaan tanaman perkebunan, dari sebelum dan sesudah panen. Kegiatan bersama yang dilakukan para anggota kelompok tani tersebutlah yang membantu meminimalisir hambatan dalam pengelolaan HKM.

7.5.3. Keberadaan Pendampingan dan Hambatan dalam Pengelolaan HKM

Pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Esensi pemberdayaan pada hakekatnya tidak sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, akan tetapi merupakan usaha untuk membentuk kemandirian sehingga masyarakat dapat mengatasi permasalahan mereka sendiri (Suparjan & Suyatna, 2003: 22). Oleh karena itu, pendampingan sebagai bagian sentral pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk

mendorong terciptanya kekuatan dan kemampuan masyarakat untuk secara mandiri mampu mengelola dirinya, berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta mampu mengatasi tantangan persoalan di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal tersebut, keberadaan pendampingan diharapkan akan membantu masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan HKM. Lembaga-lembaga lokal yang baru muncul dari kelompok HKM ini membutuhkan adanya pendampingan secara intensif sebab pada umumnya pengelola lembaga HKM masih belum memiliki kapasitas memadai untuk mengelola lembaga tersebut. Bentuk pendampingan tersebut dapat berupa penguatan kapasitas kelembagaan, kewirausahaan, penguatan akses pasar, dan sebagainya. Keberadaan pendamping dalam pengelolaan kelembagaan diharapkan mampu membantu kemajuan lembaga yang bersangkutan agar mampu menciptakan kesejahteraan antar anggota dan kelompok.

Tabel 7.31 menunjukkan hubungan antara keberadaan pendampingan dengan lembaga yang muncul dengan hambatan dalam pengelolaan HKM. Dari Tabel 7.31 tersebut menunjukkan bahwa terdapat 186 responden (93%) menyatakan bahwa

adanya pendampingan terhadap kelembagaan yang muncul dapat meminimalkan hambatan dalam pengelolaan HKm seperti konflik dan kurangnya akuntabilitas. Ini

didukung oleh 117 responden (58,5%) yang menyatakan bahwa dengan adanya pendampingan menyebabkan tidak ada hambatan dalam pengelolaan HKm.

► **Tabel 7.31. Tabulasi Silang Keberadaan Pendampingan dan Hambatan Pengelolaan HKm**

			Pendamping		Total
			Tidak	Ya	
Hambatan	Tidak ada	Count	14	117	131
		% of Total	7,0%	58,5%	65,5%
	Konflik	Count	0	15	15
		% of Total	0,0%	7,5%	7,5%
	Kurangnya akuntabilitas	Count	0	15	15
		% of Total	0,0%	7,5%	7,5%
	Lainnya	Count	0	39	39
		% of Total	0,0%	19,5%	19,5%
Total		Count	14	186	200
		% of Total	7,0%	93,0%	100,0%

Catatan: Chi-square=7,929, signifikan pada derajat kepercayaan 95%

Sumber: Diolah dari Data primer

Hasil wawancara dan FGD di keempat lokasi HKm yakni kelompok Tani Manunggal Bleberan, kelompok HKm Mandiri Kalibiru, kelompok HKm Sinar Mulya Sukamaju dan Kelompok HKm Beringin Jaya Margoyoso memperkuat data survey tersebut, Keberadaan pendampingan membantu mereka meningkatkan ketrampilan merawat dan memelihara hutan, Dari dimensi sosial, aktivitas pencurian kayu juga sudah mulai tidak ada, Hambatan-

hambatan lain seperti konflik antar anggota, konflik anggota dengan pengurus juga dapat diminimalkan, Masyarakat juga sudah sadar arti pentingnya kelembagaan yang ada dan arti penting kelestarian hutan bagi mereka, Berdasarkan hasil temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pendampingan yang dilakukan secara maksimal akan meminimalisir hambatan dalam pengelolaan HKm.

BAB 8

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN PERHUTANAN SOSIAL

Analisis dampak dilakukan berdasarkan studi kasus di lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Mandiri, di Dusun Kalibiru Desa Hargowilis dan Tani Manunggal di Dusun Menggoran II, Desa Bleberan (Yogyakarta), Sinar Mulya, Pekon Sukamaju dan Beringin Jaya, Pekon Margoyoso (Lampung). Pada Subbab 8.1 akan dijabarkan hakikat sustainabilitas. Adapun dampak dari program HKm dari sisi sustainabilitas fungsi produksi dipaparkan pada Subbab 8.2.

Di lapangan, dampak program HKm terhadap kelestarian fungsi ekologi dipotret dari ancaman dalam pengelolaan HKm. Hasil analisis terhadap responden di lokasi studi HKm terkait hal tersebut ditampilkan pada Subbab 8.3. Kriteria untuk penentuan kelestarian fungsi sosial dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat mencakup kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi, dan keadilan manfaat

menurut kepentingan komunitas.

Dampak program HKm terhadap kelestarian fungsi sosial dipotret dari partisipasi masyarakat pada tiap tahapan, yaitu: pada tingkat perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Berikutnya dipotret keterlibatan para *stakeholders* pada program HKm. Hasil analisis kelestarian fungsi sosial disajikan pada Subbab 8.4.

8.1. HAKIKAT SUSTAINABILITAS

Di dalam menganalisis sustainabilitas pengelolaan sumberdaya hutan harus mengacu pada tiga asas kelestarian yang dapat menjadi landasan berfikir dari sebuah pengelolaan hutan (Simon, 2010). Pertama adalah kelestarian hasil (statis), yaitu kelestarian yang hanya menghendaki hasil yang sama setiap tahunnya. Kedua adalah kelestarian potensi (dinamis), yaitu kelestarian yang menuntut kemampuan yang maksimal secara kontinyu dari hutan untuk menghasilkan produk tertentu. Ketiga adalah kelestarian ekosistem, yaitu kelestarian yang menginginkan adanya kontinuitas

dari seluruh kemanfaatan hutan yang dapat diberikan baik dalam menjaga keseimbangan ekosistem (mencegah banjir dan erosi, menjaga tata air, menjaga kualitas udara, dan lain-lain) maupun dalam memberikan kemanfaatan kepada manusia.

Untuk dapat mewujudkan kelestarian dalam pengelolaan hutan, minimal harus memenuhi tiga persyaratan, yaitu: areal yang dikelola harus sudah dilaksanakan tata batas yang jelas padanya, dalam eksploitasi tidak boleh melebihi kemampuan hutan untuk menghasilkan produk atau riap (jatah tebangan), dan yang terakhir adalah adanya jaminan keberhasilan dari proses penanaman kembali (regenerasi) agar sumber daya hutan tetap dapat mempertahankan potensinya (Simon, 2006). Apabila ketiga syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, hampir dapat dipastikan bahwa pengelolaan hutan akan kehabisan sumberdayanya dan akan menyebabkan berbagai macam degradasi lingkungan.

Sustainability atau lebih populer disebut kelestarian (*sustainability*) dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan dipahami sebagai pencapaian dan pemeliharaan luaran (*output*) hutan sebagai sumberdaya yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) secara terus menerus (*perpetuity*) atau dalam dimensi

kehidupan secara lintas generasi (*intergeneration*). Dengan demikian, syarat pengelolaan hutan yang penting adalah menghindarkan terjadinya pemanfaatan sumber daya yang berlebihan (*overuse*) atau melebihi daya dukungnya (*carrying capacity*) dan dalam pengusahaannya melakukan reinvestasi minimal sama dengan apa yang diambil dari sumberdaya (Sardjono, 2005). Hal tersebut penting agar sumberdaya dapat terus mempertahankan strukturnya (*ecological* atau *environmental sustainability*) dalam upaya mempertahankan fungsi dan manfaatnya.

Berkaitan dengan sumberdaya hutan di Indonesia, di mana masyarakat dalam faktanya menjadi elemen integral atau sulit terpisahkan dari sumberdaya hutan, kelestarian ekologi, dan ekonomi hanya dimungkinkan dicapai bila pengelolaan sumberdaya juga senantiasa memperhatikan kehidupan dan penghidupan masyarakat lokal. Pemahaman sederhana siapa yang dimaksud dengan masyarakat lokal (*local community*). Masyarakat lokal adalah sekelompok manusia yang bermukim di dalam atau di sekitar hutan serta kehidupannya tergantung pada sumberdaya tersebut. Ditinjau dari latar belakang budaya yang dimilikinya dalam kaitannya dengan

sumberdaya, masyarakat lokal dikategorikan menjadi dua, yaitu: tradisional/masyarakat adat dan non tradisional.

Prinsip kelestarian hutan pada dasarnya telah lama dianut dalam pengusahaan dan pengelolaan hutan. Konsep kelestarian hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan pada mulanya muncul dalam kegiatan pengusahaan hutan untuk keperluan produksi, bahkan secara lebih khusus adalah untuk produksi kayu. Hal ini dapat dimengerti karena hasil hutan yang pertama kali dirasakan paling besar manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan manusia adalah kayu. Walaupun dalam perkembangannya penerapan konsep kelestarian cenderung diperluas ke dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara umum, namun konsep kelestarian hasil hutan yang berupa kayu jauh lebih maju dibanding dengan konsep pengaturan hasil hutan bukan kayu dan hasil hutan yang bersifat *intangible* lainnya.

Perkembangan konsep kelestarian dalam pengelolaan sumberdaya hutan sejalan dengan nilai dan manfaat hasil hutan non kayu, baik yang bersifat *tangible* maupun *intangible*, dan makin tinggi akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan dalam penerapan konsep manfaat

ganda sumberdaya hutan yang bermula dari pembagian sumberdaya hutan ke dalam fungsi-fungsi tertentu (fungsi perlindungan, produksi, pelestarian dan pengawetan, serta rekreasi) di dalam suatu pengelolaan hutan secara intensif yang menuntut terpenuhinya setiap fungsi tersebut dari setiap satuan lahan hutan yang dikelola.

Kriteria dari kelestarian fungsi produksi di dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat mencakup tiga macam kelestarian, yaitu: kelestarian sumberdaya, kelestarian hasil, dan kelestarian usaha. Indikator kelestarian sumberdaya, antara lain adalah: status dan batas lahan jelas, perubahan luas penutupan lahan, manajemen pemeliharaan hutan, dan sistem silvikultur sesuai daya dukung hutan.

Indikator untuk kelestarian hasil hutan, meliputi: penataan areal pengelolaan hutan, kepastian adanya potensi produksi untuk dipanen lestari, pengaturan hasil, efisiensi pemanfaatan hutan, keabsahan sistem lacak balak dalam hutan, prasarana pengelolaan hutan, dan pengaturan manfaat hasil (LEI, 2004). Sedangkan indikator kelestarian usaha, meliputi: kesehatan usaha, kemampuan akses pasar, sistem informasi manajemen, tersedianya tenaga terampil, investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan

hutan, serta kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi setempat (LEI, 2004).

Penentuan konsep kelestarian fungsi ekologi mencakup: stabilitas ekosistem dan sintasan *spesies* langka/endemik/dilindungi (LEI, 2004). Indikator stabilitas ekosistem, antara lain: tersedianya aturan kelola produksi yang meminimalkan gangguan terhadap integritas lingkungan dan proporsi luas kawasan dilindungi yang tertata baik terhadap keseluruhan kawasan yang seharusnya dilindungi dan sudah ditata batas di lapangan. Indikator berikutnya adalah: dampak kegiatan kelola produksi terhadap stabilitas ekosistem (tanah, air, struktur, dan komposisi hutan) dan intensitasnya terdokumentasi, serta adanya rencana kelola lingkungan dan efektifitas kegiatannya. Indikator sintasan *spesies* langka/endemik/dilindungi, antara lain: tersedianya informasi mengenai *spesies* langka/endemik/dilindungi dan agihan habitatnya yang penting dalam kawasan, adanya upaya minimalisasi dampak kelola produksi terhadap *spesies* langka/endemik/dilindungi.

Indikator kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas mencakup: status lahan tidak dalam proses konflik dengan warga anggota komunitasnya maupun pihak lain, kejelasan batas-batas areal dengan

pihak lain, fungsi kawasan menurut kepentingan komunitas/publik secara jelas diakui sebagai kawasan hutan tetap, digunakannya tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang demokratis dan adil terhadap pertentangan klaim atas hutan yang sama, dan pelaku pengelolaan HKm benar-benar warga komunitas, baik dijalankan sendiri atau bermitra.

Terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas dilihat dari indikator: sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi, penerapan teknik-teknik produksi minimal tetap mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada, baik laki-laki maupun perempuan (LEI, 2004). Indikator berikutnya adalah: kegiatan pengelolaan hutan maupun paskapanensejauh mungkin dikembangkan di dalam wilayah komunitas dan menggunakan tenaga kerja komunitas.

Indikator terbangunnya pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi. Ini termasuk pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam pengelolaan hutan merupakan hubungan sosial relatif sejajar dan pembagian kewenangan yang jelas, demokratis dalam organisasi

penyelenggaraan HKm.

Selanjutnya keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas dipandang dari indikator: adanya kompensasi atas kerugian yang diderita komunitas secara keseluruhan akibat pengelolaan hutan oleh kelompok dan disepakati seluruh warga komunitas, seluruh warga komunitas dan publik terbuka untuk terlibat dalam penyelenggaraan HKm, dan adanya mekanisme pertanggungjawaban publik dari kelompok pengelola terhadap komunitas dan/atau publik.

8.2. SUSTAINABILITAS HKm

Subbab 8.2 tentang sustainabilitas HKm akan membahas perubahan tutupan lahan di empat lokasi HKm pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 2016 melalui kajian data sekunder yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selanjutnya berturut-turut akan dipaparkan hasil survei terhadap responden di empat lokasi HKm yang mencakup jenis tanaman, tanaman pokok, rehabilitasi, dan pertumbuhan bibit.

8.2.1. Perubahan Tutupan Lahan

Terbukanya akses legal bagi masyarakat memasuki lahan hutan melalui program HKm sangat

berdampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan eksistensi keberadaan hutan serta fungsi ekologisnya. Hadirnya HKm di Kulon Progo, Gunungkidul, dan Tanggamus diharapkan mampu menjadi resolusi konflik antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan. Masyarakat sekitar hutan yang tergabung dalam gabungan kelompok tani (gapoktan) diharapkan mampu membantu mempertahankan fungsi hutan lindung ataupun hutan produksi. Pengelolaan HKm yang berlandaskan asas keberlanjutan akan memberi dampak terhadap kelestarian dari keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, ekosistem perairan (mata air, sungai, danau, dan air terjun) dan kesehatan hutan. Pengelolaan hutan yang baik mampu mencegah dan meminimalisasi terjadinya erosi, banjir, dan kebakaran hutan. Oleh karena itu, dibutuhkan *monitoring* dan evaluasi yang dapat mengukur dampak dari HKm terhadap lingkungan dan kelestarian hutan. Beberapa indikator yang digunakan dalam kajian ini untuk mengukur dampak tersebut, yaitu: sustainabilitas, tingkat ancaman yang ada, seperti: kebakaran, pengebangan pohon, pencurian, ancaman gangguan satwa, dan perburuan satwa. Partisipasi kelompok tani

dalam HKm juga menjadi penentu tercapainya program HKm.

Program HKm di Kulon Progo, Gunungkidul, dan Tanggamus telah berjalan sejak lama. Hal ini terlihat dari diperolehnya Surat Keputusan (SK) HKm mulai dari tahun 2007, 2009, 2014 dan 2017. SK tersebut diberikan kepada gapoktan HKm yang ada di Kulon Progo, Gunungkidul, dan Tanggamus. Kriteria untuk penentuan kelestarian fungsi sosial dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat mencakup: kejelasan sistem tenurial lahan dan hutan komunitas, terjaminnya ketahanan dan pengembangan ekonomi komunitas, terbangun pola hubungan sosial yang simetris dalam proses produksi, serta keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas. Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) yang diberikan pemerintah memberikan akses kepada masyarakat untuk berpartisipasi mengelola wilayah hutan dengan aturan-aturan tertentu. Faktanya ijin tersebut memberikan dampak terhadap tutupan lahan dari tahun ke tahun.

Berdasarkan Tabel 8.1a, perubahan tutupan lahan yang terjadi di HKm Mandiri Kaliburu sangat menarik dan mendukung kelestarian hutan lahan kering sekunder. Hal tersebut dikarenakan tutupan pertanian lahan kering

campuran beralih fungsi menjadi tutupan hutan lahan kering sekunder. Pada tahun 2009-2014 tidak ada hutan lahan kering sekunder. Namun di tahun 2016, luas hutan lahan kering sekunder menjadi 113,77 ha. Sebaliknya pertanian lahan kering campuran yang awalnya pada tahun 2009-2014 memiliki luas 113,77 ha menjadi tidak ada karena beralih fungsi menjadi hutan lahan kering sekunder.

Di sisi lain, perubahan juga terjadi pada tutupan pertanian lahan kering. Di tahun 2009 pertanian lahan kering memiliki luas 19,85 ha. Namun di tahun 2014-2016 terdapat sawah yang lokasinya di luar unit HKm. Jika dilihat dari status kawasan lahan HKm yang merupakan hutan lindung, maka pengalihfungsian lahan pertanian kering menjadi lahan sawah kurang sesuai dengan fungsi hutan lindung. Secara normatif kawasan hutan lindung merupakan kawasan yang tidak dapat dijadikan sebagai lahan sawah (Kementerian Pertanian, 2013).

Berdasarkan perubahan tutupan lahan di HKm Kaliburu dapat diketahui cadangan serapan karbon. Tutupan lahan tahun 2016 di HKm Kaliburu terdiri dari 113,77 ha hutan lahan kering sekunder dan 19,85 ha sawah (lihat Tabel 8.1a). Dari 113,77 ha hutan lahan kering sekunder, dapat dihitung jumlah cadangan

karbon sebesar 9.698,89 Carbon (C) ton. Hal ini diperoleh berdasarkan perhitungan data cadangan karbon per hektar untuk 7 tipe penutupan lahan hutan skala regional. Untuk pulau Jawa, cadangan karbon per hektar sebesar 85,25 C ton/ha. Sedangkan untuk sawah dihitung

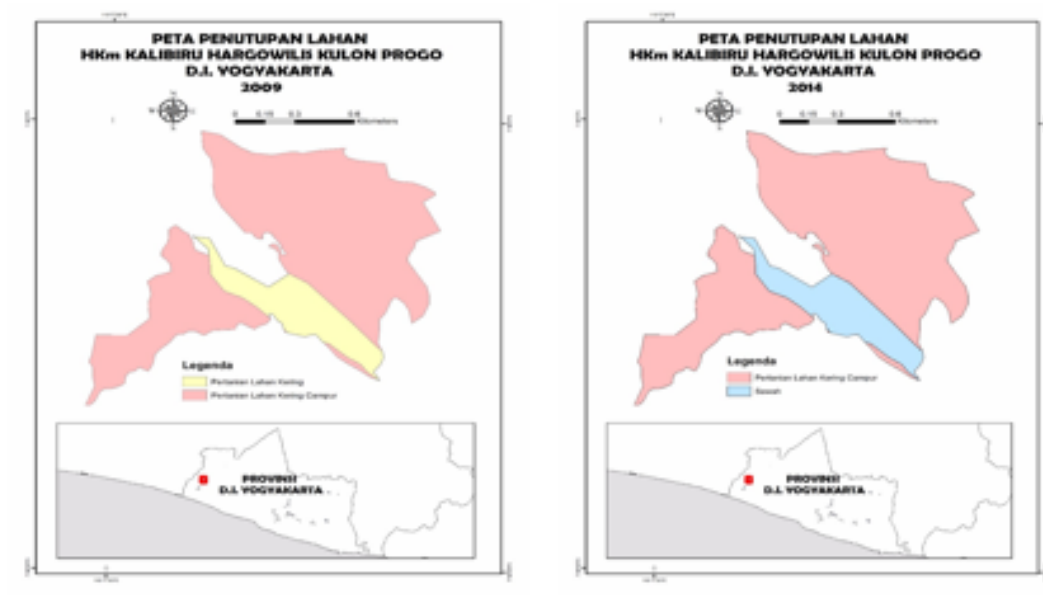
berdasarkan data cadangan karbon per hektar untuk 23 tipe penutupan lahan skala nasional di mana setiap hektar sawah memiliki cadangan karbon 2 C ton/ha. Dari luas total sawah 19,85 ha diperoleh cadangan karbon sebesar 39,7 C ton (Tosiani, 2015).

► Tabel 8.1a. Perubahan Tutupan Lahan HKm di Kalibiru, Desa Hargowilis

Tahun	Hutan Lahan Kering Sekunder	Pertanian Lahan Kering	Pertanian Lahan Kering Campur	Sawah
2009	-	19,85	113,77	-
2014	-	-	113,77	19,85
2016	113,77	-	-	19,85

Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2017)

► Gambar 8.1. Peta Penutupan Lahan HKm Kalibiru, Desa Hargowilis tahun 2009 dan 2014



Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2018)

► Gambar 8.2. Peta Penutupan Lahan HKm di Kalibiru, Hargowilis Tahun 2016



Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2018)

Berbeda dengan HKm Mandiri Kalibiru, perubahan tutupan lahan tidak terjadi di HKm Tani Manunggal. Luas tutupan hutan lahan kering sekunder yang semula di tahun 2009 yaitu 129,40 ha sampai dengan tahun 2016 tidak berubah dan tidak ada pengalih fungsian lahan (lihat Tabel 8.1b).

Pada KTHKm Tani Manunggal, tutupan lahan tidak mengalami

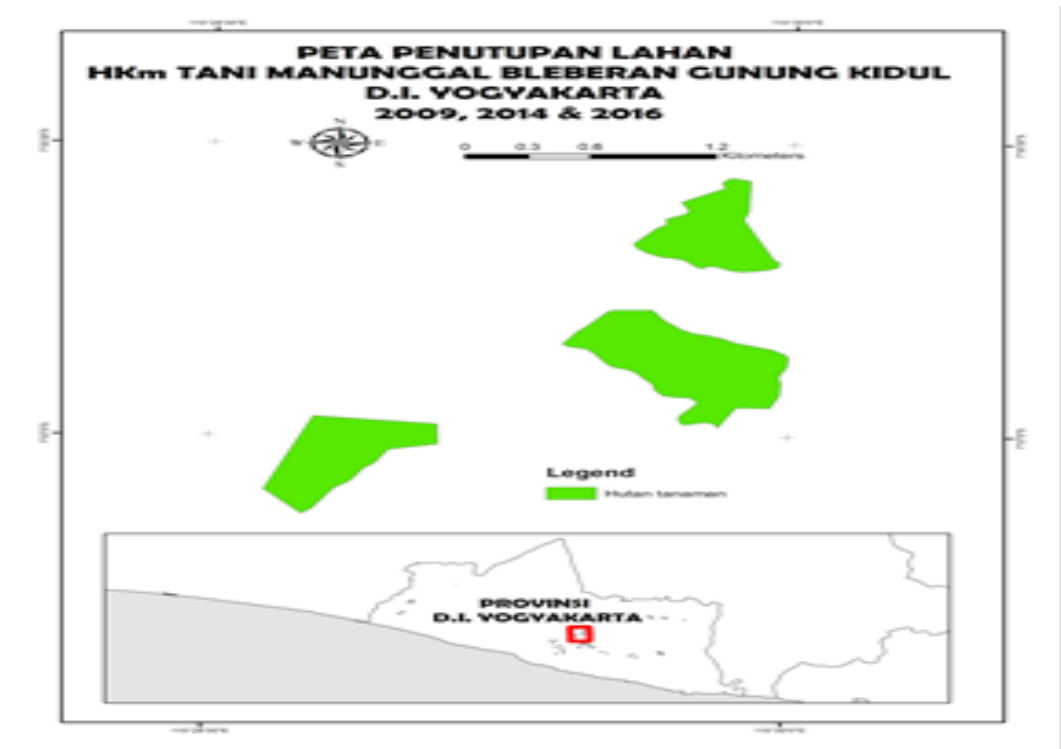
perubahan yaitu hanya ada tipe hutan lahan kering dari tahun 2009-2016. Akibatnya, cadangan karbon yang dimiliki dengan luas hutan lahan kering sekunder sebesar 129,4 ha yaitu sebesar 11.031,35 C ton. Setiap hektar hutan lahan kering sekunder ini memiliki cadangan karbon sebesar 85.25 C ton/ha (Tosiani, 2015).

► Tabel 8.1b. Perubahan Tutupan Lahan HKm di Menggoran, Desa Bleberan

Tahun	Hutan Lahan Kering Sekunder
2009	129,40
2014	129,40
2016	129,40

Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2017)

► Gambar 8.3. Peta Penutupan Lahan HKm Tani Manunggal Bleberan tahun 2009, 2014 dan 2016



Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2018)

Di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju terjadi perubahan tutupan lahan dari tahun 2009 sampai dengan 2014. Sementara dari tahun

2014 sampai 2016 tidak terjadi perubahan tutupan lahan. Tutupan hutan lahan kering sekunder mengalami penurunan seluas 2,91

ha. Penurunan tersebut juga terjadi pada pertanian lahan kering seluas 352 ha. Berdasarkan studi yang dilakukan Ngaji (2009), perubahan penggunaan lahan hutan menjadi pertanian menyebabkan lahan tidak produktif, sehingga berdampak tidak adanya ketersediaan air di musim kering. Sebaliknya, menanam pohon dapat mengurangi limpasan permukaan (*surface run-off*) dan meningkatkan aliran cepat tanah (*soil quick flow*), sehingga kapasitas penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS) meningkat. Sementara pertanian lahan kering campuran mengalami peningkatan seluas 354,91 ha (lihat Tabel 8.1c).

HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju memiliki 3 tipe tutupan lahan yaitu hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan kering campur. Pada tahun 2016 HKm Sinar Mulya

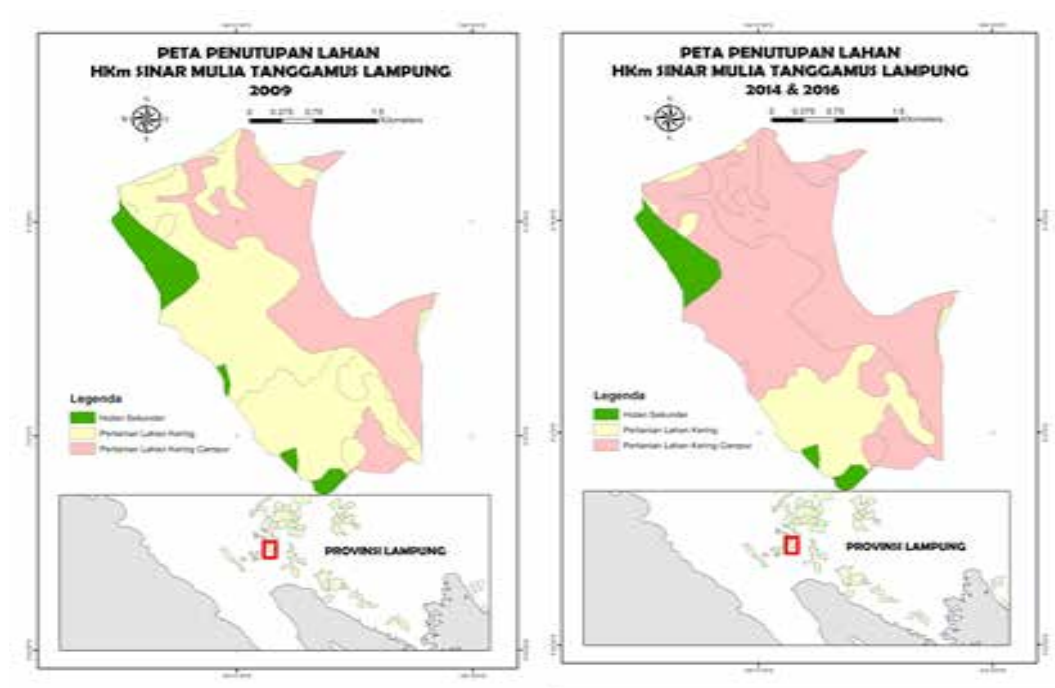
memiliki luas hutan lahan kering sekunder sebesar 63,85 ha, memiliki cadangan karbon sebesar 5.818,01 C ton. Nilai tersebut merupakan konversi dari data cadangan karbon untuk tipe hutan lahan kering sekunder di Pulau Sumatera di mana setiap hektar hutan lahan kering sekunder memiliki cadangan karbon sebesar 91,12 C ton/ha. Sedangkan untuk tipe lahan pertanian kering yaitu sebesar 179,34 ha memiliki cadangan karbon sebesar 1.793,4 C ton dan pertanian lahan kering campur seluas 680,23 ha memiliki cadangan karbon sebesar 20.406,9 C ton. Nilai tersebut merupakan hasil konversi dari data cadangan karbon untuk pertanian lahan kering memiliki cadangan karbon sebesar 10 C ton/ha dan pertanian lahan kering campur sebesar 30 C ton/ha (Tosiani, 2015).

► Tabel 8.1c. Perubahan Tutupan Lahan di Lokasi HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju

Tahun	Hutan lahan Kering sekunder	Pertanian Lahan Kering	Pertanian lahan Kering Campur
2009	66,76	531,34	325,32
2014	63,85	179,34	680,23
2016	63,85	179,34	680,23

Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2017)

► Gambar 8.4. Peta Penutupan Lahan di Lokasi HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju tahun 2009, 2014 dan 2016



Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2018)

Jika dibandingkan antara HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso, terdapat perbedaan perubahan tutupan lahan di antara keduanya. Di HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso tutupan hutan lahan kering skunder tidak mengalami perubahan, dari tahun 2009 hingga 2016 luas tutupan lahan tetap 9,61 ha. Sementara pada pertanian lahan kering relatif sama dengan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju, di HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso juga luas pertanian

lahan kering mengalami penurunan, yaitu berkurang sebanyak 271,76 ha dan pertanian lahan kering campuran mengalami peningkatan seluas 271,75 ha (lihat Tabel 8.1d).

HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso dengan 3 tipe tutupan lahan yaitu hutan lahan kering skunder, pertanian lahan kering, dan pertanian lahan kering campur. Tahun 2016, HKm ini memiliki luas hutan lahan kering skunder sebesar 9,61 ha. Jika dikonversikan, HKm ini memiliki cadangan karbon

sebesar 875,66 C ton. Nilai tersebut merupakan konversi dari data cadangan karbon di Pulau Sumatera di mana setiap hektar hutan lahan kering sekunder memiliki cadangan karbon sebesar 91,12 C ton/ha. Sedangkan untuk tipe pertanian lahan kering yaitu sebesar 24,08 ha memiliki cadangan karbon sebesar 240,8 C ton dan pertanian lahan

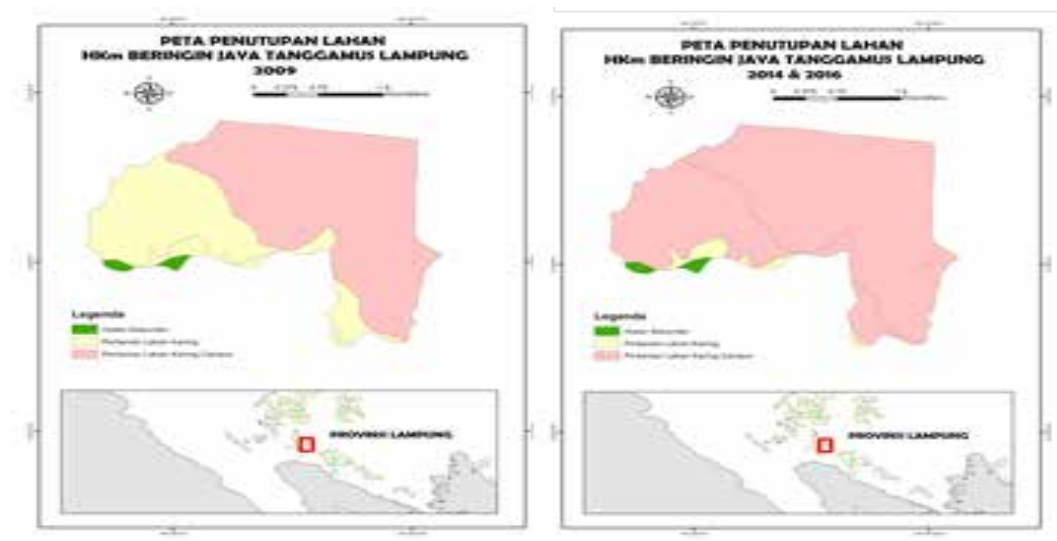
kering campur seluas 830,08 ha memiliki cadangan karbon sebesar 20.902,4 C ton. Nilai tersebut hasil konversi dari data cadangan karbon untuk pertanian lahan kering memiliki cadangan karbon sebesar 10 C ton/ha dan pertanian lahan kering campur sebesar 30 C ton/ha (Tosiani, 2015).

► Tabel 8.1d. Perubahan Tutupan Lahan di Lokasi HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso

Tahun	Hutan lahan Kering sekunder	Pertanian Lahan Kering	Pertanian lahan Kering Campur
2009	9,61	295,84	558,33
2014	9,61	24,08	830,08
2016	9,61	24,08	830,08

Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2017)

► Gambar 8.5. Peta Penutupan Lahan di Lokasi HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso tahun 2009, 2014 dan 2016



Sumber: Diolah dari Kementerian LHK (2018)

Perubahan tutupan lahan pada kedua lokasi HKM di Tanggamus tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan kelompok tani pengelola hutan terhadap lahan perkebunan yang sangat tinggi. Sebagian besar kelompok tani menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan kopi. Faktor ekonomi tersebut yang menyebabkan meningkatnya luasan pertanian lahan kering campuran dan berkurangnya luasan pertanian lahan kering serta tutupan hutan lahan kering sekunder. Hal tersebut sejalan dengan studi yang dilakukan Putiksari *et al.*, (2014) bahwa faktor sosial ekonomi seperti rendah dan tingginya pendapatan menjadi pendorong terjadinya perambahan yang menyebabkan deforestasi. Di sisi lain, kelompok tani sangat mengeluhkan terjadi pembukaan lahan garapan baru yang disebabkan oleh penggarap ilegal. Mereka tidak memiliki izin HKM dan tidak tergabung dalam kelompok tani bahkan berasal dari desa lain. Sampai saat ini belum ada tindakan pencegahan yang efektif atau penerapan sanksi hukum kepada penggarap ilegal tersebut, yang mengakibatkan jumlah mereka semakin bertambah. Oleh karena itu, tindakan cepat dan tepat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan terjadi pembukaan lahan hutan. Pemerintah KLHK harus menerapkan

regulasi yang tegas yang memiliki payung hukum yang jelas sehingga mampu memberikan efek jera kepada penggarap ilegal. Setelah regulasi dibuat Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) baik daerah maupun kabupaten harus mampu menerapkan dan menjelankan sanksi hukum terkait regulasi tersebut.

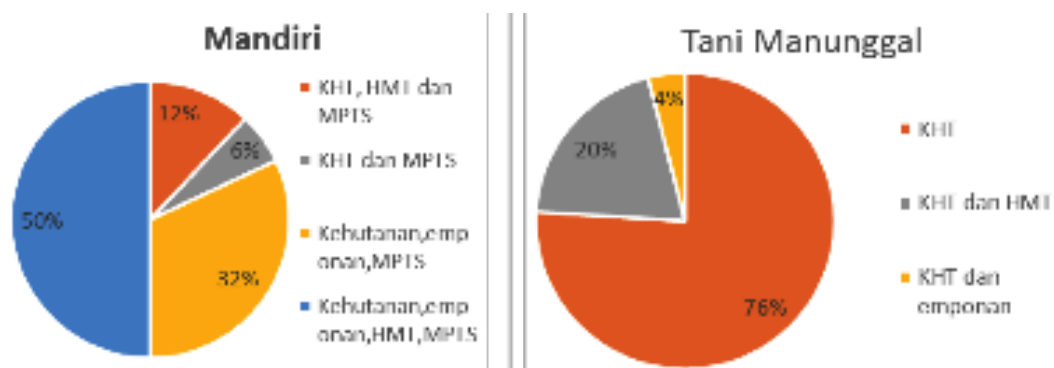
Peran *stakeholders* terkait terutama KPHL, Polhut, Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi mengamankan hutan dari pembukaan lahan. Koordinasi antara pihak pemerintah dalam hal ini KPHL dan kelompok tani harus ditingkatkan seperti halnya pelaporan terjadinya penggarapan ilegal. Kelompok tani sebagai pengelola HKM jauh lebih cepat mengetahui jika ada pembukaan lahan. Hal tersebut harus segera dilaporkan kepada KPHL ataupun polhut. Selain itu, patroli rutin harus segera dilakukan minimal 2 kali dalam 1 minggu. Patroli pertama dilakukan dengan KPHL, polhut, babinsa dan kelompok tani. Patroli kedua dilakukan oleh pengurus kelompok tani dan anggota kelompok tani. Harapannya dengan adanya laporan pembukaan lahan yang dilakukan oleh perorangan atau masyarakat dapat segera ditindak lanjuti kemudian patroli yang dilakukan dapat mencegah terjadi pembukaan lahan berikutnya.

8.2.2. Jenis Tanaman Di Lahan HKm

Dilihat dari kondisi biofisik, tanaman yang ada di kawasan HKm Mandiri Kalibiru merupakan kombinasi antara tanaman kehutanan, empon-empon, Hijauan Makan Ternak (HMT), dan *Multi Purposes Trees Species* (MPTS). Kondisi ini ditunjukkan dengan jawaban responden, yaitu sebesar 50% mengatakan ditanami kombinasi ketiga jenis tanaman hutan. Selain itu, terdapat 32% responden di Kalibiru menyebutkan bahwa pada lahan mereka hanya ditanami tanaman kehutanan, empon-empon, dan tanaman MPTS tanpa ada

tanaman HMT (lihat Gambar 8.6). Jawaban lainnya, yaitu sebesar 12% responden menjawab komposisi tanaman kehutanan, HMT, dan MPTS. Sedangkan 6% responden lainnya menjawab hanya ada tanaman kehutanan dan MPTS di lahan HKm mereka (lihat Gambar 8.6). Tanaman kehutanan yang ada, meliputi: jati, sonokeling, dan akasia. Tanaman empon-empon yang ada, antara lain: berupa kunyit, temulawak, dan lengkuas. Untuk jenis HMT, terdiri dari: rumput kolonjono, singkong, dan gamal. Sedangkan tanaman MPTS, meliputi: cengkeh, duren, nangka, rambutan, mangga, dan pete.

► Gambar 8.6. Jenis Tanaman di Lahan HKm Mandiri dan Tani Manunggal (DIY)



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

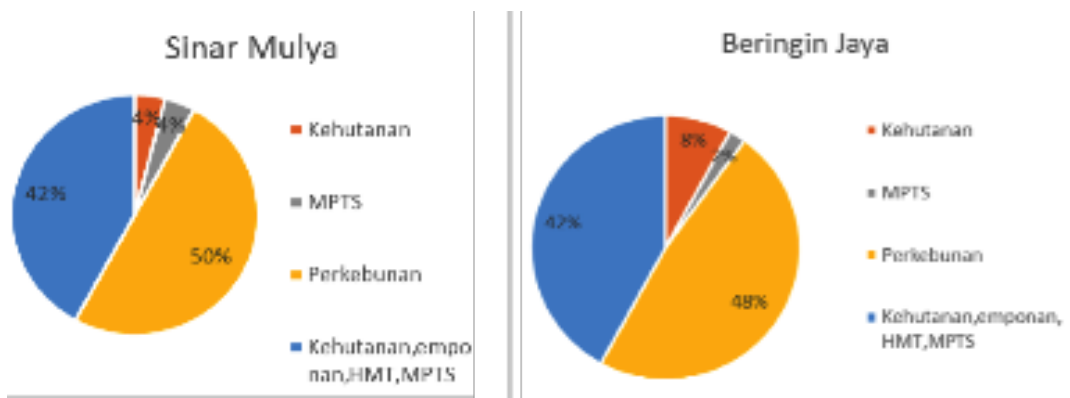
Sementara itu untuk HKm Tani Manunggal Bleberan, mayoritas responden yaitu sebesar 76% menjawab pada lahan mereka hanya

terdapat tanaman kehutanan, 20% responden menjawab tanaman kehutanan dan HMT, dan 4% responden menjawab ada tanaman

kehutanan dan empon-empon di lahan HKm yang mereka kerjakan (lihat Gambar 8.6). Pada saat dilakukan pengamatan langsung pada areal HKm oleh Tim, maka diketahui bahwa tanaman kehutanan, yaitu jati mendominasi tutupan lahan HKm tersebut dan di sela-sela tanaman jati tersebut ada beberapa titik yang terdapat HMT dan semak

belukar. Kondisi tanaman jati dapat dikatakan cukup rapat, sebagaimana terlihat dari tajuknya yang sudah bersentuhan satu sama lain. Hal inilah yang menyebabkan tanaman jenis lain tidak dapat tumbuh dengan baik pada areal ini dikarenakan minimnya sinar matahari yang dapat masuk atau menembus tutupan tajuk tanaman jati.

► **Gambar 8.7. Jenis Tanaman di Lahan HKm Sinar Mulya dan Beringin Jaya (Lampung)**



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso memiliki karakteristik tempat tumbuh yang sama. Hal tersebut terlihat dari kondisi tanah dan kondisi topografi. Tanah lahan HKm didominasi dua jenis tanah, berupa latasol coklat dan podsolik merah kuning. Kondisi tanah subur mencapai 100% sementara kondisi tanah kurang subur dan tandus berbatu dengan kemiringan minimal

mencapai 70%. Kondisi topografi di tingkat dataran dan tingkat kemiringan memiliki variasi. Persentase pada tingkat dataran 8° - 15° seluas 15% dan 15° - 45° seluas 30%. Persentase pada tingkat kemiringan lebih dari 45° memiliki luasan 65%, ketinggian tanah mencapai 250-700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Suhu mencapai $25-32^{\circ}\text{C}$, dengan curah hujan berkisar dari 2.000-7.000 mm per tahun.

Karakteristik tempat tumbuh tersebut mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh dan ditanam di atas lahan HKm. Sebagian besar petani HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju menanam tanaman perkebunan di lahannya dengan persentase 50%. Tanaman perkebunan tersebut berupa kopi, lada, dan cengkeh. Sementara tanaman terbanyak setelah tanaman kopi, yaitu kombinasi antara tanaman kehutanan, empon-empon, HMT, dan MPTS dengan persentase 42%. Setelah itu diikuti dengan tanaman MPTS dan kehutanan dengan persentase tanaman masing-masing 4% (lihat Gambar 8.7). Adapun di HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso memiliki komposisi tanaman perkebunan sebesar 48%, tanaman kombinasi (kehutanan, empon-empon, HMT, dan MPTS) sebesar 42%, tanaman kehutanan sebesar 8%, dan tanaman MPTS sebesar 2%.

Jenis tanaman empon-empon di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso, yaitu: jahe, kunyit dan lainnya. Jenis HMT yakni dikhususkan pada rumput pakan ternak kambing karena banyak petani yang memelihara kambing. Rumput tersebut, yaitu: rumput gajah, kolonjono, dan gliricidia/gamal. Tingginya persentase tanaman kombinasi dipengaruhi oleh tingkat kesadaran petani dalam mengoptimalkan produksi lahan.

Orientasi petani saat ini tidak lagi terhadap luas lahan, namun mengacu pada optimalisasi lahan. Kombinasi tanaman adalah langkah efektif yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan, harian, bulanan dan tahunan. Adapun tanaman kopi ditanam di bawah naungan tanaman berkayu (mindy, medang, mahoni, randu, rimau, dadap, dan cempaka) dan MPTS (petai, durian, alpukat jengkol, dan pala). Sementara tanaman pertanian, seperti: jahe, cabai, pepaya, kacang-kacangan, dan talas ditanam sebagai tanaman sela di bawah atau di dekat tanaman kopi. Berdasarkan struktur strata hutan dan komposisi jenis tanaman, maka lahan HKm termasuk agroforestri kompleks.

Berdasarkan struktur strata hutan dan komposisi jenis tanaman, empat lokasi lahan HKm termasuk agroforestri kompleks. Namun, karena lokasi HKm terutama di HKm Sinar Mulya dan HKm Beringin Jaya lebih banyak didominasi tanaman perkebunan yakni kopi, maka perlu ada rekomendasi berupa perbanyak tanaman kehutanan dan MPTS. Sejauh ini telah ada rehabilitasi tanaman MPTS yakni durian, pala, dan alpukat. Sementara untuk tanaman kehutanan belum ada. Diharapkan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDSHL) nantinya dapat

memberikan bantuan bibit yang memiliki tajuk lebar sehingga mampu menahan air hujan sampai tanah dan mengurangi jumlah air yang terinfiltrasi serta penjenjutan lengas tanah secara tepat. Selain itu, jenis tanaman yang memiliki perakaran dalam juga harus diutamakan agar mampu meresapkan air hujan ke dalam tanah dan sebagai pencegah longsor. Beberapa jenis tanaman tersebut yaitu, kaliandra merah, kaliandra putih, johar, sonokeling, waru laut, waru gunung, bungur, mindi, mahoni, lamtoro dan angkana. Setelah batuan bibit diberikan pihak KPHL dan polhut harus ikut serta menanam bibit bersama petani setelah itu dilakukan pengecekan rutin yang terus berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu untuk memastikan bibit tersebut tumbuh. Bibit yang mati harus disulam, penyulaman bibit tersebut harus dilakukan kelompok tani dengan pengawasan dari KPHL dan polhut. Selain penyulaman penerapan sanksi dengan menanam bibit 2 kali lebih banyak bagi bibit tanaman hasil sulaman yang mati dapat dijadikan solusi untuk menggerakkan petani menjaga bibit tanamannya agar dapat tumbuh dengan baik.

8.2.3. Tanaman Pokok Di Lahan HKm

Tanaman pokok yang berada di

lahan HKm Mandiri Kalibiru dan Tani Manunggal Bleberan adalah tanaman kehutanan, meskipun terdapat beberapa jenis tanaman lain pada areal tersebut. Di areal HKm Mandiri terdapat beberapa jenis tanaman kehutanan, seperti: mahoni, jati, sonokeling, dan akasia. Sedangkan pada areal HKm Tani Manunggal hanya terdapat satu jenis tanaman kehutanan, yaitu tanaman jati. Kondisi ini disebabkan karena areal hutan pada HKm Mandiri merupakan hutan lindung, sedangkan areal HKm Tani Manunggal merupakan hutan produksi yang sebelumnya berupa tanah kosong yang kemudian ditanami dengan satu jenis tanaman pokok berupa jati oleh KTHKm Tani Manunggal.

Berbeda dengan di lahan HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal yang tanaman pokoknya merupakan pohon berkayu. Di lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan Beringin Jaya Pekon Margoyoso, kopi adalah tanaman pokok yang mendominasi di areal HKm tersebut (lihat Tabel 8.2). Lahan hutan di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju adalah lahan hutan dengan didominasi tanaman perkebunan kopi. Setelah ada izin HKm tanaman pokok tetap kopi. Namun, sudah ada penanaman tanaman MPTS dan kehutanan (pohon berkayu). Sementara di HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso,

sebelum adanya ijin HKm lahan hutan lindung didominasi tanaman pertanian berupa sayuran. Setelah adanya ijin HKm tanaman sayuran sudah berubah menjadi tanaman perkebunan, MPTS, dan kehutanan (pohon berkayu). Hal ini menunjukkan dengan diberikannya ijin HKm memberikan dampak terhadap kelestarian hutan di lokasi HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso.

Lahan HKm di Sinar Mulya dan Beringin Jaya yang didominasi dengan tanaman utama kopi kurang sesuai jika dilihat dari aspek sustainabilitas hutan. Hal tersebut dikarenakan penutupan kanopi yang dimiliki tanaman kopi lebih rendah dari tanaman kehutanan sehingga saat hujan turun air hujan langsung mengenai dan memukul permukaan tanah yang menyebabkan tingginya limpasan permukaan tanah sehingga terjadi erosi. Fakta ini sejalan dengan studi yang dilakukan Widiyanto *et al.* (2004) bahwa, pertanaman kopi monokultur ternyata tidak dapat sepenuhnya mengembalikan fungsi hidrologi hutan walaupun kopi telah berumur 10 tahun. Ada beberapa aspek yang hilang dari hutan yang tidak bisa dikembalikan melalui pertanaman kopi. Hal tersebut dibuktikan dengan percobaan lapangan yang dilakukannya pada lahan hutan yang masih tersisa di puncak bukit dan pada pertanaman

kopi yang berumur 1, 3, 7 dan 10 tahun. Limpasan permukaan terbesar diperoleh pada petak dengan tanaman kopi berumur 3 tahun (124 mm). Pada petak dengan tanaman kopi berumur lebih dari 3 tahun terjadi penurunan limpasan permukaan. Kehilangan tanah karena erosi yang terbesar pada petak dengan tanaman kopi berumur 1 tahun. Hasil percobaan tersebut menunjukan bahwa kopi monokultur ternyata tidak dapat mencegah laju infiltrasi lebih besar dari tanaman kehutanan yakni pohon.

Oleh karena itu, lahan HKm dengan penerapan sistem agroforestri yang tanaman pokoknya berupa kopi perlu ada perbaikan dengan lebih banyak ditanami tanaman MPTS dan berkayu. Namun, proses ini membutuhkan waktu dan bertahap. Karena hal ini tidak terlepas dari faktor ekonomi masyarakat yang mengharapkan cepat mendapatkan hasil dari tanaman pokoknya dan sejarah pengelolaan lahan yang memang ditanami kopi. Peran berbagai pihak untuk menumbuhkan kesadaran petani secara langsung dan tidak langsung harus dilakukan terutama dalam penyuluhan dan pendampingan. Sekolah lapang dengan model *farmer to farmer share learning* dapat dijadikan media untuk menggaungkan tanaman kehutanan dan MPTS sebagai naungan bagi tanaman kopi. Pemberian bantuan

bibit tanaman MPTS dan tanaman berkayu juga memberikan peran penting untuk perbaikan jenis tanaman di lahan HKm.

► **Tabel 8.2. Persentase Tanaman Pokok**

Lokasi HKm	Tanaman Pokok	Persentase
Mandiri Kalibiru Hargowilis	Lainnya	100%
Tani Manunggal Bleberan	Jati	100%
Sinar Mulya Sukamaju	Kopi	100%
Beringin Jaya Margoyoso	Kopi	100%

Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

8.2.4. Rehabilitasi Di Lahan HKm

Rehabilitasi merupakan upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Kegiatan rehabilitasi hutan dapat berupa kegiatan reboisasi, penghijauan, pemeliharaan maupun pengayaan tanaman. Di HKm Mandiri Kalibiru terdapat 96% responden yang menjawab ada kegiatan rehabilitasi dan hanya 4% responden menjawab

tidak ada kegiatan rehabilitasi (lihat Tabel 8.3). Kegiatan rehabilitasi ini berupa penanaman kembali tanaman MPTS, seperti: bibit duren, jambu, nangka, dan petai. Sedangkan 100% responden di HKm Tani Manunggal Bleberan menjawab tidak ada kegiatan rehabilitasi di lahan HKm mereka (lihat Tabel 8.3). Hal ini dikarenakan lahan mereka sudah tidak dapat ditanami tanaman lain karena pohon jati yang ada sudah besar-besar dan tajuknya sudah menutupi seluruh lahan garapan mereka.

► **Tabel 8.3. Persentase Rehabilitasi**

Lokasi HKm	Ada	Tidak ada
Mandiri Kalibiru	96%	4%
Tani Manunggal Bleberan	-	100%
Sinar Mulya Sukamaju	94%	6%
Beringin Jaya Margoyoso	94%	6%

Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Adanya kegiatan rehabilitasi di lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso tidak terlepas dari peran dan dukungan berbagai *stakeholders* terkait yang peduli terhadap sustainabilitas hutan. *Stakeholders* terkait, yang meliputi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), Dinas Kehutanan, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), secara berkelanjutan memberikan dukungan kepada kelompok tani HKm sesuai dengan kapasitasnya. LSM sebagai pendamping petani sangat aktif dalam membantu meningkatkan kesadaran petani untuk mengelola lahan dengan memperhatikan aspek sustainabilitas. Aspek sustainabilitas hutan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah melalui program HKm. Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya yang mendukung terjaganya kelestarian hutan. Upaya tersebut, yaitu: penyuluhan dan pelatihan kehutanan, pemberian pinjaman modal melalui Badan Layanan Umum Pengelola Pembiayaan Hutan (BLU P2H) KLHK, dan pemberian bantuan bibit tanaman.

Pemberian bantuan bibit tanaman merupakan upaya pemerintah melalui BPDAS HL dalam mendukung

dan memfasilitasi kelompok tani untuk mengkonservasi lahan hutan. Bantuan bibit tersebut diberikan untuk merehabilitasi lahan hutan. Bibit yang diberikan pemerintah berupa tanaman MPTS, yaitu: durian, pala, dan alpukat di tahun 2010, 2011, dan 2017. Bantuan bibit tersebut diberikan oleh BPDAS HL kepada HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan Beringin Jaya Pekon Margoyoso melalui program Bantuan Langsung Masyarakat Pengembangan Perhutanan Masyarakat Perdesaan Berbasis Konservasi (BLM-PPMPBK) dan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Bibit tersebut telah ditanam di lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso dengan persentase penanaman bibit mencapai 94% (lihat Tabel 8.3). Pemberian bantuan bibit ini diharapkan oleh kelompok tani menjadi program yang berkelanjutan dari pemerintah. Adapun bibit yang diharapkan petani adalah bibit unggul atau bibit dari pohon plus (berkualitas tinggi) sehingga bisa dijadikan sumber indukan yang baik untuk Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang dimiliki petani.

8.2.5. Pertumbuhan Bibit Di Lahan HKm

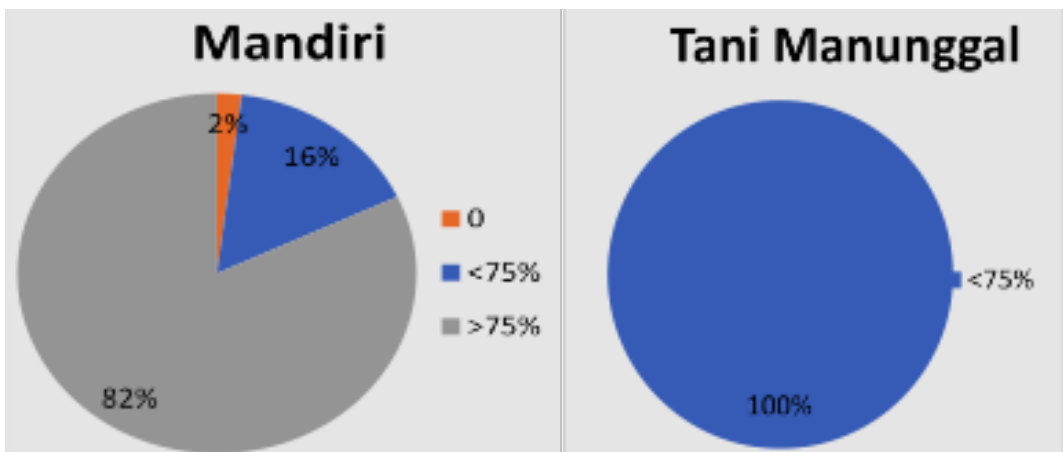
Dilihat dari keberhasilan tanaman, persen bibit yang dapat tumbuh di HKm Mandiri Kalibiru masih rutin dilakukan penanaman. Dari hasil

wawancara 82% responden menjawab persen bibit tumbuh kurang dari 75%, dan hanya 16% responden menjawab persen bibit tumbuh lebih dari 75% (lihat Gambar 8.8).

Sedangkan di HKm Tani Manunggal Bleberan, 100% responden menjawab bahwa persen tumbuh bibit kurang dari 75% (lihat

Gambar 8.8) sehingga di lahan HKm Tani Manunggal sudah tidak pernah lagi ditanami tanaman apapun. Pernah dilakukan uji coba tanaman porang (sejenis umbi-umbian) namun kurang berhasil karena memang tajuk tanaman jati yang sudah terlalu rapat yang menyebabkan kurangnya sinar matahari yang masuk ke lantai hutan.

► Gambar 8.8. Persentase Tumbuh Bibit di HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal (DIY)



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

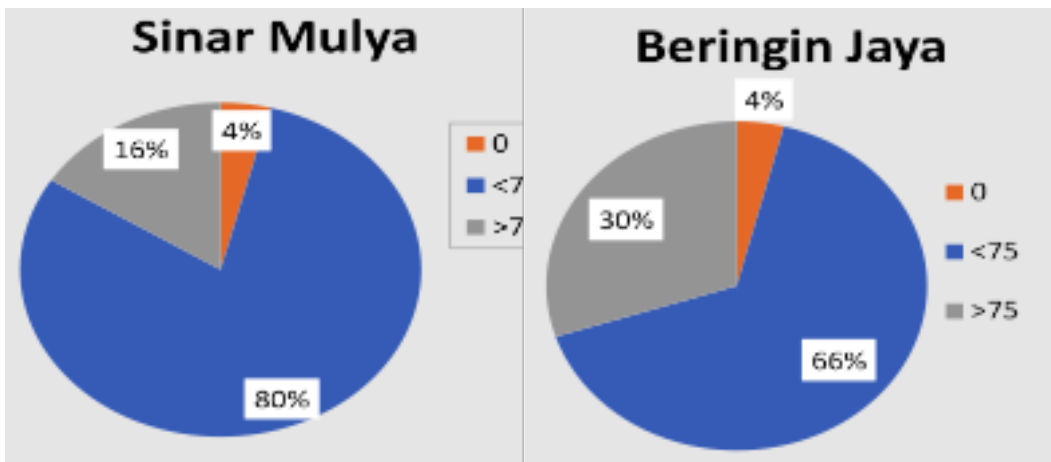
Persen bibit tumbuh yang kurang dari 75% di lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju adalah 80%, sementara di HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso hanya 66% (lihat Gambar 8.9). Pertumbuhan bibit sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, intensitas hujan, dan tindakan pemeliharaan. Oleh karena itu, kelompok tani harus lebih meningkatkan pemeliharaan bibitnya

agar persentase bibit tumbuhnya meningkat. Ada beberapa upaya pemeliharaan yang dapat dilakukan, yaitu: memberikan jarak tanam antar tanaman, menanam tanaman di bawah naungan tajuk disertai ajir yang terbuat dari bambu, menyirami bibit dengan air yang cukup, dan membersihkan rumput pengganggu dan semak belukar yang dapat menjadi penghambat pertumbuhan

tanaman. Selain itu, kegiatan penyulaman juga perlu dilakukan sehingga ada keseimbangan antara persen tumbuh dan kematian

bibit. Pertumbuhan bibit tanaman menjadi salah satu faktor penunjang kelestarian hutan.

► Gambar 8.9. Persentase Bibit di HKm Sinar Mulya dan HKm Beringin Jaya (Lampung)



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

8.3. ANCAMAN DALAM PENGELOLAAN HKm

Ancaman dalam pengelolaan HKm merupakan representasi indikator yang dipilih untuk menjawab kelestarian dari sisi fungsi ekologi. Pada subbab ini akan membahas kebakaran (faktor-faktor kebakaran dan tindakan pencegahan), pencurian (persentase pencurian dan tindakan pencegahan), dan satwa (jenis satwa, gangguan satwa, tindakan pencegahan, dan perburuan satwa).

8.3.1. Kebakaran

Ancaman yang mengkhawatirkan

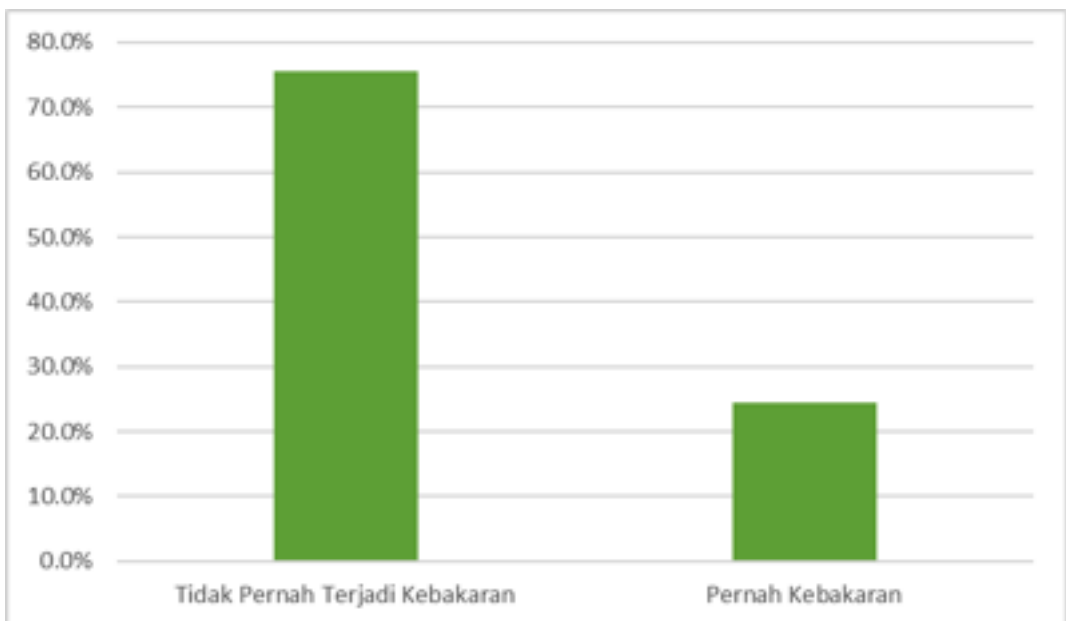
eksistensi keberadaan hutan, yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi disebabkan oleh 2 faktor yakni manusia dan alam. Oleh karena itu, HKm hadir sebagai solusi untuk meminimalkan terjadinya berbagai ancaman yang mengancam keberadaan hutan. Ijin HKm dalam P.37/Menhut-II/2007 dan P.88/Menhut-II/2014 memberikan suatu payung hukum yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan hutan. Peraturan tersebut selanjutnya ditungkan dalam AD/ART kelompok, sehingga kelembagaan HKm memiliki suatu aturan main (*rule of*

the game) dan batasan kewenangan (*jurisdictional boundaries*) yang jelas. Aturan formal ini mengikat semua anggota untuk patuh.

Persentase terjadinya kebakaran di HKm Mandiri dan Tani Manunggal (DIY) dan HKm Sinar Mulya dan Beringin Jaya (Lampung) cukup rendah. Ternyata 75,5% kebakaran tidak pernah terjadi dan 24,5% kebakaran pernah terjadi (lihat Gambar 8.10). Kebakaran lebih sering terjadi di HKm Mandiri Kalibiru dengan persentase 22% dan HKm Tani Manunggal Bleberan sebesar 72%, sementara di HKm

Sinar Mulya Pekon Sukamaju kebakaran tidak pernah terjadi dan di HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso persentase terjadi kebakaran hanya 4%. Kebakaran dapat terjadi karena dua faktor yakni alam dan manusia. Menurut Armanto & Wildayana (1998) dan Armanto (2014), kebakaran terjadi sebagian besar akibat kelalaian atau aktivitas manusia dan faktor alam. Dalam penelitian Akbar (2015) dan Wildayana (2006), kejadian kebakaran 95% selalu dipicu oleh adanya pembakaran awal dalam aktivitas manusia.

► **Gambar 8.10. Persentase Kebakaran di DIY dan Lampung**

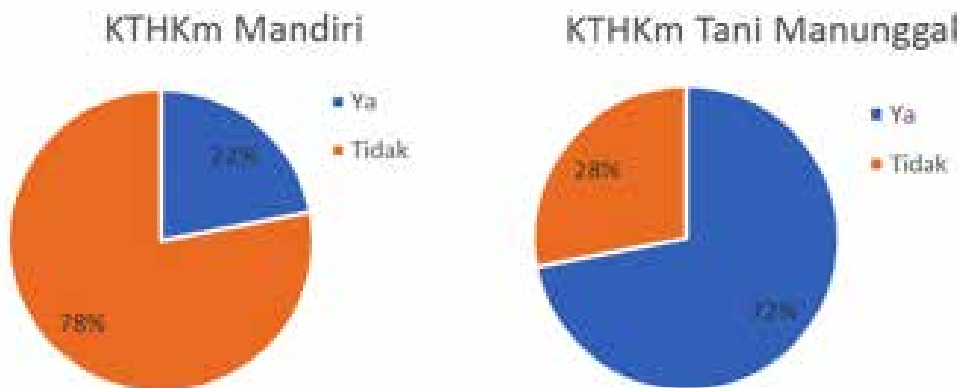


Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Kebakaran hutan merupakan salah satu ancaman dalam kegiatan pengelolaan hutan. Dari hasil wawancara, sebanyak 22% responden mengatakan bahwa masih terjadi kebakaran di kawasan HKm Mandiri Kalibiru, dan sebanyak 78% responden menjawab sudah tidak pernah terjadi kebakaran lagi (lihat Gambar 8.11). Sedangkan di areal HKm Tani Manunggal Bleberan masih sering terjadi kebakaran. Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa sebanyak 72% responden menjawab masih terjadi kebakaran di saat musim kemarau

dan 28% menjawab tidak pernah lagi kebakaran. Hal ini disebabkan salah satunya karena seresah berupa daun jati dan semak belukar yang kering merupakan bahan yang mudah sekali terbakar. Akibatnya, ketika ada sedikit saja percikan api baik yang disengaja maupun tidak dari aktifitas manusia tertentu akan menyebabkan terjadinya kebakaran. Namun, sejauh ini ketika terjadi kebakaran pada areal HKm Tani Manunggal Bleberan selalu dapat diatasi secepatnya dan tidak sampai menyebabkan kerusakan ataupun kematian pada tanaman jati.

► **Gambar 8.11. Kebakaran di Lahan HKm Mandiri Desa Hargowilis dan Tani Manunggal Desa Bleberan**



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Sejak adanya kelembagaan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) kelompok pada pengelolaan HKm, kebakaran hutan hampir tidak pernah terjadi.

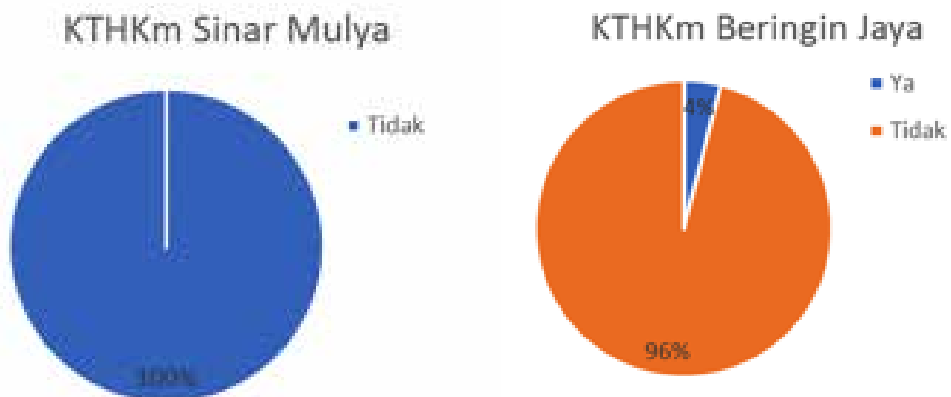
Persentase terjadi kebakaran hutan di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju tidak pernah terjadi sedangkan di HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso persentase terjadi

kebakaran hanya 4% (lihat Gambar 8.12). Faktor manusia dapat sangat mendominasi sebagai penyebab terjadinya kebakaran di dua HKm tersebut, karena Register 30 Gunung Tanggamus dan Register 39 Kota Agung Utara bukan merupakan gunung berapi yang aktif. Adapun salah satu faktor rendahnya tingkat kebakaran ini adalah adanya aturan dalam AD/ART yang melarang bagi anggota kelompok membakar areal hutan. Saat ini kelompok tani pengelola HKm jauh lebih peduli dengan hutan dan aktif dalam melakukan tindakan pencegahan terjadinya kebakaran.

Beberapa anggota kelompok tani di kedua pengelola HKm tersebut berpartisipasi menjadi

bagian dari masyarakat peduli api yang merupakan mitra KPHL. Pembentukan kelompok tersebut sejalan dengan studi Imanudin *et al.* (2015) bahwa pengendalian kebakaran secara nonteknis dapat dilakukan dengan membangun kemitraan dan penguatan kelembagaan petani atau masyarakat. Kegiatan patroli di wilayah hutan juga dilakukan Pamong Hutan (Pamhut) bersama dengan *stakeholder* terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran *illegal logging*, perambahan, perburuan, dan kebakaran. Beberapa upaya pencegahan yang dilakukan tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan kepada kelompok tani dalam mengelola lahan HKm.

► Gambar 8.12. Kebakaran di Lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan Beringin Jaya Pekon Margoyoso



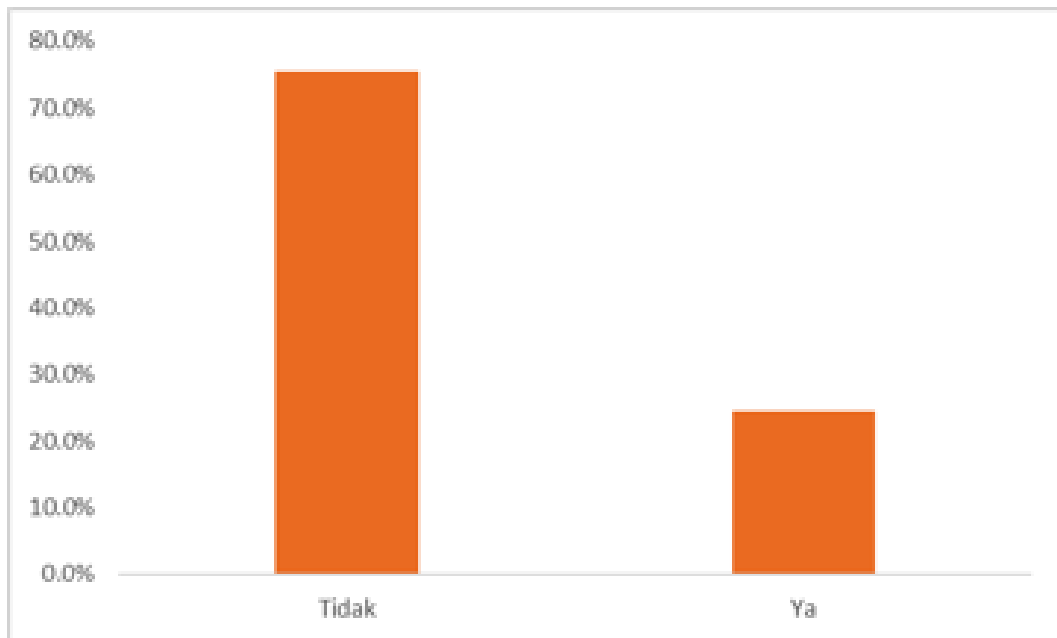
Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

8.3.2. Pencurian

Kenyamanan dan ancaman adalah dua faktor yang sangat berdampak terhadap pengelolaan HKm. Tingkat kenyamanan diharapkan semakin tinggi setelah adanya HKm. Hal tersebut sejalan dengan fakta yang

ada di lokasi studi. Pencurian hasil panen dan penebangan pohon saat ini semakin berkurang. Persentase tidak terjadi pencurian di lahan HKm mencapai 74,5% dan terjadi pencurian 25,5% (lihat Gambar 8.13).

► Gambar 8.13. Pencurian di Lahan HKm di DIY dan Lampung



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Pada HKm di DIY, persentase pencurian kayu atau hasil panen hanya 8% di HKm Mandiri dan di HKm Tani Manunggal sebesar 32% (lihat Gambar 8.14). Jika dibandingkan antar HKm di DIY (HKm Mandiri dan Tani Manunggal) dan Lampung (HKm

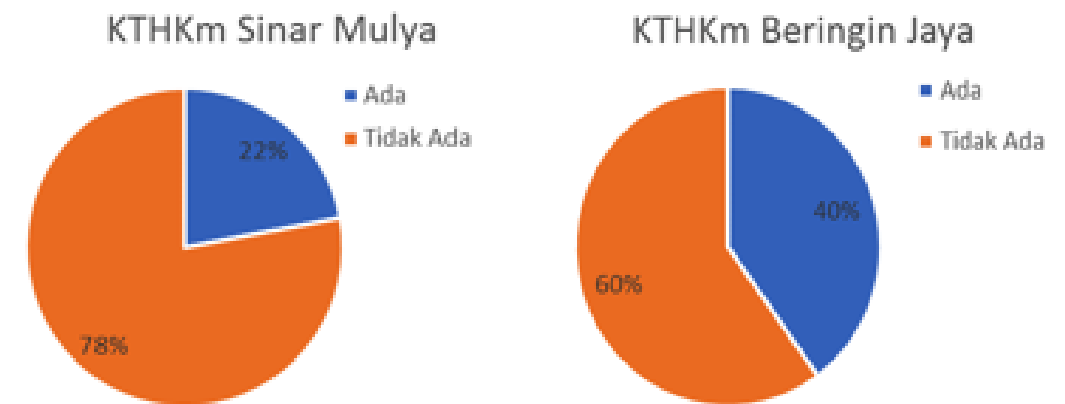
Sinar Mulya dan Beringin Jaya), maka persentase tingkat pencurian lebih besar terjadi pada HKm di Lampung, yaitu: HKm Sinar Mulya sebesar 22% dan HKm Beringin Jaya sebesar 40% (lihat Gambar 8.15).

► Gambar 8.14. Persentase Pencurian HKm Mandiri Desa Hargowilis dan Tani Manunggal Desa Bleberan



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

► Gambar 8.15. Persentase Pencurian di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan Beringin Jaya Pekon Margoyoso



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Pencurian kayu dan hasil hutan akan mengancam kelestarian hutan. Menurut Pega *et al.* (2016), kegiatan pencurian pohon oleh masyarakat sekitar kawasan hutan yang terus

menerus akan menyebabkan berkurangnya pepohonan yang ada dalam kawasan hutan lindung dan lambat laun akan menimbulkan kerusakan yang sangat parah.

Selain itu, fungsi hidrologis akan terganggu karena lahan bekas tebangan yang kosong tidak mampu menyerap dan menyimpan air yang akan mengakibatkan terjadinya erosi dan banjir. Terdegradasinya kualitas tanah, kekeringan yang berkepanjangan, dan kemiskinan karena potensi yang terus menyusut. Pohon yang rapat menjadi jarang dan menjadi hamparan yang kosong dan kritis. Oleh karena itu, dukungan berbagai *stakeholders* untuk mencegah terjadinya pencurian dan penebangan pohon sangat dibutuhkan.

Sebelum adanya ijin HKm, tindakan pencurian sering terjadi di musim panen. Namun, setelah adanya ijin HKm tingkat pencurian menurun bahkan jarang terjadi. Dalam satu tahun terakhir persentase kegiatan pencurian hanya 22% di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju sementara di HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso tingkat pencurian lebih banyak terjadi hingga mencapai 40% (lihat Gambar 8.15). Tingkat kejadian pencurian dapat terjadi 1 hingga 10 kali selama satu tahun pada beberapa lahan HKm.

Faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat pencurian ini karena adanya larangan dan sanksi dalam AD/ART yang melarang anggotanya untuk mencuri atau menampung hasil curian. Selain itu, adanya larangan menebang pohon

yang masih hidup. Sanksi bagi anggota yang tertangkap melakukan hal tersebut, yaitu diberi peringatan ke-1 sampai dengan peringatan ke-2. Apabila selama diberikan peringatan, pelaku tidak berubah bahkan masih melakukan pelanggaran, maka akan dikeluarkan dari anggota kelompok tani pengelola HKm dan diharuskan meninggalkan lahan garapan. Sanksi berikutnya dilaporkan pada Polisi Hutan (Polhut) atau polisi untuk dilakukan proses hukum. Selama program HKm telah berjalan, kelompok tani pengelola HKm telah proaktif dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya pencurian dan penebangan pohon. Upaya pencegahan, antara lain: berupa himbauan, saling mengingatkan antar anggota, menjaga lahan kelola, melaporkan tindakan pencurian ke aparat pemerintah, dan melakukan ronda ataupun pengawasan bersama pamhut dan Bintara Pembinaan Desa (Babinsa).

8.3.3. Satwa

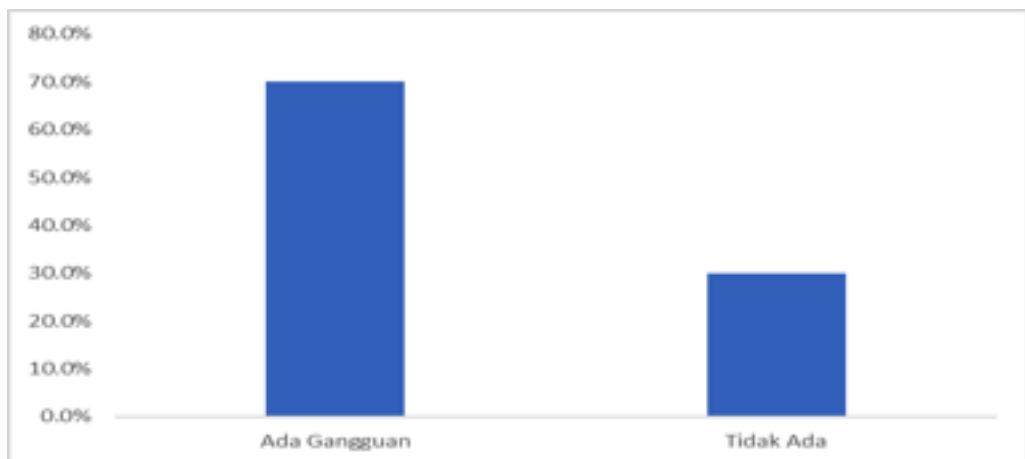
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019, maka program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) diharapkan mampu menjawab nawacita pemerintahan. Pemerintah menginginkan pembangun dari pinggiran, sehingga mengurangi

ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. HKm yang merupakan salah satu bagian dari program PSKL diharapkan mampu melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan Sumberdaya Alam (SDA) sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan keberlanjutan. Oleh karena itu, kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kehutanan sangat dibutuhkan. Perilaku peduli dari masyarakat menjadi faktor pendukung dalam tercapainya kelestarian hutan. Sementara faktor penghambat kelestarian hutan yakni ancaman-ancaman yang ada dalam pengelolaan hutan.

Gangguan satwa merupakan ancaman berbahaya dalam pengelolaan hutan. Hal ini dikarenakan persentase

gangguan satwa yang terjadi di lahan HKm, baik di HKm Mandiri dan Tani Manunggal (DIY) maupun HKm Sinar Mulya dan Beringin Jaya (Lampung) cukup tinggi yang mencapai 70% ada gangguan dan 30% tidak ada gangguan (lihat Gambar 8.16). Biasanya satwa merusak tanaman dan memakan buah-buahan di lahan HKm. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Diniyati (2015) bahwa satwa merusak dan memakan tanaman pangan, tanaman buah, tanaman obat, dan merusak batang tanaman kayu. Oleh karena itu, gangguan satwa sangat mengancam kuantitas dari hasil panen. Menurut Harahap *et al.* (2014), gangguan satwa menyebabkan kerugian ekonomi terhadap pendapatan dari hasil tanaman palawija dan tanaman tahunan.

► **Gambar 8.16. Persentase Gangguan Satwa di DIY dan Lampung**



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Gangguan satwa di areal HKm Mandiri lebih besar dibanding di HKm Tani Manunggal. Sebanyak 90% responden di HKm Mandiri menuturkan masih ada gangguan satwa yang ada di lahan HKm mereka, dan 10% responden mengatakan tidak ada gangguan satwa. Sedangkan di HKm Tani Manunggal, 86% responden mengatakan tidak ada gangguan satwa di lahan HKm mereka, dan 14% responden mengatakan terdapat gangguan

satwa di lahan mereka (lihat Gambar 8.17). Di lokasi HKm Mandiri lebih besar gangguan satwanya dikarenakan status hutannya adalah hutan lindung yang di dalamnya masih banyak satwa yang dapat hidup dan berkembang biak secara aman. Sedangkan di lokasi HKm Tani Manunggal merupakan hutan produksi yang lebih monokultur sehingga tidak banyak terdapat satwa seperti di hutan lindung.

► **Gambar 8.17. Gangguan Satwa di HKm Mandiri Desa Hargowilis dan Tani Manunggal Desa Bleberan**



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

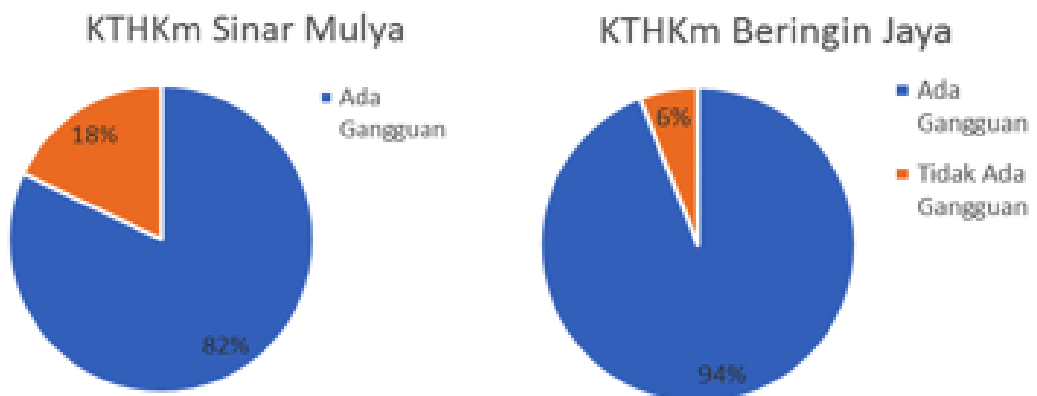
Gangguan satwa pada HKm di Lampung (Tanggamus) cukup tinggi. Persentase gangguan satwa di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju sebesar 82% dan di HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso sebesar 94% (lihat Gambar 8.18). Tingginya persentase tersebut

dipengaruhi oleh kerusakan habitat satwa di kawasan hutan lindung. Hal tersebut diperkuat oleh Harahap *et al.* (2014) bahwa perambahan hutan mengakibatkan kerusakan habitat satwa dan jenis tanaman yang ada di lahan hutan sangat disukai satwa.

Kedatangan satwa biasanya di waktu pagi dan sore saat petani belum datang ke lahannya dan ketika telah pulang dari lahannya. Hal tersebut didukung oleh hasil studi Nasichah (2017), bahwa satwa sering dijumpai

pada pukul 05.00 hingga 07.45 WIB, dan pukul 16.00 hingga 17.30 WIB. Faktor ini juga yang menyebabkan petani sulit untuk mengamankan lahannya dari gangguan satwa.

► **Gambar 8.18. Persentase Gangguan Satwa di Lokasi HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso**



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

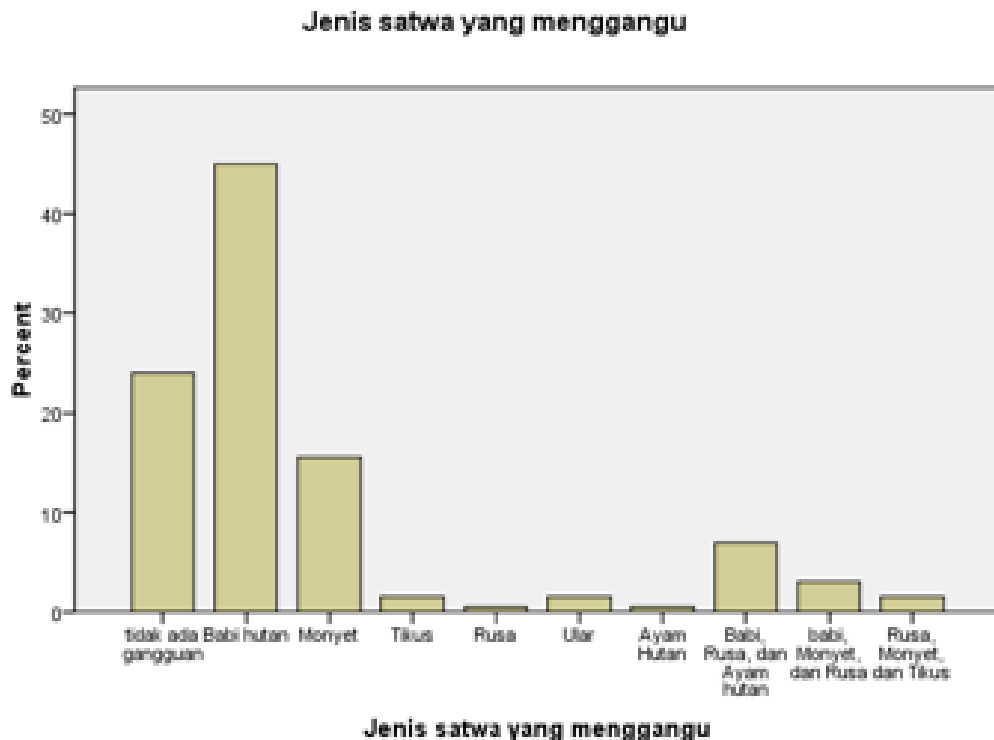
Jenis satwa yang mengganggu di lahan HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal (DIY) lebih beragam dari pada di lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso (Lampung). Jenis satwa yang mengganggu di lahan HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal (DIY) adalah babi hutan, monyet, tikus, rusa, ular, ayam hutan, kombinasi babi, rusa, dan ayam hutan, serta kombinasi rusa, monyet, dan tikus (lihat Gambar 8.19). Menurut

Diniyati (2016), gangguan satwa tersebut juga ditemukan pada hutan pola agroforestri. Sementara satwa yang mengganggu di lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso (Lampung), yaitu: babi hutan, monyet, dan kombinasi babi hutan, monyet, dan tikus. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Irfan (2006) bahwa gangguan terhadap tanaman perkebunan disebabkan oleh tikus hutan, monyet, dan babi hutan.

Secara umum persentase gangguan satwa tertinggi ada pada jenis babi hutan yang mencapai 45% dan monyet sebesar 15,5%. Namun, jika dibandingkan antara HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal (DIY) dan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso (Lampung) terdapat perbedaan persentase gangguan satwa. Di lahan HKm

Mandiri paling banyak mengganggu adalah babi hutan yakni 44% dan di lahan HKm Tani Manunggal tidak ada gangguan satwa (86%) (lihat Gambar 8.20). Sedangkan di lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju, satwa yang paling banyak mengganggu adalah babi hutan sebesar 58% dan di lahan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso sebesar 78% (lihat Gambar 8.21).

► Gambar 8.19. Persentase Jenis Satwa di DIY dan Lampung

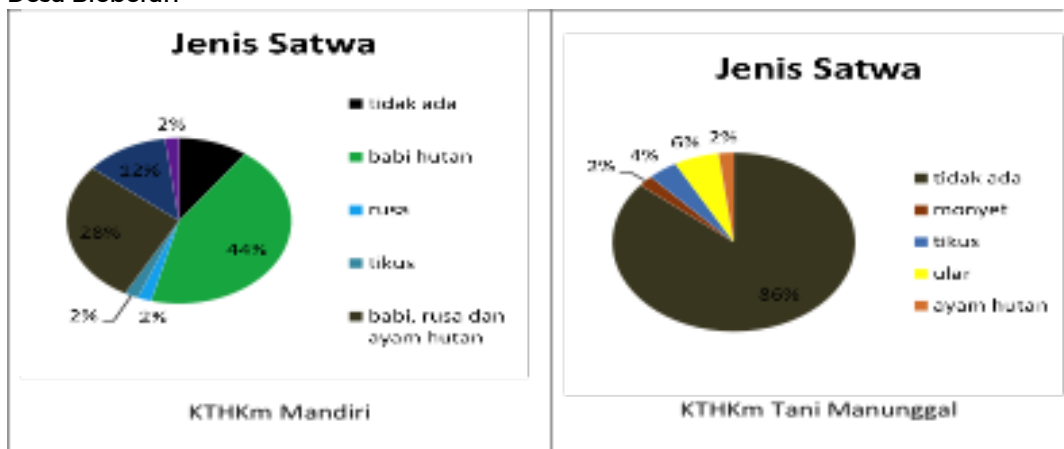


Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Jenis satwa yang terdapat di lahan HKm Mandiri juga lebih banyak dibandingkan di lahan HKm Tani Manunggal. Di lahan HKm Mandiri terdapat beberapa satwa, terutama babi hutan, tikus, rusa, ayam hutan, dan monyet. Menurut warga Kalibiru, keberagaman satwa ini dikarenakan status lahan HKm mereka yaitu hutan lindung dengan komposisi pohon yang lebih beragam dan lokasi HKm yang berdekatan dengan Suaka Margasatwa Sermo. Dari hasil wawancara, sebanyak 44%

responden menjawab terdapat jenis satwa babi hutan dan 20% menjawab terdapat jenis satwa, seperti: babi hutan, rusa, dan ayam hutan di lahan HKm mereka. Jawaban lain, yaitu sebesar 12% responden mengatakan bahwa terdapat jenis satwa, seperti: babi hutan, monyet, dan rusa. Selain itu 10% responden menjawab hanya ada jenis satwa rusa di lahan mereka dan 4% responden menjawab jenis satwa, seperti: babi hutan, monyet, dan tikus (lihat Gambar 8.19).

► Gambar 8.20. Jenis Satwa di Lahan HKm Mandiri Desa Hargowilis dan Tani Manunggal Desa Bleberan



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Sedangkan di HKm Tani Manunggal, sebanyak 86% responden menjawab tidak ada jenis satwa dan sisanya yaitu sebesar 6% menjawab ada jenis satwa berupa ular, 4% menjawab ada jenis satwa berupa tikus, 2% menjawab ada jenis

satwa berupa ayam hutan, dan 2% menjawab ada jenis satwa berupa monyet (lihat Gambar 8.20). Adanya jenis satwa ini tentunya merugikan anggota kelompok tani HKm ketika mereka masih menanam tanaman pertanian atau tanaman pangan di

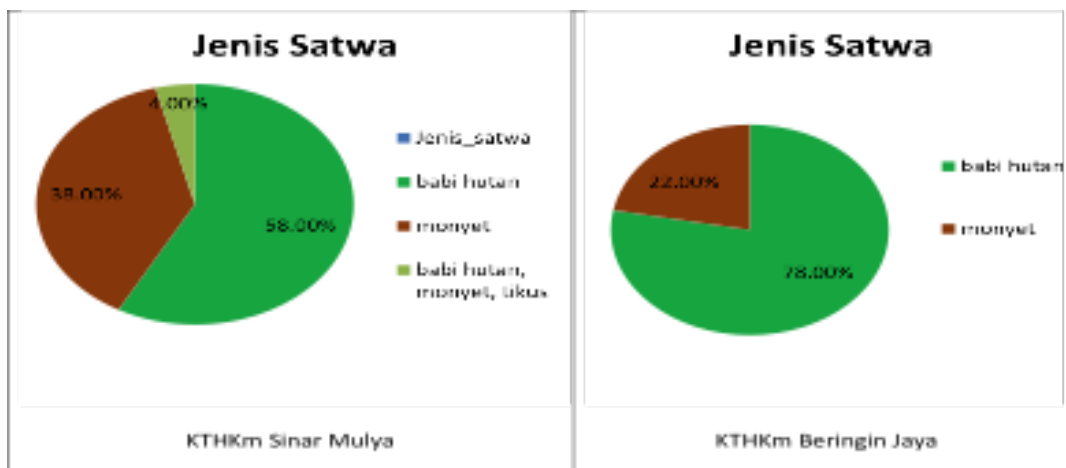
lahan mereka. Namun, setelah areal HKm mereka hanya berisi tanaman jati yang sudah relatif besar dan rapat, maka gangguan dari satwa tidak membahayakan lagi.

Sebagian besar jenis satwa yang mengganggu di lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju adalah babi hutan dengan persentase 58% dan 78% di lahan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso (lihat Gambar 8.21). Gangguan jenis satwa terbesar setelah jenis satwa babi hutan adalah jenis satwa monyet ekor panjang sebesar 38% di lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan 22%

di lahan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso. Jenis-jenis satwa tersebut sebagian besar menyerang tanaman perkebunan. Adanya gangguan dari jenis satwa yang sama di kedua lahan HKm ini dipengaruhi oleh keragaman jenis tanaman. Tanaman seperti kopi, buah-buahan, dan pisang merupakan tanaman yang disukai oleh babi hutan dan monyet. Oleh karena itu perlu upaya yang efektif dan efisien untuk meminimalkan gangguan satwa.

Sebagian besar kelompok tani HKm di DIY (HKm Mandiri

► Gambar 8.21. Jenis Satwa di Lahan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

dan Tani Manunggal) maupun di Lampung (HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan Beringin Jaya

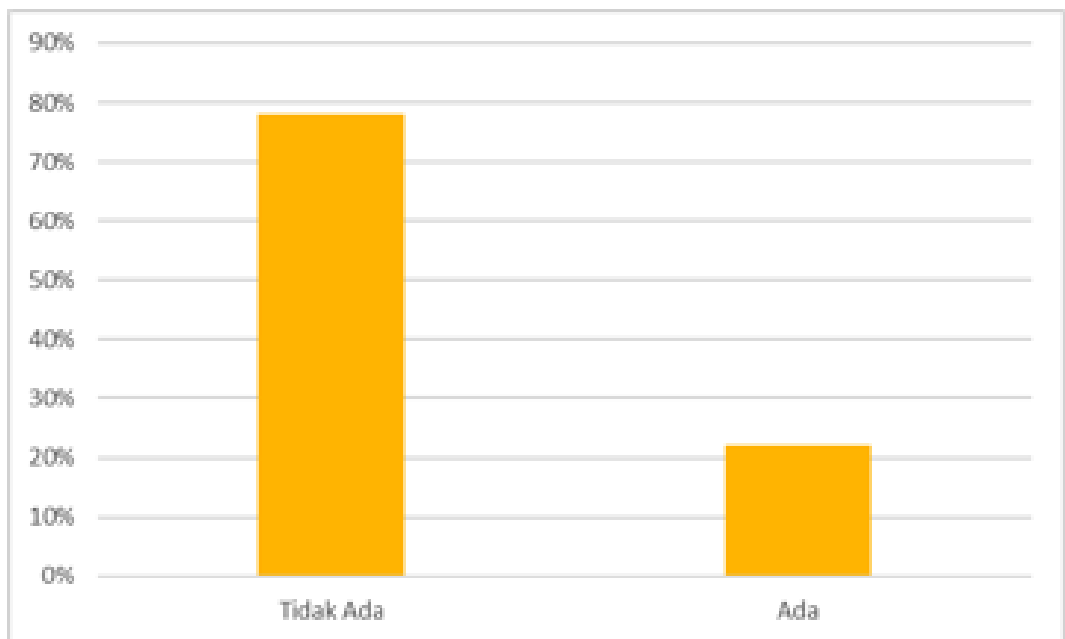
Pekon Margoyoso) tidak melakukan tindakan pencegahan terhadap gangguan satwa. Persentase petani

HKm yang tidak melakukan tindakan pencegahan mencapai 78% dan 22% lainnya melakukan tindakan pencegahan (lihat Gambar 8.22). Sebagian petani tidak melakukan tindakan pencegahan disebabkan oleh status kawasan hutan yang merupakan hutan lindung. Petani lainnya melakukan tindakan, namun hanya sebatas pada pengusiran satwa serta perlindungan lahan dan hasil hutan bukan kayu (buah) dari gangguan satwa. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Nasichah (2017),

mengusirnya atau dipindahkan adalah upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan satwa. Menurut Diniyati (2015), alat atau bunyi-bunyian dapat digunakan untuk mengusir satwa.

Terkait dengan gangguan satwa tersebut, sebanyak 96% responden menjawab tidak ada tindakan pencegahan atas gangguan satwa yang ada di areal HKm Mandiri, sedangkan 4% dari responden menjawab ada upaya pencegahan yaitu berupa kegiatan perburuan

► **Gambar 8.22. Persentase Tindakan Pencegahan Satwa Di Lahan HKm DIY dan Lampung**



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

babi bekerjasama dengan dinas terkait. Sedangkan di areal HKm Tani Manunggal tidak ada upaya pencegahan (lihat Gambar 8.23). Pada dasarnya satwa di areal HKm Mandiri Kalibiru tersebut tidak mengganggu dikarenakan satwa tersebut memang dilindungi mengingat status kawasan tersebut sebagai hutan lindung. Sedangkan di areal HKm Tani Manunggal karena di lahan hanya ada tanaman jati sebagai sumber makanan satwa, maka

sumber makanan satwa tersebut tidak berpengaruh atau tidak membahayakan terhadap keamanan tanaman.

Pengamanan lahan dari gangguan satwa sebagian besar menjadi tanggung jawab kelompok tani pengelola HKm. Oleh karena itu, petani melakukan upaya pencegahan ataupun pengamanan dari gangguan satwa. Meskipun upaya yang telah dilakukan petani masih rendah dan

► **Gambar 8.23. Tindakan Pencegahan dari Gangguan Satwa di HKm Mandiri Desa Hargowilis dan HKm Tani Manunggal Desa Bleberan**



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

kurang efektif. Hal tersebut terlihat dari persentase tidak adanya upaya tindakan pencegahan terhadap gangguan satwa yang dilakukan oleh HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju yaitu sebesar 50% dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso sebesar 66% (lihat Gambar 8.24). Adapun

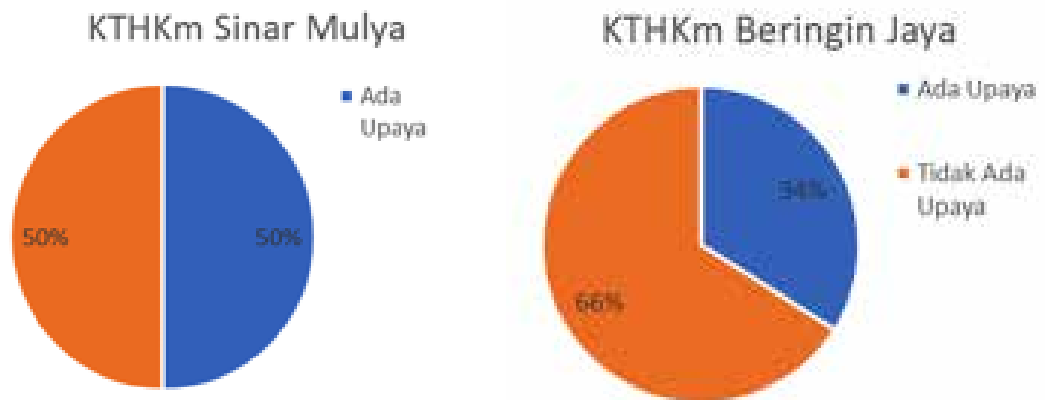
upaya tindakan pencegahan dan pengamanan yang dilakukan oleh kedua HKm tersebut yaitu sebatas memasang pagar seng di lahan kelola, memasang jaring pada tanaman yang berbuah, menghidupkan petasan ketika satwa datang, dan memasang orang-orangan sawah. Tindakan

tersebut juga baru dilakukan oleh sebagian anggota kelompok tani saja sedangkan yang lainnya hanya membiarkan gangguan satwa di lahannya terjadi. Menurut Wibowo *et al.* (2017), penanganan konflik gangguan satwa liar dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, yaitu pengusiran/penghalauan satwa liar kembali ke habitatnya. Penangkapan satwa liar yang mengganggu untuk dievakuasi ke lokasi habitatnya yang aman, demikian juga penyelamatan satwa liar yang bermasalah (terjerat/terluka). Melakukan penyuluhan di sekitar kawasan sekitar konflik dan membangun kepedulian

masyarakat terhadap konservasi satwa di sekitar kawasan konflik, *monitoring*/pendataan lokasi rawan konflik, bermitra dengan LSM untuk menangani/mitigasi konflik satwa liar serta perlindungan dan patroli kawasan konservasi.

Selain ancaman gangguan satwa ada juga ancaman perburuan liar di lahan HKm. Persentase perburuan liar di HKm Mandiri mencapai 52%, sedangkan 48% menjawab tidak ada perburuan. Tindakan pencegahan dilakukan dengan memasang spanduk larangan berburu di dalam lahan HKm, serta pengawasan *stakeholders* terkait dan anggota HKm sendiri. Di

► Gambar 8.24. Tindakan Pencegahan Dari Gangguan Satwa Di HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

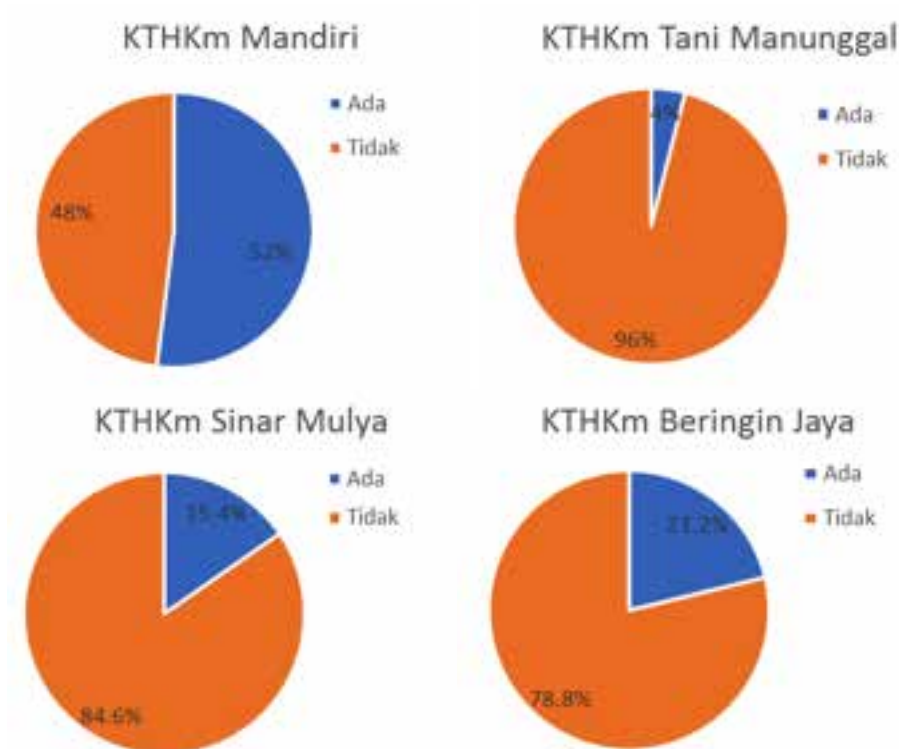
HKm Tani Manunggal 96% responden mengatakan tidak ada perburuan liar dan 4% lainnya menjawab ada

perburuan. Tidak ada tindakan pencegahan karena perburuan tidak mengganggu keamanan di lahan HKm.

Persentase perburuan liar di HKm Sinar Mulya adalah 15,4% sementara di Beringin Jaya perburuan liar mencapai 21,2% (lihat Gambar 8.25). Meskipun persentase perburuan liar masih relatif rendah namun gangguan ini sangat mengkhawatirkan kelompok tani karena perburuan tersebut dapat mengancam keseimbangan ekosistem hutan dan keanekaragaman satwa. Oleh karena itu, pengamanan hutan dari ancaman perburuan liar menjadi tanggung jawab bersama terutama *stakeholders*

tarkait. Saat ini keanekaragaman satwa mulai mengalami penurunan. Satwa yang seringkali menjadi perburuan liar di lahan HKm yakni burung kacer. Burung tersebut memiliki peran sebagai agen hayati yang memakan semut di tanaman. Saat ini keberadaan burung tersebut sudah hampir tidak terlihat di hutan. Kelompok tani sangat membutuhkan peran serta berbagai *stakeholders* yang dapat memberikan tindakan efektif yang nyata agar perburuan liar tidak terjadi.

► Gambar 8.25. Persentase Perburuan Satwa di Masing-masing HKm



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang jelas dan tegas terhadap berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh perorangan ataupun masyarakat di luar anggota HKM. Faktanya larangan dan sanksi yang ada di AD/ART kekuatannya hanya sebatas pada anggota, sedangkan masyarakat di luar anggota tidak terikat dengan sanksi tersebut. Perburuan satwa sering kali dilakukan oleh pihak luar, yaitu masyarakat yang bukan anggota kelompok bahkan berasal dari desa lain. Meskipun pemasangan papan atau tanda peringatan dilarang melakukan perburuan satwa di lahan hutan nyatanya tidak memberikan dampak apapun terhadap para pemburu. Menurut Achmadi & Rusdiana (2016), selain aturan hukum nasional penanggulangan terhadap perburuan satwa dapat dilakukan dengan pembinaan spiritual atau aturan hukum adat dan budaya hukum setempat. Karena hal tersebut di beberapa tempat jauh lebih efektif, seperti halnya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

8.4. PARTISIPASI MASYARAKAT

Salah satu unsur penting dalam demokrasi adalah adanya partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan atau keputusan. Persoalan berat yang dihadapi negara dunia ketiga pada umumnya adalah *organization gap*, di mana hubungan

antara masyarakat kota dan desa hampir terputus. Kalaupun ada, yang terjadi adalah hubungan yang bersifat satu arah (*top-down*) dan ekstraktif, bukan hubungan yang bersifat kerjasama dan saling mendukung. Karena itu yang diperlukan bukan pendekatan yang menekankan pada pembentukan kapital namun lebih memperhatikan tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja, dan ini mengharuskan pemberian prioritas pada persoalan partisipasi masyarakat. Menurut dua ilmuwan tersebut, partisipasi dapat diarahkan pada empat sasaran, yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan, penerapan keputusan, menikmati hasil, dan evaluasi hasil (Masoeed, 2003).

Dalam praktik pengelolaan hutan di lapangan, partisipasi masyarakat tidak bisa secara serta merta muncul dan menjadi pendukung keberhasilan kegiatan. Beberapa asumsi umum yang harus ada agar partisipasi berjalan dengan baik sering tidak dipenuhi. Di antara asumsi tersebut adalah bahwa masyarakat lokal memiliki kemampuan dan kemauan untuk mengelola sumberdaya hutan secara lestari. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang berada di sekitar hutan tidak atau kurang memiliki ketrampilan tersebut. Tingkat pendidikan mereka rata-rata masih rendah dan pengalaman

yang masih sedikit dalam mengelola hutan. Kondisi ekonomi mereka juga sebagian besar masih jauh dari cukup. Adalah sesuatu yang mustahil bahwa partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat yang demikian.

Keterlibatan atau partisipasi setiap anggota KTHKm dalam seluruh tahapan kegiatan pengelolaan HKm merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan dan kontinuitas pengelolaan HKm. Partisipasi tersebut dapat dilihat dari tiga tahapan kegiatan pengelolaan, yaitu: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan *monitoring* evaluasi. Partisipasi masyarakat akan dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: rendah, sedang, dan tinggi. Dalam subbab ini juga akan dijelaskan keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan HKm khususnya di HKm Mandiri dan HKm Tani Manunggal (DIY) dan HKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dan HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso (Lampung).

Partisipasi anggota KTHKm Mandiri dalam berbagai tahapan kegiatan pengelolaan hutan di areal HKm Kalibiru meliputi penanaman areal HKm dengan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi, pemeliharaan serta perlindungan tanaman, mengajukan ijin kelola kawasan HKm yang bertujuan untuk

mendapatkan lahan secara sah, penyusunan rencana kelola bertujuan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan, melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk perbaikan kegiatan yang telah dilaksanakan dan ikut serta dalam pengelolaan wisata untuk meningkatkan hasil unit usaha pariwisata. Sedangkan partisipasi KTHKm Tani Manunggal dalam pengelolaan hutan di areal HKm Menggoran meliputi pengajuan ijin kelola kawasan HKm, penyusunan rencana kelola, pembuatan kesepakatan dalam pengelolaan HKm, pelaksanaan kegiatan pengelolaan meliputi tata batas areal, pembersihan lahan, penanaman, pemeliharaan, perlindungan dan pengamanan, pemanenan, pemasaran, serta monitoring dan evaluasi.

8.4.1. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Perencanaan

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam pembentukan struktur kepengurusan gabungan kelompok tani (gapoktan), pembuatan dan penetapan draft AD/ART, dan rencana pengelolaan hutan. Perencanaan tersebut dilakukan dalam pertemuan rutin kelompok. Pertemuan rutin bertujuan memberikan informasi terkait kegiatan yang sedang

dilakukan oleh gapoktan, membahas rencana kegiatan selanjutnya, dan menyelesaikan permasalahan dengan musyawarah mufakat.

Dari hasil analisis data di DIY dan Lampung, 2,5% menunjukkan adanya partisipasi yang rendah dalam tahap perencanaan. 36% menunjukkan tingkat partisipasi yang sedang, dan 61,5% menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam tahap perencanaan (lihat Tabel 8.4). Sedangkan berdasarkan hasil wawancara di setiap KTHKm, di KTHKm Mandiri sebanyak 88% responden menyatakan bahwa partisipasi anggota kelompok tani masuk dalam kategori tinggi, sedangkan 12% lainnya menyatakan masuk dalam kategori sedang. Pada KTHKm Tani Manunggal, sebanyak 52% responden menyatakan partisipasi kelompok tani termasuk kategori tinggi, 46% menyatakan termasuk kategori sedang dan sisanya 2% responden menyatakan termasuk kategori rendah. Hal ini disebabkan karena pada KTHKm Tani Manunggal Bleberan pada awalnya

memang ada kecenderungan hanya pengurus kelompok yang aktif dalam setiap kegiatan pengelolaan HKm. Namun dalam dua tahun terakhir ketika terjadi pergantian kepengurusan, keterlibatan semua anggota dalam kegiatan pengelolaan HKm semakin meningkat. Sedangkan di Tanggamus, partisipasi masyarakat KTHKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju dalam pengelolaan HKm termasuk dalam kategori tinggi mencapai persentase 58%, sedang 34%, dan rendah 8%. Sementara HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso, persentase termasuk dalam kategori tinggi 53% dan sedang 46%.

Dari keempat KTHKm di DIY dan Lampung dapat disimpulkan bahwa partisipasi pada tahap perencanaan tergolong tinggi. Khusus di KTHKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso, persentase tertinggi ditemukan pada kelompok partisipasi sedang. Sedangkan partisipasi rendah hanya terdapat di KTHKm Tani Manunggal, dan ketiga KTHKm lainnya sudah tergolong ke dalam *range* sedang hingga tinggi.

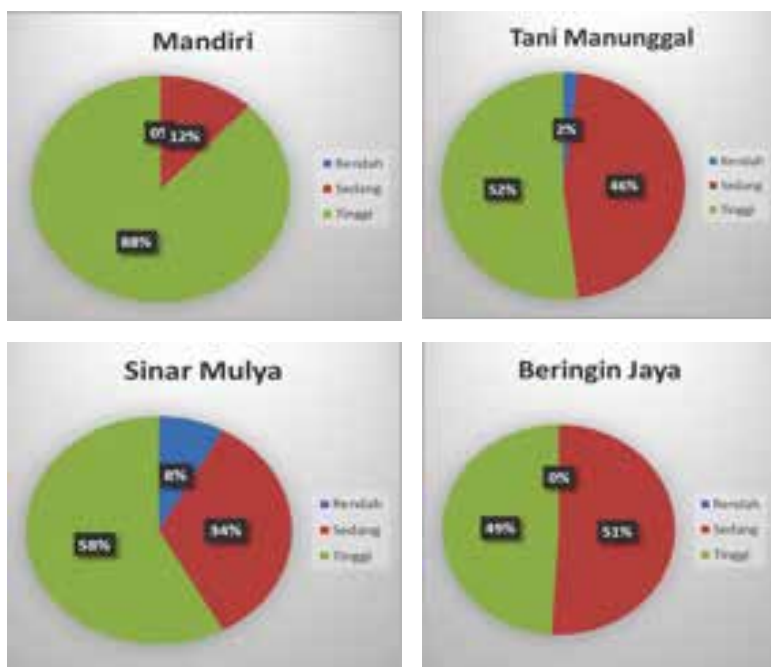
► Tabel 8.4. Hasil Analisis Tabulasi Silang dan *Chi-Square* Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan HKm di DIY dan Lampung

			Partisipasi Dalam Perencanaan			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Lokasi HKm	Mandiri	Count % of Total	0 0,0%	6 3,0%	43 21,5%	49 24,5%
	Tani Manunggal	Count % of Total	1 0,5%	23 11,5%	26 13,0%	50 25,0%
	Sinar Mulya	Count % of Total	4 2,0%	17 8,5%	29 14,5%	50 25,0%
	Beringin Jaya	Count % of Total	0 0,0%	26 13,0%	25 12,5%	51 25,5%
Total		Count % of Total	5 2,5%	72 36,0%	123 61,5%	200 100,0%

Catatan: Chi-square=28,522 signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

► Gambar 8.26. Persentase Partisipasi Perencanaan di Masing-masing KTHKm



Sumber:
Hasil olahan
data primer
(2018)

8.4.2. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh gapoktan adalah pemetaan lahan persil, penguatan tata batas HKm, penguatan kelembagaan gapoktan, dan peningkatan ekonomi anggota. Pemetaan lahan persil dilakukan untuk memperjelas dan memperkuat batas-batas lahan kelola setiap anggota kelompok, serta menjadi *database* dalam program HKm. Dari analisis data partisipasi

pelaksanaan pada KTHKm di DIY dan Lampung tergolong tinggi di keempat KTHKm, dan hanya KTHKm Tani Manunggal dan Sinar Mulya Pekon Sukamaju yang memiliki partisipasi rendah. Jika dirata-rata dari keempat KTHKm tersebut, maka partisipasi tingkat rendah hanya sebesar 2,5%, sedangkan partisipasi tingkat sedang sebesar 30,5%, dan partisipasi pelaksanaan tingkat tinggi sebesar 67% (lihat Tabel 8.5).

► **Tabel 8.5. Hasil Analisis Tabulasi Silang dan *Chi-Square* Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan HKm**

			Partisipasi Dalam Pelaksanaan			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Lokasi HKm	Mandiri	Count % of Total	0 0,0%	6 3,0%	43 21,5%	49 24,5%
	Tani Manunggal	Count % of Total	1 0,5%	23 11,5%	26 13,0%	50 25,0%
	Sinar Mulya	Count % of Total	4 2,0%	12 6,0%	34 17,0%	50 25,0%
	Beringin Jaya	Count % of Total	0 0,0%	20 10,0%	31 15,5%	51 25,5%
Total		Count % of Total	5 2,5%	61 30,5%	134 67,0%	200 100,0%

Catatan: Chi-square=24,986 signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Adapun rangkaian kegiatan dalam pembuatan peta persil, yaitu: (a) Sosialisasi peta persil kepada anggota gapoktan, (b) Pemetaan partisipatif, (c) Digitasi peta, (d) Sosialisasi

dan konsultasi, (e) Finalisasi peta persil, dan (f) Pengesahan peta persil. Tahapan selanjutnya yakni penguatan tata batas HKm. Penguatan tata batas dilakukan

pada bulan April-Juni tahun 2015 dengan bantuan LSM. Beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan meliputi perubahan peta areal kerja, koordinasi dan pembentukan panitia tata batas, pembuatan patok batas, dan pemasangan patok batas.

Tahapan partisipasi lainnya adalah penguatan kelembagaan gapoktan. Penguatan kelembagaan gapoktan dilakukan untuk mensinergiskan program dengan *stakeholders* terkait. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan pengelolaan organisasi dan keuangan. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei 2015. Dengan pendampingan pengelolaan organisasi keuangan, kegiatan ini membantu gapoktan menjalankan dan mengorganisasi keuangan dengan sistem keuangan yang baku. Gapoktan Beringin Jaya Pekon Margoyoso melakukan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali. Sementara Gapoktan HKM Sinar Mulya Pekon Sukamaju melakukan pertemuan setiap tiga bulan sekali. Pertemuan dengan *stakeholders* diharapkan mampu mensinergiskan program pengelolaan HKM sehingga tujuan kelestarian hutan terwujud.

Penguatan kelembagaan anggota pada KTHKm di Tanggamus Lampung tidak terlepas dari penguatan ekonomi anggota. Beberapa kegiatan untuk mencapai peningkatan ekonomi tersebut

dilakukan dengan: pembentukan dan penguatan kelembagaan ekonomi, optimalisasi produk kopi, pisang dan alpukat, budidaya tanaman pala, dan pengembangan ekowisata air terjun Lembah Pelangi.

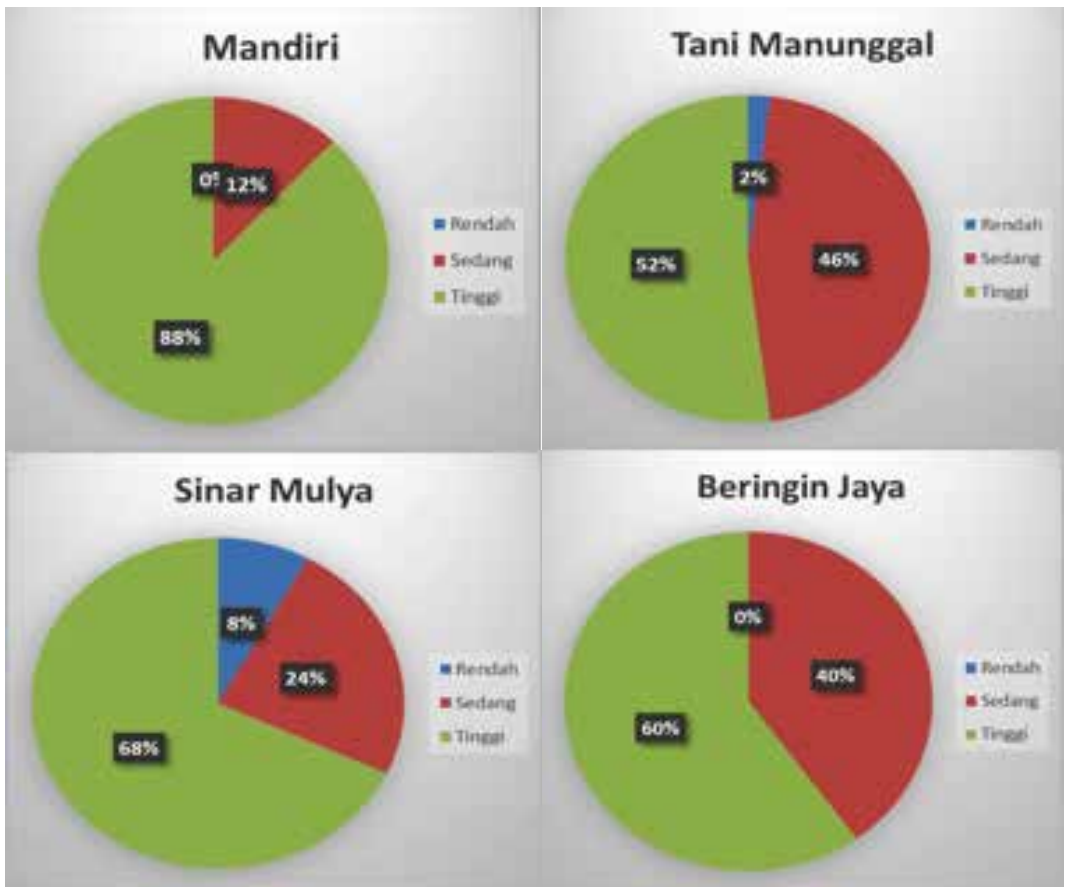
Di DIY, pada KTHKm Mandiri Kalibiru dalam rangka peningkatan ekonomi, masyarakat didampingi oleh LSM telah mengembangkan objek wisata alam. LSM yang mendampingi adalah Javlec dan dibantu oleh dinas terkait. Menurut paparan warga, pengembangan wisata alam Kalibiru yang berada di lahan HKM Mandiri ini telah memberikan dampak peningkatan ekonomi yang cukup signifikan. Wisata alam Kalibiru sendiri dapat menyerap tenaga kerja lebih dari 90% dari anggota KTHKm Mandiri. Mulai dari pemandu wisata, pedagang, tukang ojek wisata, dan penyedia penginapan di sekitar lokasi wisata cukup banyak menyerap tenaga kerja. Setiap empat bulan, penggarap lahan HKM juga mendapatkan uang kas dari hasil wisata sebesar ±Rp300.000,00. Berbeda dengan KTHKm Tani Manunggal, peningkatan ekonomi dilakukan dengan mengembangkan UKM yaitu berupa keripik jagung dan kerajinan dari limbah kayu.

Partisipasi masyarakat di KTHKm Mandiri Kalibiru ternyata sangat tinggi dibanding ketiga KTHKm lainnya yaitu sebesar 88% dan

kategori sedang sebesar 12%. Untuk KTHKm Tani Manunggal Bleberan, partisipasi kategori tinggi sebesar 52%, kategori sedang 46%, dan kategori rendah sebesar 2%. Untuk KTHKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju, partisipasi dalam pelaksanaan HKM

yang masuk kategori tinggi mencapai 68%, sedang 24%, dan rendah 8%. Sementara HKM Beringin Jaya Pekon Margoyoso, partisipasi dalam pelaksanaan HKM yang masuk kategori tinggi 60%, sedang 40%, dan rendah 0% (lihat Gambar 8.27).

► Gambar 8.27. Persentase Partisipasi Pelaksanaan di Masing-masing KTHKm



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

8.4.3. Partisipasi Masyarakat Dalam Tahapan *Monitoring* dan *Evaluasi*

Monitoring secara luas diakui sebagai suatu elemen yang krusial dalam pengelolaan dan implementasi program dan kebijakan dalam organisasi. *Monitoring* merupakan suatu penilaian (*assesment*) yang rutin (harian) terkait aktivitas dan perkembangan yang sedang berlangsung. Partisipasi masyarakat dalam tahap *monitoring* di KTHKm DIY maupun Tanggamus (Lampung)

menunjukkan hasil yang cukup bagus. Secara umum dari keempat KTHKm menunjukkan partisipasi tinggi dalam *monitoring* dan evaluasi (62,5%), kategori sedang (35%), dan kategori rendah hanya sebesar (2,5%). Tabel 8.6 menunjukkan hasil uji *chi-square* yang signifikan pada derajat kepercayaan 99%. Artinya, ada perbedaan yang signifikan antar lokasi KTHKm dilihat dari partisipasi masyarakat pada tahapan *monitoring* dan evaluasi.

► **Tabel 8.6. Hasil Analisis Tabulasi Silang dan *Chi-Square* Partisipasi Masyarakat Dalam *Monitoring* dan *Evaluasi* HKm**

			Partisipasi Dalam <i>Monitoring</i> dan <i>Evaluasi</i>			Total
			Rendah	Sedang	Tinggi	
Lokasi HKm	Mandiri	Count	0	6	43	49
		% of Total	0,0%	3,0%	21,5%	24,5%
	Tani Manunggal	Count	1	23	26	50
		% of Total	0,5%	11,5%	13,0%	25,0%
	Sinar Mulya	Count	3	19	28	50
		% of Total	1,5%	9,5%	14,0%	25,0%
	Beringin Jaya	Count	1	22	28	51
		% of Total	0,5%	11,0%	14,0%	25,5%
Total		Count	5	70	125	200
		% of Total	2,5%	35,0%	62,5%	100,0%

Catatan: *Chi-square*=20,547 signifikan pada derajat kepercayaan 99%.

Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

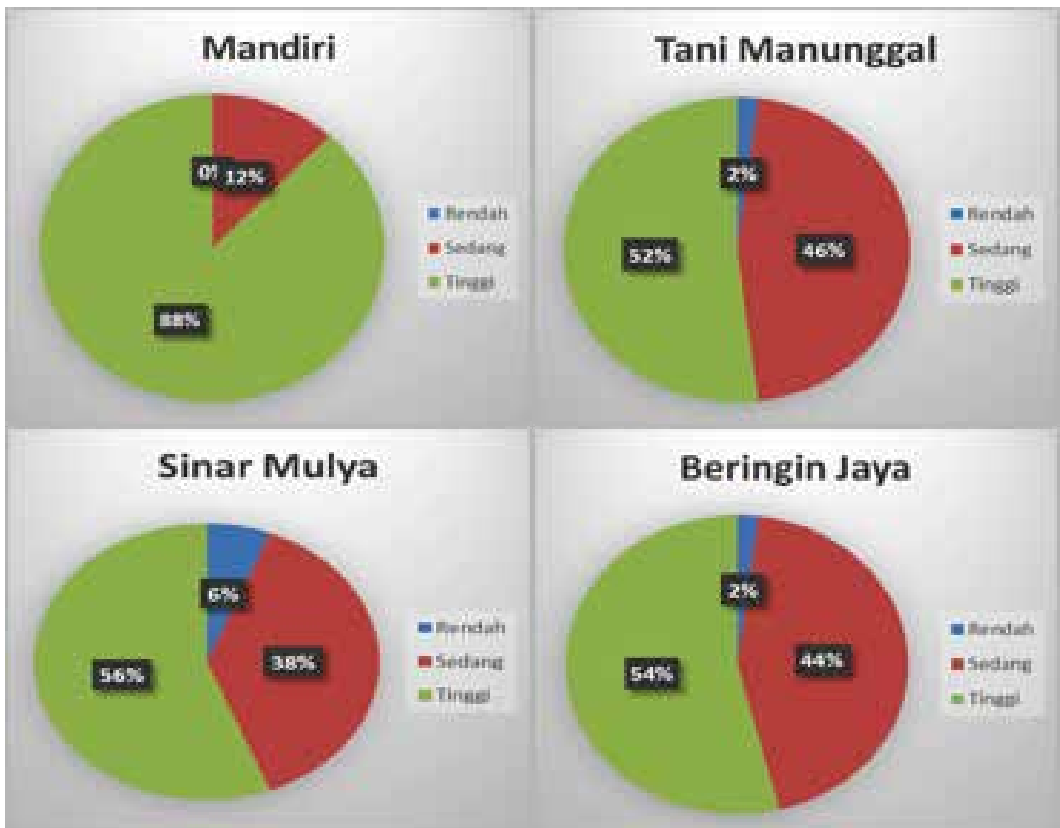
Partisipasi masyarakat pada tahap *monitoring* di KTHKm Mandiri Kalibiru menunjukkan bahwa KTHKm tersebut memiliki tingkat

partisipasi paling tinggi (88%) dan kategori sedang (12%). Sedangkan KTHKm Tani Manunggal, partisipasi berada pada kategori tinggi sebesar

52%, sedang 46%, dan rendah 2%. KTHKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju, partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi berada pada kategori tinggi (56%), sedang (38%), dan rendah (6%). Sementara HKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso, persentase dalam kategori tinggi 54%, sedang 44%, dan rendah 2%. Dari persentase tersebut

terlihat bahwa tingkat partisipasi dalam pelaksanaan dengan kategori tinggi di HKm Mandiri lebih besar dari ketiga HKm lainnya. Sementara persentase dengan kategori rendah masih terdapat pada KTHKm Tani Manunggal, Sinar Mulya, dan Beringin Jaya dengan masing-masing persentase sebesar 2%, 6%, dan 2%.

► **Cambar 8.28. Persentase Partisipasi Pada Tahap *Monitoring* dan Evaluasi di Masing-masing KTHKm**



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

8.4.4. Keterlibatan Stakeholders Dalam Pengelolaan HKm

Keberhasilan dalam pengelolaan lahan HKm didukung oleh dua faktor, yakni internal dan eksternal. Kedua faktor ini saling menguatkan dan berpengaruh dalam mempertahankan keberlanjutan hutan. Faktor internal dalam pengelolaan HKm di antaranya adalah kelembagaan kelompok tani dan manajemen pengelolaan lahan. Sementara faktor eksternalnya adalah kolaborasi dalam pengelolaan lahan bersama *stakeholders* terkait.

Gambar 8.29 menunjukkan hasil persentase keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan HKm di DIY dan Tanggamus (Lampung). Kombinasi A, B, C merupakan kombinasi *stakeholders* dari pengurus kelompok, polisi hutan, dan LSM memiliki

nilai persentase paling tinggi yaitu sebesar 36,5%. Kombinasi A dan C yaitu pengurus kelompok dan LSM memiliki persentase sebesar 30,5%. Keterlibatan pengurus kelompok menunjukkan persentase sebesar 17,5%. Sedangkan kombinasi A dan B yaitu pengurus kelompok dan polisi hutan sebesar 11%. Hanya 4,5% jawaban dari responden yang menjawab lainnya. Nilai ini dijumpai pada responden di Tanggamus (Lampung) yang menunjukkan *stakeholders* pihak swasta (perusahaan swasta) dan akademisi (perguruan tinggi). Pada HKm di Tanggamus (Lampung), gapoktan telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan swasta di Indonesia, bahkan dari luar negeri, dari hasil lahan HKm mereka yaitu kopi.

► Gambar 8.29. Persentase Keterlibatan *Stakeholders* Dalam Pengelolaan HKm

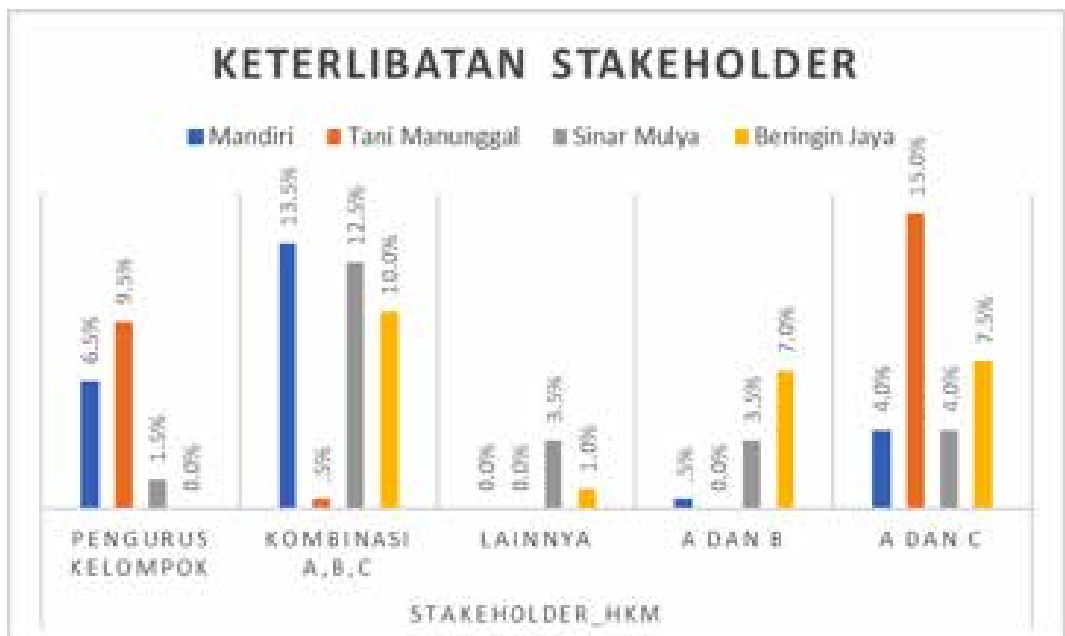


Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Stakeholders yang terkait dan berperan dalam pengelolaan lahan HKm yang hanya terdiri dari pengurus kelompok tertinggi di KTHKm Tani Manunggal yaitu sebesar 9,5%. *Stakeholders* kombinasi A, B, dan C yaitu kombinasi pengurus kelompok, polisi hutan, dan LSM tertinggi pada KTHKm Mandiri di Kulonprogo (DIY). *Stakeholders* lainnya yaitu pihak swasta dan akademisi yaitu

berada di KTHKm Sinar Mulya Pekon Sukamaju, Tanggamus (Lampung). Kombinasi A dan B yaitu kombinasi pengurus kelompok dan polisi hutan tertinggi pada KTHKm Beringin Jaya Pekon Margoyoso, Tanggamus (Lampung). Kombinasi A dan C yaitu kombinasi pengurus kelompok dan LSM tertinggi yaitu pada KTHKm Tani Manunggal di Gunungkidul (DIY).

► **Cambar 8.30. Persentase Keterlibatan *Stakeholders* Dalam Pengelolaan HKm Di Masing-masing KTHKm**



Sumber: Hasil olahan data primer (2018)

Hasil persentase dari keterlibatan *stakeholder* paling tinggi ada pada pengurus kelompok, polisi hutan, dan LSM. Hal ini menunjukkan bahwa peran serta pemerintah melalui polhut ataupun KPHL belum dirasakan oleh masyarakat. Peran tersebut harus ditingkatkan dan dibenahi. Pemerintah dalam hal ini KPHL dapat menjadi penghubung antara kelompok tani dengan segmen pasar (perusahaan, dan kelompok usaha) dan akademisi (perguruan tinggi dan peneliti) sehingga keberhasilan HKM dapat terwujud. Faktor lainnya yang menjadi penentu keberhasilan perhutanan sosial, menurut Ekawati *et al.*, (2008), adalah kesiapan aspek sosial yaitu kesempatan, kemauan, dan kemampuan masyarakat yang secara keseluruhan akan mempengaruhi ketertarikan masyarakat. Ketertarikan masyarakat terhadap program perhutanan sosial dipengaruhi oleh manfaat yang mereka peroleh. Hal ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Novayanti *et al.*, (2017) bahwa tingkat persepsi masyarakat terhadap program pembangunan perhutanan sosial tergolong dalam kategori sedang. Masyarakat merasa mendapatkan manfaat dengan

adanya program ini yaitu jaminan keamanan. Selain itu persepsi seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi perilakunya (*behavior*) salah satunya dalam wujud pengambilan keputusan (Fabra-Crespo, 2012).

BAB 9

DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL TERHADAP KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam bab ini akan dibahas tentang dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan masyarakat. Paradigma baru perhutanan sosial intinya hutan bukan hanya untuk pengusaha atau usaha besar tapi rakyat kecil dan usaha kecil mikro (UKM) di seputar hutan perlu mendapat jaminan ijin dan hak penghidupan yang layak. Tentu *multipler effects* dari perhutanan sosial akan berdampak langsung bagi rakyat kecil yang mendapat ijin dan hak yang selama ini hanya diberikan dan dinikmati kepada pengusaha kelas kakap.

Bab ini akan menganalisis seberapa besar dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan. Subbab pertama akan menganalisis topik ini dengan menggunakan data makro dan regional. Subbab berikutnya akan mengelaborasi faktor utama apa di balik kenaikan atau klasifikasi pendapatan para responden yang merupakan penerima ijin HKM

dengan menggunakan data primer di DIY dan Lampung? Dalam subbab tersebut akan digunakan analisis regresi logistik yang binari.

9.1. PRO-POOR GROWTH AND PRO-JOBS

9.1.1. Di Indonesia

Dua warisan pemerintah SBY setelah 10 tahun berkuasa adalah menurunnya kemiskinan namun diikuti dengan ketimpangan yang cenderung meningkat. Pertanyaannya, mengapa selama 10 tahun terakhir kemiskinan Indonesia hanya berkurang 5,7% padahal dana APBN dan APBD untuk mengurangi kemiskinan telah digelontorkan hingga ratusan triliun? Bagaimana pemerintah Jokowi membalik arah pembangunan yang terkonsentrasi secara geografis ke Jawa-Sumatra dan perkotaan menjadi membangun dari pinggiran dan desa?

Data Badan Pusat Statistik Januari 2015 menunjukkan tingkat kemiskinan menurun dari 16,66%

di awal Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintah (2004), menjadi 14,15% di akhir pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu I (2009), bahkan menjadi 10,96% pada September 2014 dengan jumlah penduduk miskin masih sebanyak 27,73 juta orang. Angka terakhir ini hanya berkurang 0,87 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang sebesar 28,6 juta orang (11,46%). Rekor kemiskinan ini tercatat paling rendah, baik besaran maupun persentasenya, sejak tahun 1970. Namun, yang perlu dicatat, penurunan kemiskinan masih di bawah target RPJMN dan terjadi perlambatan penurunan kemiskinan di akhir era SBY.

Mencermati fakta ini, tantangan utama pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sejak Oktober 2014 adalah bagaimana menurunkan ketimpangan pendapatan antardaerah dan antargolongan pendapatan yang cenderung meningkat (Kuncoro, 2013), serta kemiskinan yang masih substansial?

Gambar 9.1 menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang meningkat di Indonesia telah menyebabkan penurunan kemiskinan dan pengangguran. Namun pertumbuhan ekonomi yang sekitar 4-6% sejak tahun 2000

ternyata belum mampu menurunkan ketimpangan, yang diukur dengan indeks gini, secara substansial bahkan ada kecenderungan meningkat hingga tahun 2014. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum “berkualitas” ketimpangan antar si kaya-miskin dan daerah kaya-miskin masih lebar.

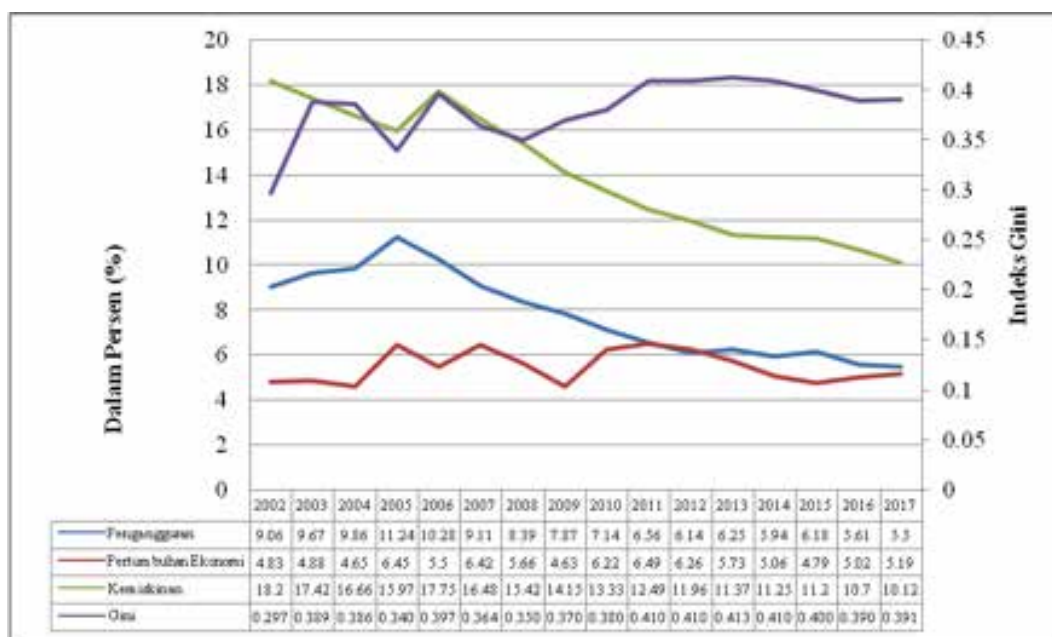
Di era Jokowi, realisasi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan masih di bawah target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dalam dokumen resmi Kabinet Kerja yang tertuang dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2015-2019, Jokowi-JK menetapkan sasaran nasional hingga 2019: (1) pertumbuhan ekonomi 5,8-8%; (2) kemiskinan menjadi 8-10,5%; (3) pengangguran turun menjadi 7-8%; (4) indeks gini turun dari 0,41 menjadi 0,36. Nyatanya, selama era Kabinet Kerja, ekonomi Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79% (2015), 5,02% (2016), dan 5,19% (2017). Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,8-5,19% tersebut, kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan mampu diturunkan. Tingkat kemiskinan terbukti menurun dari 11,25% (2014) menjadi 10,12% (2017), demikian juga tingkat pengangguran menurun dari 5,94%

(2014) menjadi 5,5% (2017); serta tingkat ketimpangan menurun dari 0,41 (2014) menjadi 0,391 (2017). Singkatnya, hanya pengangguran yang sesuai dengan target RPJMN.

Masalah ketimpangan ini, dalam praktik, sering memicu kecemburuan sosial dan kekerasan yang sering terjadi berbagai daerah di Indonesia. Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia seharusnya mampu memberikan kesejahteraan masyarakat jika regulasi berpihak

kepada rakyatnya. Namun, yang terjadisebaliknyakesenjanganterjadi di mana-mana.Misalnya, di daerah yang miskin dan APBD-nya rendah, para pejabat dan kepala dinasnya mengendarai mobil-mobil mewah dan tinggal di perumahan mewah. Tak ketinggalan para kontraktor sebagai mitra kerja Pemda juga ikut menampilkan gaya hidup mewah di tengah kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

► **Gambar 9.1. Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran, dan Indeks Gini: Indonesia 2002-2017**



Sumber: Diolah dari BPS (2018)

Dalam studi empiris, ada dua jenis ketimpangan yang menjadi pusat perhatian. Pertama, **ketimpangan distribusi pendapatan antar-golongan pendapatan** masyarakat, yang diukur dengan indeks gini dan berapa kue nasional yang dinikmati oleh 40% golongan pendapatan terendah. Ketimpangan yang meningkat diukur dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang makin lebar, sebagaimana tercermin dari rasio gini yang meningkat dari 0,33 pada tahun 2002 menjadi 0,39 pada tahun 2017. Ironisnya, penurunan kue

nasional yang dinikmati kelompok 40% penduduk termiskin justru diikuti oleh kenaikan kue nasional yang dinikmati oleh 20% kelompok terkaya dari 42,2% tahun 2002 menjadi 46,41% tahun 2017 (lihat Tabel 9.1). Sementara itu kelompok 40% penduduk menengah mengalami penurunan kue nasional dari 36,9% tahun 2002 menjadi 36,47% pada tahun 2017. Ternyata ada indikasi kuat terjadi *trickle-up effect*, efek muncrat ke atas, dalam proses pembangunan di Indonesia (Kuncoro, 2013b).

► Tabel 9.1. Ketimpangan Antargolongan Pendapatan Dari Era Megawati-Haz Hingga Jokowi-Kalla, Indonesia, 2002-2017

Kelompok Pendapatan	Megawati-Haz			SBY-Kalla				SBY-Boediono					Jokowi-Kalla			
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
40 persen terendah	20,9	20,6	20,8	18,8	19,8	19,1	19,56	21,22	18,05	16,85	16,88	16,87	17,12	17,10	17,11	17,12
40 persen menengah	36,9	37,1	37,1	36,4	38,1	36,1	35,67	37,54	34,68	34,73	34,18	34,6	34,6	34,65	36,33	36,47
20 persen tertinggi	42,2	42,3	42,1	44,8	44,77	41,24	45,47	48,94	48,94	48,42	48,94	49,04	48,27	48,25	46,56	46,41
Indeks Gini	0,33	0,32	0,32	0,36	0,33	0,37	0,35	0,38	0,38	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,39	0,39

Sumber: Diolah dari BPS (2017; 2002)

Kedua, **ketimpangan antar daerah** penting untuk diteliti karena gravitasi aktivitas ekonomi Indonesia masih cenderung terkonsentrasi secara geografis ke Kawasan Barat Indonesia (KBI) selama lebih dari 5 dasawarsa terakhir. Betapa tidak, data BPS hingga triwulan I 2017 menunjukkan, struktur perekonomian Indonesia secara spasial masih didominasi kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58%, yang disusul Sumatera (22%), Kalimantan (8,3%), Sulawesi (6%), Bali dan Nusa Tenggara (3%), serta Maluku dan Papua (2%). Struktur perekonomian Indonesia

secara spasial masih terkonsentrasi KBI sekitar 80-81% sejak tahun 2000 (lihat Tabel 9.2). Kawasan Timur Indonesia (KTI), sebagai kawasan pinggiran, hanya sebagian sisanya yaitu sekitar 19-20%. Singkatnya, pola *unbalanced development* di Indonesia masih terus terjadi, yang tercermin dari kuatnya “pusat” (Jawa-Sumatra) sebagai gravitasi pembangunan dan menyisakan “pinggiran” (KTI dan desa). Pembangunan ekonomi Indonesia memang bias ke barat (KBI), yang memegang pangsa sekitar 80-81% dari kegiatan ekonomi nasional. Dengan kata lain, ketimpangan antar wilayah dan pulau di Indonesia terus terjadi.

► **Tabel 9.2. Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentukan PDB Nasional, 2000-2017.1 (persen)**

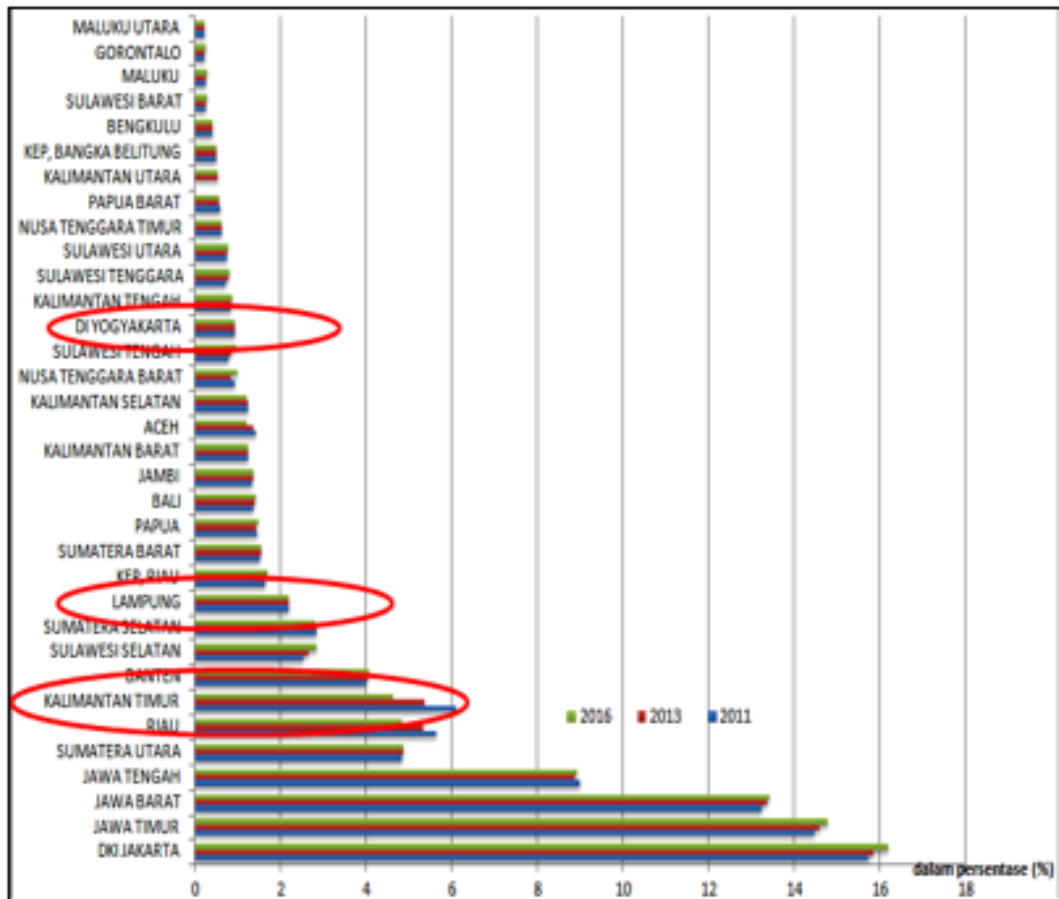
Pulau	2000	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017.1
Sumatra	23,1	23,56	23,74	23,81	23,63	22,37	22,03	21,95
Jawa	58,0	57,59	57,65	57,99	58,51	58,27	58,49	58,49
Bali dan Nusa Tenggara	2,7	2,56	2,51	2,53	2,50	3,10	3,13	3,03
Kalimantan	9,2	9,55	9,3	8,67	8,21	7,99	7,85	8,33
Sulawesi	4,6	4,61	4,74	4,82	4,97	6,08	6,04	5,94
Maluku dan Papua	2,4	2,13	2,06	2,18	2,18	2,19	2,46	2,26
Total	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS (2015; 2017)

Gambar 9.2 menunjukkan kontribusi Provinsi Lampung dan DIY dalam membentuk PDB Indonesia. Provinsi Lampung menyumbang 2,20% pada tahun 2011 kemudian sumbangan ini sedikit menjadi

2,21% tahun 2016. Pada tahun 2016, Provinsi DIY menyumbang 0,92%, persentase sumbangan ini sedikit mengalami penurunan sebesar 1% dibanding dengan sumbangan DIY pada tahun 2011.

► Gambar 9.2. Persentase Sumbangan PDRB Seluruh Provinsi di Indonesia, 2011, 2013 & 2016.



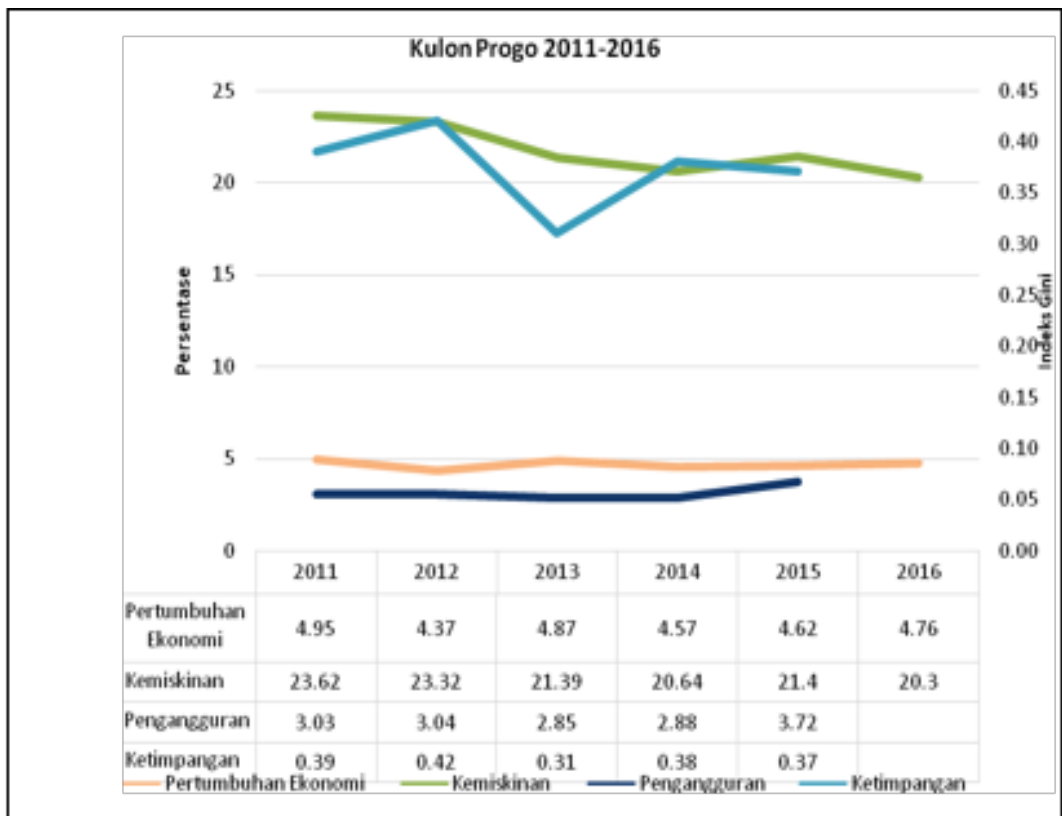
Sumber: Diolah dari BPS (2018)

9.1.2. Di Tanggamus, Kulonprogo, Gunung Kidul

Gambar 9.3 menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi yang di Kulon progo telah menyebabkan penurunan kemiskinandari 23,62% pada tahun 2011 menjadi 20,3% pada tahun 2016. Namun pertumbuhan

ekonomi yang sekitar 4,3-4,95% selama tahun 2011-2016 ternyata belum mampu menurunkan ketimpangan. Tingkat ketimpangan dan pengangguran ternyata berfluktuasi pada tahun 2011-2016 (lihat Gambar 9.3).

► Gambar 9.3. Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi Kulon Progo, 2011-2016

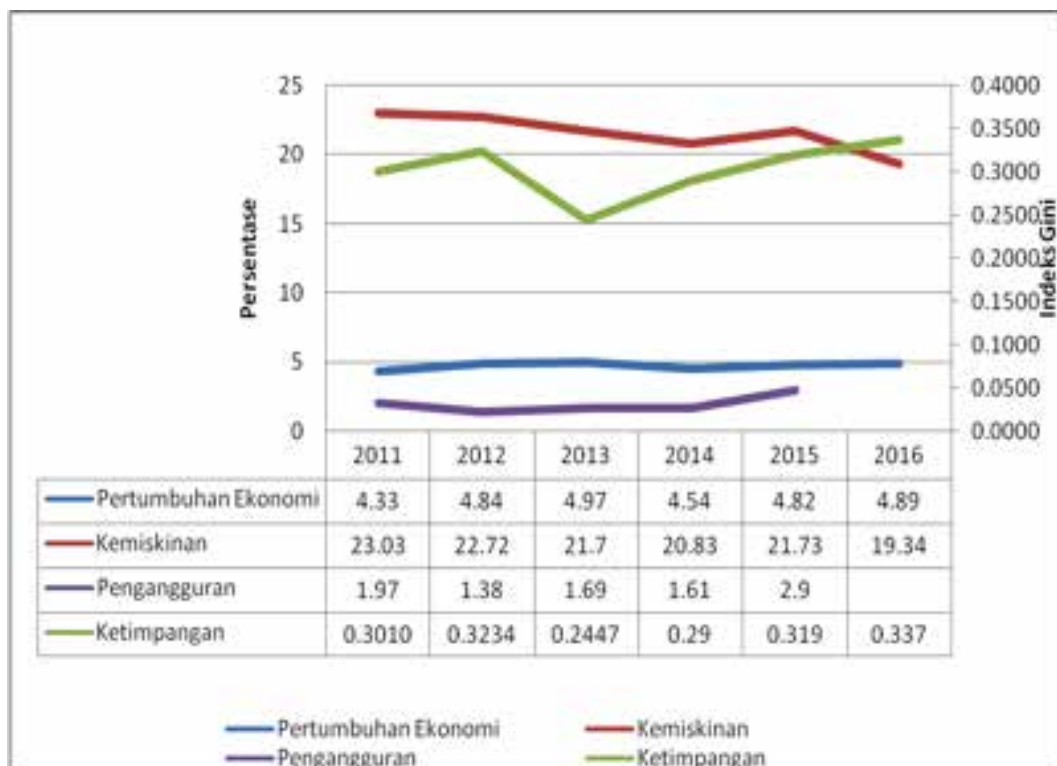


Sumber: Diolah dari BPS DIY (2017)

Gambar 9.4 menunjukkan indikator ketenagakerjaan, penduduk miskin, ketimpangan, pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul. Pertumbuhan ekonomi, yang berada pada kisaran 4,97-4,33% selama tahun 2011-2016, ternyata mampu menurunkan angka kemiskinan dari 23,03% pada tahun

2011 menjadi 19,34% pada tahun 2016. Kendati demikian, ternyata pertumbuhan ekonomi Gunung Kidul tersebut belum mampu untuk mengurangi tingkat ketimpangan dan pengangguran. Ketimpangan dan pengangguran ternyata mengalami tren meningkat pada tahun 2011-2016 (lihat Gambar 9.4).

► Gambar 9.4. Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Ketimpangan, Pertumbuhan Ekonomi Gunungkidul, 2011-2016

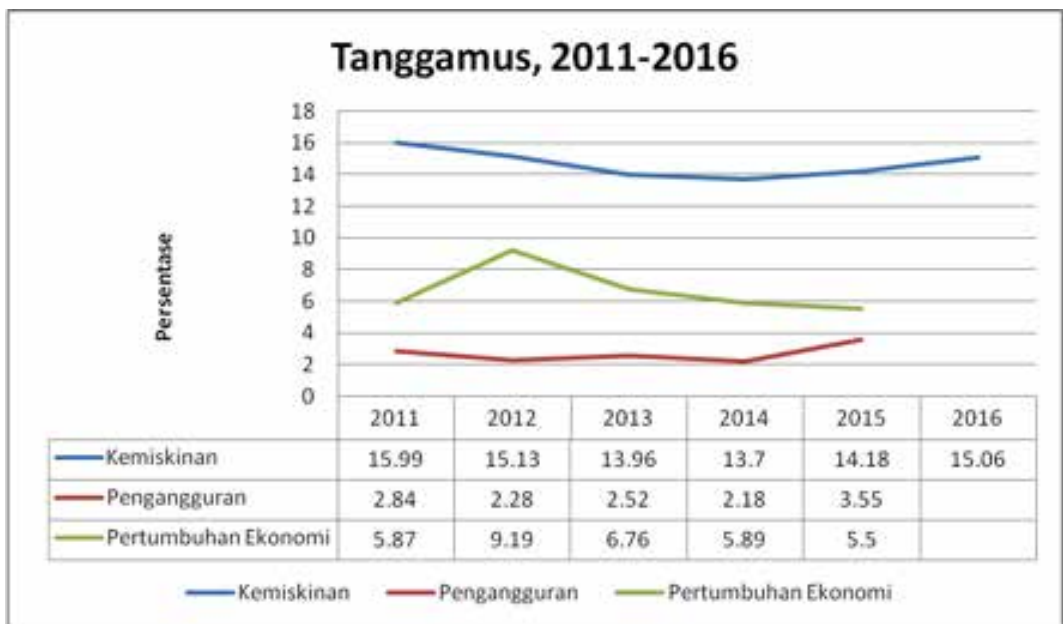


Sumber: Diolah dari BPS DIY (2017)

Gambar 9.5 menunjukkan indikator ketenagakerjaan, penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi di Tanggamus. Pertumbuhan ekonomi Tanggamus berkisar pada angka sekitar 5,5-9,19% selama tahun 2011-2015. Pertumbuhan ekonomi Tanggamus cenderung mengalami

penurunan. Penurunan terjadi pada tahun 2012 menuju 2015 dari 9,19% menurun hingga 5,5%. Penurunan angka pertumbuhan ekonomi ini ternyata berdampak pada kemiskinan dan pengangguran ternyata juga mengalami peningkatan pada tahun 2011-2016.

► Gambar 9.5. Tingkat Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Tanggamus, 2011-2016



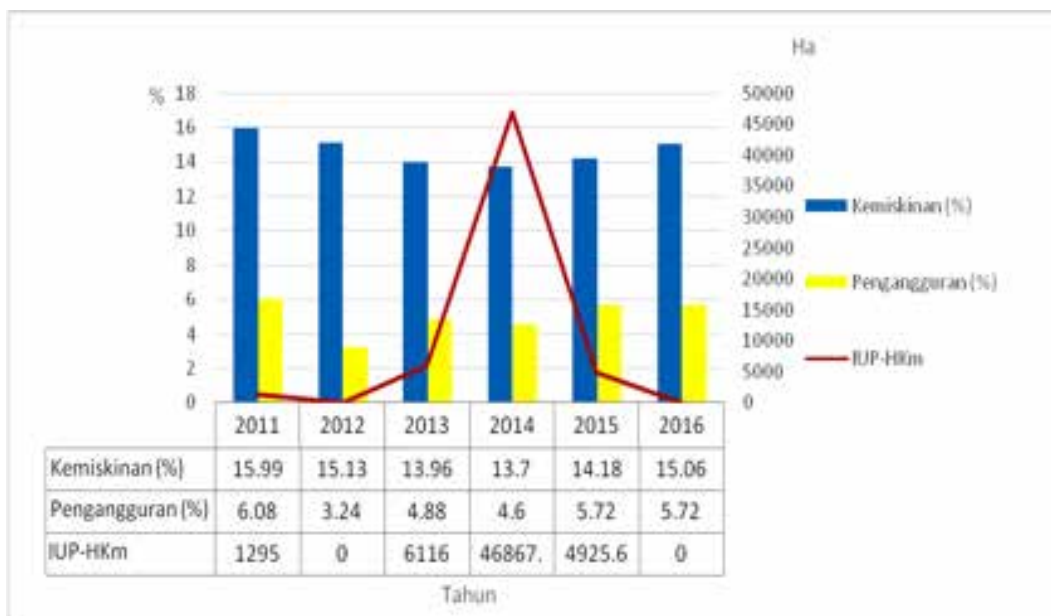
Sumber: Diolah dari BPS Tanggamus (2017)

Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) di Tanggamus diberikan secara bertahap dalam lima tahun terakhir. Ijin pengelolaan paling banyak diberikan di tahun 2014 dengan luas lahan 46.867, 67 ha.

Hasil regresi logistik binari di subbab 9.2 menyatakan bahwa secara statistik luas lahan HKM tidak bisa menjelaskan kenaikan pendapatan responden. Hal ini sejalan dengan Gambar 9.6, pemberian ijin pengelolaan HKM di tahun 2014 yang tinggi hanya sedikit

mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran Tanggamus. Bahkan, tingkat kemiskinan dan pengangguran di tahun 2015 mengalami peningkatan. Kondisi seperti ini diduga terjadi karena efek pemberian ijin pengelolaan HKM tidak langsung terjadi di tahun bersangkutan, terutama untuk Tanggamus. Mayoritas responden hutan kemasyarakatan di Tanggamus mengusahakan komoditas perkebunan (kopi), yang hasilnya baru bisa dinikmati beberapa tahun kemudian setelah penanaman.

► **Gambar 9.6. Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan IUP-HKm (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) di Tanggamus Tahun 2011-2016**

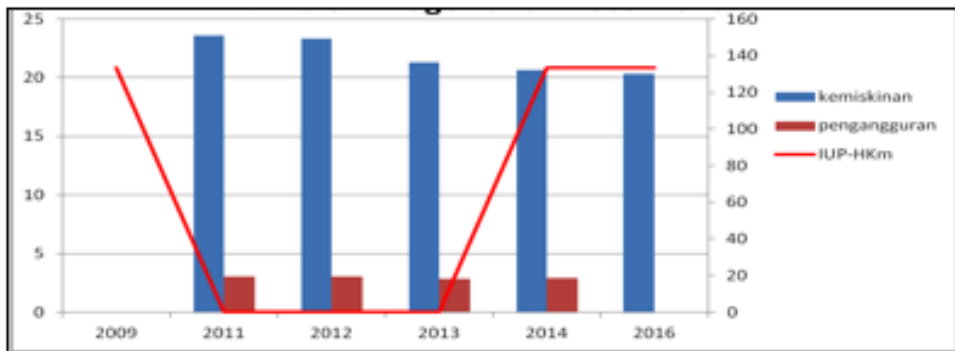


Sumber: Diolah dari BPS Lampung (2017)

Gambar 9.7 dan 9.8 memberikan gambaran mengenai pemberian ijin pengelolaan HKm di tahun 2009 sampai dengan 2016 yang tinggi hanya sedikit mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di Gunungkidul dan Kulon Progo. Kondisi seperti ini diduga terjadi karena efek pemberian ijin pengelolaan HKm tidak langsung terjadi di tahun bersangkutan. Mayoritas responden

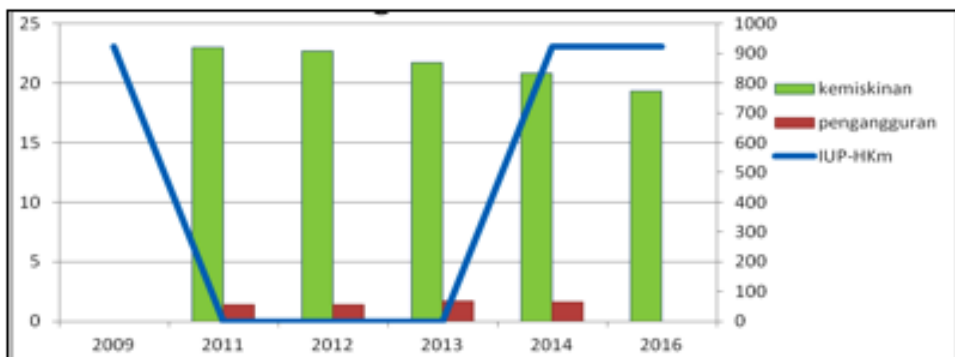
hutan kemasyarakatan di DIY khususnya Gunungkidul menanam tanaman Jati, yang mana hasil dari tanaman ini baru bisa diambil dalam jangka waktu yang relatif lama. Respon di Kulon Progo menanam tanaman kayu atau tanaman hutan lainnya, yang hasilnya baru bisa dinikmati beberapa tahun kemudian setelah penanaman.

► **Gambar 9.7. Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan IUP-HKm (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) di Kulon Progo Tahun 2011-2016**



Sumber: Diolah dari BPS DIY (2017)

► **Gambar 9.8. Tingkat Kemiskinan, Pengangguran, dan IUP-HKm (Ijin Usaha Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan) di Kulon Progo Tahun 2011-2016**



Sumber: Diolah dari BPS DIY (2017)

9.2. HUBUNGAN ANALISIS SOSIAL, LINGKUNGAN DAN EKONOMI

Paradigma baru perhutanan sosial intinya hutan bukan hanya untuk pengusaha atau usaha besar tapi rakyat kecil dan usaha kecil mikro (UKM) di seputar hutan perlu mendapat jaminan ijin/hak untuk menanam kopi, jagung dll, maupun air minum dan penghidupan yang layak. Di masa lalu perambah hutan, masyarakat adat dan rakyat yang tinggal di seputar hutan sering dikejar-kejar oleh polisi hutan karena mencuri kayu, merusak, bahkan membakar hutan. Kini mereka malah dikasih ijin/hak pengelolaan.

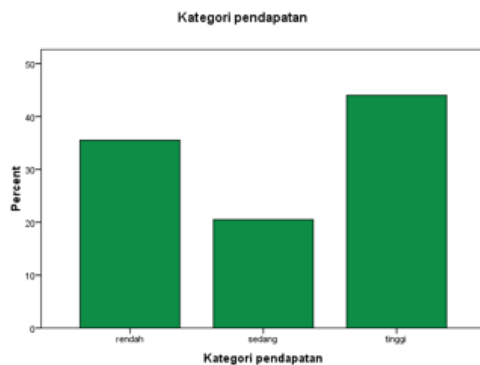
Tentu *spillover dan multiplier effects* dari perhutanan sosial akan berdampak langsung bagi rakyat kecil (baca: wong cilik) yang mendapat ijin/hak yang selama ini hanya diberikan dan dinikmati kepada pengusaha kelas kakap. Dampak tidak langsung juga akan dirasakan bagi daerah di seputar hutan akan mendapat manfaat dari penciptaan kerja (menurunkan pengangguran), meningkatnya nilai tambah & pertumbuhan ekonomi, dan menurunkan ketimpangan. Memang rakyat dan UKM membutuhkan pendampingan dan kemitraan.

Dalam subbab ini analisis regresi logistik digunakan untuk memprediksi faktor-faktor penentu klasifikasi kenaikan pendapatan

responden. Pendapatan 200 responden di Lampung dan DIY dikategorikan menjadi “tinggi” apabila melebihi nilai rata-rata pendapatan ditambah deviasi standarnya; sebaliknya disebut “rendah” bila kurang dari nilai rata-rata pendapatan ditambah deviasi standarnya.

Berdasarkan Gambar 9.9 diperoleh hasil bahwa klasifikasi pendapatan rendah responden sebanyak 35,5%, dan sebanyak 44% responden memiliki pendapatan yang tinggi, sisanya 20,5% responden berpendapatan sedang.

► Gambar 9.9. Klasifikasi Pendapatan



Sumber: Diolah dari data primer

Adapun model yang digunakan adalah *Binary Logistic Regression* sebagai berikut:

$$\text{PG_PENDAPATAN} = f(\text{LAMA_SK, LUAS_LAHAN, TK, B_TRANSPORTASI, B_INPUT, KEMITRAAN, P_HKM, KENDALA, KEBAKARAN, PENCURIAN, PENDAMPINGAN, TANAM POKOK, PARTISIPASI_RENCANA, PARTISIPASI_PELAKSANAAN, PARTISIPASI_MONEV}) \quad 5.3$$

Persamaan 5.3 digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut: Apakah kategori pendapatan responden (PG_PENDAPATAN) dapat dijelaskan oleh variabel (LAMA_SK, LUAS_LAHAN, TK, B_TRANSPORTASI, KEMITRAAN, P_HKM, KENDALA, KEBAKARAN, PENCURIAN, PENDAMPINGAN, TANAM POKOK, PARTISIPASI_Rencana, PARTISIPASI_Pelaksanaan, PARTISIPASI_Monev) tersebut? Adapun variabel penjelas tersebut adalah:

LAMA_SK	= Lama tahun diterima SK
LUAS_LAHAN	= Luas Lahan HKm yang dikelola masing-masyarakat
TK	= Jumlah tenaga kerja termasuk buruh dan pemilik lahan
B_TRANSPORTASI	= Biaya transportasi yang dikeluarkan
B_INPUT	= Biaya input yang dikeluarkan untuk mengelola lahan HKm
KEMITRAAN	= Jenis kemitraan yang dilakukan
P_HKM	= Dummy variabel (1= masyarakat tahu tentang HKm, 0= tidak tahu)
KENDALA	= Dummy variabel (0= tidak tahu, 1=akses pasar, 2=akses modal. 3=akses bahan baku, 4=peralatan masih tradisonal, 5=kombinasi, 6=lainnya)
KEBAKARAN	= Dummy variabel (1= tidak pernah kebakaran, 0= pernah kebakar)
PENCURIAN	= Dummy variabel (0= tidak ada pencurian, 1= ada pencurian)
PENDAMPINGAN	= Dummy variabel (0= tidak ada pendampingan, 1= ada pendampingan)

TANAM POKOK	= Dummy variabel (1=kopi, 2=jati, 3=lainnya (tanaman kehutanan)
PARTISIPASI_Rencana	= Dummy variabel partisipasi rencana masyarakat mendukung kelestarian lingkungan (3= tinggi, 2=sedang, 1=rendah)
PARTISIPASI_Pelaksanaan	= Dummy variabel partisipasi pelaksanaan masyarakat mendukung kelestarian lingkungan (3= tinggi, 2=sedang, 1=rendah).
PARTISIPASI_Monev	= Dummy variabel partisipasi monev masyarakat mendukung kelestarian lingkungan (3= tinggi, 2=sedang, 1=rendah).

Secara keseluruhan, model regresi logistik binari mampu mengalokasikan secara tepat lebih dari 88% dari klasifikasi pendapatan. Tabel 9.1 memberikan ringkasan klasifikasi untuk model tersebut. Model 3 adalah model yang terbaik karena hasilnya mampu memprediksi secara tepat keanggotaan grup sebesar 80,5% untuk responden yang pendapatannya tinggi pasca ijin HKM dan 86,2% untuk responden yang mengaku pendapatannya rendah.

Variabel kunci yang menentukan pendapatan responden meningkat atau tidak adalah **lama SK IUPHKM, kemitraan, tenaga kerja, dan partisipasi pelaksanaan**. Koefisien regresi logistik untuk lama SK adalah negatif dan signifikan dengan derajat kepercayaan 99%. Hal ini berarti bahwa semakin singkat responden mendapatkan SK IUPHKM maka besar kemungkinan pendapatan responden makin tinggi.

Koefisien regresi logistik

untuk kemitraan adalah positif dan signifikan dengan derajat kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa semakin responden banyak menjalin kemitraan dengan pihak mana pun maka makin besar kemungkinan pendapatan responden meningkat. Sebaliknya, makin sedikit kemitraan yang dijalin, maka makin besar kemungkinan pendapatan responden tidak meningkat. Sedangkan variabel tenaga kerja, memiliki hubungan yang negatif, artinya semakin banyak jumlah tenaga kerja maka penghasilan yang diperoleh menjadi semakin berkurang.

Koefisien regresi logistik untuk partisipasi pelaksanaan adalah negatif dan signifikan dengan derajat kepercayaan 90%. Hal ini berarti bahwa semakin besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan maka makin kecil kemungkinan pendapatan responden makin rendah.

► Tabel 9.3. Hasil Estimasi Kategori Pendapatan dengan Regresi Logistik Binari

Prediktor	Model		
	1	2	3
Konstanta	-6,260 (1,915)	-6,293 (2,223)	-1,524 (0,961)
Luas Lahan	-0,081 (0,036)		
Lama SK	0,684 (13,497)	0,634 (29,991)***	0,711 (35,615)***
Tenaga Kerja	-0,176 (1,658)	-0,160 (1,758)	-0,218 (3,287)*
Proporsi Biaya Transpor	1,517 (1,258)	1,643 (1,860)	
Proporsi Biaya Input	-0,560 (0,201)		
Kemitraan	0,190 (3,387)*	0,216 (5,034)**	0,184 (4,252)**
Kendala	0,066 (0,277)		
Pengetahuan tentang HKm	2,781 (1,329)	2,583 (1,346)	
Kebakaran	1,210 (2,657)	1,128 (2,820)*	
Pencurian	0,123 (0,027)		
Ada tidaknya pendampingan	2,274 (0,417)	2,157 (0,396)	
Tanaman pokok yang ditanam	-0,320 (0,154)		
Partisipasi Rencana	0,601 (0,056)		
Partisipasi Pelaksanaan	-2,724 (1,629)	-1,898 (9,624)***	-1,776 (8,094)**
Partisipasi Monev	-6,260 (1,915)		
Pendapatan tinggi	89,3%		86,6%
Pendapatan rendah	90,9%		89,8%
Overall Percentage	90,0%		88,0%

***) menunjukkan signifikan statistik pada derajat kepercayaan 99%

**) menunjukkan signifikan statistik pada derajat kepercayaan 95%

*) menunjukkan signifikan statistik pada derajat kepercayaan 90%

Nilai statistik Wald dalam kurung. Model 1: model lengkap ; model 2: *backward model*; model 3: model terbaik

Ternyata koefisien lain yang tidak signifikan adalah luas lahan, biaya transpor, biaya input, kebakaran, pencurian, pendampingan, tanaman pokok, partisipasi rencana, dan partisipasi monev. Artinya, variabel ekonomi (luas lahan, biaya transpor, biaya input), variabel sosial (pendampingan, pengetahuan HKm, dan kendala pengelolaan HKm), dan variabel lingkungan (kebakaran, pencurian, tanaman pokok, partisipasi rencana, dan partisipasi monev) ternyata belum berdampak secara signifikan terhadap pendapatan responden. Besar kemungkinan ini diakibatkan oleh periode implementasi HKm yang relatif masih pendek (3-4 tahun).

BAB 10

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan implikasi kebijakan dari masing-masing bab berdasarkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang diharapkan bermanfaat bagi pengambilan keputusan dari berbagai pemangku kepentingan khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

10.1. Kesimpulan

Laporan final ini telah menjawab pertanyaan sebagai berikut: (1) Seberapa jauh peningkatan kesejahteraan (dampak ekonomi dan sosial) terhadap rakyat lokal (pemegang ijin dan masyarakat sekitar)?; (2) Sejauh mana perhutanan sosial mendukung kelestarian hutan? Sasaran dari kajian ini adalah “rakyat sejahtera, hutan lestari” yang ditinjau dari tiga aspek analisis, yaitu analisis dampak ekonomi, sosial dan lingkungan.

Bab 2 memberikan gambaran umum mengenai perhutanan sosial di Indonesia. Perhutanan sosial muncul setelah Kongres Kehutanan Dunia ke-8 tahun 1978 di Jakarta. Kongres tersebut mengangkat tema *Forest*

for People. Pembangunan diarahkan untuk pembangunan masyarakat lokal (*forestry for local community development*). Tujuannya adalah untuk meningkatkan standar kehidupan penduduk perdesaan di sekitar hutan dengan cara melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan dan berbagai kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan kearifan lokal. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 622/Kpts-II/1995 tentang Pedoman Hutan Kemasyarakatan awal mula payung hukum yang digunakan. Pencanangan HKm pada tahun 2007 merupakan tonggak awal pemberian ijin definitif HKm yaitu IUPHKm yang diberikan ketiga provinsi di Indonesia yaitu Lampung, DIY, dan NTB. Terjadi peningkatan pemberian akses kelola kawasan hutan dari tahun 2007-2014 ke tahun 2014-2017 yaitu sebesar 438.087,05 ha.

Bab 3 mendeskripsikan gambaran umum perhutanan sosial di DIY. Dalam bagian ini deskripsi fokus di wilayah penelitian yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tani Manunggal, Dusun Menggoran II, Desa Bleberan, Kecamatan Playen,

Kabupaten Gunungkidul dan HKM Mandiri, Dusun Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Kawasan hutan yang dikelola oleh HKM Tani Manunggal, Dusun Menggoran II, Desa Bleberan merupakan hutan lindung dengan tanaman pohon Jati. Di wilayah Desa Bleberan telah dikembangkan kawasan desa wisata Bleberan dengan obyek wisata utama Air terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencono. Kawasan desa wisata tersebut dikelola oleh BUMDES “Sejahtera”. Sebagian anggota HKM Tani Manunggal terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam kegiatan desa wisata tersebut.

Kawasan hutan yang dikelola oleh HKM Mandiri juga kawasan hutan lindung dengan beberapa jenis pohon seperti Jati, Sonokeling, dan tanaman keras lainnya. Di dusun Kalibiru, Desa Hargowilis sudah dikembangkan kawasan desa wisata Kalibiru. Efek pengganda dari kegiatan wisata tersebut mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja. Sebagian anggota HKM Mandiri yang terlibat langsung maupun tidak langsung tentu akan memperoleh tambahan penghasilan.

Bab 4 menjelaskan gambaran umum perhutanan sosial di Lampung. HKM Sinar Mulya Pekon Sukamaju Kec. Ulu Belu Reg.39

dikelola oleh 8 kelompok tani dan HKM Beringin Jaya Pekon Margoyoso, Kecamatan Pulau Panggung Reg.30 dikelola oleh 8 kelompok tani. Kedua HKM tersebut merupakan kawasan hutan lindung dengan tanaman pokok kopi. Tanaman kopi tersebut telah menjadi sumber pendapatan terbanyak dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga kelompok tani. Bahkan kelompok tani telah memperoleh berbagai pelatihan kopi dari Nestle, *Tropical Forest Conservation Action* (TFCA), dan Konsorsium Kota Agung Utara (KORUT). Sementara untuk pemeliharaan ternak hanya sebagai penghasilan tambahan karena baru sebagian saja anggota kelompok yang melihara ternak. HKM Sinar Mulya dan Beringin Jaya memiliki potensi wisata yaitu air terjun lembah pelangi di Hkm Sinar Mulya dan air terjun batu lapis di Hkm Beringin Jaya. Wisata air terjun ini belum dikelola dengan baik dan belum ada sarana prasarana pendukung di dalamnya sehingga belum memberikan kontribusi terhadap pendapatan kelompok tani. Namun, telah dibentuk pokdarwis di Hkm Sinar Mulya yang sudah berjalan selama ijin IUPHKM terbit bersama dengan koperasi serba usaha. Di HKM Beringin jaya koperasi serba usaha sudah jauh lebih dulu dibentuk dan berjalan.

Bab 5 mendeskripsikan

metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksploratif dan deskriptif analitik. Unit analisis dalam penelitian ini adalah anggota Kelompok HKm di 4 lokasi di DIY dan Lampung. Teknik penentuan informan dilakukan dengan metode *cluster sampling* dan *purposive sampling*. Jumlah responden untuk masing-masing lokasi HKm adalah 50 orang sehingga total responden adalah 200. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan *focused group discussion*. Teknik Analisis data dilakukan dengan validasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kerangka pemikiran yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak perhutanan sosial adalah dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan. Untuk mengidentifikasi dampak ekonomi dilihat dari indikator-indikator jumlah produksi dan pendapatan petani, lapangan kerja yang muncul dari keberadaan HKm, penurunan kemiskinan dan kemitraan bisnis yang mampu dikembangkan. Indikator dampak sosial meliputi persepsi masyarakat, desain kelembagaan, perubahan perilaku dan kendala di dalam pengembangan HKm. Sedangkan indikator dampak lingkungan adalah sustainabilitas kelestarian

lingkungan, ancaman (kebakaran hutan, pencurian satwa, pencurian dan sebagainya) dan partisipasi masyarakat di dalam mendukung kelestarian lingkungan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif (metode kasus dan metode statistik), analisis tabulasi silang dan regresi logistik.

Bab 6 berisi hasil dan pembahasan dampak ekonomi implementasi perhutanan sosial. Secara umum terjadi peningkatan produksi, pendapatan, penyerapan tenaga kerja. Terlepasnya petani dari jerat kemiskinan yang tercermin dari: (1) Petani HKm telah memiliki rumah sendiri meskipun sebagian masih semi permanen; (2) Kepemilikan sepeda motor antara 1 hingga 3 unit. Analisis regresi membuktikan bahwa lama SK IUPHKm, luas lahan, jumlah tenaga kerja, dan kemitraan berpengaruh positif terhadap pendapatan. Jenis kemitraan yang telah dilakukan berupa penyuluhan, pelatihan, membeli produk, memberi bantuan modal, dan pendampingan. Kendala yang dihadapi oleh petani kelompok Hkm adalah kombinasi dari terbatasnya akses bahan baku, akses modal, akses pasar, dan masih tradisionalnya peralatan yang dimiliki.

Bab 7 telah menganalisis dampak sosial dari perhutanan sosial di Lampung dan DIY. Hasil

analisis menemukan bahwa program Perhutanan Sosial telah meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai HKm, mendorong munculnya lembaga lokal (terutama koperasi), dan perubahan perilaku positif masyarakat. Kendala yang dapat mengancam keberlanjutan program perhutanan sosial yang telah diidentifikasi adalah: kurangnya pendampingan dari KLHK, bentuk pendampingan yang muncul masih berorientasi penguatan kelembagaan (*silver*), adanya keluhan terkait prosedur izin dalam penjarangan (Gunungkidul), lemahnya kapasitas pengurus dalam mengelola HKm dan faktor cuaca (angin kencang, hujan dan kemarau di waktu yang tidak sesuai siklus) menjadi masalah bagi keberlangsungan usaha perkebunan kopi (Tanggamus).

Bab 8 disimpulkan bahwa adanya variasi perubahan tutupan lahan di keempat lokasi HKm. Peningkatan tutupan hutan lahan kering sekunder terjadi di HKm Kalibiru, sebaliknya di HKm Sinar Mulya terjadi penurunan sebesar 2,91 ha. Pada dua lokasi HKm lainnya tidak terjadi perubahan tutupan hutan lahan kering sekunder. Ada gangguan satwa dan perburuan satwa yang mengancam kelestarian hutan. Ancaman satwa terbesar, yaitu babi hutan dan monyet. Tingkat partisipasi dari tahap

perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi tergolong tinggi. Ada variasi keterlibatan *stakeholders*. Keterlibatan *stakeholders* dalam pengelolaan HKm sebagian besar didominasi oleh pengurus kelompok, polisi hutan, dan LSM. Khusus pada HKm Sinar Mulya, Lampung terdapat keterlibatan *stakeholders* dari pihak swasta yaitu perusahaan nasional dan internasional, serta pihak akademisi.

Bab 9 disimpulkan bahwa ternyata pertumbuhan ekonomi baik di DIY dan Tanggamus belum mampu mengurangi kemiskinan. Hal ini didukung oleh temuan hasil penelitian melalui regresi logistik binari bahwa hanya ada beberapa variabel yang memiliki pengaruh terhadap kenaikan pendapatan. Variabel kunci yang menentukan pendapatan responden meningkat atau tidak adalah **lama SK IUPHKm, kemitraan, tenaga kerja, dan partisipasi pelaksanaan**. Koefisien regresi logistik untuk lama SK adalah negatif dan signifikan dengan derajat kepercayaan 99%. Hal ini berarti bahwa semakin singkat responden mendapatkan SK IUPHKm maka besar kemungkinan pendapatan responden makin tinggi. Koefisien regresi logistik untuk kemitraan adalah positif dan signifikan dengan derajat kepercayaan 95%. Hal ini berarti bahwa semakin responden

banyak menjalin kemitraan dengan pihak mana pun maka makin besar kemungkinan pendapatan responden meningkat. Sebaliknya, makin sedikit kemitraan yang dijalin, maka makin besar kemungkinan pendapatan responden tidak meningkat. Sedangkan variabel tenaga kerja, memiliki hubungan yang negatif, artinya semakin banyak jumlah tenaga kerja maka penghasilan yang diperoleh menjadi semakin berkurang. Koefisien regresi logistik untuk partisipasi pelaksanaan adalah negatif dan signifikan dengan derajat kepercayaan 90%. Hal ini berarti bahwa semakin besar partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan maka makin kecil kemungkinan pendapatan responden makin rendah.

Ternyata koefisien lain yang tidak signifikan adalah luas lahan, biaya transpor, biaya input, kebakaran, pencurian, pendampingan, tanaman pokok, partisipasi rencana, dan partisipasi monev. Artinya, variabel ekonomi (luas lahan, biaya transpor, biaya input), variabel sosial (pendampingan, pengetahuan HKm, dan kendala pengelolaan HKm), dan variabel lingkungan (kebakaran, pencurian, tanaman pokok, partisipasi rencana, dan partisipasi monev) ternyata belum berdampak secara signifikan terhadap pendapatan responden. Besar

kemungkinan ini diakibatkan oleh periode implementasi HKm yang relatif masih pendek (3-4 tahun).

10.2. IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari Bab 1 hingga Bab 9, dapat ditarik implikasi kebijakan dari perspektif masing-masing dimensi sebagai berikut:

1. Dari dimensi ekonomi:
 - a. Program pemberian IUPHKm kepada petani/masyarakat terus dilaksanakan secara berkesinambungan dengan mempertimbangkan lamanya ijin usaha (termasuk kemudahan dan kecepatan pemberian ijin yang terkait dengan pengelolaan hutan), luas lahan, dan kesiapan kelompok tani HKm.
 - b. Program Perhutanan Sosial, khususnya HKm, harus bekerja sama dan bersinergi dengan pemangku kepentingan, yaitu: pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, komunitas lokal, dan media massa (*Penta Helix*). Keterlibatan pemangku kepentingan diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi, pendapatan petani, penyerapan tenaga kerja, penurunan kemiskinan, dan kemitraan usaha.
 - c. Sebagian besar responden

tergolong Usaha Mikro dan Kecil (UMK) maka diperlukan dukungan, bantuan, dan pendampingan terkait dengan akses bahan baku, akses modal, akses pasar, dan masih tradisionalnya peralatan yang dimiliki.

2. Dari dimensi sosial:

- a. Pendampingan yang lebih intensif dari KLHK perlu ditingkatkan khususnya melalui penguatan kewirausahaan (bantuan ekonomi produktif dan temu usaha), akses modal, akses pasar.
- b. P r o g r a m - p r o g r a m pendampingan perlu berbasis pada paradigma pemberdayaan masyarakat. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga subyek dalam pengelolaan HKm. Dalam konteks ini, pemberdayaan harus diarahkan pada upaya pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi (*empowering*), dan menciptakan kemandirian anggota HKm. Perencanaan partisipatif menjadi salah satu kunci utama agar bentuk pendampingan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang

dimiliki anggota kelompok HKm.

- c. Fungsi pendamping perlu lebih dioptimalkan lagi agar keberadaannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Secara ideal, fungsi pendamping diarahkan pada tiga tugas utama yaitu pengorganisasian masyarakat, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pendokumentasian program-program Perhutanan Sosial. Fungsi pengorganisasian masyarakat meliputi: merumuskan kebutuhan hidup masyarakat di sekitar wilayah HKm dan memetakan potensi yang dimiliki masyarakat untuk berkembang (*need assesment*), menjalin dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemerintah daerah, pemerintah desa, LSM dan berbagai organisasi lainnya, menginformasikan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program Perhutanan Sosial, dan merumuskan rencana program sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat di sekitar HKm. Sedangkan fungsi peningkatan

- kapasitas masyarakat meliputi: merumuskan kapasitas yang harus dimiliki masyarakat dalam program pengembangan HKm dan melakukan pendampingan pengembangan kapasitas masyarakat dan pengurus kelompok HKm, melakukan monitoring dan evaluasi program yang dilakukan.
- d. Dari aspek regulasi, perlu payung hukum agar kelompok HKm mampu memberi kontribusi kepada daerah melalui PADes maupun PAD (Kulon Progo),
 - e. Perlu ada peran KLHK dalam memunculkan dan mensosialisasikan prosedur ijin yang jelas dalam melakukan penjarangan pohon (Gunungkidul),
 - f. Perlu ada penguatan kapasitas akses pasar mengenai pengolahan kopi paska panen agar nilai jual biji kopi di petani bisa tinggi dan petani memiliki alternatif menjual kopi dalam bentuk olahan yang bernilai tambah, penguatan kewirausahaan dengan bantuan alat/pengetahuan yang mampu mengurangi kerugian akibat cuaca yang tidak bersahabat (Tanggamus).
3. Dari dimensi lingkungan:
 - a. Perlu adanya tindakan pencegahan yang efektif dan penerapan sanksi hukum yang tegas agar mampu memberikan efek jera kepada penggarap ilegal yang membuka lahan hutan. Peran *stakeholders* terkait terutama KPHL, Polhut, Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) sangat dibutuhkan untuk berkolaborasi mengamankan hutan dari pembukaan lahan.
 - b. Perlu adanya penerapan teknologi yang tepat untuk mengamankan hutan dari gangguan satwa dan perburuan satwa. Bantuan dari dinas terkait untuk pengamanan lahan sangat dibutuhkan agar pengawasan hutan dan regulasi yang tegas dapat dijalankan. Regulasi yang tegas diharapkan mampu mencegah perburuan satwa yang biasanya dilakukan oleh perorangan ataupun masyarakat di luar anggota HKm.
- Keterlibatan *stakeholders* dalam pendampingan pengelolaan HKm perlu ditingkatkan dan harus terus berkelanjutan terutama keterlibatan dari KLHK. Kelompok tani membutuhkan pendampingan terkait cara inventarisasi, pemetaan, dan pembuatan perencanaan kelola tahunan (RKT).

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, R. H., Rusdiana, E. (2016). Penanggulangan perburuan satwa yang dilindungi oleh masyarakat adat di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, *Jurnal Novum*, Vol. 1(2): 1-7.
- Akbar, A. (2015). Studi Kearifan Lokal Penggunaan Api Persiapan Lahan. Studi Kasus di Hutan Mawas, Kalimantan Tengah, *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 8(3): 211-223.
- Armanto, M.E. (2014). Spatial Mapping for Managing Oxidized Pyrite (FeS₂) in South Sumatra Wetlands, Indonesia. *Journal of Wetlands Environmental Managements*, Vol. 2 (2): 6-12.
- Armanto, M.E. dan Wildayana, E. (1998). Analisis Permasalahan Kebakaran Hutan dan Lahan dalam Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas, *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol.18(4): 304-318.
- BPDAS Serayu Opak Progo. (2011). *Profil Kelompok Tani HKm DIY*. BPDAS Serayu Opak Progo. Yogyakarta.
- BPS Gunungkidul. (2016). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2016*. BPS Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.
- BPS Kulon Progo. (2016). *Kulon Progo Dalam Angka 2016*. BPS Kabupaten Kulon Progo. Yogyakarta.
- BPS Kulon Progo. (2017). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kulon Progo 2017*. BPS Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.
- BPS Tanggamus. (2017). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tanggamus 2017*. BPS Kabupaten Tanggamus, Lampung.
- Desa Bleberan. (2016). "Sejarah Desa Bleberan". Tersedia di: http://bleberan-playen.desa.id/index.php/first_ (Diakses tanggal 2 Februari 2018).
- Desa Wisata Bleberan. (2015a). "Goa Rancang Kencono". Tersedia di: <http://wisatadesableberan.blogspot.co.id/> (Diakses tanggal 2 Februari 2018).
- Desa Wisata Bleberan. (2015b). "Pesona Air Terjun Sri Gethuk". Tersedia di: <http://wisatadesableberan.blogspot.co.id/> (Diakses tanggal 2 Februari 2018).

- Desa Wisata Kalibiru. (2017). “*Kalibiru: Desa Wisata*”. Tersedia di: <http://kalibiru.blogspot.co.id/> (Diakses tanggal 2 Februari 2018).
- Diniyati, D. (2015). Satwa yang sering ditemukan pada hutan rakyat agroforestri di Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya, Jawa Barat, *Jurnal*, Vol 1, (3): 642-646.
- Ekawati S, Daryono H, Zuraida. (2008). Kesiapan Masyarakat Sekitar Hutan dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, *Makalah*, Seminar Hutan Tanaman Rakyat yang diselenggarakan oleh Puslit Sosek dan Kebijakan Kehutanan Badan Litbang Kehutanan tanggal 14 Agustus 2008.
- Fabra-Crespo, M., Mola-Yudego, B., Gritten, D., & Rojas-Briales, E. (2012). Public perception on forestry issues in the Region of Valencia, *Forest Systems*, 21(1), 99-110.
- FAO. (1978). *Forestry for Local Community Development*. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), FAO Forestry Paper, No.7, Rome.
- Foley, Gerard, and Geoffrey Barnard. (1984). *Farm and Community Forestry*. Technical Report No.3. International Institute for Environment and Development. London.
- Hadi, U. (2017). “Bleberan Gunungkidul Jadi Desa Wisata Terbaik Versi Kemendes”, *Detiknews*. Tersedia di: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3501806/bleberan-gunungkidul-jadi-desa-wisata-terbaik-versi-kemendes> (Diakses tanggal 2 Februari 2018).
- Harahap, W.H., Patana, P., Afifuddin, Y. (2014). “Mitigasi konflik satwa liar dengan masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Leuser (Studi Kasus Desa Timbang Lawan dan Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat)”, <http://id.portalgaruda.org> (Diakses tanggal 14 Februari 2018).
- Imanudin, M.S., Armanto, E., Probowati, D. (2015). Strategi pengendalian kebakaran hutan terpadu dalam upaya mendukung program zero asap di Sumatera Selatan, *Makalah*, Seminar Nasional Etika Lingkungan dalam Eksplorasi Sumberdaya Pangan dan Energi, BKPSL Indonesia-PPLH-Unsri, Palembang 11-12 November 2015, 12 hlm.
- Irfan, M. (2006). Kajian Ekologi, Populasi dan Kranimetri Bange (*Macaca tonkeana*) di Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, *Tesis*, Institut Pertanian Bogor, Bogor, 62 hlm.
- Irwandi, Jumani., Ismail, B. (2016). Upaya penanggulangan

- kebakaran hutan dan lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur, *Jurnal AGRIFOR*, Vol 15 (2): 201-210.
- Kementerian Kehutanan dan Perkebunan. (1998). *Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 677/Kpts-II/1998 Tentang Hutan Kemasyarakatan*. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. (2001). *SK Menhut Nomor: 31/Kpts-II/2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. (2007). *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 37/Menhut-II/2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. (2014). *Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 88/Menhut-II/2014 Tentang Hutan Kemasyarakatan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementerian Kehutanan. 2016. *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kementrian Pertanian. (2013). *Pedoman Teknis Perluasan Sawah*. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementrian Pertanian.
- Konsorsium Kota Agung Utara. (2017). *Pengembangan Sistem Pengelolaan Informasi Pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Tanggamus Lampung*, Lampung: Tropical Forest Conservation Action Sumatera, KORUT, Universitas Lampung.
- KORUT. (2014). HKm di Tanggamus, *Laporan*. KORUT. Tanggamus. (tidak dipublikasikan).
- KORUT. (2014). Peta HKm Beringin Jaya, *Laporan*. KORUT. Tanggamus. (tidak dipublikasikan).
- KORUT. (2014). Peta HKm Sinar Mulya, *Laporan*. KORUT. Tanggamus. (tidak dipublikasikan).
- KORUT. (2017). HKm di Tanggamus, *Laporan*. KORUT. Tanggamus. (tidak dipublikasikan).
- KORUT. (2014). Peta HKm Beringin Jaya, *Laporan*. KORUT. Tanggamus. (tidak dipublikasikan).
- KORUT. (2014). Peta HKm Sinar Mulya, *Laporan*. KORUT. Tanggamus. (tidak dipublikasikan).
- KPHL Kota Agung Utara. (2014). *Rencana Pengelolaan KPHL Kota Agung Utara 2014-2023*, *Laporan*, KPHL Kota Agung Utara. Tanggamus. (tidak dipublikasikan).

- Kuncoro, Mudrajad. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta, Erlangga.
- Kuncoro, Mudrajad. (2018). *Metode Kuantitatif untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- LEI. (2004). Pedoman Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari (PHBML) Standar 5000-3.
- Lestari, L. (2017). Program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, *Skripsi*, Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Mas'oed, M. (2003). *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Moeljarto dalam Priyono, Onny S & A.M.W. Pranarka. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Mulyana, L., safe'i, R., Febryano, IG. (2017). Performa pengelolaan agroforestri di Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa, *Jurnal Hutan Tropis*, Vol 5(2):127-133.
- Nandini, R. (2013). Evaluasi pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) pada hutan produksi dan hutan lindung di Pulau Lombok, *Jurnal Penelitian Hutan Tanaman*, Vol. 10(1): 43-55.
- Nasichah. Z. (2017). Mitigasi gangguan simpai (presbitys melalophos) dalam kerusakan agroforestri di Hutan Lindung Reg 25 Pematang Tanggang Kelumbayan Tanggamus, *Skripsi*, Universitas Lampung, hlm. 43, Lampung. (tidak dipublikasikan).
- Ngaji, AUK. (2009). Pengaruh perubahan tutupan lahan terhadap kondisi hidrologis kawasan daerah aliran sungai talau, *Jurnal Partner*, Vol. 16 (1): 51-55.
- Novayanti, D., Banuwa, IS., Safe'i, R., Wulandari, C., Febryano, IG. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat dalam pembangunan hutan tanaman rakyat pada KPH Gedong Wani, *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, Vol. 9 (2): 61-74.
- Nurrani, L., Bismark, M., Tabbas, S. (2015). Partisipasi lembaga dan masyarakat dalam konservasi mangrove (Studi kasus di Desa Tiwoho Provinsi Sulawesi Utara), *Jurnal WASIAN*, Vol.2(1): 21-32.
- Pega, K. B., Sukarno, A., Sulastri, S. (2016). Studi tingkat kerusakan hutan lindung Mbay Akibat Pencurian Pohon, *Jurnal Ilmu Kehutanan*, Vol. 1, (1): 17 – 21.
- Priyono, Onny S & A.M.W. Pranarka.

- (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan Dan Implementasi*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Prijono, Agus. (2017). *Berbagi ruang Kelola Kisah dan Pesan Hutan Kemasyarakatan Tanggamus-Lampung*, Jakarta: Tropical Forest Conservation Action Sumatera.
- Putiksari, V., Dahlan, E.N., Prasetyo, L.B. (2014). Analisis perubahan penutupan lahan dan faktor sosial ekonomi penyebab deforestasi di Cagar Alam Kamojang, *Jurnal Media Konservasi*, Vol.19 (2): 126–140.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemdes Bleberan. (2016). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunungkidul*. Bleberan.
- Sabrina, .A.M. (2015). Strategi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, hlm. 1-12.
- Sardjono. (2005). *Relevansi Prinsip Sosial Dalam Sertifikasi Guna Mengoptimalkan Kestinambungan Sumberdaya Hutan dan Usaha Kehutanan*, *Jurnal e-label*, Edisi III, No. 67-73.
- Simon, Hasanu. (1994). *Merencanakan Pembangunan Hutan Untuk Strategi Kehutanan Sosial*. Yayasan Pusat Studi Sumberdaya Hutan. Yogyakarta.
- Simon, Hasanu. (2006). *Hutan Jati dan Kemakmuran, Problema dan Strategi Pemecahannya*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Simon, Hasanu. (2010). *Perencanaan Pembangunan Sumberdaya Hutan Timber Management*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suparjan dan Suyatna, Hempri. (2003). *Pengembangan Masyarakat Dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Suyatna, Hempri, Awan Santoso, Istianto Ari Wibowo, Advis Naire, Junaedi Ghazali, Pusoko Nur Seto, dan Puthut Indroyono. (2016). *Model Kerakyatan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suyatna, Hempri, Soetomo, Eka Zuni Lusi Astuti. (2015). *Pembangunan Masyarakat Sebuah Analisis Kompataratif*, Yogyakarta: AzzaGraffika.
- Tiwari, KM. (1983). *Role of Social Forestry in Village Economy*. Forestry Research Institute and Collage. Dehradun. India.
- Tosiani, A. (2015). *Buku Kegiatan Serapan dan Emisi Karbon*. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

- Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Jakarta.
- Vitasurya, R., Pudianti, A., Purwaningsih, A., & Herawati, A. (2014). Kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan Desa Wisata Kalibiru, di D.I Yogyakarta, *Makalah*, Puswira UAJY, Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Westoby, JC. (1968). *Changing Objectives of Forest Management*. Address to Ninth Commonwealth Forestry Conference. New Delhi.
- Wibowo, A., Ayu K.R.H.G., Sudarwanto, A.S. (2017). Implementasi kebijakan dalam penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar di Propinsi Jambi (ditinjau dari hukum dan kebijakan publik), *Prosiding Seminar*. Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM Sosial, Ekonomi dan Humaniora, hlm. 265-274.
- Widianto., Suprayogo, D., Noveras, H., Widodo, R.H., Purnomosidhi, P., dan Noordwijk, M.P. (2004). Alih guna lahan hutan menjadi lahan pertanian: apakah fungsi hidrologis hutan dapat digantikan sistem kopi monokultur, *Jurnal Agrivita*, Vol. 26(1): 47-52.
- Wildayana, E. (2006). Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat di Propinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ilmiah HABITAT*, Vol. 17(3): 218-227.
- Winata, A dan Yuliana, E. (2012). Tingkat partisipasi petani hutan dalam Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) perhutani, *Jurnal Mimbar*, Vol. 28, (1): 65-76.
- Wiratno. (2016). "Kalibiru yang Mendunia" diakses dari <http://konservasiwiratno.blogspot.co.id/2017/02/kalibiru-yang-mendunia.html> (Diakses tanggal 3 Februari 2018).
- Yuwono, M. (2017). "Dulu Kesulitan Air, Kini Bleberan Jadi Desa Wisata Berpendapatan Miliaran Rupiah", *Kompas.com*, Tersedia di: <http://regional.kompas.com/read/2017/05/28/08272861/dulu.kesulitan.air.kini.bleberan.jadi.desa.wisata.berpendapatan.miliaran.rupiah?page=all> (Diakses tanggal 2 Februari 2018).
- Yuwono, T. (2008). *Kehutanan Sosial*. Fakultas Kehutanan UGM. Yogyakarta.

BIODATA SINGKAT TIM PENELITIAN



MUDRAJAD KUNCORO adalah guru besar ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM). Ia tercatat peringkat ke-13 dari daftar 602 top ilmuwan Indonesia dari semua disiplin ilmu menurut Webometrics bulan Juli 2017 (<http://www.webometrics.info/en/node/96>), sekaligus sebagai ekonom paling banyak dikutip karyanya di Indonesia. Lahir di Yogyakarta, 4 September 1965. Ia mendapat gelar Sarjana Ekonomi dengan predikat *cum laude* dari FE UGM (1989), Graduate Diploma dengan spesialisasi Keuangan Daerah (1992) dan Master of Social Science dari University of

Birmingham, Inggris (1993), dan Doktor (PhD) dengan spesialisasi Business & Regional Development dari University of Melbourne, Australia (2001), dan meraih guru besar termuda FEB UGM (2006). Pernah mengikuti kursus singkat Fiqh for Economists di International Islamic University, Selangor, Malaysia (1994), visiting scholar di Department of Economics, Research School of Pacific and Asian Studies, Australian National University, Canberra (1998), dosen tamu di University of Melbourne, University of Leiden, dan University of Groningen, serta menjadi delegasi Republik Indonesia (RI) dalam Konferensi International Labour Organization ke-96 di Geneva (2007). Ia pernah menjadi Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB UGM (2007-2011), Chief Economist Recapital Advisors (2008-2010), Anggota Tim Eksternal Pemantau Pelaksanaan Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi di Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2006-2008), Tim Ahli Bidang Ekonomi Kadin (2007-2009), Tim Penyusun Kebijakan Pembangunan Industri Nasional (2006-2008), Ketua tim revitalisasi Perusda Kaltim (2012-sekarang), Komisaris PT AMI (Perusda milik provinsi DIY), staf ahli Gubernur DIY bidang ekonomi (Februari 2011-Agustus 2012), Editor in Chief Journal of Indonesian Economy & Business (2004-2014), Manajer Kantor Publikasi FEB UGM (2013), Ketua Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi FEB UGM (2016-2017), dan Chief Economist Jaya Samudra Karunia Group (2015-2017). Artikelnya telah dipresentasikan dalam beberapa konferensi internasional di Rome, Paris, Sydney, Melbourne, Le Havre, Geneva, Groningen, Amsterdam, Leiden, Tokyo, Guangzhou, Denmark, Perth, Canberra, Singapura, Seoul, Manila, London, Cambridge, Oxford. Penghargaan ilmiah (award) yang pernah diperoleh, a.l.: (1)

Best paper award di Rome, Italia, 14 agustus 2016; (2) Best tract presentation & award of honour dari Academy of Business & Retail Management dalam International Trade & Academic Research Conference, di London 4-5 november 2013; (3) Penelitian & Pengabdian Award 2010 dari Rektor UGM untuk Kategori Publikasi Internasional Terbaik ke-3 se-UGM; (4) Special Dean Award dari Faculty of Economics and Commerce, University of Melbourne; (5) Teaching Award dan Lecture Notes Award dari QUE-Economics yang disponsori World Bank. Buku yang diterbitkan “baru” 45, a.l.: (1) Ekonomika Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan; (2) Ekonomika Industri Indonesia: Menuju Negara Industri 2030?; (3) Otonomi dan Pembangunan Daerah. Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai ketua tim peneliti.



Y. SRI SUSILO (YSS) adalah dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Lulus dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP) Fakultas Ekonomi UGM (1992), Magister Sains (M.Si) dari Program Studi IESP Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial Program Pascasarjana UGM (1999), Doktor dari Program Doktor Ilmu Ekonomi (PDIE) peminatan Ekonomi Pembangunan Program Pascasarjana UNS (2016). Pengalaman manajerial pernah menjadi Sekretaris Pusat Pengembangan Manajemen (PPM) Fakultas Ekonomi UAJY (1993-1996). Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ekonomi UAJY (2003-2006). Asesor BAN PT untuk

Program Studi Sarjana (S1) Ekonomi Pembangunan (2002-2005). Tenaga Ahli Bidang Investasi Bappeda DIY (2017-Sekarang) dan Tenaga Ahli Forum Indonesia Raya Incorporated (2016-Sekarang). Tenaga Ahli/Konsultan Ekonomi pada CV Madani CS (2017-Sekarang). Kegiatan lain adalah menjadi Sekretaris ISEI Cabang Yogyakarta (2017-2020) dan Anggota Pengurus Pusat (PP) ISEI (2015-2018). Sekretaris/Anggota Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta (2014-2018). Aktif melakukan riset dengan biaya yang bersumber dari UAJY, APTIK, Kemendikbud RI (Dosen Muda, Hibah Bersaing, Hibah Kompetitif dan DCRG), Kemenristek RI (Insentif Riset), Universitas Stichting Belanda, PAU Studi Ekonomi UGM, PP ISEI, ISEI Cabang Yogyakarta, Bappeda Kabupaten Gunung Kidul, Bappeda Kabupaten Fakfak, Pemda DIY, PT. BRI (Persero),

Tbk., Kantor Perwakilan Bank Indonesia DIY, PT. Central Daya Energi, Jakarta dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Karya artikel ilmiah yang dihasilkan telah terbit di beberapa jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional. Sejak tahun 1992 aktif menulis artikel di koran antara lain Kedaulatan Rakyat, Bernas Jogja, Harian Jogja, Bisnis Indonesia, Koran Jakarta, Suara Karya, Suara Pembaharuan, Suara Merdeka, dan Pikiran Rakyat. Sejak tahun 2009 lebih fokus dan aktif menulis kolom “Analisis KR” & “Opini KR” di Surat Kabar Harian “Kedaulatan Rakyat”. Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai anggota tim peneliti dari aspek ekonomi.



HEMPRI SUYATNA adalah dosen Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM. Lahir di Sleman, 8 Juli 1978. Lulus dari S1 Jurusan Sosiatri Fisipol UGM (2001) dengan predikat cumlaude, master dari Program Studi Sosiologi Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial Fisipol UGM (2005) dengan predikat cumlaude dan Doktor Sosiologi Fisipol UGM tahun 2012. Jabatan akademik yang pernah dimiliki adalah asisten dekan bidang akademik Fisipol UGM 2012-2013, Ketua Program Studi S2 PSdK Tahun 2013-2015 dan Sejak Tahun

2016 sampai sekarang menjadi Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial PSdK (Social Development Studies Center). Selain itu juga aktif di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM. Concern terhadap isu-isu ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa publikasi yang dihasilkan di antaranya Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan (2003) Quo Vadis Petani Indonesia, Terhempasnya Anak Bangsa Dari Sektor Pertanian (2006), Evo Morales Presiden Bolivia Menentang Arogansi Amerika (2007), Ekonomi Rakyat Dalam Pusaran Pasar Bebas (2009), Potret Kehidupan Pembatik di Lasem Rembang (2010), Pembangunan Masyarakat Sebuah Analisis Komparatif (2015), Pengembangan UMKM, Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis, (2015), Memahami Model Bisnis Organisasi Sosial di Indonesia (2015), Model Kerakyatan Dalam Pengembangan Energi Terbarukan (2016), Dinamika Dan Kebijakan Ekonomi Rakyat, (2017). Aktif menulis juga sebagai kolumnis di media massa khususnya terkait isu-isu ekonomi

kerakyatan. Beberapa penghargaan yang pernah diraih di antaranya tahun 2010 sebagai Pembina Penalaran Berprestasi, dalam rangka Dies Natalis ke-61 UGM dan tahun 2015 meraih Pengabdian Teknologi Tepat Guna Terbaik Bidang Sosial Humaniora dalam rangka Dies Natalis UGM ke 66. Pengalaman lain pernah menjadi Tim Pendamping SKPD pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah DIY, 2013-2014. Tim Pendamping SKPD pada Dinas Sosial DIY, 2016. Sejak Tahun 2013 sampai sekarang juga menjadi Anggota FORPI (Forum Pemantau Independen) Kabupaten Sleman. Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai anggota tim peneliti dimensi sosial.



RONGGO SADONO adalah dosen tetap di Fakultas Kehutanan UGM sejak tahun 1989. Ia lahir tahun 1964, di Ngawi, Jawa Timur. Hutan dan kayu jati sudah tidak asing sejak pra-sekolah, baik peruntukannya sebagai kayu bakar maupun kayu pertukangan. Diterima di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1983 dan diselesaikan pada tahun 1988. Menjadi dosen pada fakultas yang sama sejak tahun 1989. Ia pernah mengikuti kursus AMDAL dan mendapat sertifikat A dan B. Selanjutnya mengikuti pelatihan Bahasa Jerman di Göthe Institut Jakarta dan dilanjutkan di Freiburg Jerman dalam rangka melanjutkan studi di Jerman. Sejak tahun 1996,

kuliah di Ludwig Maximillian Universität München (LMU) di Fakultas Kehutanan. Pada periode kuliah, terjadi reformasi perguruan tinggi, yaitu Fakultas Kehutanan LMU dimerger ke Technische Universität München (TUM). Ia lulus tahun 2001 dan mendapat gelar Doktor di bidang ilmu kehutanan disingkat Dr. rer. silv. Setelah kembali ke fakultas, ia aktif mengajar di Prodi S1, S2 dan S3 di bidang Biometrika Hutan, Pengukuran Sumberdaya Hutan, Ilmu Pertumbuhan Hutan, dan Pemodelan. Jabatan fungsional saat ini adalah Lektor Kepala dan menjabat sebagai Kepala Laboratorium Komputer dan Biometrika Hutan. Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai anggota tim peneliti dimensi lingkungan.



NAIROBI adalah Lektor Kepala bidang ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Lahir di Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran 21 Juni 1966. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari FE Universitas Lampung (1989), Magister Sains dari FE UGM (1996) dan Doktor dengan spesialisasi Ekonomi Publik dari FEB UGM (2014). Pengalaman kursus mengikuti pencangkakan dalam bidang Ekonomi Moneter Internasional di FE UGM (1991). Jabatan akademik yang pernah diembannya menjadi sekretaris Pusat Jasa Ketenagakerjaan (PJK) Unila (2004-2008), ketua Program studi D3 Koperasi FE Unila (2000-2008), menjadi ketua jurusan Ekonomi Pembangunan (2015–Sekarang). Sejak Tahun 2012-sekarang menjadi Ketua Tim Ahli di DPRD Kabupaten Pringsewu Lampung. Aktif melakukan penelitian sebagai ketua bekerjasama dengan beberapa instansi seperti Kantor BI Lampung (2011-2008), Bappeda Kabupaten Tulang Bawang Lampung (2016), Bappeda Kabupaten Lampung Tengah (2015). Kemudian juga menjadi konsultan pendirian BPR Inti Dana Sentosa di Kota Metro Lampung (2006). Selain itu Ia juga aktif melakukan penelitian dalam kajian Ekonomi Kelembagaan. Buku ajar yang pernah ditulis adalah Pengantar Ekonomi Kelembagaan dan Perekonomian Indonesia. Dalam penyusunan Laporan Final Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai anggota tim peneliti dimensi ekonomi. Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai anggota tim peneliti dimensi ekonomi.



ARIVINA RATIH Y.T. adalah dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung. Lahir di Tangerang, 5 Juli 1980. Meraih gelar sarjana dari Universitas Lampung pada 2003, kemudian mendapatkan gelar Master dari Universitas Padjajaran tahun 2006, dan gelar Doktor bidang Ilmu Ekonomi Regional dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016. Ia concern pada penelitian di bidang ekonomi regional dengan disertasinya yang berjudul “Geografi Ekonomi Pembangunan Regional Sumatera 2001-2012”. Penelitian di bidang

regional lainnya yaitu di antaranya berjudul Pusat Pertumbuhan dan Efek Limpahan Spasial Perekonomian Provinsi Lampung 2002-2011 (2013), Kinerja Ekonomi Daerah Sumatera 2001-2011 Studi Kasus Sumatera Utara, Lampung dan Jambi (2014), Kesiapan Sumatera Menyongsong Agenda Prioritas Ke-Tujuh dalam Nawa Cita (2015), Analisis Spasial Ekonomi dan Migrasi di Sumatera, Jawa, dan Bali (2017). Pelatihan terakhir yang pernah diikuti yaitu Environmental Valuation in Cost Benefit Analysis: The Use of Stated Preference Methods (2017). Saat ini dipercaya sebagai Dewan Pakar Debat Publik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2018. Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutananan Sosial ini sebagai anggota tim dimensi sosial.



RAHMAT SAFE'I adalah dosen Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung (UNILA). Lahir di Majalengka, 23 Januari 1976. Ia mendapat gelar Sarjana Kehutanan (S.Hut) dari Program Studi Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) tahun 2000, Magister Sains (M.Si) dari Program Studi Ilmu Pengetahuan Kehutanan Sekolah Pascasarjana IPB tahun 2005, dan Doktor (Dr) dari Program Studi Ilmu Pengelolaan Hutan Sekolah Pascasarjana IPB tahun 2015. Sejak Oktober 2016 sampai sekarang menjadi Sekretaris Pusat Penelitian dan Pengembangan Biodiversitas Tropika Lembaga Penelitian dan Pengabdian

Kepada Masyarakat (LPPM) UNILA. Saat ini sedang aktif membantu Tim Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Lampung. Kegiatan lain adalah menjadi Auditor Bidang Produksi Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC), Auditor Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, dan Pendamping Pelaksanaan Kegiatan Aspek Lingkungan pada Manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Pernah menjadi pengurus Bidang Kebijakan Forum Hutan Kemasyarakatan (HKm) Provinsi Lampung (2009-2010), Sekertaris II Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia (PERSAKI) Daerah Lampung (2009-2010), dan Kepala Bidang Pemuda Masyarakat Agrobisnis dan Agroindustri (MAI) DPD Lampung (2007-2008). Publikasi jurnal tiga tahun terakhir, antara lain: Strategi Implementasi Kebijakan Hutan Tanaman Rakyat Di KPH Gedong Wani (2018), Analisis

Kelembagaan Gabungan Kelompok Tani Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Kota Agung Utara Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung (2018), Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada KPH Gedong Wani (2017), Identifikasi Tingkat Kerusakan Tegakan pada Kawasan Pusat Pelatihan Gajah Taman Nasional Way Kambas (2017), dan Pengembangan Metode Penilaian Kesehatan Hutan Rakyat Sengon (2015). Beberapa publikasi buku, antara lain: Kesehatan Hutan: Penilaian Kesehatan Hutan Menggunakan Teknik Forest Health Monitoring (2016), Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Provokasi Arsitektur Pemikiran, Konsep, dan Strategi (2016), Kamus Ekowisata (2017), Biodiversitas Flora dan Fauna Di Arboretum Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu Tahura Wan Abdul Rachman, dan Sistem Informasi Penilaian Kesehatan Hutan (2017). Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai anggota tim peneliti dimensi lingkungan.



DYAH WAHYUNING TYAS adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta. Lulusan Sarjana Ekonomi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dengan predikat cum laude pada tahun 2008 di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014 mendapatkan gelar M.Ec.Dev di bidang konsentrasi Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gadjah Mada (MEPUGM) Yogyakarta. Pernah mengikuti short course Sertifikasi Penilai Bisnis di MEP UGM pada tahun 2016. Ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 1986. Aktif kegiatan sosial kemasyarakatan pada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Yogyakarta sebagai Koordinator Umum dan Kesekretariatan pada periode 2017-2020, anggota aktif DPW Jateng dan Yogyakarta Himpunan Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata Indonesia (HILDIKTIPARI), dan anggota Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) sejak tahun 2016-sekarang. Pengalaman pengabdian pada masyarakat sebagai asisten tim ahli Kajian Keamanan dan Kehandalan Pelabuhan dan Bangunan Pantai (2012), Profil/Pemetaan Potensi Ekonomi Daerah Kabupaten Boyolali (2015), Kajian Peran UMKM terhadap Pertumbuhan Ekonomi di DIY dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi (2015), Tenaga Ahli Updating Database UMKM (Kecamatan Tegalrejo) (2016),

asisten tim ahli dalam Kajian Studi Pengembangan Ekonomi Masyarakat DIY Menghadapi Bandara Baru 2016 (2016), Kajian Revitalisasi Pengembangan CFSMI (2017), Kajian Potensi Perikanan Budidaya Kabupaten Cilacap (2017), Updating Database UMKM (Kecamatan Jetis) 2017 kerja sama antara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota Yogyakarta (2017), Asisten Tim Ahli dalam Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Temanggung (2017), Kajian Analisa Potensi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Temanggung (2017), Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai asisten tim peneliti dimensi ekonomi.



AGUNG PRAJULIYANTO adalah alumnus S2 Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, FISIPOL, UGM. Ia lahir di Magelang, 24 Juni 1989. Ia menyelesaikan S1 Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012 dengan predikat cum laude, S2 di Program Studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, FISIPOL, UGM dan lulus dengan predikat cum laude. Ia memiliki ketertarikan dalam pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya bidang gender, isu-isu perempuan, pemberdayaan masyarakat, corporate social responsibility dan social

development studies. Ia juga aktif menjadi asisten peneliti di Social Development Studies Center, FISIPOL, UGM. Sederet aktivitas penelitian dan pendampingan masyarakat pernah ia lakukan antara lain: (1) Kajian Pemetaan Sosial di Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro (2017); (2) Penelitian Evaluasi Program CSR JOB Pertamina-Medco E&P Tomori, Sulawesi Tengah (2017); (3) Penelitian Indeks Kepuasan Masyarakat Program CSR JOB Pertamina-Medco E&P Tomori, Sulawesi Tengah (2017); (4) Pemetaan Sosial Wilayah Pengembangan Masyarakat PT Pertamina (Persero) TBBM Balikpapan (2017); (5) Pendampingan Pembentukan Kelembagaan Tambang Rakyat Desa Batu Butok, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (2016); (6) Penulisan Profil Tambang Rakyat di Indonesia (2016); (7) Penelitian Social License Index PT Holcim Indonesia Tbk. Cilacap Plant (2016); (8) Penelitian Social License Index PT Pertamina EP Field Subang (2016); (9) Penulisan Buku Pedoman

Pelembagaan Tambang Rakyat di Indonesia (2015); (10) Penyusunan Baseline Peluang Kelembagaan Tambang Rakyat di Desa Batu Butok, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (2015); (11) Penelitian Kondisi Kerja Layak Buruh Perempuan PT PMTex Kabupaten Magelang (2015); (12) Kajian Pemetaan Sosial: Peran Perusahaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (2015); (13) Penelitian Akses PNS Perempuan dalam Jabatan Struktural pada Pemerintahan Kabupaten Magelang (2012). Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai asisten tim dimensi sosial.



LINDA LESTARI adalah alumnus S1 Fakultas Kehutanan, lahir di Gunungkidul, 5 April 1994. Lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 2016 dengan predikat cum laude. Selama kuliah aktif di beberapa organisasi kampus antara lain sekretaris umum di Keluarga Mahasiswa Manajemen Hutan (KMMH) pada tahun 2014-2015. Bendahara pada kegiatan Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru tahun 2014. Tim Dana dan Usaha dalam kegiatan tahunan Farmer On Campus UGM. Sekretaris workshop “Proper menuju Emas” kerjasama PSLH UGM dengan PT. PJB., sekretaris umum di Olimpiade Kehutanan Indonesia tahun 2015. Protokol mahasiswa UGM dari tahun 2014-2016. Setelah lulus pernah bekerja di perusahaan swasta yaitu PT. Kayu Lapis Indonesia hingga akhir tahun 2017 dalam program Management Trainee. Beberapa penelitian yang telah dikerjakan antara lain survei Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Getas kerjasama Fakultas Kehutanan dan Perum. Perhutani, pemantauan lingkungan di PLTU Cirebon, serta pemantauan Lingkungan di PLTU Cilacap. Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai asisten tim peneliti dimensi lingkungan.



ZULFA EMALIA adalah dosen Jurusan Ekonomi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB UNILA) sejak Tahun 2010. Lahir di Bandar Lampung, 10 Mei 1985. Menamatkan pendidikan S1 Ilmu Ekonomi UGM (2008), master dari Magister Ilmu Ekonomi UGM (2010). Ia pernah menjadi Ketua Penjaminan Mutu FEB UNILA selama dua periode dan tergabung dalam Tim Penyusunan Borang Akreditasi untuk beberapa program studi. Ia baru saja ditugaskan untuk menjadi Tim Dewan Pengupahan Kabupaten Mesuji Tahun 2018. Ia pernah mengikuti beberapa pelatihan dan workshop diantaranya pelatihan Audit Mutu Internal (2012), Workshop

Pembelajaran Ilmu Ekonomi di Universitas Indonesia (2015), Workshop on Academic Writing and Rasch Modelling (2017). Ia juga tertarik pada isu-isu di bidang ekonomi regional dan perencanaan pembangunan, beberapa publikasi diantaranya Identification The Role of Infrastructure to Accelerate Economic Growth and Inter-regional Connectivity in Sumatera Island (2016), Determinan Peringkat Daya Saing Global: Perbandingan Antara Negara Maju Dan Berkembang (2016), Spatial Analysis of Regional Income Convergence : The Case of Bandar Lampung and Metro (2017). Ia juga telah menulis buku ajar yang berjudul Teori Lokasi: Konsep dan Aplikasi, Teknik Valuasi Ekonomi Lingkungan dan Ekonomi Regional. Dalam penyusunan Kajian Dampak Perhutanan Sosial ini sebagai asisiten tim peneliti dimensi sosial.



PRAYUDHA ANANTA adalah dosen tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung (FEB Unila). Lahir di Bandar Lampung, 16 September 1988. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Unila pada tahun 2011 dengan predikat sangat memuaskan, kemudian menyelesaikan pendidikan di S2 Magister Ilmu Ekonomi pada tahun 2013 dengan predikat cum laude. Saat ini aktif sebagai anggota Tim Penjaminan Mutu Program Studi Program Studi S2 MIE di FEB Unila (2015 – sekarang) dan Anggota Tim Ahli di DPRD Kabupaten Pringsewu (2016 – sekarang). Beberapa

penelitian yang pernah dilakukan antara lain : (1) Determinan Pembangunan Manusia Provinsi Lampung (2013); (2) Efektivitas Belanja Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia (Model Baru) Provinsi Lampung (2016); (3) Analisis Pengaruh Kinerja Rantai Pasok Terhadap Kinerja Organisasi Gapoktan Lada Hitam di Lampung Utara (2017). Beberapa pengabdian yang pernah dilakukan: (1) Pendampingan Management Cottage di Teluk Kiluan, Tanggamus (2014); (2) Pendampingan Pembentukan Koperasi di Desa Pancasila, Lampung Selatan (2015); (3) Pendampingan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kakao di Desa Mulyasari, Lampung Selatan. Dalam penyusunan kajian dampak perhutanan sosial ini sebagai asisten tim peneliti dimensi ekonomi.



LIA MULYANA adalah seorang rimbawan. Lahir di Bandar Lampung, 4 September 1994 Provinsi Lampung. Lulus S1 dengan predikat sangat baik dari FP Unila di tahun 2017. Ia mengabdikan diri selama 6 bulan untuk menimba wawasan dan menempa diri sebagai seorang rimbawan dengan menjadi tenaga magang bakti rimbawan priode Juli 2016-Januari 2017 di KPHL Rajabasa Unit XIV Kab. Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut merupakan program dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sebagai seorang

rimbawan peduli kepada lingkungan dan hutan telah terpatrit di dalam jiwanya sehingga mendorongnya aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Kehutanan (Himasyulva) sebagai pengurus Bidang IV Komunikasi, Informasi dan Pengabdian Masyarakat (kominfomas) priode 2013-2014 dan periode 2014-2015. Pengabdian masyarakat yang telah dilakukan bersama tim kominfomas adalah membangun Desa Binaan di Kawasan Hutan Register 25 Dusun Pematang Tanggang, Pekon Negeri Kelumbayan, Kab. Tanggamus, membuat rumah baca konservasi, memberikan penyuluhan terkait pembuatan pupuk kompos, sosialisasi konservasi sejak usia dini dan menulis majalah BENIH (Berita dan Informasi Himasyulva). Pengalaman lain, pada bulan April-Juni 2016 ia pernah menjadi Petugas Sensus Ekonomi di Badan Statistik Kotabumi Lampung Utara. Dalam penyusunan kajian dampak perhutanan sosial ini sebagai asisten tim peneliti dimensi lingkungan.

Laporan Kajian Perhutanan Sosial terdiri dari sepuluh bab, yaitu: Bab1 merupakan pendahuluan. Bab pendahuluan ini berisi deskripsi tentang latar belakang, pernyataan penelitian, tujuan penelitian, obyek dan lokasi penelitian, sasaran, waktu penelitian, peralatan dan material, personalia, dan sistematika laporan.

Bab 2 Memberikan gambaran umum mengenai perhutanan sosial di Indonesia. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai paradigma perhutanan sosial, program dan dinamika program hutan kemasyarakatan.

Bab 3 memdeskripsikan gambaran umum perhutanan sosial di DIY. Dalam bagian ini deskripsi fokus di wilayah penelitian yaitu Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul dan Hkm Kalibiru, Desa Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.

Bab 4 menjelaskan gambaran umum perhutanan sosial di Lampung. Gambaran umum fokus di wilayah penelitian yaitu Hkm Sinar Mulya (Gapoktan Sinar Mulya), Pekon Sukamaju, Kecamatan Ulu Belu dan Hkm Beringin Jaya (Gapoktan Beringin Jaya) Pekon Margoyoso, Kecamatan Sumberejo, kedua Hkm tersebut berada di wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

Bab 5 Mendiskripsikan metodologi yang digunakan dalam kajian ini. Metodologi termaksud mencakup pendekatan penelitian, lokasi penelitian, unit analisis dan informan, ruang lingkup penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab 6 berisi hasil dan pembahasan dampak implementasi perhutanan sosial berdasarkan tujuan penelitian. Fokus bab ini adalah pembahasan hasil dan analisis dari perspektif ekonomi.

Bab 7 berisi hasil dan pembahasan dampak implementasi perhutanan sosial berdasarkan tujuan penelitian. Fokus bab ini adalah pembahasan hasil dan analisis dari perspektif sosial.

Bab 8 berisi hasil dan pembahasan dampak implementasi perhutanan sosial berdasarkan tujuan penelitian. Fokus bab ini adalah pembahasan hasil dan analisis dari perspektif lingkungan hidup.

Bab 9 berisi dampak perhutanan sosial terhadap kesejahteraan rakyat yang dikaji dari perspektif makro regional dan hasil survei dengan data primer. Fokus bab ini adalah menganalisa sejauhmana perhutanan sosial berdampak pada kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan pendapatan rakyat.

Bab 10 berisi kesimpulan dan implikasi kebijakan operasional. Berdasarkan hasil analisis dan temuan dari Bab 1 hingga Bab 9, dapat ditarik kesimpulan dan implikasi kebijakan dari perspektif dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.